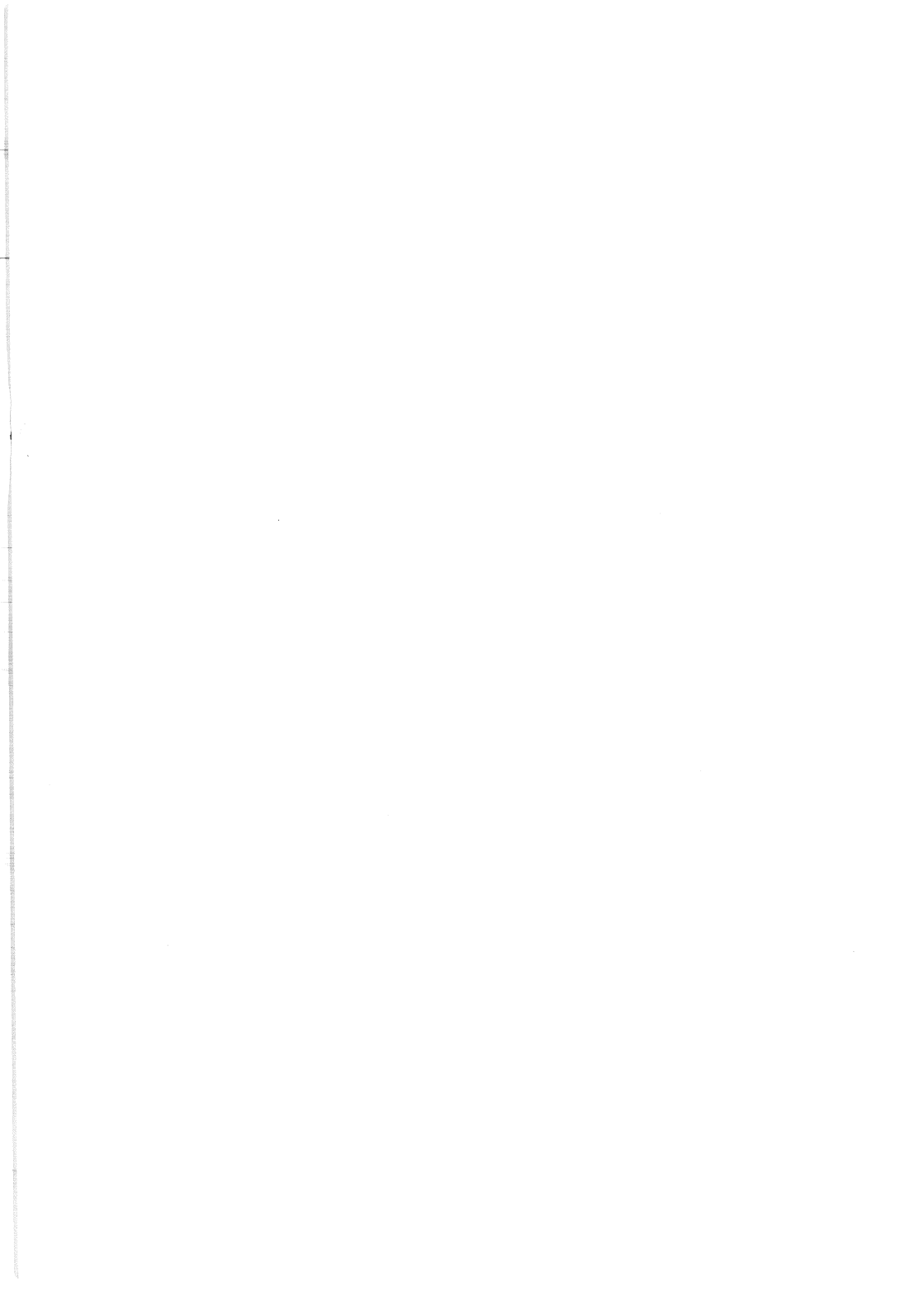


*Dinamika*

# **KEWARGANEGARAAN**

Kelompok Sosial di Perkotaan :  
Kasus Kelompok Kelas Sosial  
di Pandeglang Banten dan Makassar



*Dinamika*

# **KEWARGANEGARAAN**

**Kelompok Sosial di Perkotaan :  
Kasus Kelompok Kelas Sosial  
di Pandeglang-Banten dan Makassar**

Editor :

**Nyayu Fatimah**

**Dede Wardiat**



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

### **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di  
Perkotaan (Kasus Kelompok Kelas Sosial di Pandeglang-  
Banten dan Makassar/Nyayu Fatimah, Dede Wardiat,  
Rochmawati, Supriyadi, Sukri Abdurachman – Jakarta, 2012.

vi hlm + 242 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-181-5

1. Dinamika Sosial – Perkotaan

303. 44

Penerbit:

**PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)**

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232  
Faks.: 021-5701232

## KATA PENGANTAR

**B**uku bunga rampai ini disusun atas dorongan adanya usaha untuk melakukan pengembangan dalam penelitian tentang “Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan” dengan mengambil kasus mengenai kelompok kelas sosial di dua lokasi penelitian di Pandeglang-Banten dan Makassar-Sulawesi Selatan. Penelitian yang merupakan satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan PMB-LIPI pada tahun anggaran 2012.

Tema penelitian ini cukup strategis mengingat bahwa pemahaman kewarganegaraan yang berlangsung dewasa ini sedang menghadapi banyak tantangan dengan mencuatnya berbagai peristiwa perpecahan dalam masyarakat. Hal itu tidak perlu terjadi bila warga masyarakat dapat memahami bagaimana hidup sebagai satu warga dalam negara yang bersifat multietnik. Pengetahuan mendalam tentang dinamika kewarganegaraan dalam konstelasinya dengan perkembangan wilayah di daerah-daerah otonom di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah untuk dapat membuat formulasi kebijakan sosial, pengembangan wilayah dan komunitas perkotaan secara bertahap menghasilkan kualitas kehidupan sosial yang kohesif secara berkelanjutan.

Selama penelitian berlangsung banyak pihak telah memberikan bantuan yang kooperatif sifatnya, sehingga dengan keterbatasan waktu penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Untuk semua itu, kami menghaturkan terima kepada berbagai pihak yang telah membantu, diantaranya bapak-bapak di Banten Heritage, pemda setempat, dan masyarakat di dua lokasi penelitian berlangsung.

Secara akademis kegiatan ini telah dibahas dalam sebuah seminar akhir hasil penelitian yang diselenggarakan oleh PMB-LIPI pada tanggal 9-10 November 2012. Banyak masukan yang konstruktif

baik dari peserta seminar dan terutama dari pembahas Dr. Meutia Gani Rochman. Dengan segala kerendahan hati kami haturkan terima kasih. Segala saran dan kritik yang ada tersebut dapat kami gunakan untuk menyempurnakan tulisan ini.

Jakarta, Desember 2012

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan-LIPI

Ttd,

**Dr. Endang Turmudi, MA**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN: KASUS KELOMPOK KELAS SOSIAL DI PANDEGLANG-BANTEN DAN MAKASSAR .....</b>	<b>1</b>
Oleh: <i>Nyayu Fatimah &amp; Dede Wardiat</i>	
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Menarik Ikatan Untuk Menjaring Pemahaman .....	3
1.3 Pembabagan Buku.....	15
Daftar Pustaka .....	17
<b>BAB II PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA OTONOMI DAERAH KASUS KABUPATEN PANDEGLANG .....</b>	<b>23</b>
Oleh: <i>Nyayu Fatimah</i>	
2.1 Pengantar.....	23
2.2 Pembangunan Daerah di Lingkungan Provinsi Baru .....	24
2.3 Potensi Lokal dalam Pembangunan Wilayah .....	32
2.3.1 Kondisi Wilayah yang Terpinggirkan .....	33
2.3.2 Kondisi Demografis.....	37
2.4 Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan SDM.....	41
2.4.1 Pendidikan Formal (Umum).....	41
2.4.2 Pendidikan Informal (Pesantren).....	47
2.5 Pasang-Surut Peran Pesantren dan Kyai Sebagai Agen Pendidikan.....	57
2.6 Penutup.....	66
Daftar Pustaka .....	70

<b>BAB III DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL DI ERA OTONOMI DAERAH: KASUS KABUPATEN PANDEGLANG.....</b>	<b>73</b>
Oleh: <i>Dede Wardiat</i>	

3.1 Pengantar.....	73
3.2 Tuntutan Pemekaran Wilayah di Tengah Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	75
3.3 Dinamika Kelompok Sosial .....	79
3.3.1 Kelompok Petani dan Pemborong .....	80
3.3.2 Organisasi Masyarakat dan LSM .....	87
3.3.3 Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) .....	88
3.3.4 Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM).....	89
3.3.5 Kyai .....	94
3.3.6 Jawara.....	113
3.4 Penutup.....	123
Daftar Pustaka .....	127

<b>BAB: IV DINAMIKA SOSIAL BUDAYA KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL DI KOTA MAKASSAR .....</b>	<b>129</b>
Oleh: <i>Rochmawati</i>	

4.1 Pengantar.....	129
4.2 Dinamika Sosial Budaya dalam Jalanan Etnisitas di Kota Makassar.....	130
4.3 Stratifikasi Sosial dan Nilai Kultural Masyarakat Kota Makassar.....	135
4.4 Fungsi dan Peran Kelompok Sosial.....	143
4.5 Pergeseran Status dan Peran Sosial .....	146
4.6 Penutup.....	155
Daftar Pustaka .....	156

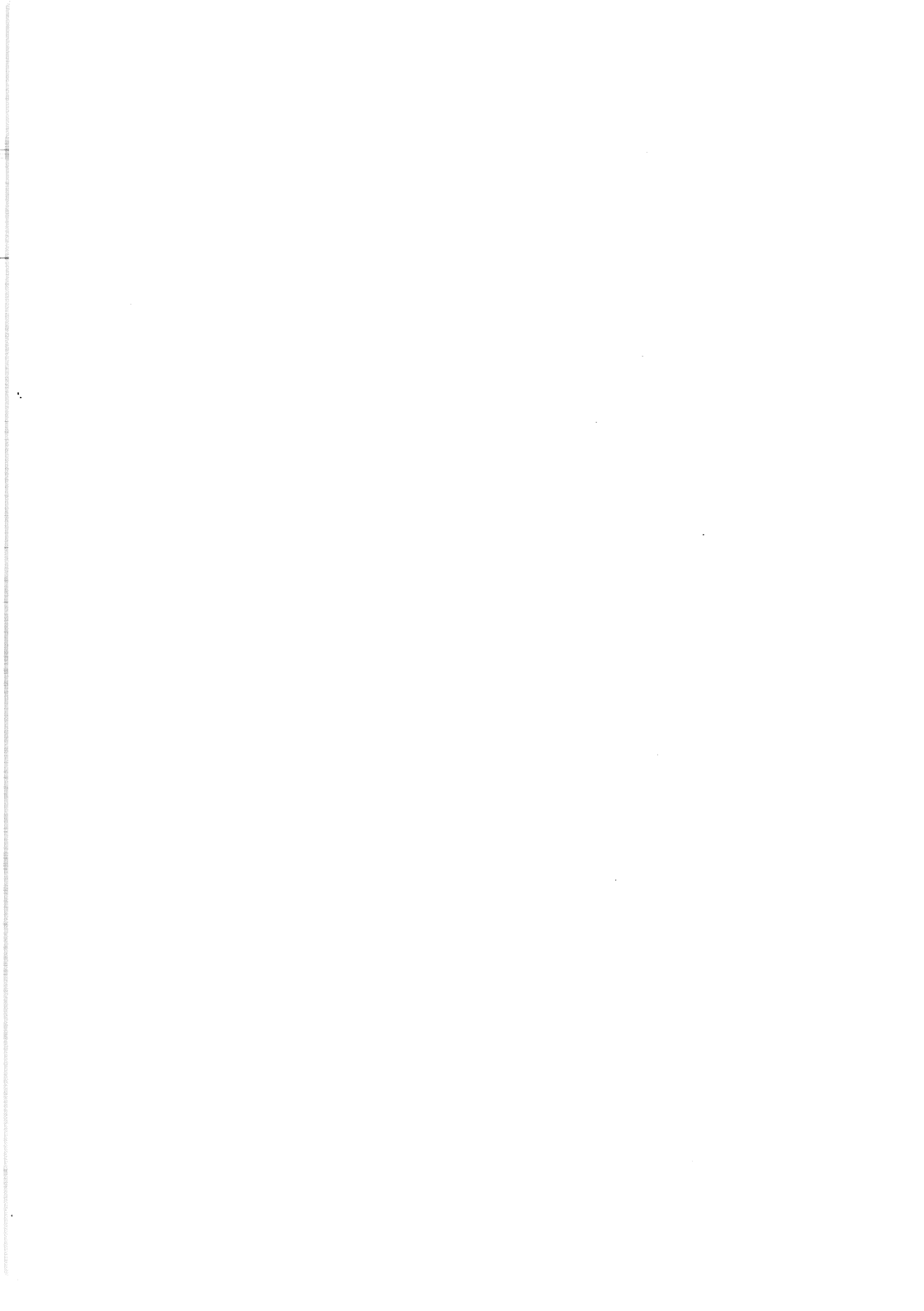


**BAB V DINAMIKA SOSIAL EKONOMI KELOMPOK-  
KELOMPOK SOSIAL DI KOTA MAKASSAR ..... 159**  
Oleh: *Suprihadi*

5.1 Pengantar.....	159
5.2 Profil Ekonomi Kota Makassar .....	160
5.3 Jaringan dan Status Sosial Ekonomi Kelompok Masyarakat.....	168
5.4 Pemahaman Tentang Kewarganegaraan.....	180
5.5 Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan.....	187
5.6 Penutup.....	191
Daftar Pustaka .....	192

**BAB VI DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL DALAM  
POLITIK LOKAL DI KOTA MAKASSAR ..... 195**  
Oleh: *Sukri Abdurrahman*

6.1 Pengantar.....	195
6.2 Selayang Pandang tentang Kota Makassar.....	198
6.3 Pelapisan Sosial Dalam Etnis Lokal.....	208
6.4 Etnisitas dan Kelompok Kelas Sosial Dalam Politik Lokal.....	214
6.4.1 Peta Politik Lokal .....	214
6.4.2 Kelompok Etnis Dalam Politik Lokal .....	217
6.4.3 Kelompok Profesi Dalam Politik Lokal .....	219
6.4.4 Kelompok Bangsawan Dalam Politik Lokal .....	224
6.4.5 Kelompok Panguyuban Kedaerahan Dalam Politik Lokal .....	231
6.4.6 Dinasti Politik Dalam Percaturan Politik Lokal.....	233
6.5 Jabatan Dalam Birokrasi dan Implikasinya Terhadap Kewarganegaraan.....	234
6.6 Penutup.....	235
Daftar Pustaka .....	240



## BAB I

# DINAMIKA KEWARGANEGARAAN KELOMPOK SOSIAL DI PERKOTAAN: KASUS KELOMPOK KELAS SOSIAL DI PANDEGLANG-BANTEN DAN MAKASSAR

Oleh Nyayu Fatimah dan Dede Wardiat

### 1.1. Pendahuluan

Perkotaan dalam tulisan ini tidak merujuk pada perkotaan dalam terminologi wilayah administratif pemerintahan. Istilah itu digunakan semata-mata hanya untuk membedakan suatu wilayah dengan wilayah perdesaan di daerah-daerah otonom. Dalam konteks ini perkotaan bisa berupa Ibu Kota Kabupaten atau wilayah-wilayah lain yang menjadi pusat pertumbuhan daerah otonom.

Setelah implementasi paket kebijakan Desentralisasi dan Otonomi daerah kemudian banyak tumbuh dan berkembang wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di daerah otonom. Seiring dengan perkembangan wilayah tersebut heterogenitas penduduk pun tidak dapat dihindari, baik heterogenitas etnik, kelas sosial, status, jenis okupasi dan latar belakang pendidikan. Fakta sosial tentang keragaman ini dapat dilihat sebagai peluang untuk saling belajar dari kultur masing-masing komunitas dan mengadopsinya untuk perbaikan peluang hidup (*life chances*) komunitas yang bersangkutan. Namun demikian, di sisi lain, kondisi ini juga merupakan hal yang rentan karena dapat mendorong muncul dan berkembangnya ketidakteraturan sosial, bahkan kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas, kerusuhan sosial yang terjadi pada dasarnya memiliki akar dan

permasalahan sosial yang relatif sama yaitu karena adanya kesenjangan sosial ekonomi yang paralel dengan identitas kultural dan kelas sosial warga komunitas di perkotaan.

Di tengah ketidak-adilan yang dirasakan oleh warga masyarakat, pemerintah setempat tidak banyak berkontribusi dalam perwujudan masyarakat yang adil, sementara kemakmuran dan gemerlap kota-kota tersebut hanya dapat dinikmati oleh sebagian komunitasnya. Banyak kebijakan yang dinilai terlalu didorong oleh keuntungan ekonomi dalam manajemen perkotaan yang lebih berpihak pada yang kaya. Penataannya menjadi sangat bersifat ekonomistis dan kurang mempertimbangkan aspek keseimbangan ekosistem, sosial budaya, kelembagaan sosial dan penataan norma sosial yang dibangun dari nilai-nilai bersama (*shared values*) warga kota secara keseluruhan. Ruang-ruang di perkotaan kurang mempertimbangkan aspek estetika dan ruang-ruang terbuka yang dapat mempertemukan warga kota lintas etnik, jenis okupasi, kelas sosial, status dan jenjang pendidikan. Penataan wilayah seperti ini memiliki implikasi luas pada kehidupan sosial warga masyarakat, diskriminasi, marginalisasi atau eksklusi sosial, lambat atau cepat akan mengancam keharmonisan, kekohesivan, akhirnya mendorong terjadinya apa yang disebut para ahli sosiologi perkotaan sebagai kebusukan kota (*urban decay*)<sup>1</sup>. Padahal kehadiran komunitas atau kelas sosial dan status sosial yang heterogen dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kehidupan sosial yang berkualitas. Pembangunan wilayah dengan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama juga dapat dicapai dengan kerjasama antar kelompok sosial. Di sini perlu adanya kerjasama kolaboratif antar kelompok kelas sosial dengan fasilitasi dari birokrasi. Dalam konteks itu, birokrasi, difungsikan sebagai realisasi dari keinginan-keinginan bersama yang dirumuskan secara rasional bukan resultan dari hegemoni kelas sosial tertentu.

---

<sup>1</sup>Pembusukan kota (*urban decay*) adalah proses di mana sebuah kota atau bagian dari kota yang sebelumnya berfungsi jatuh ke dalam kerusakan dan keruntuhannya, hal ini disebabkan oleh terjadinya deindustrialisasi, depopulasi, dsb.

Dalam konteks demikian itulah, pembahasan mengenai dinamika kewarganegaraan menjadi sangat penting. *Academic enterprise* mengenai isu tersebut dapat menghasilkan pengetahuan mendalam tentang dinamika kewarganegaraan dalam kontelasinya dengan perkembangan wilayah di daerah-daerah otonom di Indonesia. Selain itu juga, secara praktis dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan sosial, pengembangan wilayah dan komunitas perkotaan secara bertahap menghasilkan kualitas kehidupan sosial yang kohesif secara berkelanjutan. Dilhat dalam perspektif yang lebih luas formulasi kebijakan sosial tersebut merupakan upaya preventif terjadinya ketidakteraturan sosial (*social disorder*) yang berimplikasi pada gejala *urban decay*.

Beberapa studi yang berkaitan dengan kelas dan status sosial telah cukup banyak dilakukan seperti Christian Pelras (1976:314); Burhan Magenda (1989:22-96); Hasan Walinono (1979:195); Lorrain Van Aragon (2007:49) pada intinya menjelaskan bagaimana posisi seorang bangsawan yang tetap ajeg berkuasa karena status sosialnya dalam masyarakat. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menjelaskan keterkaitan dimensi kewarganegaraan, modal sosial, kontradiksi proses sosial *gesellschaft* dan *gemeinschaft* dan eksklusi sosial khususnya di perkotaan. Sekalipun demikian berbagai analisis dari hasil studi tersebut dapat dijadikan acuan untuk mereproduksi secara lebih luas realisasi basis normatif Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam mewujudkan kohesi dan stabilitas sosial secara efektif.

## 1.2 Menarik Ikatan Untuk Menjaring Pemahaman

Secara estimologis kewarganegaraan berasal dari kata *civitas* yang digunakan pada masa Roman *civitatus*. Dalam terminologi Perancis dikenal juga *Citoyen* (dari *cit'e*), kemudian *citeaine* (abad 12) dan *comcitien* (abad 13 M) berarti sekumpulan warganegara yang mendapatkan hak-hak terbatas dalam konteks kota (*city*) bukan *town*, karena yang terakhir lebih berarti sekumpulan rumah di perkotaan. Di Inggris, konsep *citizen* juga terkait dengan *city* yang pada abad 16 M

disamakan dengan *denizen*. Begitu dekatnya konsep *citizen* dengan pertumbuhan kota sehingga dikatakan bahwa *citizen* merupakan *freeman of a city* (Rousse, 1973: 175; John Eade, 1997: 27).

Kedekatan *city* dengan *citizen* dapat dimengerti karena kota memang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran filsafat sosial mengenai kebebasan, individualitas dan keadaban (Weber 1966: 233). Kota memang berkonotasi positif sebagai pusat peradaban. Untuk pergi ke kota meninggalkan kampung dianggap sebagai proses *civilization* (pengadaban, peradaban). Baru pada abad ke 19, kota sering ditulis sebagai pusat korupsi sosial dan dekadensi moral. Oleh karena itu, terdapat kemudian tulisan-tulisan yang sepertinya bernostalgia untuk hidup kembali dalam tatanan pedesaan (*country life and rural practises*) seperti muncul dalam konsep *gesellschaft* dan *gemeinschaft* nya Ferdinand Tonnes (1974).

Terlepas dari kontradiksi makna kota, konsep kewarganegaraan merupakan resultan dari pergumulan antara absolutisme monarki dengan gerakan masyarakat sipil yang menginginkan kebebasan, persetujuan dan kontrak sosial dalam kehidupan sosial politik. Dalam konsep kewarganegaraan seperti diproposisikan oleh Marshall (1965, 1981),<sup>2</sup> terdapat tiga dimensi hak yang terkandung di dalamnya yaitu hak sipil, politik dan sosial. Hak sipil berkaitan dengan isu-isu dasar seperti kebebasan berbicara dan hak untuk memperoleh akses dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Hak politik tidak hanya menyangkut hak-hak dalam pemilu tetapi juga akses yang lebih besar pada lembaga-lembaga politik untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan akses pada sistem pengamanan sosial (*social security system*), di mana tiap warga berhak memperoleh tingkat kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam kondisi mengganggu, sakit atau tertimpa

---

<sup>2</sup>Marshall adalah sosiolog yang memproposisikan bahwa masyarakat kapitalis sebagai *'hyphenated society'* yaitu adanya ketegangan yang tidak terelakkan antara ekonomi kapitalis, negara kesejahteraan dan persyaratan negara modern.

kemalangan. Namun harus segera ditambahkan di sini adalah hak budaya yaitu hak yang menyangkut identitas kultural, agama, bahasa dan adat-istiadat, hal yang absen dalam teori Marshall karena konteks masyarakat Inggris yang relatif homogen dari segi agama pada waktu itu (Kymlica dan Norman, 2000), yang berbeda tentunya dengan kondisi di Indonesia yang sarat dengan kemajemukan etnik.

Tentu saja konsep kewarganegaraan tidak selamanya terealisasi dengan baik betapapun ia telah menjadi basis normatif negara kesejahteraan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam dunia riil, perjuangan antar kelas atau antar kelompok dalam masyarakat perkotaan merupakan hal yang senantiasa hadir. Pergumulan untuk menjadi eksis dalam wajah baru menjadi tujuan hidup seseorang atau sekelompok orang. Eksistensi Kelas sosial seseorang atau kelompok sifatnya sangat *fluid sifatnya*, sehingga mudah sekali baginya untuk bergeser, adalah menjadi tidak tepat bila persoalan kelas hanya selalu ditarik pada satu sisi saja seperti keturunan misalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Artikel Michael Zweig berjudul *Six Point on Class*, menyatakan bahwa di Amerika Serikat, pengertian tentang kelas dicampurbaurkan dengan pengertian tentang pendapatan, kesejahteraan, atau gaya hidup. Padahal, kelas lebih berhubungan dengan kekuasaan, sementara pendapatan, gaya hidup, dan kesejahteraan lebih bermakna individual dengan ciri karakter yang tetap. Adalah menarik bila kelas ini dihadapkan pada keberadaannya dalam kancah sosial, politik, dan ekonomi. Tampak bahwa kelas sebagai suatu bagian dari adanya stratifikasi sosial dapat menunjukkan dominasinya yang dapat mendorong tingkat eksklusi sosial/inklusinya yang dalam hal ini dapat mencederai ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Zweig terpengaruh oleh definisi Lenin tentang kelas yang mengatakan bahwa kelas tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh kekuasaan atau posisi seseorang atau kelompok dalam hubungan produksi yang ada, "*Being rich is not the key point*,". Konsep kelas muncul untuk mengidentifikasi individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang membeda-

kannya dalam mendapatkan fasilitas kesehatan, ekonomi, kesejahteraan<sup>3</sup>.

Dalam konteks kelas, maka seseorang yang dimasukkan dalam satu kelas tertentu secara langsung akan dihadapkan pada posisinya dalam kelas tersebut dan itu artinya akan menyangkut juga pada status sosialnya. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu (AF.Saifuddin, 2005: 157; S.K.Sandersen, 2003: 145-157, O'Byrne, Darren, 1997: 74-78). Sebagaimana tipologi status yang dikemukakan Linton yaitu adanya status yang diperoleh dengan suatu usaha pencapaian individu guna mendapatkan status yang diinginkannya yang disebut dengan *achieved status* atau status yang secara otomatis melekat pada diri seseorang karena faktor keturunan yang disebut dengan *ascribed status*. Selain itu juga dalam perkembangan berikutnya bisa saja suatu status itu diperolehnya karena adanya penghargaan terhadap apa yang diperolehnya sebagai suatu status yang disebut *assigned status*. Dengan demikian posisi dari *assigned status* itu berada pada kombinasi dari kedua jenis status tersebut yaitu merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain, atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Dewasa ini jenis perolehan status ketiga itulah yang banyak dijumpai dalam masyarakat. Bahkan perolehan status secara *assigned* tersebut dapat memberikan *privilege* yang berarti bagi individu atau kelompok yang memperolehnya.

Dengan demikian perolehan status yang dimiliki seseorang atau kelompok tersebut itulah yang dapat menentukan bagaimana posisi sosial, politik dan ekonominya dalam masyarakat yang juga

---

<sup>3</sup><http://nyanyoataraxis.wordpress.com/2009/03/30/stratifikasi-sosial-sebuah-catatan-awal/> diakses tg 9/02/11. Atau dalam buku Stephen K. Sandersen yang berjudul Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, edisi kedua, tahun 2003, hlm. 145-165.



dapat berpengaruh terhadap sikapnya dalam menyikapi perbedaan tentang nilai-nilai kehidupan sosialnya.

Status sosial sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat ini adalah satu cara bagi penguatan eksistensi kelas sosial tersebut dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber, bahwa status sosial seseorang terkait dengan kehormatan yang melekat dalam status tersebut. Kehormatan mungkin dapat dihubungkan ke dalam masyarakat yang serba pluralitas yang akan mengacu terhadap adanya pembedaan status sosial seseorang dalam masyarakat. bila pada zaman dahulu status sosial seseorang erat kaitannya dengan “kelahirannya” (*ascribed status*) sebagaimana misalnya yang masih terdapat di beberapa tempat seperti Yogyakarta, Sulawesi, atau Bali. Nampaknya, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pola berpikir dan penegakan hak-hak asasi manusia hal tersebut yaitu status sosial berdasarkan “kelahiran” mulai banyak kehilangan maknanya dan bahkan ditinggalkan. Namun demikian, dilihat dari sisi politik lokal tidak secara otomatis semua itu menunjukkan perubahan yang signifikan, karena sebagaimana hasil penelitian Pelras (1976: 314) yang dikutip dari Andi Hasan (2007: 491) menyatakan bahwa kaum bangsawan akan tetap berkuasa meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan yang ada di masa lampau. Bahkan lebih jauh menurut Burhan (Burhan Magenda, 1989: 22-96) dikemukakan bahwa sebagaimana yang terjadi ”di daerah Sulawesi Selatan, tetap bertahannya kaum bangsawan setempat dalam aparat pemerintahan (pamong praja) tidak mengherankan karena faktanya menunjukkan bahwa pamongpraja telah menunjang kaum bangsawan setempat, mengingat birokrasi daerah tidak lain merupakan perkembangan dari birokrasi turun temurun berbagai teritori yg memerintah sendiri sejak masa kolonial”. Lain daripada itu, reformasi desentralisasi yg terjadi pada tahun 1938 membuahkan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih luas dan semakin bertambahnya jumlah kaum bangsawan. Dalam kehidupan masyarakat yang masih komutarian dan primordial, semua itu menjadi sah sah saja dan bahkan sebagaimana pendapat Hasan Walinono yang dikutip dari Imam

Suprayogo menyatakan bahwa “seorang pejabat yg juga bangsawan akan lebih dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat dibandingkan dengan pejabat yang bukan bangsawan” (Hasan Walinono 1979:195 dikutip dari Imam Suprayogo 1985: 28).

Dengan demikian, tampak bahwa ketidaksamaan dapat terjadi dalam masyarakat bisa karena pengaruh sosial seperti prestise seorang individu yang dihormati dan dihargai yang menunjukkan perbedaan individu dalam pengaruh sosial, atau pada pencapaian kedudukan individu yang berbeda. Pada saat pola berfikir manusia sudah mulai bergeser, kesadaran akan hak hak sosialnya mulai mempertanyakan bahwa status sosial seseorang tidak saja hanya dapat diperoleh karena faktor keturunannya seperti keluarga bangsawan (kasus Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain) tetapi juga pada potensi pengembangan diri misalnya pendidikan, pekerjaan, jabatan akademis, pekerjaan yang diperolehnya, atau karena kekayaan yang dimilikinya<sup>4</sup>.

Pada dasarnya perbedaan dalam hak-hak istimewa merupakan bagian dari sistem stratifikasi. Dasar dan inti dari stratifikasi (*social*) adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Sehingga dengan adanya stratifikasi sosial ini menyebabkan seseorang mempunyai peranan yang berbeda antar individu-individu lainnya. dan biasanya dalam masyarakat terstratifikasi ketidaksamaan prestise berasal dari ketidaksamaan kekuasaan dan hak-hak istimewa (Stephen K. Sanderson, 2003: 146; Darren O’Byrne dalam John Eade, 1997: 73-89). Dengan demikian *privilage* yang akan diperoleh kelas sosial tertentu akan sangat dipengaruhi oleh posisi status sosial yang melekat pada orang atau kelompok tersebut dalam masyarakat. Sehingga munculnya ketidakadilan dan ketidakmerataan pembagian hasil

---

<sup>4</sup><http://nyanyoataraxis.wordpress.com/2009/03/30/stratifikasi-sosial-sebuah-catatan-awal/> diakses pada tanggal 9 Februari 2011. Lihat juga Stephen K. Sanderson: Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, edisi kedua, tahun 2003, hlm. 145-165.

pembangunan yang ada menjadi pantas untuk diperdebatkan. Masalah ketidak-adilan dan ketidak-merataan pembagian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa puluh tahun inilah yang merupakan suatu fenomena sosial yang tetap berlangsung hingga waktu ini. Implikasi yang paling menyolok dari gejala ini adalah terbentuknya sejumlah kecil warganegara yang secara eksklusif mendapat manfaat besar dari peningkatan kegiatan di sektor ekonomi dan mereka secara eksklusif akan menempatkan dirinya pada satu kelompok kelas sosial dengan posisi tertentu dalam masyarakat, sementara sebagian besar anggota masyarakat justru telah mengalami proses pemiskinan dan kelompok ini akan menjadi satu kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya tersebut.

Marjinalisasi akibat eksklusi sosial ini merupakan suatu proses yang tampaknya akan terus berlangsung selama komunitarianisme atau budaya berpikir dan bertindak secara primordial masih mendominasi perilaku berbagai komunitas bangsa. Marginalisasi mengandung makna adanya satu kelompok atau pihak yang ingin melakukan dominasi atas berbagai sumberdaya tertentu, seperti kekuasaan politik, birokrasi, peluang ekonomi, dan lain-lain. Peminggiran juga bermakna adanya kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapat akses terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak setiap warganegara. Lembaga-lembaga pendidikan yang semakin bersifat komersial dan kurang memperlihatkan fungsi sosial, misalnya, tidak mungkin dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, sekalipun mereka memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Peminggiran juga dapat berupa implikasi dari kebijakan pemerintah kurang mendukung pengembangan usaha yang inklusif dapat dilakukan terutama oleh kelompok kurang beruntung.

Seperti telah disebut di atas salah satu penyebab utamanya adalah masih dominannya cara berpikir komunitarian dan primordial dalam masyarakat. Manifestasinya satu kelompok menyisihkan (*exclude*) kelompok lain dalam pemanfaatan sumberdaya ekonomi dan pelayanan publik tertentu. Kelompok yang tersisihkan mengalami deprivasi karena tidak mendapatkan apa yang dianggap merupakan hak

asasi sebagai warganegara. Perasaan terdeprivasi secara komunal pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antar kelompok komunitas baik dari segi etnik, status sosial, jenis okupasi dan kepentingan lain yang berbeda. Bahkan konflik dalam skala yang lebih besar dapat mengancam keutuhan kehidupan kota.

Eksklusi sosial dan deprivasi merupakan dua konsep yang sejak beberapa tahun belakangan semakin banyak digunakan untuk menjelaskan proses marjinalisasi dan pemiskinan (*impoverishment*) yang terjadi dalam masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana sejumlah individu atau kelompok tersisihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di mana mereka berada. Eksklusi sosial dapat dikatakan sebagai kebalikan dari integrasi sosial yang mencerminkan persepsi pentingnya untuk turut menjadi bagian dari suatu bangsa (de Haan, 1996) Selanjutnya de Haan mengatakan bahwa konsep eksklusi sosial memiliki dua ciri utama. *Pertama*, mengutip Silver dalam de Haan konsep ini bersifat multidimensional. individu atau kelompok dapat tersisih dari hak atas sumber kehidupan, kesempatan kerja, penghasilan, kepemilikan, pendidikan, tempat tinggal, konsumsi minimum, kewarganegaraan, hubungan personal dan penghargaan. *Kedua*, konsep ini terfokus pada sifat multidimensi dari deprivasi, karena dalam kenyataan suatu kelompok masyarakat sering terdeprivasi atau tersisihkan sekaligus dalam berbagai hal, baik secara sosial budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Selain *good will* dari rezim perkotaan untuk mengatasi gejala deprivasi dan eksklusi sosial tersebut, terdapat hal lain yang menentukan terealisasinya gagasan normatif kewarganegaraan yaitu modal sosial komunitas atau kelompok masyarakat. Modal sosial di sini dapat dianggap sebagai *resource* komunitas yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang tidak saja penting dalam menentukan ikatan kerjasama internal kelompok tetapi juga secara eksternal dapat menjalin kerjasama dengan kelompok lain (*bridging social capital*). Persistensi modal sosial eksternal diindikasikan dengan

sikap penghargaan pada pentingnya kerjasama guna mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai keinginan bersama. Suatu komunitas tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian, modal sosial komunitas akan menekankan perlunya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri.

Sebagai sebuah konsep, modal sosial merupakan pendekatan yang semakin intensif digunakan dalam mengatasi masalah sosial gejala *urban decay*, ketidak-adilan lintas kelas dan etnik, protes sosial, kemiskinan seperti terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Robert Putnam, salah seorang pakar modal sosial yang paling terkenal dalam tulisan yang merupakan hasil kajiannya (Putnam 1995), menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. *Pertama*, adanya jaringan sosial memungkinkan terjalannya koordinasi dan komunikasi yang akhirnya dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. *Kedua*, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi sangat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. *Ketiga* berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat

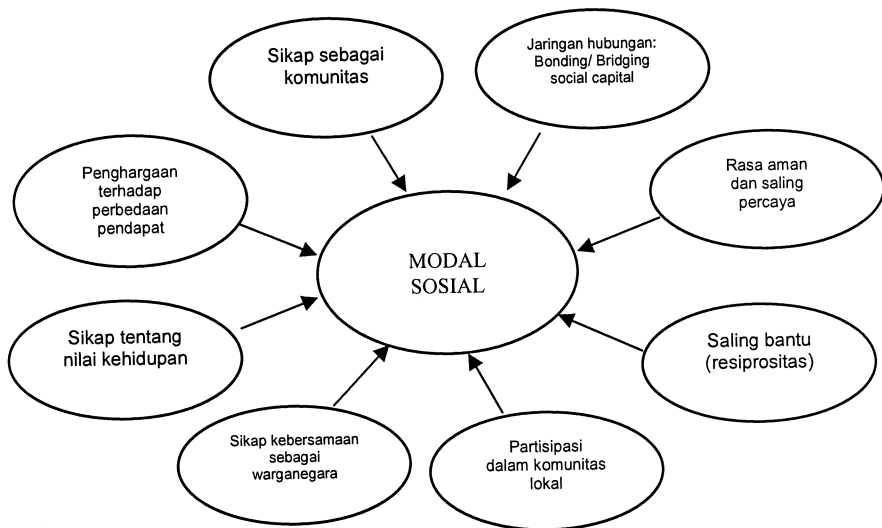
kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Berangkat dari hasil kajian Putnam ini serta laporan hasil kajian modal sosial dari beberapa penelitian lainnya di Indonesia yang dilakukan belakangan ini (M.Hisyam, dkk, 2006; Zaenuddin, D, dkk, 2005) dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberi landasan pengetahuan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial di perkotaan, pemahaman mendalam akan kondisi modal sosial masyarakat amat diperlukan, karena hal inilah yang akan menjadi titik tolak bagi pembangunan kembali komunitas (*community rebuilding*) dan revitalisasi pranata sosial.

Modal sosial memiliki sejumlah indikator yang dapat diturunkan ke dalam berbagai variabel sebagai alat pengukurnya. Seperti terlihat dalam bagan di bawah terdapat delapan unsur yang dapat dijadikan indikator tingkat keberadaan modal sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini termasuk: (1) Adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) Jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) Rasa aman dan saling percaya (*mutual trust*), (4) Keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) Kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) Sejauh mana adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) Kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) Sejauh mana adanya solidaritas sebagai sesama warganegara (Fukuyama 1995; Putnam 1993; Coleman 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000).

Seperti terlihat pada Bagan di bawah, tingkat modal sosial yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tercermin dari keberadaan delapan unsur penunjangnya. Mulai dari seberapa jauh seseorang masih bersikap sebagai bagian dari suatu komunitas primordial, baik berupa kelompok etnik atau sosial maupun kelompok keagamaan, yang dianggap sebagai sumber utama identifikasi dirinya, sampai pada

seberapa jauh pula ia memiliki rasa kebersamaan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, warga bangsa Indonesia. Pada masyarakat dengan ikatan primordial yang kuat, rasa kebersamaan sebagai bangsa tidak mungkin tumbuh apabila identitasnya tidak terlebih dahulu mendapat pengakuan dari pihak lain. Pengembangan modal sosial dari suatu komunitas dengan penekanan pada pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya sebagai identitas yang mereka miliki.



Bagan: Indikator Modal Sosial  
 Sumber: Syahra, 2007

Dalam pembahasan ini, konsepsi Putnam mengenai dua sisi ekulibrium dalam proses sosial tampak relevan. Kondisi yang berangkat dari kebajikan (*virtues circle*) dapat dikatakan sebagai situasi yang mendukung pergaulan sosial yang diwarnai keadaban (*civility*). Sebaliknya, pada sisi lain kondisi yadari ng berangkat situasi sosial yang kurang baik (*vicious circle*) seperti pengkhianatan, ketidak-saling percayaan, pengingkaran, eksploitasi, kekacauan, isolasi, dan kemunduran merupakan indikasi dari situasi sosial yang tidak beradab.

Unsur-unsur ini saling memperkuat dan melahirkan situasi yang resisten pada pengembangan kewarganegaraan yang demokratis (*democratic citizenship*). Kerangka konseptual dari Putnam ini bermanfaat untuk pengkajian hubungan fungsional modal sosial dengan realisasi kewarganegaraan yang demokratis atau kewarganegaraan multikultural seperti dikatakan Kymlicka (1995).

Keterkaitan antara budaya kewarganegaraan dengan modal sosial diilhami oleh teori kewarganegaraan multikultural. Teori ini pada dasarnya mempertanyakan apakah minoritas memiliki hak untuk memelihara pranata budayanya dan secara sah dapat mempertahankan identitas kulturalnya (Young, 1990; Kukathas, 1992; Kymlicka, 1995; Kymlicka dan Norman, 2000). Teori ini menyoroti hak-hak sosial, sipil dan politik, di samping hak akomodasi struktur institusional dari negara bagi minoritas. Teori ini berproposisi bahwa pentingnya komunitas terlibat dalam proses demokratisasi agar terjadi moderasi yang sangat strategis untuk prevensi konflik. Selanjutnya diproposisikan bahwa integrasi dan solidaritas ditentukan tidak hanya oleh karakteristik kultural tetapi juga oleh institusi struktural. Teori kewarganegaraan multikultural ini lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif atau hubungan signifikan antara integrasi sosial dan politik dengan adanya rasa saling percaya, toleransi dan solidaritas. Dengan persistensi modal sosial dan basis yang kuat mengenai kewarganegaraan, komunitas dapat memiliki kemampuan untuk bernegosiasi memperjuangkan kepentingannya masing-masing di samping kepedulian pada kepentingan bersama antar kelompok. Selanjutnya, masyarakat dengan komitmen pada kewarganegaraan dapat dilihat dalam kehidupan sosial di mana adanya transaksi komunikasi yang bebas oleh komunitas-komunitas, karena di arena ini terjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi yang mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan jaringan kelembagaan politik resmi. Jadi di sini memungkinkan terjadinya negosiasi-negosiasi untuk kebaikan bersama seraya tetap mematuhi hukum yang berlaku (Hikam, 1996:3).



### 1.3 Pembabagan Buku

Pembahasan dalam tulisan ini dibagi dalam enam bagian, uraian pada Bab I lebih terfokus pada pembahasan secara makro tentang urgensi kelas dan status sosial dalam kontelasinya dengan pembangunan wilayah. Dalam konteks ini dibahas realisasi basis normatif Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam mewujudkan kohesi dan stabilitas sosial secara efektif. Pada bagian ini juga dibahas berbagai analisis teoritik tentang konsep kewarganegaraan dan modal sosial yang menjadi basis berbagai kelompok sosial dalam menjalin relasinya. Analisis teoritik tersebut dijadikan landasan prespektif untuk melihat dinamika kewarganegaraan yang terjadi di daerah otonom, khususnya Pandeglang dan Makasar.

Pembahasan pada Bab II difokuskan pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang, khususnya pembangunan Suber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks ini, selain pendidikan formal, juga dibahas pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan pendidikan di daerah Pandeglang. Pergeseran sistim belajar mengajar di lingkungan pesantren, dari sistim salafiah ke sistim klasikal dalam bentuk madrasah serta implikasinya terhadap eksistensi pesantren dalam kehidupan sosial setempat menjadi basis analisis dalam melihat perubahan sosial yang terjadi di Pandeglang. Disamping pembangunan Sumber Daya Manusia, pada bagian ini juga dibahas berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Pandeglang.

Pembahasan pada Bab III difokuskan pada dinamika kelompok-kelompok sosial dominan di Pandeglang, yakni kelompok petani yang merupakan mayoritas penduduk Pandeglang serta Pemborong/kontraktor yang merupakan mata pencaharian baru di luar sector pertanian. Selain katagori berdasarkan mata pencaharian, tulisan ini juga akan membahas kelompok-kelompok sosial yang memiliki peran tradisional dalam kultur masyarakat setempat. Dalam kontelasinya dengan kewarganegaraan, kelompok ini memegang

peranan penting, sebab kelompok sosial tersebut menjadi sub kurtur yang memberikan identitas cultural pada masyarakat setempat. Pembahasan tentang kelompok sosial yang bersifat tradisional ini akan difokuskan pada kelompok Jawara dan Kyai.

Pembahasan pada Bab IV diarahkan pada dinamika sosial budaya dalam jalinan entisitas yang ada. Fokus perhatian ditujukan pada empat etnis besar yang ada di Kota Makassar, yakni Bugis, Makassar, Mandar Dan Toraja. Dalam konteks ini, analisis tentang stratifikasi sosial lebih menekankan pada pergeseran setiap strata dalam kontelasinya dengan perubahan jaman. Secara komprehensif, pada bagian ini juga dibahas tentang pergeseran status dan peran bangsawan seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Keseluruhan analisis dilihat kontelasinya dengan lingkungan cultural yang menjadi fondasi bagi terbentuknya nilai-nilai dalam relasi antar kelompok sosial diperkotaan.

Pembahasan pada Bab V difokuskan pada dinamika sosial-ekonomi kelompok-kelompok sosial yang dominan di Kota Makasar. Dalam konteks ini dibahas tentang kondisi sosial ekonomi kelompok-kelompok sosial yang ada, jaringan sosial yang dimilikinya serta pemahaman tentang kewarganegaraan dari kelompok-kelompok sosial tersebut. Pembahasan tentang dinamika sosial pada bagian ini lebih diarahkan pada faktor pendorong dan penghambat realisasi kewarganegaraan dari setiap kelompok sosial yang dikategorisasikan berdasarkan status sosial ekonominya.

Pembahasan pada Bab VI difokuskan pada isu tentang dinamika kelompok sosial dalam percaturan politik lokal di Kota Makasar. Dalam konteks itu dibahas tentang peta kelompok kelas sosial dominan dalam politik lokal pada era reformasi dan otonomi daerah, perubahan atau pergeseran kelompok kelas sosial dominan khususnya kelas bangsawan dalam politik lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran fungsi dan peran kelas bangsawan dalam percaturan politik lokal. Dalam bagian ini juga dibahas kontelasi dinamika kelompok

sosial yang ada dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan di bidang politik.

## Daftar Pustaka

- Andi Faisal Bakti, "Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (Editor), (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Aragon. Lorraine V, "Persaingan Elite di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (Editor), (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Burhan Djaber Magenda, 1989, *The Surviving Aristocracy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Island*, Disertasi PhD, Cornell University, Ithaca, NY.
- Bruner, E.M. 1974. "The Expression for Ethnicity in Indonesia", dalam A. Cohen (peny.) *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hlm.. 251-288
- Coleman, James, 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, Vol. 94 (supplement), pp. S95-S120.
- 1993. "The Rational Construction of Society." *American Sociological Review*, Vol 58 (February), pp. 1-15.
- de Haan, Arjan (1996), "Social Exclusion: Enriching the Understanding of Deprivation" (makalah internet)
- Eade, John, ed. 1997. *Living The Global City: Globalization as Local Process*, New York, NY 10001: Routledge.
- Eberly, Don E, ed. 2000. *The Essential Civil Society Reader*. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

- Feldman, Tine Rössing dan Susan Assaf, 1999. *Social Capital: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence* (Working Paper No. 5, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Fukuyama, Francis, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- , 1999. "Social Capital and Civil Society" (Makalah pada Pertemuan IMF conference on Second Generation Reform, 1 Oktober).
- Hasan Walinono, 111979, *Tanete Suatu Studi Sosiologi Politik*, Disertasi, Ujung Pandang: Universitas Hassandin
- Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (Editor), (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Syarif, (2007), "Shadow State..? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (Editor), (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hikam, MAS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Imam Suprayogo, 1985, "Warisan Budaya Karaeng Galesong", dalam Mukhlis dan Kathryn Robison (Editor), *Panorama Kehidupan Sosial*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hassanudin.
- Isham, Jonathan dan Satu Kähkönen, 1999. *What Determines the Effectiveness Of Community-Based Water Projects? Evidence from Central Java, Indonesia* (Working Paper No. 14, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Khristna, Anirudh, dan Norman Uphoff, 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*, (Working Paper No. 13, Social Capital Initiative, The World Bank).

- Kukathas, B. 1992. "Are They any Cultural Right?" *Political Theory*, 20:105-139.
- Kymlica, W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlica, W dan Norman, W. eds. 2000. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Marshall, T.H. 1963. *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann Educational Books.
- 1965. *Social Policy in the Twentieth Century*. London: Hutchinson.
- Mukhlis dan Kathryn Robison (Editor), 1985), *Panorama Kehidupan Sosial, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial*.
- nkoff, Debra, 1997. "Producing Social Capital: National Social Movement and Civil Society," *American Behavioral Scientist*, Vol. 40, No. 5, 1997.
- O'Byrne, Darren, (1997), "*Working-Class Culture: Local Community and Global Conditions*", dalam *Living The Global City: Globalization as Local Process*, edited by John Eade, New York, NY 10001: Routledge.
- Pantoja, Enrique, 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Pelras, Christian, (1996). *The Bugis, The Peoples of South East Asia and the Pacific*, Firts Publited, Blackwell Publishers Ltd, 108, Cowley Road, Oxford OK41JF, UK.
- , 2006, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta- EFEO.

- , 1976, *Pelapisan dan Kekuasaan Tradisional di Wajo*, diterjemahkan oleh Ida Husain, dari judul asli *Hierarchie et Pouvoir Traditionnels en Pays Wajo*, Paris: s.n., 1971.
- Portes, Alejandro, 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology," *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 1-24.
- Putnam, Robert, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- , 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", *The American Prospect*, Vol. 13, pp. 35-42.
- Riza Sihbudi, Moch. Nurhasim, editor, 2001, "*Kerusuhan sosial di Indonesia Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*", Jakarta: Grasindo.
- Robison, Lindon J., dan Marcelo Siles, 2000. *Social Capital: Sympathy, Socio Emotional Goods, and Institutions* (Staff Paper No. 00-45, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, December).
- Rothstein, B. 1998. "*Trust, Social Dilemmas and the Strategic Construction of Collective Memories*". Russel Sage Foundation, *Working Paper*, 142.
- Saifuddin, AF, (2005), "Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma". Jakarta: Kencana, edisi pertama.
- Sasson, A.S. 1983. 'Civil Society, dalam T. Bottmore, *et.al.*, *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sanderson. Stephen K, 2003, "*Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, *edisi kedua*.

- Saifuddin, A.F, (2005), *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Sen, Amartya (2000) “*Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*” (Social Development Papers No. 1, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank).
- Syahra, R. 2007. *Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Untuk Antisipasi Bencana Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, 1999, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta.
- Tihami.M.A. 1992. Kiyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pesanggrahan Serang, Banten”, Program Studi Antropologi-Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tonnies, Ferdinand. 1974. *Community and Association (trans)*. London: Routledge & Kegan Paul.
- 1974. “*The Concept of Gemeinschaft*” dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.
- Turner, Bryan. S. 1990. “*An outline of a Theory of Citizenship*”. *Sociology*, Vol. 24:3, hlm.. 89-217.
- Uphoff, Norman, 2000. “*Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation*” (Makalah pada Staff Seminar, Mansholt Institute, Wageningen, 13 September).
- Walmsley, Jim, 2006, “*Putting Community in Place*” in *Dialogue*, Vol. 25/No. 1, 2006.
- Weber, M. 1966. *Status*. Milton Keynes: Open University Press.
- Woolcock, Michael. 1998. “*Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy*

*Framework*”, *Theory and Society*, Vol. 27, No. 2, pp. 151-208

Willem van Genugten J.M (ed), 1994, *Human Rights Reference*, The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs.

**Sumber Internet:**

<http://nyanyoataraxis.wordpress.com/2009/03/30/stratifikasi-sosial-sebuah-catatan-awal/> diakses pada tanggal 9 Februari 2011



## BAB II

# PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA OTONOMI DAERAH KASUS KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh Nyayu Fatimah

## 2.1 Pengantar

Tulisan ini merupakan satu kajian dari penelitian tentang Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan, yang mengambil kasus di daerah Kabupaten Pandeglang. Kajian difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Membahas masalah SDM penting dilakukan karena SDM merupakan tulang punggung pembangunan. Pengembangan SDM ini difokuskan pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dalam konteks ini, aspek penting yang dapat menjadi penggerak bagi pembangunan di daerah adalah aspek manusianya. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan faktor penggerak utama dalam proses pembangunan. Tentu saja agenda pengembangan sumber daya manusia yang penting untuk dilakukan adalah yang berkaitan dengan tingkat pendidikan. Pendidikan baik yang sifatnya formal maupun yang informal adalah sarana penting bagi peningkatan pengetahuan manusia itu sendiri. Dalam kaitan itu pula selain pendidikan formal yang dikembangkan dan dikeluarkan pemerintah sebagai sumber utama dalam rangka pemberdayaan manusia, juga dibahas pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang bersifat informal dan selama ini telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan pendidikan di daerah Pandeglang. Pendidikan pesantren yang merupakan cikal bakal pengetahuan penduduk pandeglang terhadap pendidikan (secara khusus adalah pendidikan yang berbasiskan keagamaan-Islam) telah

memberikan cirinya sendiri dalam kehidupan kemasyarakatan Kabupaten Pandeglang, yang memberikan ciri sebagai kota santri sebagai satu “adigium” dari pendidikan pesantren.

Dalam perkembangan sejarahnya, pasang surut pendidikan mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat Pandeglang. Pergeseran sistim belajar mengajar di lingkungan pesantren, dari sistim salafiah ke sistim klasikal dalam bentuk madrasah serta implikasinya terhadap eksistensi pesantren dalam kehidupan sosial setempat menjadi basis analisis dalam melihat perubahan sosial yang terjadi di Pandeglang. Dimana melalui pendidikan itu pula seseorang akan mendapatkan pengakuan sosial yang pada gilirannya juga dapat menjadikannya masuk dalam suatu kelompok sosial tertentu dalam kaitannya dengan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakatnya. Sebagaimana halnya mereka yang pada waktu itu mendapat pendidikan di pesantren telah menjadi satu simbol sosial yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosialnya sendiri. Di samping pengembangan sumber daya manusia, pada bagian ini juga dibahas berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Pandeglang.

## **2.2 Pembangunan Daerah di Lingkungan Provinsi Baru**

Salah satu kabupaten yang ada di daerah Provinsi “baru” Banten dan menjadi “core” untuk pengembangan daerah Banten adalah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten ini sejak lama telah diperhitungkan menjadi bagian dari sejarah Banten. Semua itu disebabkan oleh adanya unsur lebih dari kabupaten ini, dilihat potensi geografisnya wilayah ini kaya dengan daerah pegunungan dan juga dengan daerah pantai. Kondisi seperti ini cukup strategis untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah perlawanan. Pada saat bersamaan pula nama Pandeglang sebagai satu kekuatan politik Banten. Berdasarkan data sejarah itu pula, Pandeglang sudah merupakan pusat pemerintahan distrik. Sebagaimana riak otonomi daerah yang melanda bumi Indonesia, tidak ketinggalan Banten menyatakan dirinya sebagai satu provinsi sendiri dan lepas dari provinsi Jawa Barat yang selama ini

sebagai daerah administratifnya. Tampaknya keinginan ini tidak muncul begitu saja tapi sudah lama ada usaha untuk menjadikan Banten sebagai satu provinsi sendiri.

Berangkat dari sejarah terbentuknya kembali Banten sebagai sebuah provinsi di era otonomi daerah saat ini, tampaknya tidak dapat dihindarkan pada adanya rentetan sejarah yang melingkupinya. Bertumpu pada sejarahnya, sudah selayaknya bila Banten merasa perlu untuk menjadi satu wilayah otonom lepas dari provinsi Jawa Barat, berdasarkan *staatblad Nederlands Indie* No. 81 Tahun 1828, Banten pada awalnya merupakan suatu keresidenan yang terbagi atas tiga kabupaten yakni, Kabupaten Utara (Serang), Kabupaten Selatan (Lebak), dan Kabupaten Barat (Caringin). Menurut data itu pula dapat diketahui bila Banten pada masa kolonialisme (tahun 1089) pernah harus melepaskan salah satu wilayah yang sangat potensial (yaitu Lampung yang termasuk dalam wilayah Banten) dan harus diserahkan kepada VOC, hingga saat ini Lampung tidak pernah menjadi bagian dari Banten kembali.

Di saat Banten harus menghadapi pemerintahan kolonial, Banten menjalankan strategi dengan menggunakan wilayah geopolitiknya sebagai daerah tempat-tempat penyerangan yang berpencar ke pelosok-pelosok Pandeglang seperti di kaki gunung Karang dan ke pantai. Hal itu dimungkinkan karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada masa kekuasaan VOC telah menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi musuh. Strategi pemerintah kesultanan pada masa itu dengan menempatkan Pandeglang yang sangat strategis dengan wilayah pegunungan dan pantainya telah memposisikan Pandeglang menjadi basis kekuatan kesultanan dalam menghadapi perlawanannya terhadap kekuasaan VOC. Sampai akhirnya pada tahun 1874, berdasarkan *staadsblad* 1874 Nomor 73 Ordonansi, Pandeglang menjadi daerah kabupaten dan mulai berlaku pembagian daerah yang terdiri dari 9 distrik atau kawedanan. Pembagian ini terjadi pada tanggal 1 April 1874 (Profil Daerah dan Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang, 312010:9-11), yang kemudian tanggal tersebut telah menjadi tanggal untuk hari jadi

Kabupaten Pandeglang hingga sekarang. Delapan tahun kemudian (1882) Pandeglang telah merupakan sebuah wilayah kabupaten dan sekaligus distrik kawedanaan. Sampai pada akhirnya pada tahun 1925 Kabupaten Pandeglang telah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Sekilas menilik pada sejarah kabupaten ini khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya, rupanya tidak menjadi suatu polemik berkepanjangan bila disaat otonomi daerah mulai bergulir dewasa ini, Banten menjadi satu provinsi sendiri karena keinginan tersebut sudah ada sejak masa kolonial tersebut.

Keunikan atau kelebihan sosial lainnya yang dimiliki Pandeglang, adalah kabupaten ini dikenal juga sebagai Kota Santri dan Pandeglang terkenal dengan daerah yang historis, patriotis dan agamis. Julukan ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya, akan tetapi bentangan sejarah telah mencatatnya. Namun demikian, secara sosial Pandeglang tidak mempunyai referensi basis kultural karena di daerah ini tidak ada kerajaan yang dapat menjadi acuan nilai-nilai kesehariannya sebagaimana misalnya Yogyakarta atau Solo. Pusat kekuasaan yang akan menjadi referensi nilai-nilai bagi masyarakatnya. Daerah ini (Pandeglang) tidak memiliki acuan nilai yang dapat menjadi satu ukuran bagi nilai-nilai yang mereka anut, dengan demikian secara kultural nilai-nilai yang dianut masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya secara umum merupakan nilai-nilai yang lebih dominan pada nilai-nilai keagamaan. Sehingga figur santri dan kiyai-kiyai yang merepresentasikan nilai-nilai keagamaan akan menjadi referensi nilai bagi kehidupan sosial masyarakatnya.

Dengan munculnya Provinsi Banten yang berdiri sendiri pada tahun 2000, maka pembenahan dilakukan dalam provinsi baru tersebut, dan salah satunya adalah menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai *core* untuk pengembangan bagi daerah Provinsi Banten. Pada masa kesultanan Banten dahulu, Pandeglang sempat eksis menjadi basis sebagai benteng pertahanan peperangan dengan kolonial. Kabupaten Pandeglang yang berada di ujung barat Provinsi Banten ini di batasi oleh wilayah perairan yaitu Samudra Indonesia di sebelah selatan dan dengan Selat Sunda di sebelah barat, sementara wilayah daratan yang

terhampar di wilayah utara dan timurnya berbatasan dengan Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak.

Bila dilihat dari luas wilayahnya, terdapat 2.747 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten. Artinya seperempat luas Provinsi Banten merupakan bagian wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang, dan sisanya merupakan bagian dari empat kabupaten dan tiga kota lainnya yang ada di Provinsi Banten. Sebagai daerah terluas tentu Kabupaten ini memikul beban cukup berat untuk dapat membangun daerahnya tersebut. Namun demikian, Pandeglang yang telah dikenal sebagai daerah yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan telah menjadikan daerah ini sebuah daerah yang memiliki pendidikan yang berbasis agama (Islam) yang sering disebut sebagai pendidikan informal pesantren. Keberadaan pendidikan informal sejenis pesantren tersebut cukup menjanjikan bagi Kabupaten Pandeglang untuk memberikan pengembangan bagi warganya.

Dari aspek SDM tampaknya Pandeglang telah terisi oleh wawasan kehidupan yang sifatnya agamis. Sementara itu, bila dilihat dari potensi sosial ekonomi dan alamnya, sektor pariwisata bahari merupakan potensi yang cukup menonjol di kabupaten ini seperti pantai Carita dan Labuan serta Tanjung Lesungnya, kemudian wisata taman Nasional Ujung Kulon dengan Badak berculanya. Sektor tersebut telah mengembangkan sektor-sektor pendukungnya seperti halnya perdagangan, hotel, restoran, dilihat dari PDRB sektor tersebut memberikan andil yang cukup besar yaitu sebesar (25,05%), demikian pula dari sektor jasa semua potensi itu dapat mengangkat Kabupaten Pandeglang menjadi daerah maju. Demikian pula dari sektor lainnya yang merupakan ekonomi tradisional masyarakatnya yaitu sektor pertanian masih cukup tinggi (33,08%). Hal tersebut menunjukkan bila di tengah bergolaknya mobilitas pekerjaan penduduk, pekerjaan tradisional masih cukup bertahan dan tetap di jalani penduduknya. Terdapatnya kecenderungan terhadap perubahan orientasi di bidang pekerjaan di tengah masih cukup dominannya jenis pekerjaan

tradisional tersebut, Pandeglang setahap demi setahap melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kehidupan kemasyarakatannya.

Pertama-tama adalah melakukan penataan ulang kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini. Secara administratif, sejak bulan Juli 2006, Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemekaran wilayahnya menjadi 35 kecamatan dan 335 desa/kelurahan (13 kelurahan), artinya telah terjadi pemekaran kecamatan dengan 2 (dua) tambahan kecamatan yaitu Kecamatan Majasari dan kecamatan Sobang. Proses pemekaran yang terjadi itu diharapkan akan dapat membawa dampak yang positif terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pemerataan hasil-hasilnya, yang selama ini dinilai kurang merata dan tidak terjangkau.

Dalam perkembangan selanjutnya Pandeglang menjadi satu wilayah tersendiri yang memiliki juga karakteristiknya sendiri. Satu-satunya daerah kabupaten yang ada di Provinsi Banten yang tidak terbuka atas berbagai perkembangan teknologi modern, laiknya sebagai suatu daerah yang sedang membangun. Daerah Pandeglang yang menjunjung tinggi nilai-nilai lama berbasiskan keagamaan, hal itu ditunjukkan dengan adanya upaya membendung munculnya pengaruh audio visual dalam bentuk sarana hiburan gedung bioskop. Hingga saat ini tidak ditemukan gedung bioskop di kota ini. Sarana tersebut dinilai dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan kemasyarakatannya. Karena aktifitas yang berlangsung dari sarana tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kental pada norma-norma kesopanan dan nilai-nilai spiritual masyarakat.

Sebagai bagian dari proses perubahan struktural pemerintahan, Kabupaten Pandeglang memerlukan banyak aktifitas sosial dan politik guna dapat mengembalikan posisi kabupaten ini menjadi sebuah wilayah yang pernah diperhitungkan pada masa lalu. Untuk itu pula tentu saja terdapat banyak kegiatan yang perlu dibenahi tidak hanya dari aspek sarana dan prasarana yang ada, namun juga pada aspek peningkatan sumber daya manusianya.

Sepanjang perjalanannya untuk membangun Pandeglang menjadi wilayah yang bangkit dari keterbelakangannya selama ini, peran pemerintah daerah sangat penting. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW), maka rencana pengembangan wilayah tidak hanya difokuskan pada pelayanan bagi masyarakat tertentu saja tetapi ditujukan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di daerah perkotaan maupun di wilayah perdesaaan. Dengan demikian RTRW berdasarkan sistem pusat pelayanannya dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaaan.

Sebagai wilayah pelayanan ditetapkan adanya 3 wilayah pengembangan, yaitu pengembangan wilayah I diarahkan pada kegiatan perekonomian dengan lingkup intra dan antarwilayah (kabupaten-Provinsi); sedangkan wilayah pengembangan II diarahkan untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, energi, perkebunan, koleksi dan distribusi barang dan jasa dan transportasi, peningkatan dan pengembangan sentra kegiatan pariwisata khususnya di kawasan Carita dan Tanjung Lesung. adapun pengembangan wilayah III diarahkan untuk pengembangan wilayah selatan, yang sarasannya adalah peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan, pelabuhan laut guna menunjang kegiatan lainnya.

Lain daripada itu untuk pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan pengembangan wilayah maka dilakukan dengan melalui pendekatan kawasan strategis, dan tahapan rencana konseptual dari strategi pengembangan ini dibantu oleh pihak perguruan tinggi terkemuka (ITB) yang telah dilakukan pada tahun 2010 dan kesimpulan dari studinya menyatakan bahwa Pandeglang kaya dengan potensi daerah tetapi tidak memiliki daya saing. Jadi berdasarkan hasil studi tersebut akhirnya dibuat dua skenario bagi pengembangan wilayah Kabupaten Pandeglang ini, yaitu: pertama adalah pengembangan “pariwisata” sebagai pengungkit dan pembangkit ekonomi daerah dengan agro industri yang diperkuat untuk menarik wilayah “*hinter*”nya, dan kedua adalah dengan agro industri yang diperkuat untuk dapat menarik pariwisata.

Lain daripada itu pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang ini searah dengan kebijakan pengembangan pemanfaatan ruangnya yang didasarkan pada fungsi Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan sebagai kawasan penunjang utama bagi kawasan andalan Provinsi Banten dan sebagai peningkatan pelayanan Banten Selatan juga sebagai pusat pengembangan ekonomi dengan sektor unggulan agribisnis, pariwisata, dan kelautan. (Profil Daerah & Peluang Investasi, Kabupaten Pandeglang, 2010: 58).

Berangkat dari Visi dan misi dari Kabupaten Pandeglang yang berbunyi: **“Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan”**. Tentu saja telah membuka peluang bagi daerah pedesaan untuk lebih berkembang. Visi misi yang lebih berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan juga masyarakat pendukungnya itu dapat dijalankan bila secara bijak pemerintah juga dapat melihat berbagai potensi yang dimilikinya baik di bidang sumber daya alam yang ada (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM) sebagai pendukung pembangunan.

Prioritas pengembangan adalah dengan cara meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata; maka pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu melihat peluang dari potensi pertanian tersebut, sementara kemandirian di bidang pariwisata akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah yang akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan. Pembangunan pedesaan perlu partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Dengan demikian subyek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan



basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

Namun demikian, berdasarkan semua asset daerah yang ada tersebut, pemerintah daerah mencoba mengakomodasinya dalam bentuk program-program pembangunannya, sesuai dengan visi yang diangkat oleh kabupaten ini yaitu menjadikan daerah kabupaten sebagai daerah “Agro Wisata” dengan *konsep one village one product*. Melalui konsep ini diharapkan asset yang ada di daerah masing-masing akan menjadi pendongkrak bagi perkembangan wilayah dan berimbas terhadap masyarakat pendukungnya. Sementara itu, dalam pembangunan pariwisata ditetapkan tiga koridor pariwisata Pandeglang yang dapat diandalkan, yaitu koridor pantai barat (Tanjung Lesung-P.Oar), Carita (eksisting), dan pantai selatan Cibinuang-Ujung Kulon yang telah diakui dunia sejak tahun 1991 sebagai taman nasional, dan akan menjadi sebagai daerah *bover zone* penyangga BPUK memanfaatkan hasil hutan non kayu. Dengan semua sumber daya masing-masing daerah itu maka akan dikembangkan kabupaten menjadi daerah yang patut dikedepankan.

Dalam perkembangannya, pemerintah kabupaten merintis 3 (tiga) proyek besar yang akan membawa Pandeglang ke dunia luar yaitu *pertama* adalah berdasarkan PP 26 melaksanakan proyek KEK yang berhasil bersaing dengan daerah lain dan dalam hal ini pemerintah mendorong investor privat yang bermain; *kedua* adalah proyek Bandara Perintis di Banten Selatan (Panimbang) dengan maksud agar nuansa provinsinya nampak, dan *ketiga* proyek JSS (jembatan Selat Sunda) tapak kaki tempat jembatan antara perbatasan Anyer dan Carita di daerah Selat Sunda, tentu saja kabupaten harus siap bersaing. Arah kebijakan JSS dengan dibangunnya jalan tol prospektif bebas dari Serang–Panimbang sepanjang 83 km, hal ini adalah dalam kapasitasnya untuk mensinergikan ekonomi warganya. Dengan adanya jalan tol ini, sudah tentu Pandeglang sudah harus bersiap untuk bersaing dengan wilayah Lampung yang selama ini sebagai pemasok bermacam komoditas.

Dilihat dari perspektif pembangunannya itu, dari sisi sosial ekonominya, Kota Pandeglang dan Labuan merupakan daerah yang menjadi Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang. Pandeglang sebagai daerah ibu kota kabupaten dan Labuan sebagai daerah pesisir pantai yang telah menjadi maskot di bidang pariwisata bagi daerah kabupaten ini. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu terdapat tiga koridor pariwisata di Kabupaten Pandeglang ini, yaitu koridor pantai barat yang menjadi andalan adalah di darah Tanjung Lesung dan pantai Oar; koridor Carita–Labuan sebagai daerah yang sudah terbentuk dan terbuka bagi pariwisata; dan koridor Pantai Selatan yaitu di Cibinuangun-Ujung Kulon (Taman Nasional). Sementara itu, terdapat tiga jenis pariwisata yang mencuat di Kabupaten Pandeglang yakni wisata hutan di Kota Pandeglang, Cikole, Cisolog (air panas). Sementara itu, dari wisata budaya muncul dalam bentuk atraksi-atrakasi kesenian seperti debus, rebana, dan tempat-tempat jiarah sheh<sup>1</sup> yang demikian populer di kalangan majelis taklim yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di kalangan masyarakat pendeglang sendiri.

### **2.3 Potensi Lokal Dalam Pembangunan Wilayah**

Berangkat dari visi misi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini, maka sudah pada tempatnya untuk

---

<sup>1</sup>Cara berjiarah ini merupakan salah satu perilaku keagamaan dalam bentuk melakukan tirakat berjikir dan berdo'a. Semua perilaku itu merupakan satu sikap budaya leluhur yang selama ini mereka yakini dapat memberi berkah. Syekh yang dikunjungi pemakamannya itu sebagai satu personifikasi dari leluhurnya. Ulama dan kyai yang mereka hormati itu telah menjadi satu bagian dari paket keyakinan dan kepercayaan atas ajaran yang diterapkan oleh shehnya itu. (seperti contoh sheh Abdul Dajaelani yang begitu lekat dalam kehidupan kegamaan umat Islam). Sehingga apa yang diyakininya selalu mengedepankan para sesepuh agamanya dan hal itu masih kental dalam kehidupan keagamaan masyarakat yang sarat dengan sifat magis kepada para leluhur keagamaannya (ulama dan kyai).

melihat seberapa besar sebetulnya potensi yang ada di daerah ini. Sementara secara garis besar telah dijelaskan terdahulu tentang sumber daya alam yang berikut ini adalah sumber daya pendukung pembangunan yaitu masyarakatnya. Berikut akan digambarkan situasi geografis dan demografis Kabupaten Pandeglang

### **2.3.1 Kondisi Wilayah yang Terpinggirkan**

Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemekaran wilayah kecamatannya, dimana pada mulanya di Tahun 2000 memiliki 22 kecamatan dan pada akhir Tahun 2007 sampai sekarang telah menjadi 35 kecamatan. Hal ini menunjukkan potensi geografis kabupaten ini cukup luas jangkauannya dan tentunya akan menyimpan cukup besar potensi yang dimiliki daerahnya selain juga beberapa kendala yang akan dihadapinya.

Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Provinsi Banten (Serang) dan 111 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Jarak tersebut dapat dilalui dengan keadaan prasarana jalan yang sudah cukup baik dan bahkan sudah ada pula usaha peningkatan fungsi kabupaten menjadi daerah yang menunjang provinsinya dengan adanya kebijakan membuka jalur jalan toll dari arah Serang ke Panimbang sepanjang 83 kilometer. Dengan akses jalan tersebut akan lebih memudahkan daya jangkau ke daerah ini.

Selain itu pula keadaan geografis yang terbentuk atas dua kondisi wilayah pesisir dan daratan telah menguntungkan Pandeglang untuk dapat melakukan sharing aktifitas dan usaha ekonomi. Wilayah-wilayah Sumur, Cikeusik, Panimbang, Sobang, Munjul, Angsana, Sindangresmi, Pagelaran, Patia, Sukaesmi, Labuan, Carita dan wilayah lainnya yang rata rata ada pada ketinggian 3 meter sampai 21 meter dari permukaan laut telah menjadi daerah potensial untuk pengembangan wilayah bahari. Sementara Cikeusik dan Sumur yang relatif lebih tinggi dari permukaan laut (21 meter dan 9 meter) dapat menjadi daerah yang potensial sebagai daerah antara yang

menjembatani wilayah-wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan/perbukitan. Sementara itu, wilayah lainnya yang menjadi daerah mempunyai aktifitas tinggi pada umumnya berada pada ketinggian di atas 100 meter dari permukaan laut seperti halnya wilayah Pandeglang, Majasari, Cadasari, Karangtanjung, Koroncong yang merupakan wilayah-wilayah yang tinggi dari permukaan laut rata-rata di atas 251 meter. Kondisi geografis yang dimiliki kabupaten ini sebetulnya menjadi satu kekayaan alam yang dapat menjadi bagian dari sumber daya sosialnya terutama untuk daerah wisata. Karena satu sama lain dapat saling mendukung bagi perkembangan pembangunan. Dari gambaran tersebut, dapat disebutkan bila dua potensi yang cukup menjanjikan yaitu potensi bahari dan potensi pertanian/perkebunan menjadi menarik untuk diulas dalam tulisan ini.

Kabupaten Pandeglang yang baru disahkan pembentukannya sebagai sebuah kabupaten melalui peraturan nomor 23 pada tahun 2000 pada tanggal 17 Oktober tahun 2000 ini memiliki luas wilayah daratan 2.747 Km<sup>2</sup> atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten, dengan panjang garis pantai 230 Km dan memiliki 13 pulau kecil dan pulau Panaitan sebagai pulau yang paling luas. Pemanfaatan Wilayah seluas itu terdistribusikan pada lahan Hutan (35,82%), lahan sawah (19,15%) dan lahan kering/lainnya (45,03%), yang juga terdistribusi sebagai lahan hunian (pemukiman) dan lahan usaha lainnya seperti lahan perkebunan dan peternakan. Secara geografis, Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan daerah-daerah lain sebagai berikut, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, di sebelah Timur dengan Kabupaten Lebak, sebelah Selatan dengan hamparan Samudera Indonesia, dan di sebelah Barat dibatasi oleh hamparan Selat Sunda. Dilihat dari kondisi geografis seperti itu, sudah selayaknya apabila salah satu arah visi misi pembangunan kabupaten ini berorientasi juga pada sektor pariwisata terutama wisata bahari. Dengan kondisi iklim

tropis yang sedang telah membuka jalan bagi wisata bahari daerah Pandeglang untuk dilirik wisatawan mancanegara.

Menyimak pada pemanfaatan lahan yang ada di Pandeglang ini, tentunya dapat disebutkan bila potensi sumber daya alam yang didominasi untuk usaha di bidang pertanian (sawah, perkebunan, dan lain-lain). Berdasarkan data yang ada, tampak bahwa dari 274.690 hektar luas Pandeglang, hampir 90% lebih merupakan lahan sawah dan perkebunan dan lahan hutan dan lahan kering. diantaranya digunakan untuk usaha pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, empang, kolam tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk hutan. Lahan sawah seluas 53.951 ha dan lahan kering dan lahan hutan 220.739, yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi (hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam). dimana sebanyak 84.962 ha terdiri dari hutan negara. Potensi lahan yang cukup besar di sektor pertanian ini selain tanaman padi sawah (110.552 ha) juga dengan padi ladang (18.926 ha). Sementara tanaman palawijanya seluas 20.005 ha banyak ditanami dengan tanaman jangka pendek seperti jagung, kedelei, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Dan tiga jenis buah-buahan yang cukup dikenal sebagai hasil yang potensial di daerah Pandeglang adalah durian, pisang, melinjo. Hasil olahan melinjo dalam bentuk emping menjadi salah satu andalan penduduk daerah Pandeglang. Dalam kaitannya dengan potensi tanaman pangan yang ada itu, maka terdapat beberapa komoditas unggulan yang mempunyai prospek baik dan yang ditawarkan bagi pengembangan agribisnis, yakni untuk tanman padi aspek usahanya adalah mesin pengering dan *rice milling* di Kecamatan Sobang, sementara dari komoditi jagung adalah pada aspek usaha penanaman dan industri pengolahan yang akan di tempatkan di Kecamatan Mandalawangi, Kaduhejo, demikian juga dengan komoditi kedelai pada aspek usaha penanaman dan industri

pengolahan di Kecamatan Cibaliung, dari komoditi manggis dan mangga pada aspek usaha budidaya di Kecamatan Cikeudal dan Pandeglang dan industri pengolahan produk terutama untuk jenis mangga dan rambutan di Kecamatan Pagelaran dan Sukaresmi. Selain tanaman pangan, tanaman keras yang menonjol dan mempunyai prospek juga bagi pengembangannya adalah dari komoditi kelapa, sawit, dan karet dengan aspek usaha industri pengolahan di Kecamatan Mandalawangi (kelapa), Kecamatan Bojong Datra (sawit, dan Kecamatan Angsana, Patia dan Munjul (karet).

Sementara itu, dari sektor pariwisata sebagaimana telah disebutkan terdahulu terdapat beberapa pusat aktifitas pariwisata yang menjadi unggulan di Pandeglang, baik dalam bentuk wisata budaya seperti atraksi Debus yang cukup dikenal luas, atau situs situs sebagai fakta sejarah, dan lain-lain. Untuk menunjang menunjang keberadaan obyek wisata tersebut telah pula dilengkapi dengan sarana akomodasi sebanyak 60 unit dalam bentuk hotel bintang, melati, resort, villa yang terdapat di daerah pariwisata seperti Carita, Labuan, Tanjung Lesung, Munjul, dan sebagainya. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Banten, kegiatan pariwisata di Kabupaten Pandeglang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Perkembangan sektor pariwisata diantaranya dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dan jumlah tamu yang menginap pada tempat penyedia jasa akomodasi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan daerah selama ini masih terkendala dengan buruknya infrastruktur jalan yang menjadi akses ke daerah tujuan wisata. Dari Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yang mencapai 1.043,48 kilometer, sepanjang 723,03 kilometer ada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten dalam

kondisi cukup baik/sedang, sementara selebihnya dalam keadaan rusak dan rusak berat. Tentu saja kondisi jalan seperti itu dapat mengurangi intensitas kedatangan wisatawan, dan hal inilah yang sedang menjadi perhatian untuk dikembangkan lebih baik agar potensi sumber daya alam yang ada tersebut secara maksimal dapat memberikan hasil guna bagi masyarakatnya.

### **2.3.2 Kondisi Demografis**

Komposisi penduduk yang ada di Kabupaten Pandeglang hingga Tahun 2010 tercatat berjumlah 1.149.610 jiwa terdiri dari laki-laki 589.056 jiwa dan perempuan 560.554 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 272.937 KK. Dalam setahun terdapat pertambahan penduduk sejumlah 2.997 jiwa (jumlah penduduk Tahun 2009 sejumlah 1.149.064 jiwa). Berdasarkan data kependudukan tersebut juga dapat diketahui jumlah penduduk yang bekerja yaitu terdapat 839.286 orang atau 73,01% yang merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 535.107 orang merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah yang cukup besar dari bukan angkatan kerja tersebut terdapat 50.760 jiwa yang menganggur yang meningkat dari keadaan tahun sebelumnya. Tentu saja kondisi itu dapat menjadi batu sandungan bagi upaya pemberdayaan masyarakatnya. Dimana terdapatnya keadaan perbandingan 2:1 antara penduduk usia kerja yang harus dapat mengayomi penduduk bukan usia kerja. Tabel berikut dapat menggambarkan keadaan tersebut.

**Tabel 1**  
Keadaan Penduduk Berdasarkan Karakteristik Ketenagakerjaan  
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2009–2010

No.	Karakteristik	Tahun	
		2009	2010
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	768.797	839.286
2	Angkatan Kerja (AK)	488.347	535.107
	a. Bekerja	434.745	474.401
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	53.602	60.706
3	Bukan Angkatan Kerja	280.450	304.179
	a. Sekolah dan Mengurus RT	226.918	250.697
	b. Mengurus RT	53.532	53.482
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,52	63,76
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,98	11,34
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	89,02	88,66

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2009-2010)

Dapat digambarkan juga bagaimana serapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pada umumnya penduduk Kabupaten Pandeglang bergerak di sektor pertanian. Namun bila dilihat dari data yang ada dalam tabel di bawah ini, tampak bahwa telah terjadi perubahan orientasi di bidang pekerjaan dari penduduk kabupaten ini. Walaupun pekerjaan di sektor pertanian masih tetap mendominasi kegiatan penduduk, tetapi bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan yang bekerja di sektor tersebut. Sebagaimana data pada tahun 2009 menunjukkan masih cukup besar jumlah yang bergerak di sektor pertanian yaitu sebanyak 46,72%, tetapi pada tahun 2010 telah terjadi penurunan sekitar 5% menjadi 43,94%. Alih profesi tampaknya lebih tertuju pada bidang usaha jasa, dimana telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari yang semula 9,57% di tahun 2009 meningkat menjadi 13,01% pada tahun 2010, demikian juga dengan jenis pekerjaan di sektor perdagangan yang juga mengalami penurunan padahal di tahun 2009 sektor ini termasuk yang



menjadi pilihan masyarakat (25,16), yang menurun pada keadaan di tahun 2010 menjadi 23,25%.

Pada umumnya jumlah penduduk yang bekerja tersebut, kaum prianya mendominasi bidang pekerjaan yang secara fisik cukup berat seperti bidang pekerjaan pertanian dan sektor lainnya yang mencakup sektor pertambangan dan penggalian, LGA, konstruksi, angkutan/transportasi, walaupun ada juga pada sektor yang tidak membutuhkan fisik yang besar seperti keuangan dan jasa perusahaan. Berbeda dengan sektor perdagangan ternyata lebih banyak diminati oleh kaum perempuan (36,01%). Dilihat dari aset dan ritme kerja yang dilakukan sektor ini memang relatif lebih mudah dilakukan oleh kaum perempuan, karena biasanya jenis usaha yang dijalankan adalah dalam bentuk membuka warung berjualan bahan-bahan keperluan rumah tangga seperti sembako, dan lain-lain, dan bahkan usaha tersebut ada di sekitar rumah. Selain itu pula jenis pekerjaan itu tidak menuntut dan tidak terikat oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan (formal) dari pelakunya, hal yang cukup dominan dilakukan penduduk pada umumnya (terdapat 83,67%) penduduknya bergerak di sektor informal, sementara yang bekerja di sektor formal terdapat 16,33%. dan dilihat dari status pekerjaan pada umumnya juga merupakan pekerja keluarga (16%), dan merupakan pekerja yang tidak dibayar (2,32%). Dalam hal ini perubahan modernitas di bidang pekerjaan menunjukkan perkembangan yang relatif lambat. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula bila sebagai daerah yang cukup potensial dari segi potensi sosialnya, telah membuka peluang cukup besar bagi investor untuk berinvestasi di kota ini. Sektor informal yang ada berupa PT-PT, perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang seperti bidang perkebunan atau perhotelan. Perusahaan swasta tersebut menyerap cukup banyak pekerja. Dari 25 perusahaan swasta yang ada telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.379 pegawai yang terdiri dari 2.124 laki-laki dan 255 perempuan. Sementara bila digabung dengan perusahaan BUMN dan BUMD terdapat 260 buah perusahaan dengan jumlah yang paling besar adalah perusahaan industri pengolahan (98 buah) dan perdagangan dan hotel (92 buah). Namun demikian,

tampaknya banyak jumlah perusahaan tersebut belum dapat menjamin bila penduduk Kabupaten Pandeglang lah sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut, hal itu dapat terlihat dari data yang ada menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di industri pengolahan jumlahnya relatif lebih kecil dibanding dengan yang bekerja di perdagangan dan perhotelan, padahal dari segi jumlah perusahaan justru berbanding terbalik. Hal itu mengindikasikan bila prospek kerja di sebuah perusahaan akan dihadapkan pada potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Keadaan pekerjaan penduduk Kabupaten Pandeglang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
Komposisi Penduduk yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
		2009	2010
1	Pertanian	46,72	43,94
2	Industri Pengolahan	7,03	7,65
3	Perdagangan, HR	25,16	23,25
4	Jasa-jasa	9,57	13,01
5	Lainnya	11,52	12,15

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang, 2010, BPS Kabupaten Pandeglang, hlm. 54, 56.

Sementara itu, bila keadaan penduduk dilihat dari kategori usia produktifnya, menunjukkan bahwa penduduk usia produktif relatif lebih besar dengan dengan jumlah penduduk non produktifnya (2;1) Tabel berikut dapat menjelaskan hal tersebut

**Tabel 3**  
Komposisi Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
Anak (0-14)	200.855	187.291	388.146
Produktif (15-64)	365.931	346.081	712.012
Lansia (65+)	22.270	27.182	49.452
Jumlah	589.056	560.554	1.149.610

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan tabel tersebut. Tampak penduduk usia produktif (usia antara 15–64 tahun) relatif cukup besar jumlahnya, jumlah tersebut tentunya dapat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan dan pembangunan daerah kabupaten ini, dan juga dengan jumlah itu pula dapat menutupi kekurangan dari keberadaan kelompok non produktif tersebut. Namun demikian, kembali harus dipertanyakan apakah SDM tersebut memang telah dapat diandalkan dalam artian cukup potensial bagi roda penggerak pembangunan dan kesejahteraan kehidupannya. Untuk dapat menjawab semua itu tentu saja salah satu indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari SDM nya adalah dari tingkat pendidikan yang dimilikinya. Karena diasumsikan bahwa bila keadaan pendidikan dari penduduknya relatif baik, SDM akan baik pula dan tentunya dapat menjadi agen pembangunan bagi daerahnya.

## **2.4 Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan SDM**

Pendidikan dalam pembahasan ini akan dibedakan atas dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dalam bentuk pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah seperti sekolah dasar(SD), sekolah lanjutan pertama atas atas (SLTP dan SLTA), dan pendidikan informal terutama pendidikan tradisional dalam bentuk pesantren.

### **2.4.1 Pendidikan Formal (Umum)**

Sarana pendidikan umum (sekolah) yang ada di Kabupaten Pandeglang baik yang pembinaannya ada di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau di bawah Departemen Agama, secara umum sudah cukup memadai. Sarana pendidikan dari tingkat sekolah dasar bahkan tingkat pemula berupa taman kanak-kanak sampai tingkat lanjutan atas dan perguruan tinggi telah tersedia di kabupaten ini. Sarana pendidikan yang ada tersebut, tidak hanya yang ada dalam pembinaannya Departemen Agama seperti halnya madrasah-madrasah seperti Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang berkembang

kemudian sesudah pendidikan formal mulai berjalan dan diperkenalkan dan bahkan pada tahun tahun 1975 telah diterbitkan surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) yang menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya. Demikian pula sebaliknya. Kompensasi dari kesetaraan itu adalah bahwa 70% dari kurikulum madrasah harus berisi mata pelajaran umum. Bahkan, berdasarkan kurikulum madrasah 1994, kurikulum madrasah harus memuat 100% kurikulum sekolah umum. Sehingga madrasah dikategorikan sebagai Sekolah Umum yang Berciri Islam<sup>2</sup>

Menilik pada karakteristik sarana pendidikan yang ada itu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2009 sudah terdapat sebanyak 354 unit sekolah TK/RA di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari TK Negeri terdapat empat (4) unit sekolah, TK Swasta ada 216 unit, dan RA Swasta terdapat 134 unit. Keadaan tersebut meningkat dari keadaan tahun 2008 yang berjumlah 282 unit. Sementara itu, Jumlah sekolah SD sederajat terdapat 1.015 unit, Jumlah sekolah SMP sederajat 265 unit jumlah sekolah SMA sederajat terdapat 131 unit.

Dari jumlah sarana pendidikan itu dapat terlihat berapa besar serapan murid yang masuk untuk mendapatkan pendidikan. Jenis pendidikan yang ada tidak hanya pendidikan Negeri dikelola pemerintah tetapi juga pendidikan agama yang telah cukup banyak diminati penduduknya. Untuk jelasnya mengenai atensi penduduk Pandeglang terhadap pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>2</sup> <http://journal.uii.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/187/176> diakses 8 mei 2012.

**Tabel 4**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Guru Terhadap Murid**  
**di Kabupaten Pandeglang**

Tingkat Pendidikan	Jumlah sekolah		Guru/Murid	murid			Rasio
	Negeri	Swasta		L	P	Jumlah	
TK	4	216	1.076	7.409			6,89
RA	-	134	622	3.999			6.43
SD	868	5	10.345/172.41	89.177	82.624	171.801	16,67
SDN			3				
SD Swasta							
MI	3	139	1.526/16.822				11,02
MI-N				294	286	580	
MI-S				8.214	8.028	16.242	
SMP	116	149	5.789/ 71.008				12,27
SMP N				21.146	19.792	40.938	
SMP-S				2.646	2.665	5.311	
Mts	6	132	2.763/24.759				8,96
MTs-N				1.601	2.006	3.607	
Mts- S				10.300	10.852	21.152	
SMA	18	15	944	10.959			11,61
MA	4	53	1.135	8.089			7,13
SMK	8	33	1.106	12.113			10,95

Sumber: Diolah dari Pandeglang Dalam Angka 2010, BPS dan Bappeda, Hlm. 101-131

Tabel di atas menunjukkan bagaimana sarana pendidikan swasta telah bersaing dengan jumlah sarana pendidikan negeri yang dibangun pemerintah. Cukup banyak sarana pendidikan yang dikelola swasta dan ternyata peminatnya cukup tinggi. Dalam hal ini mungkin dapat dikatakan bila kepedulian terhadap pendidikan terlihat cukup besar. Hal ini telah menjadi satu upaya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya, tetapi juga dari kelompok sosial tertentu pendidikan telah menjadi satu batu loncatan untuk dapat meningkatkan status sosialnya. Karena melalui pendidikan yang diraihny akan memberikan dampak terhadap penghargaan orang terhadap dirinya dan dirinya akan menjadi lebih terhormat. Bukan menjadi “orang bodoh” lagi. Ungkapan dan ucapan ketidak berdayaan yang sering terdengar dan terlontar dari masyarakat Kabupaten Pandeglang “ kami mah urang gunung, teu bisa nanaon”, telah menempatkan mereka pada satu posisi kelompok yang

selalu merendahkan dirinya sebagai masyarakat yang berbeda dengan mereka yang sudah “lebih” dalam segala hal dari dirinya. Stratifikasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat memberikan tempat tersendiri pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi. Bagi kelompok masyarakat secara ekonomi berada di lapisan bawah, upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosialnya dengan cara mempunyai pendidikan yang cukup tinggi.

Dengan kondisi sarana pendidikan yang cukup memadai tersebut, mungkin akan tergambarkan suatu kondisi SDM yang memadai dari aspek pendidikannya. Namun demikian, bila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk daerah Kabupaten Pandeglang, secara umum masih kurang menggembirakan, tampak bahwa mayoritas penduduk masih berada pada tingkat pendidikan rendah 41,50% (hanya lulusan sekolah dasar bahkan cukup banyak juga yang ternyata tidak selesai dengan pendidikan dasarnya tersebut 29,30%). Penduduk yang lulus tingkat SLTP dan SLTA tidak cukup besar. Berdasarkan data kependudukan yang ada dapat disebutkan bahwa penduduk yang pendidikannya sampai tingkat yang cukup tinggi (SLTA ke atas yaitu Diploma/PT) hanya ada 18,30% saja dan hal ini sebetulnya juga telah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan keadaan pada tahun 2009 yang 11,75%. Demikian juga dengan yang pendidikannya sampai SLTP mengalami sedikit peningkatan. Tabel di bawah ini dapat menjelaskan keadaan tersebut.

**Tabel 5**

Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2009-2010

Tingkat/Jenjang Pendidikan	Tahun	
	2009	2010
Tidak/belum tamat SD/MI Sederajat	33,23	29,30
SD/MI Sederajat	40,56	41,50
SLTP Sederajat	14,47	15,10
SLTA/SMK Sederajat	8,83	11,00
Diploma/PT Sederajat	2,92	3,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Dengan memperhatikan keadaan SDM sebagaimana keadaan tersebut di atas, terdapat korelasinya terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan yang disediakan. Tampak dalam hal ini bahwa untuk pemenuhan fasilitas pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, dan SLTP sebagaimana tergambarkan pada tabel di atas sudah cukup memadai, karena baik sarana SD maupun SLTP sudah menyebar ada di tiap kecamatan bahkan di desa-desa. Hal itu berbeda dengan sarana pendidikan tingkat menengah atas (SLTA). Fasilitas SLTA belum menyebar rata di setiap kecamatan, hanya ada 144 buah sekolah menengah atas (SLTA) baik untuk SMUN maupun SMU swasta. Kekurangan fasilitas ini bisa menghambat partisipasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah. Dengan demikian, dalam jangka panjang hal seperti ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya membangun kualitas sumber daya manusia untuk menopang pembangunan daerah Pandeglang.

Cukup besarnya jumlah pendidikan yang berbasis keagamaan seperti madrasah menunjukkan bila keinginan untuk pendidikan agama masih cukup tinggi. Namun demikian, keadaan tersebut dapat kita lihat pula seberapa besar sebetulnya tingkat partisipasi terhadap pendidikan ini? Data kependudukan menunjukkan bahwa keadaan dari Angka Partisipasi penduduk dalam kegiatan sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebetulnya sudah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Ini terlihat dari angka partisipasi sekolah menurut kelompok tingkat sekolah. Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan partisipasi sekolah anak-anak di Pandeglang dari tahun 2006 sampai 2010.

**Tabel 6**

Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010

No	Indikator	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)					
	a. SD Sederajat	96,80	98,00	97,95	96,36	96,42
	b. SMP Sederajat	80,07	74,78	74,94	72,09	70,54
	c. SMA Sederajat	36,34	33,74	32,28	46,96	41,34
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,80	6,50	6,40	6,44	6,47
3	Angka Melek Huruf Latin (%)	95,50	95,61	96,50	96,30	96,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada penduduk usia SD sederajat menduduki peringkat terbesar (96,42%) dengan partisipasi sekolah pada usia di atasnya (SLTP terdapat 70,54%), bahkan untuk SLTP cenderung ada penurunan dari sejak tahun 2006 yang mencapai 80%. Demikian juga dengan tingkat SMA sederajat angka partisipasi sekolah menduduki peringkat yang paling rendah yaitu 41,34 persen pada tahun 2010 dan juga ternyata menurun bila dibandingkan keadaan tahun sebelumnya yang mencapai 46,96%. Namun demikian, sebagaimana adanya *trade mark* sebagai kota santri, antusias terhadap pendidikan di pesantren masih cukup besar. Bila keadaan pendidikan tersebut dihadapkan dengan kefanatikan dari warga Pandeglang terhadap pendidikan agama, tampaknya kekhawatiran akan kurangnya partisipasi pendidikan formal menjadi dapat ditolerir terutama dengan apa yang disebut dengan keinginan menimba ilmu pesantren.

Secara garis besar, saat ini sekolah-sekolah yang ada di kabupatena Pandeglang tidak hanya dimonopoli oleh pendidikan agama sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi pendidikan formal pemerintah telah juga diminati. Bahkan pada akhirnya juga pesantren sebagai cikal bakal dunia pendidikan tradisional di Kabupaten Pandeglang dan sebagai pendidikan yang sifatnya informal telah



mengadaptasikan dirinya pada dunia pendidikan formal sehingga pesantren pun berkembang mengikuti kebutuhan global. Berikut adalah gambaran tentang dunia pendidikan pesantren di Kabupaten Pandeglang.

#### **2.4.2 Pendidikan Informal (Pesantren)**

Secara historis, dunia pendidikan sejenis pesantren di daerah kabupaten ini sudah merupakan satu satunya pendidikan yang sudah terinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pandeglang sejak lama. Tak pelak lagi bila keinginan memasukkan anaknya ke pesantren menjadi cita-cita tersendiri bagi kebanyakan orang tua di kabupaten ini. Tidak dapat dipungkiri bila kemunculan pendidikan pesantren ini merupakan salah satu dampak dari pengaruh penyebaran agama Islam ke daerah Banten. Penyebaran agama Islam yang dibawa para pedagang Arab ke daerah Banten pada jaman kesultanan Banten pengaruhnya cukup besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Pandeglang. Norms-norma yang terkandung dalam ajaran agama Islam telah membentuk satu tatanan sosial, nilai-nilai keagamaan yang berbasiskan agama Islam dengan ajaran berdasarkan sunah dan hadis rasul itu secara informal telah tersosialisasikan pada tataran kehidupan keluarga dan rumah tangga masyarakat Banten umumnya dan khususnya masyarakat Pandeglang. Sehingga ajaran keagamaan yang telah diberikan dari sejak kecil dalam lingkungan keluarga sampai lingkungan sosialnya yang lebih luas tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai yang mereka miliki sampai sekarang, dan telah membentuk satu keyakinan dan pandangan hidup yang agamis dari masyarakatnya. Fanatisme yang tinggi terhadap kehidupan keagamaan itu pada akhirnya diwujudkan pula dalam dunia pendidikan yang disebut pesantren. Bentuk pendidikan pesantren ini lebih bersifat informal dan kekeluargaan, karena terbentuk secara *bottom up* atas kepedulian dari anggota masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan data yang ada jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Pandeglang terdapat sebanyak 1124 buah. Pesantren tersebut menyebar di seluruh kecamatan bahkan desa yang ada di

kabupaten ini. Tidak ada satupun wilayah kecamatan bahkan desa yang tidak memiliki pesantren. Pesantren telah betul betul menjadi pedoman hidup dan menjadi dunia pembelajaran bagi masyarakatnya. Bidang pendidikan khusus keagamaan di pesantren ini telah menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan dunia pendidikan bagi penduduk Kabupaten Pandeglang khususnya dan umumnya juga bagi penduduk Provinsi Banten.

Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, cerminan masyarakatnya didukung oleh keberadaan jenis pendidikan “pesantren” tersebut yang mayoritas berkembang saat itu, dan dengan berjalannya waktu, jenis pendidikan yang berbasiskan pada agama (Islam) mulai mengalami pergeseran terutama pada cakupan pendidikannya. Sesuai dengan perkembangan jaman maka pesantren-pesantren dewasa ini telah banyak yang dipandu dengan adanya kurikulum yang selama ini tidak pernah diberlakukan. Jenis pendidikan itu diwadahi dalam satu jenis pendidikan yang disebut madrasah. Muncul jenis pendidikan madrasah dari tingkat SD sederajat bahkan TK sampai SLTA sederajat dan sudah mulai dibangun dan berkembang di kota ini, seperti pendidikan sekolah untuk anak-anak dari tingkat dasar yang disebut dengan ibtidaiyah (setingkat SD), kemudian tsnawiyah (setingkat SLTP), dan aliyah untuk setingkat sekolah lanjutan atasnya (SLTA). Pendidikan jenis madrasah ini kurikulumnya mengadopsi pendidikan umum.

Pergeseran ini merupakan dampak ikutan dari perkembangan pendidikan yang berlangsung di Indonesia umumnya dan khususnya di Pandeglang. Perpaduan dan penyelarasan dunia pendidikan yang berkembang belakangan di beberapa pesantren adalah sebagai upaya untuk dapat juga menjawab tantangan kemajuan di dunia pendidikan. Banyaknya jumlah sekolah agama sebagaimana sekolah yang sejajar dengan sekolah umum dari SD sampai SMA itu merupakan satu upaya penyelarasan dengan keberadaan pendidikan yang berbasis keagamaan (pesantren) yang ada dan berkembang sejak lama di kabupaten ini. Karena keberadaan pendidikan di pesantren lebih difokuskan pada jenis pendidikan agama, tentu saja harus dapat

menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan yang berlangsung dewasa ini. Pada akhirnya dengan dibukanya jenis madrasah tersebut, pelajaran yang diberikan tidak melulu pelajaran dan ajaran agama Islam saja sebagaimana yang diajarkan di pesantren-pesantren yang memang konsepnya adalah untuk memberi pengetahuan keagamaan (Islam), tetapi telah memadukan 50% dari pelajaran umum seperti halnya pelajaran matematika, sejarah, PPKN, bahasa, dan lain-lain lainnya sekolah umum yang ada. Menurut Furchan (2004: 36). Perbedaan utama madrasah dengan pesantren adalah terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadual, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat) sedangkan pesantren menganut sistem non-formal (dengan kurikulum yang sangat bersifat lokal, pemberian pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa ujian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa). Terjadinya pergeseran itu pula yang telah mengurangi posisi pesantren yang selama ini menjadi bagian yang tak bisa dilepas dalam kehidupan masyarakatnya. Adanya dikhotomi di bidang pendidikan (pendidikan agama dan umum) telah menyudutkan pendidikan di pondok pesantren sebagai sebuah pendidikan agama saja, namun dalam perkembangan pendidikan seperti yang telah dijelaskan di atas, pesantren telah pula mengadopsi pendidikan yang bersifat umum dan ditempatkan dalam pendidikan yang disebut madrasah.

Dalam perkembangan selanjutnya, minat terhadap pendidikan dan bersekolah di sekolah agama (di luar pesantren) juga cukup besar dan sarana yang tersedia pun cukup memadai. Jumlah sarana pendidikan yang berdasarkan agama di Kabupaten Pandeglang terdapat 66 Madrasah Aliyah (MA) setara SMA; 155 Madrasah tsnawiyah (MTS) setara SMP; dan 147 madrasah ibtidaiyah (MI) setara SD.

Terdapat jumlah pesantren yang sedemikian besar (1124), tentu saja dapat menampung anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan di pesantren. betapa besar minat penduduk terhadap pendidikan pesantren dan semua itu teradopsikan dalam jumlah pesantren yang ada merata di seluruh kecamatan bahkan desa yang ada di kabupaten ini. Untuk lebih

jelasanya keadaan pendidikan agama di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7**  
**Banyaknya jumlah Sarana Pendidikan Agama**  
**di Kabupaten Pandeglang**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Madrasah ibtdaiyah (MI) setara SD	147	
2	Madrasah tsnawiyah (MTS) setara SMP	155	
3	Madrasah Aliyah (MA) setara SMA	66	Beberapa kecamatan yang tidak ada fasilitas SMA negeri atau swasta: Kecamatan Angsana, Cibitung, Sukaresmi tapi diisi oleh adanya madrasah.
4	Pesantren	1124	Terdapat tiga (3) kecamatan yang Paling banyak jumlah pesantrennya yaitu terdapat di Kecamatan, Pandeglang(87), Mandalawangi (71), Panimbang (61).
		1492	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabuapten Pandeglang, 2011.

Sebagaimana yang tampak dari tabel tersebut, terdapat sebanyak 1124 pondok pesantren (ponpes) dan ponpes tersebut tersebar di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, wilayah yang paling banyak jumlah pondesnya adalah di Kecamatan Pandeglang sebagai ibu kota kabupaten terdapat sebanyak 87 ponpes, padahal di Kota Pandeglang hanya ada empat desa saja artinya pesantren tersebut menumpuk di satu wilayah tertentu seperti di desa Kadomas dan Kota Pandeglangnya sendiri. Sementara itu, kecamatan yang paling sedikit jumlah pesantrennya adalah di Kecamatan Koroncong, yaitu dari 12 desa yang ada di kecamatan ini, Cuma ada 6 pesantren, dan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Carita (sebagai daerah wisata dan Kecamatan Pulosari). Keadaan tersebut tentu saja

berbeda dengan kecamatan lainnya yang rata-rata di setiap desanya terdapat dua sampai tiga buah pesantren. seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8**  
Persebaran Pesantren di Kabupaten Pandeglang

No	Lokasi Pesantren/ Kecamatan	Jumlah Pesantren dan Desa	Lokasi Pesantren/ Kecamatan	Jumlah Pesantren dan Desa
1	Sumur	9/7ds	1. Labuan	22/9ds
2	Cimanggu	36/12ds	2. Carita	7/10 desa
3	Cibaliung	26/9ds	3. Jiput	38/13ds
4	Cibitung	17/10ds	4. Cikedal	18/10ds
5	Cikeusik	35/14ds	5. Menes	50/11ds
6	Cigeulis	49/9ds	6. Pulosari	7/9ds
7	<b>Panimbang</b>	<b>61/6ds</b>	7. Cimanuk	51/11ds
8	Sobang	24/7ds	8. Cipeucang	28/10ds
9	Muncul	56/9ds	9. Banjar	39/11ds
10	Angsana	34/9ds	10. Kaduhejo	28/10ds
11	Sindangresmi	17/9ds	11. Mekarjaya	18/6ds
12	Picung	38/8ds	12. <b>Pandeglang</b>	<b>87/4ds</b>
13	Bojong	34/8ds	13. Majasari	5/5desa
14	Saketi	36/14ds	14. Cadasari	50/11ds
15	Cisata	37/9ds	15. Karangtanjung	39/4ds
16	Pagelaran	22/13ds	16. Koroncong	6/12ds
17	Patia	24/9ds	17. <b>Mandalawangi</b>	<b>63/15desa</b>
18	Sukaesmi	14/10ds		

Sumber: Diolah dari Hasil BPS Kabupaten Pandeglang, 2011.

Cikal bakal pendiri pesantren telah menjadikan pesantren sebagai salah satu wadah bagi penggemblengan para santrinya untuk memahami kaedah-kaedah ajaran agama Islam. Pada gilirannya unsur politik-pun telah pula masuk. Pesantren-pun telah menjadi cikal bakal bagi perekrutan massa pendukung suatu partai politik tertentu. Posisi seperti ini pula yang telah menjadikan pondok pesantren sebagai salah satu asset bagi penguatan kelompok tertentu. Dapat dikatakan bila pendidikan pesantren telah menancapkan pengaruhnya yang cukup kuat bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Pada masa lalu pesantren

telah menjadi salah satu motor penggerak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pula nilai-nilai yang dibawa dalam kehidupan pesantren telah membentuk tatanan sosial bagi masyarakatnya. Pesantren sebagai satu-satunya sektor pendidikan pada masa lalu sudah cukup mandiri, artinya keberadaan pesantren tersebut tidak membebani masyarakat. Pesantren muncul karena adanya inisiatif perseorangan atau kelompok tertentu yang mempunyai keahlian keagamaan dan yang peduli terhadap kehidupan lingkungan sosialnya. Oleh karena munculnya pesantren tidak melewati suatu prosedur yang macam-macam. Karena munculnya secara *bottom up* dari bawah bukan sebagai satu kreasi dari atas atau pemerintah, maka keberadaan pesantren yang sarat dengan kesederhanaan menjadi ciri sebuah pesantren. Yang terpenting dalam keberlangsungan sebuah pesantren adalah keberadaan dari pendirinya yang adalah seorang kyai yang secara sosial dikagumi dan dipatuhi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian telah menempatkan posisi seorang kyai sebagai pendiri pesantren menjadi begitu penting. Kondisi itu telah memunculkan peran seorang kyai yang kharismatik dalam masyarakat tersebut. Masyarakat yang mengagumi kyainya pada gilirannya juga menjadi masyarakat yang patuh terhadap kyai panutannya itu. Pada saat itu, ketergantungan pada negara seperti yang sering terjadi pada situasi sekarang diminimalisir dengan adanya peran individu dalam dunia pendidikan dalam hal ini adalah kyai. Menurut salah seorang penulis tentang pesantren dikatakannya bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pendidikan di pesantren, dan kelima prinsip yang telah disosialisasikan sejak santrinya masuk ke pesantren telah menjadi satu nilai-nilai sendiri dalam kehidupan sosialnya terutama bila harus berhadapan dengan kiyainya. Kelima prinsip itu pula yang menanamkan suatu nilai-nilai kehidupan bagi santrinya dan dalam proses sosialisasinya, nilai-nilai tersebut dapat ditularkan pada keluarga santri itu sendiri. Kelima prinsip tersebut adalah a). Adanya hubungan yang akrab antara santri dan Kiai, b). Santri yang taat dan patuh kepada Kiyainya, c). hidup secara mandiri dan sederhana dari para santrinya, d). terdapat semangat gotong royong dalam suasana penuh persaudaraan,

dan e). terlatih untuk hidup berdisiplin dan tirakat.<sup>3</sup> sebagai wilayah yang sejak awal sudah kental dengan dunia pendidikan keagamaan adalah juga patut dipertimbangkan peran yang ditimbulkan dari dunia pendidikan keagamaan tersebut atau lebih dikenal dengan kehidupan dunia pesantren yang telah dikenal oleh penduduk kabupaten Pandeglang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini.

Dalam hal ini keberadaan pesantren yang sarat dengan kehidupan kebersamaan yang tinggi telah menumbuhkan minat bagi masyarakatnya untuk selalu menjalin hubungan baik di antara sesama Prinsip dasar yang telah membentuk sikap kebersamaan sebagai warga di kabupaten ini merupakan sifat positif yang dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan warga daerah ini. Namun demikian, dalam bidang pendidikan, tidak hanya pendidikan informal yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakatnya terhadap perlunya sikap kebersamaan sebagai warga di kabupaten ini. Berkembangnya pendidikan formal yang lebih bersifat egaliter dan persaingan telah pula menjadi salah satu bagian dari proses perkembangan sumber daya manusia daerah ini.

Secara umum pesantren didirikan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan tentang agama Islam yang sudah “mumpuni”, selain itu juga perlu didukung oleh keadaan ekonomi yang biasanya relatif lebih baik dari kebanyakan keadaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun demikian, pada awalnya sebuah pesantren yang didirikan tidak berdasarkan atas bentuk fisik bangunannya, karena adakalanya sebuah pesantren tidak menunjukkan suatu tempat khusus, tetapi tempat pendidikannya itu dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Adakalanya dapat kita temukan bila tempat dimana para santri itu belajar ilmu agama di tempat yang disebut pesantren hanyalah sebuah tempat yang sifatnya sementara dan

---

<sup>3</sup><http://journal.uui.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/187/176>  
diakses 8 mei 2012.

sederhana seperti misalnya di sebuah garasi atau bagian belakang sebuah rumah tinggal. Lambat laun bila anak didik cukup banyak akan berkembang menjadi sebuah bangunan khusus untuk pendidikan yang lebih baik. Menurut salah seorang informan yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa seorang kiyai pada masa itu termasuk dalam satu kelompok masyarakat yang secara ekonomi tinggi dikelompokkan sebagai orang yang mampu atau orang “kaya”. Tidak sembarang orang dapat mendirikan sebuah pesantren. Hal itu didasarkan oleh suatu kondisi sosial ekonomi, karena untuk mendirikan sebuah pesantren memerlukan biaya yang cukup banyak, seperti untuk penyediaan alat-alat belajar mengajarnya, persiapan dan sebagainya. Oleh karena itu, secara otomatis pendiri pesantren dapat digolongkan pada masyarakat yang secara ekonominya adalah golongan “mampu” *the have*.

Wilayah Banten merupakan satu wilayah yang kehidupan sosialnya begitu agamis (Islam), dan secara historis jenis pendidikan agama terutama dalam bentuk pesantren sudah ada jauh sebelum jaman kolonial (Belanda menjajah Indonesia). Pesantren yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2003 terdapat sebanyak 2.435 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah Santri sebanyak 207.847, dan 50% lebih pesantren tersebut ada di Kabupaten Pandeglang (1.124 pondok pesantren). sehingga tidak berlebihan bila Pandeglang disebut juga sebagai “kota santri”. Sementara itu, daya tampung rata-rata Pondok Pesantren adalah sekitar 85 santri/sekolah, dengan demikian hampir 100.000 orang santri yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Pesantren-pesantren di Pandeglang umumnya memiliki “kobong-kobong”<sup>4</sup>. Kobong-kobong ini adakalanya dijadikan sebagai

---

<sup>4</sup>Kobong-kobong adalah istilah untuk menunjuk pada kepemilikan areal lahan dari pesantren tersebut dan fungsi kobong-kobong itu digunakan sebagai sumber penghasilan bagi berjalannya dunia pendidikan di pesantren, karena kobong-kobong tersebut biasanya dibudidayakan oleh para santri dari pesantren tersebut dengan berbagai komoditas yang ada di daerah itu, seperti



sumber penghasilan para kiyai untuk keperluan menghidupi pesantrennya. Sejalan dengan adanya kobong-kobong itu pula proses pembelajaran yang bersifat kebersamaan, toleransi dan kemandirian dipupuk. Walaupun tidak di semua pesantren hal itu dilakukan dan bahkan saat sekarang cara seperti itu sudah tidak lagi terjadi. Tetapi pada awalnya proses pembentukan kemandirian dan kebersamaan dilaksanakan pada saat santri menjalani tugas praktek kehidupan dengan cara bercocok tanam, dan sebagainya. Karena biasanya juga kobong-kobong itu dipakai sebagai tempat untuk latihan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial ekonomi tersebut menumbuhkan sikap kebersamaan dan toleransi di antara para santri dengan kyai yang jadi panutannya itu. Dengan cara tersebut pesantren dapat berjalan dan hidup sebagai wadah dunia pendidikan informal dalam masyarakat di Pandeglang.

Pendidikan dalam bentuk pesantren ini sudah sedemikian mengakar dalam kehidupan masyarakat Pandeglang. Sehingga ada kebanggaan khusus bagi orang tua yang telah memasukkan anaknya untuk mondok di pesantren. Sistem pendidikan di Pesantren mengharuskan anak didiknya yang biasa disebut dengan “santri” untuk tinggal dalam pondokan yang disediakan di pesantren tersebut. Sehingga muncul istilah dalam masyarakat Pandeglang sebagai kehidupan mondok di pesantren. Dalam dunia pendidikan di pesantren ini peran seorang guru yang disebut “kyai” sangat besar pengaruhnya bagi para santrinya dan bahkan orang tua santri itu sendiri akan sangat mengidolakan anaknya agar menjadi kyai seperti kyai yang ada di pesantren tersebut.

Walaupun pada awalnya, pendidikan di pesantren sarat dengan kaidah-kaidah agama sehingga memunculkan satu *image* tentang produk dari hasil pendidik yang kurang bergengsi. Dalam kehidupan

---

ubi, jagung, kacang, dan sebagainya. Kobong-kobong ini dipakai sebagai salah satu tempat untuk proses pembelajaran juga (berkebun) bagi para santri, yang disesuaikan dengan kehidupan sosial ekonomi dari masyarakatnya pada waktu itu adalah sebagai petani kebun.

sosial pada umumnya, dunia pendidikan umum lebih dihargai dan menjadi idaman bagi setiap orang untuk memiliki pendidikan formal tinggi, pendidikan pesantren selalu mendapat satu konotasi yang kolot, seakan akan mereka yang lulusan pesantren dinilai sebagai “kampungan”, tidak modern, kurang mendunia, dan sebagainya. Agak berbeda dengan keadaan di Kabupaten Pandeglang, bagi penduduk ini pesantren memberikan satu nilai tersendiri yang mengarah pada suatu prestise sosial yang menjadi panutan masyarakat. bahkan setelah pesantren mengadaptasikan pendidikannya dengan kurikulum umum, maka bermunculan pesantren dengan label “modern”. Pesantren jenis itu mengisi ruang di hati para pendukungnya dan telah menjadi idola tersendiri bagi kalangan tertentu dalam masyarakat Indonesia. Beberapa pesantren yang juga berkembang menjadi pesantren “modern” seperti yang terjadi pada beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Pandeglang, pesantren Daur El Falaah Mandalawangi merupakan salah satu pesantren yang telah mengadopsi pendidikan formal dalam kurikulumnya dan telah menjadi sebuah pesantren “modern”. Persepsi tentang sebuah pesantren yang ortodok dan tradisional pun mulai bergeser, sehingga peminatnya juga tidak hanya dari golongan masyarakat bawah yang selama ini menjadi mayoritas peminat pesantren tradisional, tetapi sudah bergeser pada golongan masyarakat *the have* bahkan dari daerah perkotaan terindikasi dari adanya pesantren “modern” dengan fasilitas level “boarding school” yang biayanya cukup mahal. Dengan demikian pesantren tidak lagi merupakan tempat pendidikan yang dihindarkan oleh remaja masa kini, tetapi sudah menjadi dunia pendidikan bergengsi di mata remaja dan masyarakat.

Melihat pada gerak perubahan pendidikan yang ada di kabupaten ini, adanya keseimbangan antara dunia pendidikan yang bersifat informal keagamaan dan pendidikan umum formal pemerintah. Berdasarkan data yang ada tercatat terdapat sebanyak 368 jumlah sarana pendidikan agama yang disebut madarasah yang sederajat dengan sekolah umum formal dari tingkat SD sampai SLTA sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Madarasah ini merupakan

satu bentuk apresiasi untuk menyikapi adanya perubahan di bidang pendidikan. Masuknya madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah sekolah pemerintah. Juga pendidikan umum dalam kurikulum pembelajarannya, dan bahkan marak hingga dewasa ini dan mulai berkembang menjadi pesantren “modern”.

## **2.5 Pasang-Surut Peran Pesantren dan Kyai Sebagai Agen Pendidikan**

Melihat pada kondisi SDM yang ada sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini, tampaknya pemerintah daerah sudah menjalankan kewajibannya. Berbagai program pendidikan yang menyentuh warganya yang berada pada berbagai level pendidikan telah diterapkan. Kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya juga sudah disikapi dengan berbagai program bantuan pendidikan seperti bebas SPP, dana BOS, dan sebagainya. Demikian pula dengan dorongan bagi masyarakat agar mendapat pendidikan lebih baik dengan cara membebaskan biaya SPP sampai tingkat SLTA.

Sebagai wilayah yang sejak awal sudah kental dengan dunia pendidikan keagamaan adalah juga patut dipertimbangkan peran yang ditimbulkan dari dunia pendidikan keagamaan tersebut atau lebih dikenal dengan kehidupan dunia pesantren yang telah dikenal oleh penduduk Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini. Dimana dalam dunia pendidikan di pesantren, sikap kebersamaan yang diterapkan, telah pula memunculkan sikap kepatuhan pada kyainya. Sikap tersebut telah menimbulkan adanya sikap dominan dari kyainya dan ada muncul pula sikap patuh dan tunduk dari para santrinya. Kondisi di dunia pesantren seperti itu telah telah menjadi cikal bakal bagi terbentuknya sistem stratifikasi sosial dalam kehidupan di pesantren dan hal itu pun berimbas dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

Pada dasarnya sistem stratifikasi sosial yang memunculkan pengelompokan itu dapat menunjukkan suatu keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai strata baik dilihat dari aspek sosial, budaya, ekonomi atau politiknya. Sistem stratifikasi social sesungguhnya merupakan suatu keadaan yang akan selalu ada dalam suatu masyarakat, baik masyarakat itu masih merupakan suatu masyarakat yang tradisional sifatnya tertutup seperti yang tampak pada masyarakat baduy misalnya atau masyarakat yang kental dengan sistem kastanya seperti masyarakat Bali contohnya, dalam masyarakat seperti itu tiap-tiap anggota masyarakat yang ada dalam satu kasta tertentu tidak dapat atau sulit untuk pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi. Ataupun dalam dunia pendidikan pesantren yang memunculkan secara tegas kedudukan antara kyai dan santri atas jenjang hirarki atas – bawah antara yang dominan dan dominee. Hal itu berbeda dengan stratifikasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang terbuka dan modern seperti halnya masyarakat perkotaan yang ada dewasa ini, setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata / tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Di mana dalam proses pembentukannya mungkin berbeda, pada satu sisi strata yang terbentuk secara tertutup terjadi karena adanya nilai-nilai yang mengikat kehidupan sosialnya, sehingga masyarakat hanya akan ditentukan status dirinya oleh ikatan-ikatan nilai yang berlaku tersebut. Adanya stratifikasi sosial ini pula yang menyebabkan adanya perbedaan baik dalam perlakuan maupun dalam kesempatan dari masing-masing anggota kelompok yang terstratifikasikan tersebut. Sistem stratifikasi sosial yang berdasarkan nilai-nilai adat budaya setempat mungkin akan lebih bersifat *rigid* dan tertutup sebagaimana yang dicontohkan di atas, tetapi akan berbeda bila stratifikasi sosial itu terbentuk bukan karena faktor budaya tetapi faktor sosial lainnya yang relatif lebih longgar sifatnya karena cenderung dapat lebih fleksibel, lentur, dan longgar, oleh pengaruh yang datang dari luar nilai- nilai yang dianutnya. Dalam kaitannya dengan proses stratifikasi sosial itu, gerak pergeseran yang dilaluinya dapat melalui beberapa cara seperti yang berdasarkan pada penguasaan atas barang dan jasa, dalam hal ini akan terdapat suatu strata antara kelompok yang dominan memiliki barang dan jasa dengan

kelompok yang didominasi untuk kepentingan kelompok dominannya tersebut; kemudian terjadinya juga melalui suatu hierarki kekuasaan, yang didasarkan pada kekuasaan ini cukup jelas keberlangsungannya selama negara masih memegang prinsip sebagai negara kekuasaan; dan dapat juga melalui hierarkis status, yang didasarkan atas pembagian kehormatan dan status sosial, sebagaimana yang terjadi di dunia pendidikan pesantren. Kelompok sosial yang ada itu secara langsung atau tidak telah memunculkan adanya suatu keadaan masyarakat yang tertata atas berbagai bagian yang berbeda satu sama lain.

Tampaknya setiap hirarkis tersebut selalu memunculkan kelompok baru dalam gerak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Dan hirarki status yang didasarkan atas pembagian kehormatan dan status sosial cukup menonjol di Banten umumnya dan khususnya di Pandeglang, stratifikasi yang terbentuk juga lebih bersifat terbuka, artinya setiap anggota masyarakat dapat menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat tanpa harus terikat oleh adanya aturan adat yang secara kultural memang tidak ada basis kultural bagi masyarakat Pandeglang. Anggota masyarakat dapat menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat tanpa harus terikat oleh adanya aturan adat yang memang tidak ada basis kultural yang dapat menempatkan posisi masyarakat sebagai satu bagian dari satu daerah kebudayaan yang masif sifatnya. Perwujudannya adalah terjadinya lapisan-lapisan sosial tinggi dan yang lebih rendah. Dasar dan inti dari stratifikasi sosial adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Sehingga dengan adanya stratifikasi sosial ini menyebabkan seseorang mempunyai peranan yang berbeda antar-individu-individu lainnya.

Dalam kaitannya dengan bagaimana posisi seseorang dalam satu kelompok sosial yang terbentuk yang ada di daerah penelitian Kabupaten Pandeglang ini, tentunya tidak luput dari *background* sejarah yang ada di daerah ini. Sebagaimana kita ketahui masyarakat Kabupaten Pandeglang lebih bersifat agamis, sehingga dalam

kehidupan sosialnya peran seseorang yang pandai di bidang keagamaan itulah yang akan sangat disegani dan dihormati dan akan menjadi panutan bagi warga masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini tokoh agama yang biasa disebut al ustadz atau kiyai yang memiliki pesantren atau yang mengajar di pendidikan pesantren merupakan tokoh utama dalam hirarki kehidupan sosial masyarakatnya (Lukman Hakim, 2006; Tihami, 1992). Selama perjalanan panjang dinamika pesantren yang ada di Pandeglang, memposisikan status seorang kyai pada tingkat sosial yang tinggi.

Tentu saja adanya dualisme pendidikan yang ada dewasa ini dan telah menjadi kebutuhan mendasar warga masyarakat Pandeglang ini dapat memunculkan kondisi kemasyarakatan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Karakteristik yang muncul lebih menonjol dengan dominasi spiritual keagamaan dari warganya. Tokoh ulama atau kyai yang menjadi figur kuat dalam pendidikan pesantren melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Menjungjung tinggi tokoh agama telah membentuk satu kelas tersendiri dalam masyarakat Pandeglang dan statusnya sebagai pemuka agama menjadi panutan bagi warganya. Pelapisan sosial pada masyarakat Pandeglang lebih meruncing pada masa pemerintahan kolonial. Selain para pemangku pemerintahan, para kyai dan ulama pada masa itu telah diposisikan menduduki lapisan tinggi.

Sebuah kelompok sosial yang bersifat tradisional akan memiliki ciri-ciri khusus seperti sikap *intimate* (hubungan menyeluruh mesra); *private* (hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja); *exclusive* (hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang lain di luar kita). Ciri-ciri itu pula yang dapat menjadi pengikat di antara warga kelompok sosial tersebut.

Secara teoritis, sifat kelompok sosial yang bersifat tradisional tidak jauh beda dengan konsep *gemeinschaft* yang dikemukakan oleh Tonnies yang dinyatakan bahwa dalam satu kelompok sosial seperti itu hubungan yang dekat (*face to face relationship*) di antara anggota kelompok adalah menjadi ciri utama untuk eksistensinya, selain itu

pula harus ada suatu kontinuitas dalam aktifitasnya, sehingga roh kelompok ini akan tetap terpancar, selain itu juga diperlukan adanya ikatan kelompok di antara anggotanya yang dapat memperkuat kelompok itu sendiri.

Pada masa lalu institusi pesantren dengan para kyainya yang menjadi sentral kekuasaan dan kekuatan sosial telah menjadi motor penggerak pembangunan dan kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan lewat institusinya itu. Demikian dominannya posisi kyai pada waktu itu membuat para santrinya demikian loyal dan patuh pada kyainya. tingkat loyalitas yang tinggi dari para santri itu telah membentuk suatu hubungan kedekatan antara kyai dengan santrinya. Kedekatan mana telah membentuk satu ikatan kekerabatan bagaikan bapak dan anaknya dan memang hal itu yang dibina dalam pendidikan di pesantren “kebersamaan” dan saling tolong menolong menjadi satu paket pendidikan di pesantren, dan nilai-nilai tersebut yang dapat menjadi modal sosial bagi ikatan bagi warganya. Hubungan yang begitu dekat antara kyai dengan santrinya pada saat itu tidak disukai pihak kolonial. Pihak Kolonial mencoba melakukan pendekatan untuk dapat mempengaruhi para kyai agar dapat mengurangi kegiatannya dengan cara memberikan berbagai kemudahan dan *privilege* dalam kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Dan situasi tersebut berlanjut sampai masa kemerdekaan di masa pemerintahan orde baru, pesantren telah menjadi tempat untuk kepentingan-kepentingan politik dan dewasa ini begitu dominan digunakan sebagai alat untuk keberhasilan salah satu partai politik. Dalam perkembangan sejarah pesantren ini mulai kehilangan pamornya apalagi setelah diketahui banyak dari kyainya menjadi alat dari partai politik. Semua itu menimbulkan rusaknya kepercayaan (*trust*) dari para santrinya. Lambat laun peran kyai mulai berkurang, perannya sekamin tergeser setelah dunia pendidikan modern semakin mendominasi kehidupan masyarakatnya dan keberhasilan dari mereka yang berpendidikan umum telah menjadi contoh tipe ideal baru bagi masyarakat sekitarnya.

Sejak abad ke 19 kelompok yang mendominasi secara kultural dan masuk sebagai golongan elit masyarakat adalah kaum ulama dan

pamong praja (Banten, Tihami:1992). Kaum ulama yang punya posisi kultural religius bagi masyarakat Pandeglang dan menurut Harikoshi dalam Tihami (1992) menyebutkan bahwa konsep ulama itu lebih luas dari kyai. Ulama lebih menunjuk pada faktor kepandaian sementara kyai merupakan pemberian gelar terhadap ulama. Dalam hal ini kyai lebih bersifat spiritual dan posisinya sangat ditentukan oleh kharismanya daripada otoritasnya. Biasanya kiyai ini tempat para jawara menimba ilmu. kelompok yang disebut jawara pada awalnya adalah kaum santri yang belajar agama di pesantren, tetapi ia juga dibekali dengan ilmu bela diri. Dengan demikian dalam dunia pendidikan pesantren terdapat dua jenis santri. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang kyai yang memiliki pesantren di Kota Pandeglang, dikatakan bahwa dalam pendidikan agama di pesantren dikenal adanya dua jenis santri, yaitu santri yang memang dipersiapkan untuk pengetahuan keagamaan dan juga santri yang disiapkan juga untuk belajar bela diri. Pada waktu itu memang dibutuhkan karena dapat membantu dalam melawan kaum kolonial. Kelompok santri inilah yang nantinya dikenal sebagai “jawara”. Santri yang mempunyai kedigdayaan fisik. Keadaan ini terjadi karena sebagai salah satu taktik untuk mengelabui pemerintah kolonial dengan kamufase pendidikan, para kiyai mempersiapkan anak didiknya para santri sebagai pasukan untuk melawan pemerintah kolonial pada waktu itu. Dengan berlindung dibalik keperluan pendidikan di pesantren, anak-anak warga masyarakat yang mempunyai motivasi untuk juga berjuang demi tanah air atau demi kebutuhan daerahnya, mereka diajarkan pendidikan agama dan sekaligus pendidikan bela diri. Pendidikan itu dilakukan secara diam-diam, dengan berkedok melakukan pelajaran “dzikir” maka para santri itu akan mendapat pelajaran bela dirinya yang dilakukan pada waktu malam hari agar terhindar dari pengawasan kolonial. Dengan berdalih belajar di pesantren mereka menghimpun kekuatan. Pada perkembangannya selanjutnya, Jawara itu berubah peran. Para santri yang disebut jawara ini melanjutkan aktifitasnya dengan cara menjadi “centeng” atau tukang pukul sehingga menjadi lebih dikenal sebagai kelompok “preman” dengan ciri-cirinya sebagaimana yang dikutip dari pendapat kartodirdjo dalam M.A.Tihami, bahwa



preman ini disebut juga sebagai jawara yang merupakan suatu golongan sosial, yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang sering kali melakukan kegiatan-kegiatan kriminal, tetapi mereka mendapat dukungan komunitas lokalnya (Tihami, 1992: 13). Rumusan tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan benar mutlak, karena sebagaimana sejarah terbentuknya jawara ini yang pada mulanya adalah kelompok santri yang digembleng ilmu bela diri sebagai upaya untuk menghadapi pihak pemerintahan kolonial pada masanya, yang baru kemudian berkembang menjadi kelompok yang marjinal setelah mereka tidak lagi menduduki posisi sebagai orang yang diperlukan untuk membela kaumnya dari pemerintahan kolonial. Pada keadaan sekarang mulai berubah, kelompok ini pada akhirnya selalu mempunyai konotasi negatif sebagai kelompok yang suka bertindak kriminal dan memang mereka diposisikan seperti itu dengan maksud untuk mendukung pihak tertentu saja. Bila diklasifikasikan dengan keyakinan keagamaan maka para jawara itu akan diberi "label" sebagai santri "hitam" yang sepek terjangnya lebih kepada kekuatan fisik dan adakalanya yang berbau "magis", sementara unsur utama semula sebagai seorang santri dan kelompok yang mengerti dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama mulai ditinggalkan. Pembagian kelompok seperti tersebut di atas dewasa ini masih menyisakan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Pandeglang.

Dinamika Kewarganegaraan kelompok sosial di Pandeglang tampaknya kurang mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sebagai kelompok dominan dilihat dari jumlah dan kultur daerah Pandeglang tidak dapat menjadi faktor yang menentukan terjadinya suatu kohesifitas sosial. Tingkat kohesifitas yang pernah ada pada masa kiyai berperan cukup besar dalam kehidupan masyarakat telah dikalahkan oleh kepentingan individu. Kyai sudah kurang pamornya karena ulahnya sendiri yang dapat berkompromi dengan pihak yang berkuasa, padahal pada masa lalu kyai sangat ketat menjunjung tinggi sikap menjaga wibawanya di depan para santri dan keluarganya. Sikap mendua (duniawi dan akherat) dari para kyai saat

ini telah mengganggu konsep kebersamaan yang selama ini terjalin sangat harmonis dan intim di antara warga masyarakat melalui personifikasi dari institusi pesantrennya. Bila pada masa lalu kelompok masyarakat yang terjalin secara kultural dan fungsional antara kyai dengan santrinya, secara kualitatif aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan, maka dewasa ini sudah mulai terjadi penurunan dan bahkan menjadi kurang aktif bahkan cenderung sudah bersikap pasif untuk merealisasikan hak-hak kewarganegaraannya. Sebagai warga negara yang cukup patuh terhadap panutannya (kyai), masyarakat menjadi kehilangan arah, baik dalam kehidupan sosial dan keagamaannya. Mitos tentang kota santri menjadi hilang makna. Hak hak kewarganegaraannya baik sipil, sosial maupun aspek lainnya mulai ditinggalkan.

Sikap masa bodoh atau kurang reaktif dan cenderung egoist terhadap pembaharuan telah menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai yang ada pada masyarakatnya. Menurut informan dari kantor bupati sikap tersebut menyulitkan kaum birokrat untuk menjalankan program kerjanya. Dalam konteks itu, dapat dikatakan bila berbagai kelompok sosial yang pernah terbentuk di daerah Kabupaten Pandeglang pada prinsipnya mulai mengalami pergeseran seiring dengan berjalannya waktu ke arah masyarakat yang lebih terbuka terhadap berbagai perubahan. Suatu proses sejarah yang dilalui bersama dengan proses adaptasi baik sosial maupun kultural yang relatif sama, telah memberikan pemahaman yang sama dalam mereka menyikapi proses perubahan yang terjadi di daerahnya.

Secara kultural Pandeglang merupakan suatu daerah yang ada di persimpangan budaya antara budaya sunda dari kesultanan Banten dan budaya jawa yang berasal dari Cirebon. Ikatan kultural kelompok masyarakat Pandeglang relatif lebih bersifat dualistik. Pakem budayanya menjadi tidak terlalu kental, karena dipengaruhi oleh dua kekuatan kebudayaan besar yang ada di Indonesia (Jawa dan Sunda). Kondisi itu menjadikan masyarakat Pandeglang sebagai masyarakat yang tidak berorientasi pada salah satu figur saja dan hal ini memunculkan sifat egois pada masyarakatnya. Sifat egois ini

menyulitkan pemerintah setempat dalam mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pimpinan pemerintahan setempat bahwa nilai-nilai masyarakat daerah Pandeglang ini yang tidak bisa diatur, “mawa karepna sorangan”.<sup>5</sup> Sebetulnya ciri nilai-nilai seperti itu lebih mencirikan kehidupan masyarakat peladang yang cenderung bekerja sendiri, sehingga lebih individualis. Berbeda dengan masyarakat petani yang merupakan pekerjaan dari mayoritas penduduk daerah Pandeglang. Sistem nilai yang terbentuk tidak lagi berdasarkan atas kehidupan mata pencahariannya itu. Seharusnya sistem nilai yang bercirikan kehidupan pertanian lebih melekat pada masyarakat Pandeglang, yang orientasinya pada suatu peradaban bekas kerajaan dalam hal ini kesulitan bercampur dengan peradaban kepagawainan yg dibawa oleh sistem pemerintah kolonial; semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami, dan agama Islam mempunyai pengaruh yang cukup dominan pula (Koentjaraningrat, 1984).

Perubahan selanjutnya terjadi setelah dunia pendidikan berkembang yaitu tidak hanya sekolah di pesantren namun juga sudah dibuka sekolah-sekolah formal yang didirikan pemerintah. Pendidikan formal yang bisa diikuti oleh siapapun (terutama masa reformasi dengan sekolah gratis sampai Sekolah Lanjutan Atas/SLTA) yang semua itu telah membuka peluang bagi mereka yang berpendidikan tinggi untuk naik status sosialnya. Dalam hal ini artinya masyarakat mulai menghargai ilmu pengetahuan, terbukti mereka yang berpendidikan tinggi mulai dihargai dan dijadikan panutan dan pegangan. Pergeseran atas stratifikasi sosial yang terbentuk pun terjadi. Masyarakat mulai memandang para warga terdidik sebagai kelompok sosial atas, sementara kedudukan kyai tetap namun sudah mulai berkurang pengaruhnya.

Melihat pada pergolakan pergeseran yang terjadi pada kelompok sosial yang ada di Kabupaten Pandeglang, semuanya itu

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan informan (bapak Juned) di Kantor Bupati Pandeglang, pada tanggal 29 Mei 2012.

berdampak pula pada hubungan sosial yang terbentuk di antara mereka. Di masa awal pembentukan provinsi cukup ramai terjadi persaingan dalam usahanya untuk mencapai posisi tertentu dalam pemerintahan. Tampak di sini bahwa menjadi orang pemerintah sudah menjadi satu kebutuhan karena juga berdampak pada pengakuan masyarakat atas dirinya dan kelompoknya yang biasanya lebih dihargai. Sementara itu, kelompok yang tampaknya tetap stagnan adalah kelompok petani yang merupakan mayoritas penduduk Kabupaten Pandeglang ini. Kelompok petani secara sosial selalu mengalami eksklusifitas dari kelompok lainnya, karena selain kelompok tersebut selalu jauh dari kekuasaan mereka pun jauh untuk mendapatkan asset dan informasi, sehingga secara sosial mereka selalu terpinggirkan. Padahal dalam setiap program pemerintah kelompok ini justru selalu menjadi kelompok yang jadi sasaran program, baik untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan untuk mendapatkan BLT, dan jenis bantuan lainnya. Dalam hal ini para kelompok yang relatif dominan mempengaruhi ruang gerak kemasyarakatan di Pandeglang bermain untuk kepentingan kelompoknya dengan mengatas namakan kaum lemah tersebut (kelompok petani dan kelompok miskin).

## 2.6 Penutup

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa aspek pendidikan yang ada cukup berkembang di daerah Pandeglang ini, terutama adalah peran pendidikan pesantren yang telah menyatu dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Pandeglang. Dalam hal itu pula, maka unsur-unsur kultural yang dibalut oleh sikap patuh terhadap para kyainya telah menjadi satu tatanan nilai masyarakatnya. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari kurangnya peran pemerintah (*state*) dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Memunculkan suatu perubahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, tidak pernah dapat dihindarkan.

Perubahan merupakan salah satu bagian dari adanya perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. Demikian juga dengan perubahan yang terjadi pada bagian dari masyarakatnya. Terlepas dari

perubahan itu direncanakan atau tidaknya, tetapi perubahan yang terjadi itu telah banyak mempengaruhi sikap dan nilai-nilai sosial yang pernah ada.

Secara umum pengelompokan masyarakat yang terjadi dalam masyarakat Pandeglang adalah dipengaruhi oleh dua faktor penting, pertama faktor tradisional yang berbasiskan keagamaan melalui pesantren-pesantren yang telah dibangun oleh para kyai dan kedua adalah oleh faktor ekonomi yang berperan dalam hal ini adalah pada adanya disparitas pekerjaan yang ditekuni masyarakatnya. Kedua pengaruh ini dalam perkembangannya terjadi dinamika baik sosial-budaya maupun ekonomi dan politik sehingga menempatkan kelompok petani selalu menjadi kelompok yang berada pada strata rendah dinilai tidak berpengetahuan atau tidak berpendidikan, maka secara sosial mereka tereksklusikan dari kancah percaturan kehidupan sosial-politik, bahkan ekonomi. Dan kelompok ini selalu menjadi kelompok yang marjinal.

Pergumulan untuk menjadi eksis dalam wajah baru menjadi tujuan hidup seseorang atau sekelompok orang. Pengaruh pendidikan telah memberikan dampak terhadap eksistensi kelas sosial seseorang atau kelompok yang lebih cair sifatnya, sehingga mudah sekali bagi mereka atau kelompok tersebut untuk bergeser, sehingga menjadi tidak tepat lagi bila persoalan kelas hanya selalu ditarik pada satu sisi saja seperti berdasarkan keturunan misalnya, atau seperti contoh kyai yang dominan di daerah ini misalnya Pada masa lalu peran kiyai dan ustadz sangat besar bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Di bidang pendidikan contohnya kebanyakan orang tua begitu menghormati dan segan pada para ustadz atau kyai di daerahnya sampai-sampai ada istilah *holy mountain* “guru-guru suci ada di Pandeglang”. sehingga mereka mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu di pondok pesantren yang berada di bawah naungan ustadz atau kyai tersebut. Kondisi itu pada satu sisi dapat menjadi satu alat bagi adanya sikap kebersamaan untuk kepentingan kemasyarakatan. Pada sisi lain dapat menjadikan suatu ketergantungan yang akan memperparah tatanan sosial yang ada, karena memunculkan sikap ketergantungan yang pada

gilirannya menjadi tidak kreatif atau malas untuk menimba pengetahuan yang dapat melebihi “guru’nya. Ada keterbatasan sosial seperti rasa segan atau tidak mampu.

Dilihat dari aspek sosial ekonomi, umumnya para kyai termasuk pada masyarakat yang cukup mampu/kaya. Rata-rata mereka memiliki tanah dan lahan sawah yang digarap secara bersama-sama dengan para santrinya. Dengan demikian kebanyakan orang tua di Pandeglang lebih suka menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren dengan alasan agar anaknya dapat menjadi orang yang berhasil seperti kyainya. Dengan belajar di pesantren, orang akan menjadi baik dan berguna karena mereka dibentengi oleh etika keagamaan yang selalu harus berbuat baik dan menjauhi kebatilan dan dapat menjadi ustadz atau kyai seperti gurunya. Sampai dewasa ini prototipe seperti itu masih menjadi satu keinginan dan harapan bagi anak-anak di Pandeglang.

Dala kaitannya dengan peta kelompok sosial yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, maka bila dikaitkan dengan agama, kelompok kyai dan ulama adalah merupakan kelompok elite dan menduduki strata tinggi dalam masyarakat. Peran kelompok ini sebagai pendorong pembangunan dan pemersatu kelompok cukup besar. Sementara itu, kelompok yang juga menduduki tempat sebagai kelompok atas juga adalah dari kelompok birokrasi artinya mereka yang kegiatannya adalah mengatur jalannya pemerintahan, baru kemudian kelompok masyarakat lainnya yang termasuk pada golongan bawah. Sementara itu, kelompok lain yang mendapatkan imbas dari peran kyai adalah para santri yang mesantren di tempat kyai. Adapun para pedagang, dan terakhir adalah para petani mendapat posisi “ambang” artinya mereka bersifat fluktuatif, adakalanya mereka dapat menyeimbangkan diri dengan kelompok ulama dan kyai, tetapi kebanyakan adalah menjadi kelompok yang marjinal.

Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan dari kelompok-kelompok yang ada di Pandeglang tersebut, yaitu seperti halnya kelompok kyai, birokrat pemerintah, kelompok berpendidikan, dan juga kelompok yang secara ekonomi diakui keberadaannya karena

keberhasilan di bidang ekonominya dan kelompok masyarakat yang didominasi oleh jenis pekerjaan sebagai petani. Hubungan yang saling melengkapi terjadi terutama dalam upayanya untuk menyikapi kebutuhan bersama, seperti misalnya dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah, dan program-program yang dibuat pemerintah untuk pelayanan kepada warganya. Dalam hal ini peran pemerintah cukup besar dalam usahanya untuk memberdayakan warga masyarakatnya. Hak dan kewajiban terakomodir selama memenuhi kepentingan bersama. Dan konflik dapat terjadi begitu kepentingan salah satu pihak tidak terakomodir.

Pengaruh reformasi telah memunculkan sikap-sikap persaingan terbuka di antara kelompok sosial yang ada tersebut. Tidak ada lagi suatu rasa tenggang rasa dalam mereka memperebutkan suatu keinginan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan cara-cara “kasar” dan bahkan tidak tepat. Politik uang, tekanan dalam bentuk demo sering dilontarkan.

Melihat fenomena dinamika kewarganegaraan di Kota Pandeglang dan peran kelompok sosial dominan (kyai, pengusaha, birokrat) yang cenderung individualistik, tampaknya menemukan tantangan bagi pengembangan kewarganegaraannya agar dapat memperhatikan arti penting akan kesadaran sipil (*civic consciousness*) yang dihadapkan dengan individualisme. Pandeglang yang sedang giat membangun untuk mengejar ketertinggalannya selama ini perlu menumbuhkan budaya “progresif” dan etos kerja positif bagi masyarakatnya. Berkembangnya sikap individualisme hanya akan mengarahkan masyarakat pada kepentingan personal dan material saja.

## Daftar Pustaka

- BAPPEDA dan BPS. 2010, *Pandeglang Dalam Angka*, Pandeglang, Banten.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Sakernas Tahun 2009-2010*.
- Fatimah, Nyayu (editor), 2011. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Kasus Kelompok Pekerja Profesional di Kota Manado dan Kota Surabaya*. Jakarta: LIPI Press.
- Furchan, Arief. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Penerbit Gema Media.
- Hakim, Lukman. 2006. *Banten: Dalam Perjalanan Jurnalistik*, Banten Heritage, Divisi.
- Pemda Kabupaten Pandeglang. 2010. *Profil Daerah dan Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang*.
- Kartodirdjo, Sartono, tanpa tahun, *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. 1986. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jembatan.
- Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sanderson. Stephen K, 2003, “*Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*”, edisi kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, 1992, “*Kyia dan Jawara di Banten*”, *Tesis Master*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Zaenuddin, Dundin (editor), 2010. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan: Studi Kasus di Bandung dan Semarang*. Jakarta: LIPI Press.



**Internet:**

<http://journal.uui.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/187/176>) diakses 8 mei 2012.

Sumber: <http://silatindonesia.com/2009/03/menapaki-jejak-sang-jawara-entitas-%E2%80%9Csubculture-of-violence%E2%80%9D-masyarakat-banten-dan-jawa-bagian-barat/> diakses tgl 8 mei 2012.



## BAB III

# DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL DI ERA OTONOMI DAERAH: KASUS KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh Dede Wardiat

### 3.1 Pengantar

**K**etika salah seorang tokoh masyarakat setempat diminta untuk menggambarkan kondisi sosial di Pandeglang saat ini, tokoh masyarakat tersebut menyatakan:

*“Jaman ayeuna, Paraji geus teu sakti, Dukun geus teu ampuh,  
Nagara geus teu komara, rakyat geus teu boga kaera”.*

Pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, bukan saja menggambarkan hilangnya peran sosial tradisional dari kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga menggambarkan kondisi delegitimasi negara dalam pandangan masyarakatnya. Paraji dan Dukun memiliki peran sosial yang strategis dalam masyarakat tradisional, paraji berperan dalam menolong orang yang melahirkan, sementara dukun berperan dalam penyembuhan orang sakit serta memberikan petunjuk guna ketentraman batiniah warga masyarakat dalam menghadapi hidup yang penuh ketidak pastian. Sementara itu, negara yang seharusnya melindungi segenap warga telah kehilangan legitimasi dan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Seiring dengan itu kehidupan rakyat dalam bernegara seharusnya dilandasi oleh norma-norma sosial yang mengikat, namun kemudian kehilangan adabnya demi kepentingan-kepentingan yang bersifat instan.

Bila kelompok-kelompok sosial dilihat dalam konstelasi dengan negara (pemerintah), pola interaksi yang terjadi tampaknya

bersifat fluktuatif tergantung dari struktur kekuasaan termasuk bentuk negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Dalam konteks ini masyarakat Pandeglang memiliki sejarah yang panjang, daerah itu telah lama menjadi wilayah administratif pemerintahan. Dalam Staatsblad Nederlands Indie No. 81 tahun 1828, wilayah Pandeglang (Caringin) ditetapkan sebagai Kabupaten Barat di bawah Keresidenan Banten. Dalam perkembangan lebih lanjut, sejak awal kemerdekaan hingga Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, Pandeglang tetap menjadi wilayah kabupaten. Dalam setiap fase sejarah pola interaksi antara masyarakat (termasuk kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya) dengan negara (pemerintah) relatif berbeda, terlepas dari perbedaan yang ada, pola interaksi yang terbentuk pada setiap fase sejarah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pola interaksi yang terbentuk pada setiap fase sejarah harus menjadi seting sosial dalam memahami sikap dan perilaku kelompok-kelompok sosial dalam bernegara. Dalam tulisan ini konstruksi pola interaksi yang terbentuk dalam setiap fase sejarah tidak menjadi fokus pembahasan, hal itu hanya dijadikan dasar untuk menjelaskan sikap dan perilaku kelompok-kelompok sosial yang ada.

Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah merubah paradigma kehidupan bernegara, dominasi negara (*state*) bergeser ke arah penguatan kemasyarakatan. Peluang masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terbuka lebar, berbagai ketentuan normatif memberikan ruang yang kondusif untuk itu. Namun demikian, di tengah *Civil society* yang belum mapan, peran masyarakat lebih banyak diwakili oleh elit masyarakat (*societal actors*). Dengan kondisi seperti ini, pengambilan keputusan bahkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum cenderung lebih banyak diwarnai oleh koalisi dan tawar-menawar kepentingan antara elit masyarakat (*societal actors*) dengan para elit penyelenggara negara (*state actors*). Keadaan ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan dalam banyak kasus koalisi dan tawar-menawar kepentingan antara elit masyarakat (*societal actors*) dengan para elit penyelenggara

negara (*state actors*) cenderung lebih nampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila kondisi makro ini dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Pandeglang, lalu bagaimana peran kelompok-kelompok tradisional yang telah lama ada di tengah kondisi sebagaimana dideskripsikan di atas, apakah peran mereka semakin dominan atau justru terdegradasi dari fungsi katalisnya? Pembahasan dalam tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut, agar pembahasan lebih bersifat komprehensif, uraian dalam tulisan ini diawali dengan pemetaan kelompok sosial yang ada. kelompok sosial dalam tulisan ini akan diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kategori mata pencaharian, baik mata pencaharian yang secara tradisional sudah ada maupun mata pencaharian baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam konstelasinya dengan kewarganegaraan, pemetaan kelompok sosial berdasarkan mata pencaharian ini sangat penting sebab dengan pemetaan ini kemudian dapat diketahui kelompok sosial mana yang tereksklusi secara ekonomi ketika menjalin relasinya dengan negara (pemerintah). Namun demikian, fokus perhatian dalam tulisan ini akan diarahkan pada kelompok-kelompok sosial yang dominan, yakni kelompok petani yang merupakan mayoritas penduduk Pandeglang serta pemborong/kontraktor yang merupakan mata pencaharian baru di luar sektor pertanian. Selain katagori berdasarkan mata pencaharian, tulisan ini juga akan membahas kelompok-kelompok sosial yang memiliki peran tradisional dalam kultur masyarakat setempat. Dalam konstelasinya dengan kewarganegaraan, kelompok ini memegang peranan penting, sebab kelompok sosial tersebut menjadi sub kultur yang memberikan identitas kultural pada masyarakat setempat. Pembahasan tentang kelompok sosial yang bersifat tradisional ini akan difokuskan pada kelompok Jawara dan Kyai.

### **3.2 Tuntutan Pemekaran Wilayah di Tengah Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang berada di ujung Pulau Jawa, dalam percaturan sejarah Kesultanan Banten, daerah

ini merupakan daerah yang dijadikan basis pertahanan untuk melawan VOC. Pada saat Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad, kekuatan kesultanan dipencar ke beberapa pelosok, dalam konteks itu wilayah Gunung Karang dan Pantai di Pandeglang menjadi basis pertahanan. Dilihat dari sisi praktek penyelenggaraan pemerintahan, Pandeglang adalah salah satu daerah di wilayah Banten yang sudah relatif lama menjadi wilayah administratif pemerintahan. Dalam Staatsblad Nederlands Indie No. 81 Tahun 1828, wilayah Pandeglang (Caringin) ditetapkan sebagai Kabupaten Barat di bawah Keresidenan Banten. Dalam perkembangan lebih lanjut, sejak awal kemerdekaan hingga Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, Pandeglang tetap menjadi wilayah Kabupaten.

Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Serang di sebelah utara dan Kabupaten Lebak di sebelah timur. Sementara itu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Luas wilayah daratan Kabupaten Pandeglang sekitar 2.747 km<sup>2</sup>, atau sekitar 29,98% dari luas keseluruhan Provinsi Banten. Pada tahun 2009, penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai sekitar 1.149.064 jiwa terdiri dari 588.126 laki-laki dan 560.938 perempuan.<sup>1</sup> Menurut nara sumber dari Banten Heritage, bila dilihat dari segi karakter dan respon terhadap pembaharuan, secara umum masyarakat Pandeglang dapat dikelompokkan dalam tiga *cluster*. *Cluster pertama* adalah tipologi masyarakat yang relatif lebih cepat menerima pembaharuan, bahkan mampu mengembangkan guna kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Tipologi masyarakat seperti ini bila dikaitkan wilayah tempat tinggal, sebagian besar adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah Pandeglang Utara dan Pandeglang Barat Laut, antara lain masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan: Cadas Sari; Karang Tanjung; Pandeglang; Maja Sari; Cimanuk; Cipeucang; Cisaat; Saketi; Menes; Pagelaran; Cikedal; Labuan; Carita. Para penduduk di wilayah tersebut kebanyakan pekerja urban yang pulang ke kampungnya seminggu sekali, mereka biasanya bekerja di Jakarta,

---

<sup>1</sup>Lihat Profil Daerah & Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2010.

Tangerang, baik di sektor formal ataupun informal. Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Pandeglang, pada pemilu yang lalu jumlah pekerja urban ini mencapai sekitar 470.000. orang. *Cluster kedua* adalah tipologi masyarakat yang relatif ulet atau memiliki etos kerja yang sangat bagus dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Tipologi masyarakat seperti ini bila dikaitkan wilayah tempat tinggal, sebagian besar adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah Pandeglang Barat, antara lain masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan: Panimbang; Sobang; Cigeulis; Cikeusik; Sukaresmi. Mereka kebanyakan pendatang dari Indramayu dan Cirebon yang datang melalui program transmigrasi lokal pada tahun 1967 hingga tahun 1970. Di lingkungan masyarakat yang ada di daerah-daerah kecamatan Panimbang, Sobang dan Sukaresmi masih menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa ibu. Kamajuan dalam bidang pertanian di wilayah ini dipicu oleh pelaksanaan program pembuatan irigasi dan pencetakan sawah pada tahun 1967 hingga tahun 1970 yang dikenal dengan Proyek Nasional Teluk Lada. Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan keuletan dan etos kerja yang tinggi kemudian masyarakat dapat mengolah areal rawa menjadi sawah, seiring dengan itu tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. *Cluster ketiga* adalah masyarakat yang terpengaruh dengan mental buruh perkebunan karet, mereka kebanyakan adalah bekas buruh perkebunan karet atau keturunan dari buruh perkebunan karet. Sebagaimana halnya buruh perkebunan karet pada umumnya, karakter mereka lebih pasrah (*nrimo*) terhadap kondisi yang ada, mereka cenderung lebih senang menerima upah dari pihak lain dari pada harus mengolah sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Tipologi masyarakat seperti ini bila dikaitkan wilayah tempat tinggal, sebagian besar adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah Pandeglang Selatan, antara lain masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan: Munjul; Cibaliung; Cimanggung; Cibitung; Bojong; Sindangresmi; Patia; Picung.

Terlepas dari berbagai tipologi dalam cluster sebagaimana dideskripsikan di atas, secara administratif Kabupaten Pandeglang

terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 322 desa. Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas dengan wilayah yuridiksi mencapai 322,76 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan wilayah yuridiksi sekitar 15,66 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Bila melihat jumlah Desa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Kelurahan, tampaknya sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan daerah pedesaan. Menurut salah seorang nara sumber dari BAPPEDA, Kabupaten Pandeglang, wilayah Kabupaten Pandeglang relatif luas. Sementara itu, pembangunan infra struktur berupa jalan aspal belum merata. Oleh karena itu, tingkat mobilitas masyarakat di pelosok pedesaan relatif rendah. Sebagai contoh misalnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sumur, masyarakat di wilayah tersebut memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk mencapai kota Pandeglang, hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang rusak. Dengan kondisi seperti ini, banyak daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh pelayanan pemerintah kabupaten, terlebih-lebih posisi Ibukota Kabupaten Pandeglang berada di ujung perbatasan dengan Kabupaten Serang, sehingga mempersulit aksesibilitas bagi daerah-daerah dipelosok. Akibat keadaan ini, daerah-daerah pelosok seperti Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cigeulis, Angsana, Munjul dan Cikeusik ingin membentuk Kabupaten tersendiri dengan Ibukota di Cibaliung. Selain Issu tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung, muncul juga desakan untuk membentuk Kabupaten Caringin, wilayah kabupaten tersebut meliputi beberapa kecamatan, yakni Labuan, Carita, Pagelaran, Jiput, Cikendal dan Sukaesmi, Panimbang, Sobang dan Menes. Menurut salah seorang nara sumber, desakan untuk membentuk Kabupaten Caringin tersebut dipicu oleh anggapan beberapa elit masyarakat yang berpandangan bahwa selain Kota Pandeglang, Labuan menjadi pusat perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, kontribusi yang relatif besar tersebut tidak sebanding dengan tingkat pembangunan yang diselenggarakan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, bila memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang maka

---

<sup>2</sup>*Ibid*



percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Menanggapi munculnya desakan pemekaran wilayah tersebut, salah seorang nara sumber dari BAPPEDA menyatakan bahwa bila pemekaran menjadi tuntutan masyarakat dan diarahkan pada kepentingan kemajuan daerah, bukan untuk kepentingan elit masyarakat tertentu, sebaiknya tidak melakukan pemisahan kecamatan untuk membentuk beberapa kabupaten baru seperti isu yang diusung saat ini, akan tetapi memindahkan Ibukota Kabupaten Pandeglang ke Panimbang. Sementara itu, Pandeglang diusulkan untuk menjadi Kota. Dengan cara seperti ini perkembangan wilayah akan lebih cepat tumbuh, sebab kedua daerah (Panimbang dan Kota Pandeglang) yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang diakomodasikan ke dalam wilayah administratif yang berbeda, yakni kabupaten dan kota. Dengan pembangunan Tanjung Lesung sebagai daerah wisata, saat ini memang wilayah Panimbang lebih cepat tumbuh dibanding daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya Panimbang menjadi Ibukota Kabupaten Pandeglang. Terlepas dari solusi yang diajukan, dilihat dalam prespektif yang lebih luas, muncul desakan untuk membentuk kabupaten baru mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kondisi ini tampaknya yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Pandeglang sebagai daerah otonom di lingkungan provinsi yang baru memisahkan diri dari Jawa Barat.

### **3.3 Dinamika Kelompok Sosial**

Sebagaimana telah disinggung di atas, kelompok sosial dalam tulisan ini akan diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kategori mata pencaharian, baik mata pencaharian yang secara tradisional sudah ada maupun mata pencaharian baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam konstelasinya dengan kewarganegaraan, pemetaan kelompok sosial berdasarkan mata pencaharian ini sangat penting sebab dengan pemetaan ini kemudian dapat diketahui kelompok sosial mana yang terklusi secara ekonomi ketika menjalin relasinya dengan negara

(pemerintah). Namun demikian, fokus perhatian dalam tulisan ini akan diarahkan pada kelompok-kelompok sosial yang dominan, yakni kelompok petani yang merupakan mayoritas penduduk Pandeglang serta pemborong/ kontraktor yang merupakan mata pencaharian baru di luar sektor pertanian. Selain katagori berdasarkan mata pencaharian, tulisan ini juga akan membahas kelompok-kelompok sosial yang memiliki peran tradisional dalam kultur masyarakat setempat. Dalam konstelasinya dengan kewarganegaraan, kelompok ini memegang peranan penting, sebab kelompok sosial tersebut menjadi sub kultur yang memberikan identitas kultural pada masyarakat setempat. Pembahasan tentang kelompok sosial yang bersifat tradisional ini akan difokuskan pada kelompok Jawara dan Kyai.

### 3.3.1 Kelompok Petani dan Pemborong

Dilihat dari segi lapangan usaha atau mata pencaharian penduduk, komposisi penduduk Kabupaten Pandeglang tampak dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Komposisi Penduduk yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin

Lapangan Usaha	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1. Pertanian	47,79	36,36
2. Industri Pengolahan	6,39	10,12
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	16,76	36,01
4. Jasa Kemasyarakatan	11,44	16,11
5. Lainnya*)	17,62	1,4
Jumlah (jiwa)	314.511	159.890

**Sumber:** BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2010)

Dalam tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki lapangan usaha di sektor pertanian relatif jauh lebih banyak dibanding sektor lainnya. Bukan saja secara kuantitatif jumlah petani ini relatif banyak, namun juga sebagian dari mereka yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang relatif luas menjadi elit masyarakat setempat. Menurut salah seorang nara

sumber, dari dahulu hingga kini, pemilik lahan pertanian yang luas, atau pemilik perkebunan karet, sawit atau nilam menjadi elit masyarakat. Sumbangan (*share*) sektor primer (*agriculture*) terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang relatif dominan, pada tahun 2000 sumbangan sektor primer terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang mencapai 39,28%. Sementara itu, pada tahun 2010 sumbangan sektor primer terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang mencapai 30,39%.<sup>3</sup> Sekalipun dari tahun 2000 hingga tahun 2010 sumbangan sektor primer terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan, namun dibanding sumbangan sektor lain, sumbangan sektor pertanian masih tetap dominan. Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha serta sumbangan sektor pertanian terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan, maka mayoritas masyarakat Kabupaten Pandeglang dapat dikategorikan sebagai masyarakat agraris.

Bila tipikel masyarakat dikaitkan dengan berbagai argument yang melatarbelakangi tuntutan pembentukan kabupaten baru seperti telah disinggung di atas, tampaknya kelompok masyarakat petani ini yang banyak tidak terjangkau oleh pelayanan publik serta pemerataan pembangunan. Petani dilihat dalam konstelasinya dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang, tampaknya kelompok petani ini belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah tersebut. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang difokuskan pada pariwisata sebagai pengungkit dan pembangkit ekonomi daerah. Sementara itu, agro wisata diperkuat untuk menarik wilayah belakang. Sekalipun ada upaya untuk memperkuat agro industri, namun itu baru dalam tahap perencanaan, sedangkan fokus utama tetap pada sektor para wisata. Oleh karena itu, Kecamatan Panimbang yang memiliki objek wisata pantai di Tanjung Lesung jauh lebih berkembang dibanding daerah-daerah lain yang menjadi basis pertanian. Sekalipun kelompok petani termarjinalisasi oleh arah kebijakan pembangunan daerah, namun sikap para petani cenderung

---

<sup>3</sup>Lihat Laporan Perekonomian Kabupaten Pandeglang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, 2010.

pasif. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, di tengah hingar bingarnya tuntutan berbagai kelompok kepentingan terhadap pemerintah daerah, terutama kelompok-kelompok kepentingan yang ada diperkotaan, seringkali mereka memaksakan kepentingannya dengan cara berdemonstrasi, namun para petani hampir tidak pernah melibatkan diri. Kepentingan-kepentingan mereka seringkali diusung oleh berbagai kelompok hanya sebagai komoditas politik untuk meningkatkan nilai tawar kelompok yang bersangkutan dalam bertransaksi dengan penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut nara sumber dari Banten Haritage, sikap pasif para petani sebenarnya disebabkan karena struktur kekuasaan sejak dahulu yang tidak pernah memberi ruang untuk bersikap partisipatif terhadap mereka. Pada masa Kesultanan Banten, para petani cenderung dibiarkan selama mereka memberikan janji setia dan mengirimkan hasil panen sebagai “seba”. Pada masa kolonial Belanda, para petani hanya dijadikan buruh perkebunan, ketergantungan mereka terhadap perkebunan yang ada dipelihara secara permanen guna menjamin berbagai kepentingan kaum kolonial. Sementara itu, pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, sekalipun banyak program yang diarahkan kepada kelompok petani, namun secara politis kelompok ini dituntut untuk memberikan imbalan berupa suara dalam pemilu guna mendukung Golkar sebagai partai penguasa, terlepas mereka suka atau tidak terhadap partai tersebut. Bila demikian keadaannya, wajar jika saat ini kelompok petani bersikap pasif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, sekalipun mereka termarjinalisasi oleh kebijakan tersebut.

Menurut nara sumber dari kalangan petani, kemajuan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Pandeglang relatif lamban, bahkan cenderung tidak mengalami perubahan, baik jenis komoditas maupun pola pertanian dan perkebunan yang diterapkan para petani. Berbagai hasil pertanian dari para petani hanya dijual ke pasar-pasar terdekat yang ada di wilayah kecamatan di mana mereka tinggal, hampir jarang terjadi petani di pedesaan menjual hasil pertaniannya ke luar daerah secara langsung. Dengan pola pemasaran hasil pertanian seperti ini, kemudian tumbuh pasar-pasar besar yang menjadi pusat

kegiatan ekonomi di ibukota kecamatan. Saat ini ada sekitar enam buah pasar besar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dari berbagai desa di wilayah Pandeglang, pasar-pasar besar tersebut yakni:

- Pasar Kecamatan Pandeglang
- Pasar Kecamatan Menes
- Pasar Kecamatan Labuan
- Pasar Kecamatan Panimbang
- Pasar Kecamatan Cibaliung
- Pasar Kecamatan Picung

Barang-barang hasil pertanian yang telah ditampung di pasar-pasar tersebut, kemudian di jual oleh para pedagang ke daerah daerah lain, seperti Jakarta dan Tangerang. Sementara itu, para petani membeli berbagai kebutuhan, baik untuk pertanian maupun kebutuhan hidup sehari-hari di pasar-pasar yang ada di Ibukota Kecamatan tersebut. Pasar Kecamatan sebagai pusat kegiatan ekonomi cenderung menembus batas-batas wilayah yuridiksi kecamatan yang bersangkutan, satu kecamatan yang memiliki pasar besar biasanya menjadi pusat kegiatan ekonomi kecamatan-kecamatan lain yang ada disekelilingnya. Pasar Pandeglang selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Pandeglang juga melingkupi Kecamatan-Kecamatan: Koroncong; Cadas sari; Karang Tanjung; Majasari; Kaduhejo; Mandalawangi; Banjar; Mekarjaya; Cimanuk; Cipeucang. Pasar Menes selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Menes juga melingkupi Kecamatan-Kecamatan: Saketi; Cisata; Pulosari; Cikendal dan Jiput. Pasar Labuan selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Labuan juga melingkupi Kecamatan-Kecamatan: Carita; Pagelaran; Patia dan Sukaresmi. Pasar Panimbang selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Panimbang juga melingkupi Kecamatan-Kecamatan: Sobang; Angsana; Munjul dan Sindangresmi. Pasar Cibaliung selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Cibaliung juga melingkupi Kecamatan-Kecamatan: Cigeulis; Cijeusik; Cibitung; Cimanggu dan Sumur. Pasar Picung selain menjadi pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Picung juga melingkupi Kecamatan Bojong. Namun karena lokasi pasar Picung ini

berada di pinggir perbatasan Kabupaten Lebak, sehingga Pasar picung ini juga melingkupi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak seperti Kecamatan Banjarsari; Cileles dan Gunung Kencana. Jaringan ekonomi seperti ini telah mendorong pengembangan wilayah yang secara alamiah bertumpu pada Ibukota-Ibukota Kecamatan yang memiliki pasar besar, sehingga kesenjangan antar daerah sulit dihindarkan.

Sekalipun pemasaran komoditas pertanian dari petani masih melalui pasar-pasar di Ibukota Kecamatan, kesinambungan penjualan dengan harga yang relatif stabil masih terjamin. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut kesinambungan pemasaran serta stabilitas harga hasil pertanian akan menghadapi tantangan yang berat. Bila program nasional tentang “Jembatan Selat Sunda” selesai dibangun, diperkirakan hasil-hasil pertanian dari seluruh wilayah Sumatra akan dengan cepat masuk ke wilayah Tangerang dan Jakarta, oleh karenanya persaingan di antara komoditas hasil pertanian dari kedua wilayah tersebut tidak dapat dihindarkan, terlebih-lebih jenis komoditas hasil pertanian dari kedua wilayah tersebut relatif sama. Jika hal ini terjadi, maka kelompok petani yang termarjinalisasi oleh kebijakan lokal akan semakin terpuruk dan masuk ke dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, salah satu cara yang harus ditempuh untuk menyelamatkan para petani dan sekaligus menangkap peluang yang akan datang yaitu pemerintah daerah harus mendorong tumbuhnya berbagai industri pengolahan hasil pertanian di wilayah Pandeglang. Dengan demikian, maka berbagai komoditas hasil pertanian dari wilayah Sumatra dapat ditampung di Pandeglang untuk diolah menjadi barang jadi, hasil olahan inilah yang kemudian di pasarkan kedaerah lain. Dengan cara ini maka Pandeglang akan memperoleh nilai tambah dari komoditas pertanian yang dihasilkan daerah lain.

Di luar sektor pertanian, akhir-akhir ini berkembang jenis usaha baru yakni pemborong atau kontraktor. Sekalipun jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam usaha ini relatif sedikit, namun jenis usaha ini dipandang prestisius dan menjadi simbol jenis usaha modern

ditengah masyarakat yang agraris. Menurut salah seorang nara sumber, jenis usaha ini berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, karena melihat segelintir orang yang berhasil menjadi pemborong dengan mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah kabupaten. Dengan mengacu pada keberhasilan segelintir orang tersebut, kemudian banyak orang yang mendirikan perusahaan dengan harapan mendapat borongan dari proyek pemerintah. Warga masyarakat yang mendirikan perusahaan tidak terbatas pada anak-anak juragan perkebunan yang memiliki modal, tetapi juga banyak diantaranya yang tidak memiliki modal sama sekali. Menurut nara sumber dari kalangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Pandeglang, dari sekitar 500 perusahaan yang terdaftar, hanya 25% yang memiliki modal permanen, selebihnya hanya perusahaan papan nama yang mencari-cari pinjaman modal tatkala mendapat borongan proyek dari pemerintah. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang ada, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor/pemborong hanya memperebutkan sumber daya ekonomi yang berada dalam kontrol pemerintah daerah, terutama proyek-proyek pembangunan fisik. Untuk mendapat proyek dari pemerintah daerah berbagai cara dilakukan oleh para kontraktor, jaringan kekerabatan, ikatan saudara, asosiasi perusahaan atau partai politik dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh proyek. Bahkan sebagian kontraktor memanfaatkan identitas kultural kejawaraan guna memperoleh proyek. Persaingan tajam sering terjadi di kalangan mereka, kadangkala berakhir di ujung konflik. Menurut salah seorang pejabat Kabupaten Pandeglang, terjadinya hubungan yang disharmonis antara Wakil Bupati dengan Bupati saat ini tidak terlepas dari masalah distribusi proyek kepada para pengusaha setempat. Pihak Asosiasi Pengusaha setempat menghendaki agar pembagian proyek dari pemerintah daerah diatur oleh mereka, demikian juga fee untuk para pejabat dari setiap proyek akan diatur oleh Asosiasi Pengusaha. Namun demikian, Bupati menghendaki diadakan lelang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga transparansi dan keadilan dapat ditegakkan. Di tengah konflik yang terjadi, pihak Asosiasi Pengusaha berlindung pada

Wakil Bupati dan Wakil Bupati sendiri mendukung gagasan pihak Asosiasi, karena memang di samping memiliki hubungan personal yang relatif dekat dengan organisasi itu, dahulu Wakil Bupati sendiri adalah seorang kontraktor.

Di atas telah disinggung bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang ada hanya memperebutkan sumber daya ekonomi yang berada dalam kontrol pemerintah daerah, terutama proyek-proyek pembangunan fisik. Oleh karena itu, jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor/pemborong relatif banyak. Menurut salah seorang pengusaha, saat ini perusahaan kontraktor yang bergerak dalam jasa konstruksi di Pandeglang ada sekitar 267 perusahaan, dari keseluruhan perusahaan tersebut hanya 10 perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sisanya berbentuk CV. Seorang pengusaha biasanya tidak hanya memiliki satu perusahaan, mereka bisa memiliki dua sampai lima perusahaan, sekalipun itu hanya berupa kepemilikan akte pendirian perusahaan semata. Saling sewa-menyewa perusahaan untuk pendamping atau pemenang tender sudah biasa dilakukan di antara mereka, bila perusahaannya disewa biasanya pemilik perusahaan mendapat *fee* dari pihak penyewa. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan yang ada mendapat proyek dari pemerintah daerah, hanya mereka yang memiliki koneksi kuat di lingkungan pemerintah daerah yang sering mendapat proyek. Seringkali terjadi proyek yang didapat oleh perusahaan pemenang tender di sub kontrakan kembali pada perusahaan lain. Sementara itu, pemenang tender hanya mendapatkan *fee* dari perusahaan sub kontraktor yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan di antara mereka. Menurut salah seorang nara sumber, bila dilihat dari segi penghasilan, kebanyakan pemborong tersebut hanya memiliki uang pada saat pembayaran termin pertama dari proyek yang didapat, setelah itu mereka terpengang-pantang lagi mencari pinjaman. Sering terjadi pekerjaan tidak dapat diselesaikan, padahal pembayaran setiap termin sudah diambil, akhirnya pengusaha tersebut berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, fenomena munculnya



pemborong/kontraktor di Pandeglang merupakan lompatan aktifitas dari lingkungan agraris kedalam sektor modern. Namun demikian, untuk itu kapasitas mereka belum memadai, profesionalisme sebagai prasyarat mutlak dinafikan demi mengejar keuntungan sesaat. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi setempat. Oleh karena itu, kemudian menjadi ajang persaingan di antara mereka. Dalam upaya memenangkan persaingan tersebut tidak hanya koneksitas yang dimanfaatkan, tetapi juga identitas kultural digunakan untuk memaksakan kepentingan mereka.

### **3.3.2 Organisasi Masyarakat dan LSM**

Menurut catatan Badan Kesbangpol dan Linmas, Kabupaten Pandeglang jumlah organisasi masyarakat yang tercatat saat ini ada sekitar 76 oraganisasi, kegiatan organisasi masyarakat tersebut sangat beragam, mulai dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan, kepemudaan, olahraga hingga himpunan Legiun Veteran Perang Dunia Ke II. Menurut salah seorang nara sumber dari Badan Kesbangpol dan Linmas, Kabupaten Pandeglang, di instansinya catatan tentang jumlah organisasi masyarakat tersebut dipisahkan dengan catatan tentang jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di luar organisasi masyarakat yang tercatat, jumlah LSM yang tercatat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang saat ini sekitar 95 organisasi. Dilihat dari tahun pendiriannya, seluruh LSM tersebut rata-rata didirikan di atas tahun 1999, hal ini mengindikasikan bahwa secara ideal pendirian LSM tersebut pada dasarnya merupakan respon masyarakat terhadap konsolidasi demokrasi yang terjadi pasca reformasi. Seperti halnya organisasi masyarakat yang lain, fokus kegiatan LSM ini sangat beragam, mulai dari pemberdayaan masyarakat, konservasi lingkungan, gerakan anti narkoba, gerakan anti korupsi hingga pemantau penyelenggaraan pemerintah. Mengingat banyaknya jumlah serta beragamnya kegiatan organisasi masyarakat dan LSM, dalam tulisan ini hanya akan membahas satu organisasi masyarakat dan satu LSM. Organisasi masyarakat yang menjadi fokus

kajian dalam tulisan ini adalah Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB), organisasi ini menarik untuk dibahas sebab para anggotanya terdiri dari jawara yang mewakili sub kultur Pandeglang secara keseluruhan. Sementara itu, LSM yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM), organisasi ini menarik untuk dibahas karena sebagai sebuah forum komunikasi kegiatannya merefleksikan kegiatan LSM secara keseluruhan.

### **3.3.3 Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB)**

Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) didirikan tahun 1998 oleh para tokoh dari Banten diantaranya Prof. DR. Dudung Sugriwa, Endoh Sigriwa dan Ata Sugriwa. Organisasi ini pada awalnya didirikan di Jakarta dengan tujuan untuk mempersatukan potensi orang-orang Banten yang ada di luar, namun dalam perkembangan selanjutnya para anggotanya tidak hanya terdiri dari orang Banten semata, akan tetapi banyak anggota dari orang di luar Banten. Saat ini BPPKB sudah menjadi organisasi yang memiliki ruang lingkup Nasional, sudah banyak didirikan Dewan Pimpinan Cabang di daerah-daerah lain, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Sumatra. Menurut Wakil Sekretaris Jendral DPP BPPKB, saat ini jumlah keseluruhan anggota mencapai sekitar delapan juta orang.<sup>4</sup>

BPPKB Cabang Pandeglang merupakan bagian dari BPPKB yang ada di pusat (Jakarta), menurut salah seorang nara sumber, BPPKB Cabang Pandeglang sudah tiga kali melakukan pergantian kepengurusan dan pemilihan ketua cabang. Dua ketua terdahulu adalah laki-laki, namun ketua cabang saat ini dijabat oleh seorang perempuan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pandeglang, jumlah anggota saat ini sekitar 10.000 orang, sebagian besar di antara mereka adalah para jawara dari setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>4</sup>Lihat Kompas Indonesia, *BPPKB Banten, Ormas Terbina dan Membina*, 30 April, 2012.

Oleh karena itu, dahulu organisasi ini terkesan sebagai organisasi para preman. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya organisasi ini sedang melakukan metamorfosa dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang lucu, sehingga kesan sebagai organisasi preman menjadi sirna. Untuk itu dilakukan perberdayaan para anggota dengan membuka berbagai kegiatan usaha seperti toko baju, toko sembako, bahan bangunan dan hasil bumi. Selain kegiatan usaha juga dirintis berbagai kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perberdayaan para anggota, seperti kerjasama dengan Asuransi Bumi Putra dan PT. Sigap Perkasi di Jakarta. Kerjasama dengan PT Asuransi Bumi Putra dilakukan untuk menyalurkan para anggotanya menjadi Agen Asuransi, hingga saat ini sudah ada sebanyak 60 orang anggota yang menjadi agen asuransi. Sementara itu, kerjasama dengan PT. Sigap Perkasi di Jakarta dilakukan dalam rangka merintis kerjasama untuk membikin perusahaan penyaluran tenaga kerja (alih daya), khususnya untuk tenaga pengamanan. Sekalipun banyak program masih dalam tahap perintisan, namun upaya yang dilakukan oleh BKPPKB ini merupakan langkah positif dalam menciptakan orientasi baru bagi para jawara untuk merubah citra negatif tentang jawara di kalangan masyarakat. Hal ini sangat penting, sebab selama ini selain merubah nama dari jawara menjadi pendekar tidak ada upaya untuk memberikan orientasi baru terhadap jawara, seiring dengan perkembangan jaman identitas kultural jawara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih kepentingan ekonomi dan politik. Bila hal ini dibiarkan larut terus-menerus, maka dalam perkembangan lebih lanjut peran ideal jawara hanya akan menjadi catatan sejarah masa lalu.

### **3.3.4 Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM)**

Dalam deskripsi di atas telah disinggung bahwa menurut catatan Badan Kesbangpol dan Linmas, Kabupaten Pandeglang jumlah LSM yang tercatat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang saat ini sekitar 95 organisasi. Namun demikian, dalam realitasnya relatif

banyak LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dan Linmas. Menurut Ketua FK-LSM saat ini secara keseluruhan ada sekitar 101 LSM di wilayah Pandeglang. Sebagaimana telah disinggung di atas, fokus kegiatan LSM ini sangat beragam, mulai dari pemberdayaan masyarakat, konservasi lingkungan, gerakan anti narkoba, gerakan anti korupsi hingga pemantau penyelenggaraan pemerintah. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, secara ideal pendirian LSM tersebut pada dasarnya merupakan respon masyarakat terhadap konsolidasi demokrasi yang terjadi pasca reformasi. Namun bila menjamurnya jumlah LSM dilihat dalam konstelasinya dengan realitas sosial setempat, tampaknya hal itu terkait dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah di daerah, khususnya di sektor formal. Menurut salah seorang nara sumber, saat ini di wilayah Pandeglang dan sekitarnya ada sekitar tujuh Perguruan Tinggi, bila dalam setahun setiap perguruan tinggi tersebut mengeluarkan 100 orang sarjana, maka secara keseluruhan dalam setiap tahun akan lahir sekitar 700 sarjana baru. Sementara itu, tenaga kerja yang terserap dalam sektor formal, termasuk Pegawai negeri Sipil hanya sekitar 50 orang setiap tahun. Dengan demikian, setiap tahun ada sekitar 650 orang sarjana yang menganggur. Oleh karena keadaan ini, maka wajar bila kemudian mereka banyak mendirikan LSM sebagai wadah kegiatan yang menyalurkan aspirasi mereka.

Dalam uraian di atas, telah disinggung bahwa fokus kegiatan LSM tersebut sangat beragam, sekalipun demikian menurut salah seorang aktivis LSM, pada masa secara umum setiap LSM lebih menonjolkan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga aksi demonstrasi sering terjadi. Oleh karena setiap LSM lebih menonjolkan fungsi kontrolnya, maka gesekan kepentingan di antara LSM sering terjadi. Atas dasar keadaan ini, pada tahun 2006 dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) dengan anggota sebanyak 65 LSM. Visi yang ditetapkan dalam organisasi yang baru dibentuk tersebut adalah Bersama Pemerintah mewujudkan masyarakat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Sementara itu, Misi yang telah ditetapkan meliputi:

- Menjaga dan mengamankan empat pilar negara Kesatuan Republik Indonesia (Pancasila, UUD45, NKRI & Bhineka Tunggal Ika).
- Membangun Kemitraan dengan Pemerintah di bidang pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum.
- Mewujudkan Profesionalisme LSM sebagai Lembaga Non Pemerintah (NGO).
- Menempatkan lembaga sebagai ujung tombak perjuangan rakyat agar terbebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, penindasan, intimidasi, kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan eksploitasi manusia.

Dengan misi dan visi yang telah ditetapkan bersama diharapkan setiap kegiatan LSM tidak hanya menonjolkan fungsi kontrolnya semata tetapi juga mulai mengedepankan sikap partisipatif terhadap berbagai program pemerintah daerah, dalam istilah para anggota FK-LSM lebih baik partisipatif dari pada konprontatif terus-menerus. Sekalipun demikian, menurut salah seorang pengurus FK-LSM, aksi unjuk rasa bukan merupakan hal yang tabu, aksi tersebut merupakan jalan terakhir bila proses dialog menemui jalan buntu.

Kepengurusan FK-LSM dibagi dalam dua bagian, Badan Konsultasi dan Badan Pengurus. Badan Konsultasi bertindak sebagai badan penasihat dengan tugas memberikan masukan terhadap seluruh LSM yang menjadi anggota. Sementara itu, Badan Pengurus bertugas melaksanakan fungsi-fungsi manajerial di dalam keorganisasian, kelembagaan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral. Menurut salah seorang nara sumber, Badan Pengurus sengaja dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral, bukan oleh seorang Ketua Umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga Independensi masing-masing LSM yang menjadi anggota. Masa kepengurusan ditetapkan selama tiga tahun, setelah itu diadakan pemilihan pengurus baru dalam forum Musyawarah Besar. Menurut salah seorang nara sumber, pergantian kepengurusan dalam tubuh oraganisasi ini baru terjadi sekali, sebab tiga tahun setelah pendirian kemudian organisasi ini vacum hingga tahun 2012. Baru pada tanggal 8 April tahun 2012 diadakan Musyawarah

Besar untuk memilih kepengurusan baru. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa pada saat FK-LSM vacum, seluruh LSM yang ada melakukan kegiatan masing-masing. Pada saat itu aksi demo relatif sering dilakukan oleh berbagai LSM secara bergantian, sehingga pemerintah daerah relatif terganggu.

Bila Musyawarah Besar yang diadakan tanggal 8 April 2012 ini dilihat dalam konstelasinya dengan dinamika politik lokal, tampaknya hal itu tidak terlepas dari rivalitas politik yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara tegas salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa terjadinya Musyawarah Besar tersebut terkait dengan konflik tertutup antara Bupati dengan Wakilnya. Dalam konteks ini Wakil Bupati mendukung penuh terselenggaranya acara tersebut dengan harapan selain dapat menciptakan stabilitas politik juga melebarkan pendukung di luar partai politik yang mengusungnya saat pemilihan kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan harapannya tersebut, sikap partisipatif dari LSM didorong guna mendukung berbagai program pemerintah daerah, sekalipun untuk itu kemudian banyak transaksi-transaksi politik yang harus dilakukan. Dilihat dari struktur organisasi Badan Kepengurusan, departemen yang dibentuk merefleksikan komisi-komisi yang ada di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di bawah Sekretaris Jendral dibentuk 4 Divisi, yakni Divisi Pemerintahan; Divisi Perekonomian; Divisi Pembangunan dan Divisi Kesejahteraan. Di bawah divisi-divisi tersebut dibentuk Bidang-Bidang yang merefleksikan sektoralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Sebagai contoh misalnya di bawah Divisi Pemerintahan dibentuk Bidang Kesbangpol; kependudukan dan catatan sipil; kepegawaian. Di bawah Divisi Pembangunan dibentuk Bidang Pertanian dan Perkebunan; Kehutanan; peternakan; kelautan dan perikanan. Di bawah Divisi Pembangunan dibentuk Bidang Pekerjaan Umum; Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan; Pertambangan dan Energi; Perencanaan Pembangunan. Di bawah Divisi Kesejahteraan dibentuk Bidang Pendidikan; Kesehatan; Sosial dan Ketenagakerjaan; Agama; Budaya dan pariwisata. Menurut salah seorang pengurus, bidang-bidang tersebut sengaja disesuaikan dengan sektoralisasi dalam

pemerintahan agar mudah menjalin kerjasama dengan Dinas-Dinas yang ada di Pemerintah Daerah. Namun demikian, menurut salah seorang nara sumber dari kalangan Pemerintah Daerah, sikap partisipatif dari kalangan FK-LSM tersebut kebanyakan diwujudkan dalam tindakan untuk meminta paket proyek dari Dinas-Dinas. Sering terjadi bila permintaan mereka tidak dipenuhi, kemudian muncul unjuk rasa, akhirnya terjadi negosiasi antara Dinas yang didemo dengan pimpinan LSM. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa unjuk rasa terhadap Program Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) yang terjadi di Dinas Pertanian baru-baru ini, pada awalnya sangat menyeramkan, bukan saja tuduhan korupsi yang dilontarkan dalam bahasa yang kasar ditujukan kepada Kepala Dinas, tetapi juga muncul tindakan anarkhis dengan merobohkan pagar kantor, namun akhirnya pimpinan unjuk rasa dari kalangan LSM mengajak negosiasi dengan meminta uang sebesar 100 juta. Jika demikian keadaannya, maka FK-LSM bukan lagi kelompok strategis bagian dari *civil society* yang berfungsi mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, melainkan hanya kelompok kepentingan yang terlibat dalam perebutan sumber daya ekonomi berupa proyek yang berada dalam kontrol Pemerintah Daerah.

Selain LSM, unjuk rasa juga sering dilakukan oleh berbagai organisasi ekstra mahasiswa antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa nasionalis Indonesia (GMNI). Di antara organisasi ekstra mahasiswa tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) relatif lebih sering melakukan unjuk rasa. Menurut nara sumber dari kalangan Badan Kesbangpol dan Linmas, isu yang diusung dalam unjuk rasa biasanya berkisar dalam masalah-masalah yang terjadi di lingkungan Dinas, seperti Dinas Pendidikan, masalah pembuatan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum. Menurut beberapa orang tokoh masyarakat, dahulu unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi ekstra mahasiswa, khususnya PMII relatif idealis, mereka cenderung menyuarakan kepentingan masyarakat umum tanpa ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Namun demikian, setelah terjadi perpecahan pimpinan mereka, saat ini relatif sulit memisahkan

antara unjuk rasa yang ditumpangi kepentingan tertentu dengan unjuk rasa yang masih idealis. Terlepas dari perbedaan tersebut, secara umum unjuk rasa para mahasiswa lebih bersifat parsial dan sering ditujukan pada pejabat tertentu secara personal. Bila hal ini dilihat dalam perspektif yang lebih luas, tampaknya ada kecenderungan pemerintahan tidak dilihat sebagai organigram, tetapi dipandang sebagai kumpulan tokoh-tokoh (*state actors*) yang memainkan peran dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, berbagai tuntutan lebih diarahkan kepada tokoh-tokoh secara personal, seakan-akan para tokoh tersebut personifikasi dari pemerintahan secara umum.

### 3.3.5 Kyai

Dalam pengertian yang sempit kyai adalah seseorang yang memimpin Pesantren, M.A. Tihami mengutip pendapat Dhofier mendefinisikan konsep kyai sebagai elemen penting dari suatu pesantren (kelembagaan tradisional dalam pendidikan islam), sekaligus pula kyai merupakan gelar terhadap ulama dari kelompok islam tradisional yang memiliki pesantren.<sup>5</sup> Pengertian kyai dilihat dalam konstelasinya dengan suatu wilayah tertentu (Banten) dikemukakan oleh Mohamad Hudaeri Dkk, dalam pengertian tersebut dinyatakan bahwa kyai dalam masyarakat Banten adalah sebuah gelar tradisional yang diberikan kepada seorang “terpelajar” muslim yang telah membaktikan hidupnya “demi mencari ridha Allah” dalam menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran agama Islam kepada seluruh masyarakat melalui lembaga pendidikan pesantren. Orang yang menyandang gelar kyai dipandang sebagai ahli kebatinan, ahli hikmah, memiliki kesaktian, guru dan pemimpin masyarakat yang berwibawa dan *legitimate* berdasarkan kepercayaan masyarakat. Karenanya, gelar kyai merupakan suatu tanda kehormatan dalam kedudukan sosial,

---

<sup>5</sup>Lihat Tihami, M.A., “Kyai dan Jawara di Banten,” dalam *Tesis* Master Universitas Indonesia, 1992.



bukan suatu gelar akademis yang diperoleh dalam pendidikan formal.<sup>6</sup> Pengertian kyai yang dikemukakan oleh Mohamad Hudaeri Dkk tampaknya lebih luas dibanding pengertian yang dikemukakan oleh M.A . Tihami, dalam pengertian tersebut kyai tidak dipandang hanya sebagai pemimpin pesantren semata, tetapi dilihat dalam konstelasinya dengan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, sehingga gelar kyai menjadi suatu tanda kehormatan dalam kedudukan sosial seseorang.

Masyarakat Pandeglang pada khususnya serta masyarakat Banten pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Dalam kehidupan masyarakat yang religius, kesakralan Tuhan atau Allah merupakan titik sentral dalam seluruh dimensi kehidupan, sehingga ketertiban sosial pun dipandang memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan di atasnya. Karena itu, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap tokoh-tokoh agama dalam memandu kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Dengan kondisi seperti ini wajar bila kemudian Kyai memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat, Pengaruh kyai melewati batas-batas geografis pedesaan berdasarkan legitimasi masyarakat untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, adat dan menginterpretasi doktrin-doktrin agama. Selain itu, seorang kyai dipandang memiliki kekuatan-kekuatan spiritual karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Kyai dikenal tidak hanya sebagai guru di pesantren, juga sebagai guru spiritual dan pemimpin kharismatik masyarakat. Penampilan kyai yang khas merupakan simbol-simbol kesalehan. Misalnya, bertutur kata lembut, berperilaku sopan, berpakaian rapih dan sederhana, serta membawa tasbih untuk berdzikir kepada Allah. Karena itu, perilaku dan ucapan seorang kyai menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari pasang-surutnya peranan sosial kyai di luar bidang keagamaan, namun peran sosial dalam kegamaan di lingkungan masyarakat

---

<sup>6</sup>Lihat Mohamad Hudaeri Dkk., “Tasbih Dan Golok, Studi Tentang Kharisma Kyai & Jawara Di Banten”, *Istiqro*, Jurnal Penelitian Vol. 2, No. 1, 2003.

tampaknya relatif permanen. Peran sosial keagamaan tersebut meliputi antara lain:

### a. Guru Ngaji

Peran kyai yang paling awal adalah mengajarkan pembacaan al-Qur'an dengan baik kepada para santrinya. Tugas kyai dalam hal ini adalah mengajarkan pembacaan huruf-huruf *hijâiyyah* dan kaidah-kaidah pembacaan al-Qur'an yang benar, yang dikenal dengan *'ilm tajwîd*. Dalam tahapan yang lebih maju kyai mengajarkan tentang beberapa metode pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dengan suara indah, yakni untuk para *qâri* dan *qâriah* yang memiliki bakat suara yang baik. Selain itu juga para *qâri* dan *qâriah* diajarkan aliran-aliran atau madzhab-madzhab pembacaan ayat-ayat al-Qur'an.

Sekarang ini, peran guru ngaji tidak hanya dilakukan oleh seorang kyai yang memiliki pesantren, tetapi juga oleh para santri, yang biasanya dipanggil *ustâdz*, yang pernah mengenyam pendidikan pesantren dan memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pembacaannya dalam *'Imu tajwîd*. Pelaksanaan pengajarannya biasanya diselenggarakan di rumah *ustâdz* atau di mushola yang terdekat dengan kediamannya. Pengajaran al-Qur'an dilakukan pada waktu-waktu selesai sholat lima waktu, seperti: setelah sholat magrib, subuh dan ashar. Para pesertanya biasanya anak-anak dan kaum remaja di sekitar kediaman *ustâdz* tersebut.

### b. Guru Kitab

Seorang santri yang telah lancar membaca ayat-ayat al-Qur'an, mulai berkenalan dengan kitab-kitab Islam klasik. Memang tugas utama seorang kyai di pesantren adalah mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama fiqh yang bermadzhab Syafi'i. Pengajaran membaca al-Qur'an, meskipun dilaksanakan di pesantren-pesantren, yang biasanya masih kecil dan belum terkenal, sebagai dasar dari suatu proses pendidikan, bukan tujuan utama sistem pendidikan pesantren. Tujuan utamanya adalah setiap santri diharapkan

memiliki kemampuan dalam memahami kitab-kitab Islam klasik, yang dikenal dengan *kitab kuning*.

Kemashuran seorang kyai dan pesantren ditentukan dari kemampuannya dalam memahami isi dan memberikan pengajaran tingkatan kitab-kitab klasik tersebut. Seorang kyai yang memimpin sebuah pesantren yang kecil dan kurang terkenal mengajar sejumlah kecil santri tentang beberapa kitab dasar. Sedangkan kyai yang terkenal dan kharismatik biasanya memiliki sebuah pesantren yang cukup besar dengan mengajarkan sejumlah santri yang cukup banyak tentang kitab-kitab besar.

### c. Guru Tarekat

Seorang kyai yang kharismatik selain mengajarkan kitab-kitab klasik, seperti yang telah diterangkan terdahulu, juga mengajarkan praktek tarekat. Pengajaran tarekat di Banten memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebuah “pesantren” tua yang terkenal bernama Karang, yang terletak di sekitar Gunung Karang, sebelah barat kota Pandeglang sekarang diduga telah mengajarkan tarekat Qodariyah. Dalam *Serat Centhini*, dijelaskan bahwa sang pertapa yang bernama Dandarma, mengaku telah belajar tiga tahun di Karang di bawah bimbingan seorang guru “Seh Kadir Jalena”; yang diduga dimaksudkan ia belajar ilmu atau *ngelmu* yang dikaitkan dengan sufi besar Abd al-Qadir Al-Jailani.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan tokoh utama dalam *Serat Centhini*, Jayengresmi alias Among Raga yang berguru di sebuah *perguruan* di Karang di bawah bimbingan seorang guru yang berasal dari Arab bernama Syaikh Ibrahim bin Abu Bakar, yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Karang. Oleh karena itu, wajar apabila para tarekat sudah sangat dikenal di lingkungan istana kesultanan Banten semenjak awal didirikannya kesultanan itu. Pendiri kerajaan Banten, Maulana Hasanuddin, telah dibai’at untuk menganut dan mempraktekkan wirid tarekat Naqsabandiyah.

#### d. Guru Ilmu Hikmah (Ilmu Ghaib)

Para kyai yang menjadi *mursyid* suatu tarekat tidak hanya dikenal sebagai pemimpin atau guru tarekat tetapi juga dikenal sebagai guru ilmu hikmah atau ilmu-ilmu ghaib. Banten hingga kini memiliki reputasi yang cukup dikenal sebagai daerah tempat bersemayamnya ilmu-ilmu ghaib sehingga tidak sedikit orang Banten yang memanfaatkan reputasi ini dengan bertindak sebagai juru ramal, pengusir setan, pengendali roh, pemulih patah tulang, tukang pijat dan tabib, pelancar usaha untuk mendapat kekayaan, kedudukan dan perlindungan supranatural serta kedamaian jiwa.

Kyai yang dikenal sebagai guru ilmu hikmah di Banten adalah Ki Armin (K.H. Muhamad Hasan Amin) dari Cibuntu, Pandeglang. Beliau adalah kemenakan dari Kyai Asnawi Caringin, guru tarekat *Qodariyyah wa Naqsabandiyah* yang sangat terkenal di Banten. Banyak cerita yang tersebar di kalangan rakyat tentang kekuatan-kekuatan ajaib diseputar kyai ini, seperti kemampuannya untuk melihat apa yang belum terjadi, karier yang cepat atau kekayaan yang datang secara tiba-tiba yang terjadi kepada beberapa orang yang telah mendapatkan restunya. Kyai lain yang juga dikenal memiliki ilmu hikmah adalah Ki Dimiyati, yang memimpin sebuah pesantren di Cisantri, Pandeglang.

#### e. Mubaligh

Seorang kyai tidak hanya tinggal diam di pesantren mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya atau menetap di suatu tempat dan umatnya datang untuk minta nasehat, doa dan kebutuhan praktis lainnya. Kyai juga aktif melakukan ceramah agama kepada masyarakat luas secara berkeliling, sehingga disebut dengan *mubâligh* (orang yang menyampaikan pesan agama Islam).

Dalam pemberontakan di Cilegon yang terjadi pada tahun 1888, peran para *mubâligh* sangat penting dalam memobilisasi massa untuk melakukan pemberontakan. Para kyai, yang terdiri dari para guru tarekat, para *syarif* dan *sayyid*, banyak berkhotbah secara berkeliling

untuk melakukan pembinaan kerohanian masyarakat. Disadari, hal tersebut turut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan kerohanian rakyat. H. Udi Mufrodi, salah seorang kyai, sering memberikan ceramah keagamaan pada berbagai acara keagamaannya di wilayah Banten dan daerah-daerah lain seperti Lampung dan Jakarta. Menurutnya bahwa untuk menjadi penceramah/*mubâligh* tidak hanya memiliki kemampuan memahami pesan-pesan agama, retorika yang baik tetapi juga harus mampu memahami kehendak masyarakat dan memiliki ilmu-ilmu batin. Sebab, menurutnya menjadi *mubâligh* itu penuh dengan tantangan, karena mungkin pesan-pesan yang disampaikan itu banyak bersinggungan dengan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan peran sosial yang dimilikinya, kyai sebagai elit sosial memiliki jaringan sosial yang sangat luas. Jaringan sosial itu terbentuk melalui sistem kekerabatan, perkawinan, hubungan intelektual guru-murid, kerjasama antar pesantren dan lembaga-lembaga sosial. Melalui jaringan tersebut para kyai dapat berperan secara maksimal dan juga status sosialnya selalu terjaga.

### **a. Kekerabatan**

Seorang kyai yang memimpin sebuah pesantren memiliki garis keturunan yang selalu dijaga, yang sebageian besar para pendahulunya adalah para kyai dan keturunan Sultan Banten. K.H. Asytari, seorang kyai keturunan Imam Nawawi Tanara, Tirtayasa, Serang Banten. Garis keturunannya tersebut apabila dicermati adalah para kyai, sultan Banten, para tokoh-tokoh ulama tasawuf sampai dengan Nabi Muhammad Saw. Seorang kyai dan keturunannya sering dipercayai oleh masyarakat mendapat *karamah* dan *berkah* dari Allah. *Karamah* dan *berkah* ini merupakan hal penting bagi seorang kyai dan keturunan untuk mengembangkan dan melanjutkan kepemimpinan pesantrennya. Dengan adanya hal tersebut para kyai dan keturunannya mendapat legitimasi kuat untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai

---

<sup>7</sup>*Ibid*

pemimpin pesantren dan elit sosial di masyarakatnya dengan segala prestise sosial yang dimilikinya.

## **b. Guru-Murid**

Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari terjalinannya ikatan jaringan intelektual antara para ulama di pusat-pusat intelektual Islam, seperti Mekkah dan Madinah di Arab Saudi dan Kairo Mesir, dengan para muridnya di Nusantara. Jaringan intelektual itu sedemikian penting, sehingga setiap ada gerakan keagamaan di pusat-pusat Islam itu akan memiliki pengaruh dalam kehidupan keagamaan di Nusantara. Demikian pula kejadian-kejadian di Nusantara akan menjadi perhatian para ulama atau syaikh-syaikh yang tinggal di negeri-negeri Arab tersebut. Sebagai contoh dari jaringan intelektual seorang murid dengan para guru-gurunya misalnya Kyai Tb. Khodim, putra K.H. Asnawi, yang telah menjadi seorang *mursyid* dari tarekat *Qodariyah wa Naqsabandiyah* memiliki silsilah guru-guru tarekat yang memang diakui oleh kyai-kyai lain yang seangkatan dengannya.

Dalam tingkat lokal, khususnya di Pandeglang, hubungan Guru dengan Murid tersebut, tampaknya tidak sebatas jaringan intelektual antara guru dengan murid semata, tetapi memiliki ikatan emosional yang dalam. Pada sebagian besar Pesantren di Pandeglang, seorang santri (murid) biasanya memanggil Kyainya dengan sebutan “Abah”, seperti panggilan seorang anak terhadap bapaknya. Dalam konteks itu seorang Kyai biasanya menganggap anak terhadap muridnya. Munculnya anak-anak non biologis ini memperluas dan mempererat hubungan kekerabatan antara guru dengan murid. Hal ini juga terjadi dalam lingkungan kejawaraan.

## **c. Organisasi Massa**

Para kyai di Banten dalam membangun jaringan sosialnya tidak hanya terbatas pada kekerabatan dan intelektual tetapi juga pada organisasi-organisasi sosial yang ada. Lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di Banten adalah yang paling banyak di

pergunakan oleh para kyai untuk membangun jaringan sosialnya. Jaringan sosial tersebut berskala baik nasional seperti Nahdatul Ulama (NU) maupun lokal, seperti Al-Khaeriyah, Mathla'ul Anwar dan Masyarikul Anwar.

Para pendiri Al-Khaeriyah, Mathla'ul Anwar dan Masyarikul Anwar nampak dari awal tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu organisasi sosial, tetapi lebih berorientasi kepada lembaga pendidikan yang dipimpinnya semata. Pada tulisan ini akan dibahas salah satu dari ketiga organisasi lokal di daerah Banten, yakni Al-Khaeriyah. Hal ini dikarenakan ketiganya memiliki karakteristik yang hampir sama. Maka, membahas salah satunya dianggap akan mewakili yang lain. Alumni dari pesantren ini, selain menjadi guru agama atau tokoh masyarakat, juga banyak yang mendirikan pesantren atau madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan biasanya diberi nama Al-Khaeriyah. Pemberian nama yang sama tersebut menyimbolkan bahwa jalinan dengan lembaga induk dan antar para santri yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Khaeriyah tetap terjaga dengan baik. Dari ikatan-ikatan yang terjalin secara emosional itu para alumninya mendirikan organisasi massa dengan nama yang sama.<sup>8</sup>

Dengan peran-peran sosial serta jaringan sosial yang dimilikinya sebagaimana dideskripsikan di atas, Kyai memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat, pada situasi-situasi tertentu kadang kepemimpinan kyai lebih menonjol dibandingkan kepemimpinan formal, bahkan sering terjadi kepemimpinan kyai cenderung menggeser kepemimpinan formal yang ada. Dengan kondisi seperti ini tidak heran bila kemudian hubungan kyai dengan negara (pemerintah) mengalami pasang surut tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Untuk melihat lebih jauh tentang hubungan kyai dengan negara (pemerintah), tampaknya harus melihat peran kyai dalam setiap episode sejarah negeri ini, mulai dari perjuangan fisik melawan kolonial hingga pasca reformasi yang terjadi tahun 1998.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Peranan kyai dalam perjuangan kemerdekaan merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan, menurut penelitian Ziemek, para pejuang kemerdekaan yang melawan kaum penjajah adalah para kyai, yang merasa mendapat ilham dan terpanggil memprakarsai dan memimpin perlawanan.<sup>9</sup> Dalam konteks ini para kyai di wilayah Banten mengukir tinta emas dalam catatan sejarah perjuangan bangsa. Setelah runtuhnya Kesultanan Banten, Para kyai memandang hina kekuasaan pemerintah kolonial karena mereka dipandang sebagai orang-orang kafir yang telah merebut kekuasaan orang-orang muslim dan dengan demikian mesti diperangi. Atas dasar keyakinan itu para kyai melakukan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, yang mendapat dukungan penuh dari rakyat dan dan elit-elit sosial lainnya, seperti para bangsawan dan para jawara. Semenjak runtuhnya kesultanan Banten, terjadi sejumlah pemberontakan yang sebagian besar dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Seperti, pemberontakan di Pandeglang tahun 1811 yang dipimpin oleh Mas Jakaria, peristiwa Cikande Udik tahun 1845, pemberontakan Wakhia tahun 1850, peristiwa Usup tahun 1851, peristiwa Pungut tahun 1862, kasus Kolelet tahun 1866, kasus Jayakusuma tahun 1868 dan yang paling terkenal adalah Geger Cilegon tahun 1888 yang dipimpin oleh Ki Wasid. Melihat keterlibatan kyai dalam kasus Geger Cilegon secara tegas Sartono menyatakan bahwa pertumpahan darah di Cilegon mendramatisasikan konflik besar antara elite religius dengan pejabat pemerintah kolonial yang mencapai momentum dengan suatu konfrontasi penuh kekerasan.<sup>10</sup>

Deskripsi di atas menggambarkan peranan yang besar dari para kyai dalam perjuangan mengusir penjajah, hal ini tampaknya disadari betul oleh Ir Soekarno sebagai Presiden saat itu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan stabilitas dan integrasi negara yang baru merdeka tersebut, pada masa awal kemerdekaan wilayah Banten dipimpin oleh

---

<sup>9</sup>Lihat Manfred Ziemek, 1986. *Pesantren dalam Perubahan*. Jakarta: P3M.

<sup>10</sup>Lihat Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.



para kyai, baik pada tingkat Residen maupun Bupati-Bupati yang ada di bawahnya. KH Ahmad Chatib, bekas pemimpin pemberontakan 1926 menjadi Residen Banten. KH. Syam'un, cucu KH Wasid, pemimpin Geger Cilegon memimpin Kabupaten Serang. KH. Tb. Abdul Halim, pemimpin pondok pesantren Kadupeusing menjadi Bupati di Pandeglang. KH. Tb. Hasan menjadi Bupati di Lebak. Namun demikian, kepemimpinan para kyai tersebut tidak berlangsung lama, hal ini disebabkan antara lain karena beredar isu bahwa Banten akan menghidupkan kembali Kesultanan dengan Residen banten sebagai Sultannya. Dengan adanya isu tersebut, maka pemerintah kemudian mengangkat Yusuf Adiminata sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang dan mengangkat Kolonel Soekarna Bratamanggala sebagai Bupati Serang mengganti KH Syam'un. Dalam perkembangan lebih lanjut, kemudian para kyai yang menjadi Bupati di lingkungan Kresidenan Banten satu persatu diganti.<sup>11</sup> Menurut salah seorang nara sumber dari kalangan kyai di Pandeglang, terlepas dari pandangan Pemerintah Pusat serta pemerintah Provinsi Jawa Barat, pergantian kepemimpinan kepala daerah di lingkungan kresidenan Banten pada saat itu dimaknai sebagai bentuk penyerahan kepemimpinan dari tangan kyai kepada ahlinya, sebab motivasi para kyai untuk memimpin daerah semata-mata hanya untuk menjaga stabilitas serta integrasi daerah dalam negara yang baru merdeka. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas, keadaan ini tampaknya merupakan titik awal tersingkirnya peran kyai dari pemerintahan, khususnya eksekutif di lingkungan wilayah Banten.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, peran kyai terpinggirkan seiring dengan tergusurnya kekuatan politik islam. Pemerintah Orde Baru berpandangan bahwa stabilitas politik merupakan landasan utama bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap stabilitas politik perlu ditertibkan sekalipun dengan tindakan yang bersifat represif. Dalam konteks ini, kekuatan politik islam dipandang sebagai salah satu bahaya laten dan sekaligus

---

<sup>11</sup>Lihat Nina Lubis. 2003. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES.

merupakan lawan utama Golkar sebagai lokomotif rezim yang berkuasa, oleh karenanya kekuatan politik islam harus disingkirkan dari percaturan politik nasional. Untuk itu secara sistematis rezim Orde baru mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melemahkan kekuatan politik islam. Di antara kebijakan tersebut antara lain mulai dari larangan untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi dan kembalinya para pemimpin partai tersebut dalam politik, Fusi partai-partai Islam, kebijakan massa mengambang dan monoloyalitas terhadap Golkar, sampai pada pelarangan Islam sebagai asas partai dan asas organisasi massa islam. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, Orde Baru mendekati para kyai untuk bergabung dengan Golkar. Dalam tubuh Golkar sendiri dibentuk satkar (Satuan Karya) Ulama sebagai salah satu sayap organisasi untuk menampung para ulama atau kyai yang bergabung dengannya. Pada saat itu banyak kyai yang bergabung dengan Satkar Ulama, di wilayah Banten contohnya adalah Mahta'ul Anwar di Pandeglang dan Alkhaeriyah di Serang.<sup>12</sup> Menurut salah seorang nara sumber dari kalangan kyai di Pandeglang, kyai pada saat itu hanya dijadikan mesin pengumpul suara di saat menjelang Pemilu, setelah aspirasinya tidak pernah dihiraukan, bahkan cenderung ditinggal dalam setiap perumusan kebijakan. Memang ada beberapa orang kyai yang ditempatkan di Legislatif, namun mereka lebih cenderung menyuarakan kepentingan rezim yang berkuasa dibanding kepentingan umat secara luas, bahkan seringkali terjadi mereka hanya disuruh memberikan Fatwa untuk membenarkan tindakan rezim yang berkuasa. Salah seorang kyai menggambarkan bahwa peran para kyai pada saat itu hanya dimanfaatkan dikala kondisi masyarakat mengalami situasi kritis, misalnya terjadi konflik sara, setelah itu mereka diisolasi kembali dari umatnya. Saat itu peran kyai seperti mobil pemadam kebakaran yang digunakan hanya pada saat terjadi kebakaran, setelah itu diparkir kembali digarasinya. Dilihat dalam prepektif yang lebih luas, pelibatan kyai dalam Satkar serta

---

<sup>12</sup>Lihat Lili Romli, Taftazani. "Jawara Dan Kekuasaan: Peranan Jawara Dalam Politik Pasca Pembentukan Provinsi Banten", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 6. No. 2, 2006.

peran yang diberikan oleh rezim Orde Baru, secara langsung ataupun tidak mengakibatkan terjadinya degradasi kepercayaan umat terhadap kyai.

Pasca reformasi, seiring dengan konsolidasi demokrasi yang terjadi, Indonesia memasuki fase liberalisasi politik. Fase ini ditandai dengan peningkatan yang tajam dalam partisipasi politik, baik dalam ranah infrastruktur maupun supra struktur. Di kalangan elit, partisipasi politik ini diwujudkan dengan berlomba-lomba untuk membentuk partai politik baru atau menghidupkan kembali partai politik yang dulu pernah ada. Sejak awal reformasi hingga tahun 1999 tercatat sekitar 148 Partai Politik yang didirikan. Menghadapi Pemilihan Umum 2004, pendirian partai politik terus berlanjut, tercatat sekitar 261 partai yang telah didirikan.<sup>13</sup> Sekalipun berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk membatasi pendirian partai politik, mulai dari aturan pengetatan syarat-syarat pendirian parpol hingga penerapan *electoral threshold*, namun hal itu tidak menyurutkan niat para elit untuk mendirikan parpol, sehingga jumlah parpol cenderung terus meningkat. Kecenderungan peningkatan jumlah parpol ditingkat pusat paralel dengan peningkatan jumlah parpol di daerah, sebab massa pendukung ada di daerah. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pimpinan Cabang berbagai partai politik marak terjadi disetiap daerah dengan melibatkan segenap elit lokal. Menurut salah seorang nara sumber, kondisi makro tersebut terjadi juga di Pandeglang. Di tengah situasi sebagaimana dideskripsikan di atas, sebagian kyai sebagai elit lokal terlibat dalam pembentukan Partai politik, bahkan kemudian menjadi pengurus aktif partai politik tersebut. Partai Politik yang dipilih para kyai tentu partai politik yang berasaskan islam atau partai politik yang berorientasi pada islam sekalipun dasarnya bukan islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (P3), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB)

---

<sup>13</sup>Lihat Lili Romli. "Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol: Catatan Atas Hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol 8. No. 1, 2008.

serta partai-partai kecil lainnya seperti PKNU dan Partai Umat Islam (PUI). Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa banyak kyai-kyai yang berasal dari pesantren yang tadinya relatif independen atau menjaga jarak dengan pemerintah, bahkan tidak mau terlibat dalam pecaturan politik, pasca reformasi kemudian berafiliasi dengan partai politik tertentu. Keadaan ini membawa implikasi yang sangat luas, kyai yang tadinya berdiri di atas kepentingan umat kemudian terfragmentasi ke dalam kepentingan-kepentingan partai politik yang menjadi pilihannya. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Dalam beberapa kasus pemihakan kyai terhadap partai politik tertentu yang didukungnya tampak menonjol. Menurut pengalamannya, dalam pendataan pada pemilu yang lalu banyak kyai yang marah karena santrinya tidak terdata sebagai pemilih, bahkan ada sekitar empat orang kyai yang ngotot agar santrinya didaftarkan sebagai pemilih, padahal santri tersebut bukan penduduk Kabupaten Pandeglang. Sikap kyai tersebut bukan semata-mata membela hak pilih santrinya sebagai warga negara, tetapi lebih didasarkan pada ketakutan berkurangnya jumlah suara untuk partai politik yang didukungnya. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, dukungan kyai terhadap partai politik saat ini terkesan berlebihan, sehingga suara kyai lebih merepresentasikan suara kelompok partai politik tertentu ketimbang suara masyarakat secara keseluruhan, bahkan sering kepentingan masyarakat umum dikorbankan demi kepentingan partai politik yang didukungnya. Ditengah kondisi seperti ini acara keagamaan yang digelar secara massal, seperti doa bersama, untuk menanggapi kasus kemasyarakatan dan kenegaraan kurang menyentuh dimensi rohaniah masyarakat. Menurut pengakuan seorang warga masyarakat, pada saat digelar doa bersama untuk menjatuhkan Bupati pada periode yang lalu, acara doa bersama tersebut terasa sangat hambar karena kyai yang memimpin doa bersama tersebut mewakili salah satu partai politik. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas kondisi ini mengindikasikan kyai terdegradasi dari fungsi katalisnya. Bila dilihat dalam konstelasi perjalanan sejarah, sebenarnya proses degradasi fungsi katalis kyai telah terjadi sejak jaman Orde Baru, fase

liberalisasi politik tampaknya tidak mendorong revitalisasi terhadap fungsi tersebut, malah mempercepat terjadinya proses degradasi.

Di samping kondisi makro sebagaimana dideskripsikan di atas, terdegradasinya fungsi dan peran kyai dalam masyarakat juga disebabkan terjadinya perubahan pola pendidikan di pesantren. Menurut salah seorang kyai di Pandeglang, dahulu Pesantren yang ada, baik di Pandeglang maupun wilayah Banten secara keseluruhan semuanya merupakan pesantren tradisional atau pesantren model “*salaf*”. Dalam model ini, seorang kyai atau santri senior hanya membacakan kitab-kitab karya ulama terdahulu (*salaf*) dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah dan memberikan penjelasan secukupnya tentang isi kitab yang sedang dibaca. Dalam model *salaf* ini dikenal sistem pembelajaran yang disebut *bandongan* atau *sorogan*. *Bandongan* atau *sorogan* adalah jenis pengajaran keagamaan yang dilakukan oleh kyai dan santri senior kepada para santrinya, seperti kuliah umum di Universitas di mana seorang dosen mengajar mahasiswa dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pembelajaran ini dilakukan oleh kyai dan santri senior setiap hari, kehadiran santri tidak didasarkan pada usia ataupun tingkat pengetahuan mereka. Sementara itu, Sistem *sorogan* memiliki perbedaan sedikit dengan sistem *bandongan*. Sistem *sorogan* biasanya diikuti oleh santri dalam jumlah yang lebih sedikit, dan kyai menjelaskan isi kitab secara lebih detail. Untuk mempercepat pemahaman santri, seorang kyai seringkali menyuruh santri untuk membaca kajian sebelumnya. Hal ini semacam pasca ujian dari kyai kepada santrinya.<sup>14</sup> Dengan sistem pembelajaran seperti ini pesantren melaksanakan dedikasi keilmuan dalam suatu lembaga pendidikan tradisional jauh sebelum Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern dan sekuler. Dalam perkembangan lebih lanjut banyak pesantren yang menerapkan sistem pendidikan modern, dalam konteks ini kemudian banyak berdiri madrasah dalam setiap tingkatan di lingkungan pesantren. Menurut salah seorang kyai, dahulu pesantren-pesantren tua ada di Labuan (Caringin), Menes,

---

<sup>14</sup>Lihat Ali Maschan Moesa. 2007. *Nasionalisme Kyai, Kontruksi Sosial Bebas Agama*. Yogyakarta: LKiS.

Saketi, Cimanuk, Cikendal. Namun dalam perkembangan lebih lanjut banyak pesantren-pesantren tua yang berkembang menjadi lembaga pendidikan modern. Pesantren Mahta'ul Anwar di Menes, dahulu merupakan pesantren salafi, namun kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan modern, bahkan mendirikan Perguruan Tinggi. Demikian juga Pesantren Syech Mansyur di Cipicung, Kecamatan Kadu Hejo, dari pesantren salafi, kemudian mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Syech Mansyur (STAISMan). Di samping mendirikan Perguruan Tinggi, banyak pesantren salafi yang mendirikan madrasah, dalam berbagai tingkatan, bahkan sekolah kejuruan, misalnya pesantren Anwarul Hidayah di Menes, di samping mendirikan Madrasah Aliyah juga mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa munculnya pendidikan modern di lingkungan pesantren disebabkan tuntutan masyarakat yang menghendaki ijazah, sehingga setiap alumni secara formal diakui dan dapat bekerja di sektor formal, terutama di lingkungan instansi pemerintahan.

Dengan munculnya madrasah sebagai simbol pendidikan di lingkungan pesantren, maka pesantren yang ada di Pandeglang serta wilayah Banten pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni:

- (1) Pesantren Salafi
- (2) Pesantren Modern (Khalafi)
- (3) Pesantren Terpadu

Pesantren salafi adalah pesantren tradisional dengan menerapkan sistem pembelajaran bandongan atau sorogan sebagaimana telah dideskripsikan di atas, sedangkan pesantren modern adalah pesantren yang menerapkan pola pendidikan modern dalam pesantren, kegiatan pesantren menyatu dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Keberadaan, kelas, kurikulum serta guru yang spesialis untuk setiap mata pelajaran merupakan persyaratan mutlak dalam pesantren modern. Menurut salah seorang nara sumber, pola pesantren modern ini sebenarnya mengikuti pola pesantren yang diterapkan di

Gontor, bahkan hamper semua kyai yang menjadi pengasuh pesantren modern di Pandeglang alumni dari Gontor. Pesantren Darull Fallah di Kecamatan Mandalawangi dan Pesantren Al'Madinah di Kecamatan Banjar merupakan contoh pesantren modern yang ada saat ini. Sementara itu, dalam pesantren terpadu pola pendidikan salaf dalam pesantren tradisional dipadukan dengan pola pendidikan modern. Namun demikian, sistem pembelajaran dari kedua pola pendidikan tersebut diberikan dalam waktu yang terpisah, sehingga tidak mengganggu sistem pembelajaran dari kedua pola pendidikan yang diterapkan. Model pendidikan salaf hanya diberikan kepada para siswa madrasah yang mondok di pesantren, bagi para siswa madrasah yang tidak merangkap menjadi santri hanya diberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum madrasah pada berbagai tingkatan. Menurut salah seorang pengasuh pesantren terpadu, penerapan model salaf atau disebut dengan istilah “ngaji” dilakukan di luar waktu sekolah, biasanya dilakukan setelah subuh, setelah Asar, setelah Magrib dan setelah Isya. Namun pada masa ujian di Madrasah, seluruh kegiatan pengajaran diliburkan.

Menurut catatan Kantor Departemen Agama, Kabupaten Pandeglang, saat ini pesantren di Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 1124 pesantren, namun tidak ada data tentang jumlah pesantren dalam setiap kategori tersebut diatas. Sekalipun demikian menurut salah seorang nara sumber, saat ini jumlah pesantren salafi yang ada di Pandeglang sudah relatif sedikit, lebih dari 50% dari pesantren yang ada sudah berkembang menjadi pesantren terpadu, sebagian kecil diantaranya berkembang menjadi pesantren modern. Sebagaimana telah disinggung di atas, sejalan dengan perkembangan pesantren tersebut kemudian banyak didirikan madrasah dalam setiap tingkatan di lingkungan pesantren, secara rinci jumlah madrasah tersebut tampak dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Jumlah Madrasah di Kabupaten Pandeglang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah	147
2	Madrasah Tsanawiyah	255
3	Madrasah Aliyah	66

Sumber: Diolah dari Laporan Kantor Departemen Agama,  
Kabupaten Pandeglang, 2012

Dilihat dari statusnya, keseluruhan madrasah tersebut di atas adalah madrasah swasta, sebagian besar diantaranya berada di lingkungan pesantren. Sementara itu, madrasah yang memiliki status madrasah negeri di Kabupaten Pandeglang hanya ada 9 buah, 3 madrasah Ibtidaiyah dan 6 madrasah Tsanawiyah. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keadaan ini menunjukkan kontribusi yang besar dari kyai dan pesantrennya terhadap pendidikan nasional. Terlepas dari hal itu, menurut pengasuh pesantren Al'Fallah yang berdiri sejak tahun 1989, pada pesantren-pesantren terpadu, perkembangan madrasah yang ada di lingkungannya cenderung diikuti oleh penurunan jumlah santri tetap yang belajar secara salaf. Pesantren Al'Fallah dahulu mengasuh santri tetap sebanyak 70 orang, namun sekarang tinggal 10 orang. Madrasah yang didirikan di lingkungan pesantren tersebut terdiri dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang Perkantoran dan Marketing. Siswa keseluruhan dari berbagai tingkatan madrasah dan Sekolah Menengah kejuruan berjumlah sebanyak 500 orang, namun hanya sekitar 100 orang siswa yang merangkap menjadi santri di pesantrennya. Penurunan jumlah santri di pesantren secara langsung ataupun tidak berpengaruh terhadap penurunan pengaruh kyai di lingkungan masyarakat, sebab santri merupakan elemen penting dalam sebuah pesantren. Tanpa adanya santri, posisi seorang kyai tampak seperti presiden yang tidak memiliki rakyat. Mereka adalah sumberdaya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan pesantren, tetapi juga menopang intensitas pengaruh kyai dalam masyarakat.<sup>15</sup> Menanggapi kecenderungan jumlah

---

<sup>15</sup>*Ibid*



santri yang terus menerus berkurang dalam pesantren, salah seorang nara sumber menggambarkan kondisi Pandeglang secara gamblang dengan menyatakan bahwa bila dahulu Pandeglang dikenal dengan sebutan daerah *seribu kyai dengan sejuta santri*, sekarang Pandeglang menjadi daerah *sejuta kyai dengan seribu santri*. Lebih jauh nara sumber tersebut menyatakan bahwa di Pandeglang memang jumlah kyai cenderung meningkat, namun hal itu tidak disertai peningkatan jumlah santrinya. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian peningkatan jumlah kyai tidak serta merta meningkatkan pengaruh kyai di lingkungan masyarakat.

Dilihat dari sisi hubungan antara guru dengan murid, ikatan emosional antara guru dengan murid di Madrasah berbeda dengan ikatan emosional antara kyai dengan Santrinya. Menurut salah seorang pengasuh pondok pesantren yang memiliki beberapa madrasah, hubungan antara guru dengan murid di madrasah tidak menumbuhkan ikatan emosional yang dalam, hubungan yang terjadi seperti lazimnya hubungan antara guru dengan murid pada sekolah-sekolah umum. Demikian juga penghormatan dan penghargaan murid-murid madrasah terhadap kyai yang mengasuh pondok pesantren relatif jauh berbeda dengan santri, baik dalam ucapan maupun perilaku, sekalipun mereka berada dalam lingkungan yang sama. Menurut pengakuan nara sumber tersebut, seorang santri bila tidak dipanggil tidak berani masuk keruangan kyai, bahkan kalau bertemu pun tidak berani bertatapan mata. Sebaliknya, para murid madrasah sering menghadap, bahkan sering masuk keruangan kyai sekalipun sedang ada tamu. Sementara itu, hubungan kyai dengan santrinya memiliki ikatan emosional yang dalam, tidak hanya sekedar hubungan antara guru dengan murid. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa hubungan kyai dengan santrinya tidak sebatas jaringan intelektual antara guru dengan murid semata, tetapi memiliki ikatan emosional yang dalam. Pada sebagian besar Pesantren di Pandeglang, seorang santri (murid) biasanya memanggil kyainya dengan sebutan “Abah”, seperti panggilan seorang anak terhadap bapaknya. Dalam konteks itu seorang kyai biasanya menganggap anak terhadap muridnya. Munculnya anak-anak non

biologis ini memperluas dan mempererat hubungan kekerabatan antara guru dengan murid. Bila perubahan pola hubungan yang terjadi antara guru dengan murid ini dikaitkan dengan fenomena munculnya banyak madrasah di lingkungan yang kemudian diikuti dengan penurunan jumlah santri tetap sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka kondisi ini pada akhirnya mempersempit jaringan kekerabatan kyai dalam masyarakat, seiring dengan itu pengaruh kyai pun kian menurun.

Dilihat dari sisi independensi pesantren, munculnya banyak madrasah di lingkungan pesantren menyebabkan ketergantungan pesantren terhadap negara (pemerintah). Pada awalnya ketergantungan mungkin hanya sebatas penentuan kurikulum yang akan diterapkan, namun dengan banyaknya subsidi serta berbagai bentuk bantuan yang ditawarkan pemerintah kemudian ketergantungan tersebut menjadi permanen. Menurut beberapa orang nara sumber, saat ini banyak kyai atau utusan dari pesantren yang datang ke kantor kabupaten dengan membawa map berisi proposal tentang permintaan bantuan, jenis bantuan yang diminta relatif beragam mulai dari bantuan pembangunan fisik, biaya pengelolaan hingga bantuan dana untuk acara-acara yang akan diselenggarakan di lingkungan pesantren. Keadaan ini ditanggapi secara beragam di kalangan masyarakat, sebagian masyarakat yang mempertahankan sikap independen dari pesantren menyatakan bahwa hal itu menurunkan harga diri dan pengaruh kyai di kalangan masyarakat dan Pemerintah, sebab seharusnya bukan Ulama yang mendatangi Umaroh, tetapi Umaroh yang harus mendatangi Ulama untuk meminta nasehat. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya, terutama sebagian pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa permintaan bantuan terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, sebab mereka membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Di samping itu juga kyai sebagai tokoh masyarakat turut serta dalam menjaga stabilitas guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, wajar bila kemudian pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk penghargaan terhadap kyai, terlebih-lebih terhadap mereka yang mendukung sejak awal pencalonan kepala

daerah. Menurut salah seorang nara sumber dari kalangan pejabat pemerintah Kabupaten Pandeglang, terlepas dari berbagai implikasi yang kemudian timbul, seringkali ketergantungan kyai terhadap pemerintah daerah justru dipelihara oleh pemerintah sendiri dengan harapan pemerintah mendapat umpan balik bersifat politis berupa dukungan terhadap kepala daerah baik secara personal maupun organisasional. Untuk itu seringkali Kepala Daerah memberikan bantuan di luar program-program yang telah ditetapkan sekalipun pada akhirnya memberatkan anggaran yang ada. Kebiasaan seperti ini kemudian menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sekalipun hanya berupa bantuan kecil, namun bila alfa melakukannya maka Pemerintah Daerah dipandang tidak memperhatikan kyai sebagai tokoh masyarakat. Menurut salah seorang kyai yang aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Pandeglang, saat ini para pengurus MUI tersebut sedang resah karena biasanya setiap tahun menjelang Idul Fitri para kyai mendapat pembagian sarung dari Bupati, jenis sarung yang dibagikan biasanya adalah sarung dengan kualitas yang bagus, yakni merk BHS. Namun dalam tahun ini kualitas sarung yang dibagikan jauh lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini selain menimbulkan kesungkaman pihak MUI untuk membagikannya juga menyulut isu di kalangan kyai bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan para kyai. Padahal menurut nara sumber dari Kantor Bupati, pembagian sarung terhadap para kyai tersebut tidak ada dalam anggaran Pemerintah Daerah, sehingga dana untuk itu harus dikeluarkan dari kantong pribadi Bupati. Terlepas dari bentuk bantuan yang diberikan, kondisi ini disatu pihak menggambarkan ketergantungan kyai terhadap pemerintah, dipihak lain mengindikasikan bahwa sekalipun peran sosial para kyai tengah mengalami degradasi namun mereka tetap menuntut hak previlagenya sebagai elit sosial lokal.

### **3.3.6 Jawa**

Mendengar kata jawa, orang sunda yang berada di luar wilayah Banten terbayang akan seseorang yang memakai baju hitam

(*kampret*) dan celana panjang longgar berwarna hitam (*pangsi*), ikat kepala (*romal*) atau topi hitam, golok terselip di pinggang, serta selendang sarung *gebeng*. Selain penampilan fisik tersebut Jawara dikenal sebagai orang atau kelompok orang yang memiliki keberanian tingkat tinggi, berbicara sompral dan meledak-ledak, serta mengandalkan kekuatan ototnya. Terlepas dari kesan umum tentang jawara, secara antropologis, Mohamad Hudaeri Dkk mendefinisikan jawara sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian (*kadigjayaan*), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, sehingga bagi orang lain dapat membangkitkan rasa hormat dan takut, serta kagum dan benci. Karena kelebihanannya itu, ia dapat menjadi seorang tokoh yang kharismatik, terutama pada saat-saat kehidupan sosial mengalami krisis.<sup>16</sup> Cerita tentang jawara menjadi legenda dalam masyarakat, pada masa perlawanan terhadap kolonial Belanda banyak pemberontakan yang dipimpin oleh Jawara dengan melibatkan elit sosial lainnya seperti kyai dan bangsawan. Pada 1895, pemberontakan pertama kaum jawara meletus, dipimpin oleh Haji Wakhia. Kemudian pemberontakan petani yang dipimpin Haji Wasid pada 1888. Pemberontakan 1926 dimotori jawara yang berafiliasi ke PKI, juga revolusi sosial yang dikobarkan rakyat Banten pada 1945-1946 (Suharto:1996). Itu dalam skala nasional, akan lebih panjang daftar pemberontakan yang dimotori jawara jika ditambah peristiwa lokal. Seperti pemberontakan dari Mas Jakaria (1811), Mas Hajji dan Mas Rakka (1818-1819), Mas Raye (1827), Nyi Gumparo (1836), sampai pada pemberontakan yang dipimpin Ratu Bagus Ali dan Mas Jabeng yang gagal (1839). Dilihat dalam lingkup kehidupan sosial secara luas, rangkaian pemberontakan ini merupakan bukti sejarah yang menunjukkan kepemimpinan jawara dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup>Lihat Mohamad Hudaeri Dkk., 2003. "Tasbih dan Golok, Studi Tentang Kharisma Kyai & Jawara di Banten", *Istiqro*, Jurnal Penelitian Vol. 2, No. 1.

Bila jawara dilihat dalam konstelasinya dengan kultur masyarakat Banten secara umum, entitas jawara merupakan sub kultur dari masyarakat Banten. Sebagai sebuah sub kultur, entitas jawara memiliki peran sosial yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran-peran tradisional sosial jawara dalam masyarakat Banten berlangsung turun naik. Hal ini pula yang merubah persepsi masyarakat terhadap jawara. Pada waktu situasi sosial yang kurang stabil, peran jawara biasanya sangat penting, tetapi ketika masyarakat dalam keadaan damai peran mereka kurang diperlukan. Bahkan sering dipandang negatif karena perilakunya yang sering melakukan kekacauan dan kekerasan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kriminal. Namun demikian, peran-peran sosial yang sering dimainkan oleh para jawara adalah di seputar kepemimpinan seperti menjadi *jaro* (lurah), penjaga keamanan desa (*jagakersa*) dan guru silat dan guru ilmu *magis*.

#### **a. Jaro**

Di daerah perdesaan di wilayah Banten terdapat pengurus desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa yang sering disebut *jaro*. Seorang *jaro* memimpin sebuah *kejarooan* (kelurahan). Pada zaman Kesultanan Banten, kepala desa (*jaro*) diangkat oleh Sultan. Tugas utama *jaro* adalah mengurus kepentingan kesultanan, seperti memungut upeti dan mengerahkan tenaga untuk kerja bakti. Dalam pekerjaan sehari-harinya, seorang *jaro* dibantu oleh pejabat-pejabat, yakni: carik (sekretaris *jaro*), *jagakersa* (bagian keamanan), pancalang (pengantar surat), amil (pemungut zakat dan pajak), merbot atau modin (pengurus masalah keagamaan dan mesjid).

#### **b. Guru Silat**

Sejarah ilmu persilatan di Banten memiliki akar yang sangat panjang. Di dalam *Serat Centhini* disebutkan bahwa pada masa pra-Islam telah dikenal istilah "*paguron*" atau "*padepokan*" di daerah dekat sekitar Gunung Karang, Pandeglang. Dalam masyarakat Banten dikenal berbagai macam *perguron*, seperti Terumbu, Bandrong, Paku Banten,

Jalak Rawi, Cimande, Jalak Rawi, si Pecut dan sebagainya. Setiap *perguron* memiliki jurus-jurus dan karakteristik yang berbeda-beda bahkan sejarah kelahirannya. Kini semua *perguron* tersebut ada dalam sebuah P3SBBI (Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia) di bawah pimpinan H. Tb. Chasan Sochib.

### c. Guru Ilmu Batin (*Magis*)

Seorang jawara yang terkenal biasanya selain memiliki kemampuan bela diri yang baik juga memiliki ilmu “batin” atau *magis*, yakni kemampuan untuk memanipulasi kekuatan supranatural untuk memenuhi keputusan praktisnya, seperti kebal dari berbagai senjata tajam, tahan dari api, juru ramal, pengusir jin atau setan, pengendali roh dan pengobatan, seperti patah tulang dan tukang pijit.

Kecenderungan terhadap kekuatan supranatural seperti di daerah Banten ini, memang memiliki akar yang sangat dalam. Sebelum Islam datang ke daerah ini sudah ada para *resi* yang melakukan *tapa*, yakni sebuah praktik meditasi untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan, diceritakan pula bahwa Sultan Hasanuddin sebelum menguasai daerah Banten ini melakukan *tapa* di tempat-tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat kosmis di Banten, yakni Gunung Pulosari, Gunung Karang dan Pulau Panaitan sebelum ia berangkat ke Mekkah untuk melakukan ibadah haji. Bentuk-bentuk *elmu* yang sering dipergunakan para jawara adalah *brajamusti* (kemampuan untuk melakukan pukulan dahsyat), *ziyad* (mengendali sesuatu dari jarak jauh), *jimat* atau *rajah* untuk mencari kewibawaan, kekayaan atau dicintai seseorang, *putter gilling* (untuk memutar kembali atau menemukan kembali orang yang hilang atau kabur), *elmu* (untuk menaklukkan binatang yang berbisa atau berbahaya) dan sebagainya.

### d. Pemain Debus (Seni Budaya Banten)

Peran jawara yang masih dekat dengan kesaktian adalah permainan debus. Permainan debus ini banyak dilakukan oleh para jawara, yang dianggap sudah memiliki kesaktian yang cukup. Jadi tidak

semua jawara dapat melakukan permainan debus, karena bagi yang tidak mampu justru akan mendatangkan bencana atau kecelakaan.

Di Banten ada beberapa macam debus, yakni debus *al-madad*, surosowan dan langitan. Dinamakan debus *al-madad* (artinya meminta bantuan atau pertolongan) karena para pemainnya setiap kali melakukan aksinya selalu mengucapkan kata-kata *al-madad*, yang seolah menggambarkan bahwa tindakan ini didasarkan atas pertolongan dari Allah SWT. Debus *al-madad* merupakan debus yang paling berat karena untuk melakukan permainan ini khalifahnyanya (pemimpin group) harus melakukan amalan yang sangat panjang dan berat. Amalan-amalan khalifah debus ini diambil dari tarekat Rifa'iyah atau Qodariyah. Sehingga seseorang yang mendapat *ijazah* untuk menjadi khalifah dari permainan debus ini adalah mereka yang telah dianggap mampu atau lulus menempuh suatu perjalanan panjang dalam mengamalkan suatu do'a-do'a tertentu, melaksanakan puasa dan meditasi lama. Sedangkan, debus surosowan adalah permainan debus yang tidak memerlukan kemampuan yang tinggi. Karena itu, permainan debus ini bisa dilakukan oleh para remaja. Nama "surosowan" berkaitan dengan nama istana Kesultanan Banten. Nampaknya semenjak awal debus ini memang ditujukan untuk pertunjukan di Istana Surosowan pada masa Kesultanan Banten bukan untuk mendapatkan kesaktian. Hal ini berbeda dengan debus *al-madad* yang selain dipergunakan untuk pertunjukan juga dipergunakan untuk kesaktian atau pengobatan. Adapun, debus langitan adalah pertunjukan debus yang mempergunakan anak-anak remaja yang dijadikan obyek sasaran benda-benda tajam tanpa yang bersangkutan merasa sakit atau menderita luka-luka. Permainan debus langitan ini pun nampaknya ditujukan hanya untuk permainan belaka, bukan untuk mendapatkan kekebalan tubuh atau kesaktian.

#### **e. Tentara Wakaf dan Khodim Kyai**

Peran jawara sebagai "tentara wakaf" ini dikoordinir oleh P3SBBI. Mereka biasanya diterjunkan pada acara-acara yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau partai politik. Pada masa Orde

Baru “tentara wakaf” ini dijadikan alat oleh Golkar sebagai satuan pengamanannya di Banten. Bahkan, ketua umumnya sendiri dijadikan pengurus partai politik tersebut. Namun, perubahan politik yang besar yang terjadi di negeri ini pasca reformasi, juga ikut merubah pandangan politiknya. Mereka sekarang nampaknya ingin bersifat lebih netral, dengan tidak berafiliasi pada partai tertentu. Oleh karena itu, apabila ada tawaran-tawaran untuk menjaga keamanan atau membantu polisi, mereka lebih terbuka dan menerima tawaran tersebut tanpa lagi melihat afiliasi politik.

Jawara yang sebenarnya adalah “khodim kyai”. Itulah suara-suara yang sering muncul dari para warga yang tidak setuju dengan peran-peran dan perilaku jawara sekarang ini. Peran sebagai “khodim kyai” maksudnya berperan sesuai yang diajarkan para kyai, yakni: membela kebenaran, berpihak kepada masyarakat yang lemah, berperilaku santun dan tidak sombong dan sejumlah aturan normatif lainnya. Peran-peran yang ideal itu semakin kurang dilakukan oleh para jawara di tengah kepekaan kehidupan yang materialistik.

Sementara itu, dalam membangun jaringan sosial, para jawara memiliki pola hubungan yang khas di antara mereka. Salah satu yang khas dari kehidupan antar mereka adalah rasa solidaritas yang tinggi. Apalagi kalau yang menghadapi masalah tersebut adalah orang yang memiliki hubungan emosional, seperti adanya hubungan kekerabatan, *seguru-seelmu*, pertemanan dan sebagainya.

#### **a. Kekerabatan**

Meskipun jaringan kekerabatan dalam kehidupan para jawara tidak seketat dalam tradisi kehidupan para kyai, namun kekerabatan juga memiliki hal penting dalam membina hubungan solidaritas dan pengajaran *elmu-elmu* kesaktian dan *magis*. Para jawara akan membela sepenuhnya apabila ada salah seorang dari kerabatnya itu dihina atau disakiti orang lain. Begitu pula para jawara akan mengutamakan para kerabatnya, terutama anak laki-lakinya, dalam mengajarkan *elmu* yang dimilikinya dari pada ke orang lain.



Rasa solidaritas yang tinggi terhadap keluarga itu tidak lepas dari nilai-nilai yang sering didengungkan dalam kehidupan mereka. Para jawara sering menekankan bahwa kalau menjadi jawara harus (1) *leber wawanen* (berani dan militan), (2), *silih wawangi* (sikap kekeluargaan) dan (3) *kukuh kana janji* (memiliki komitmen yang kuat untuk menepati janji).

## **b. Saguru-Seelmu**

Dalam tradisi jawara hubungan dengan guru, terutama yang menurunkan *elmu* kesaktian atau *magis*, adalah sama kedudukannya dengan orang tua. Anak buah jawara menyebut para gurunya (kepala jawara) itu dengan panggilan “abah”, yang artinya sama dengan “bapak”. Panggilan itu menyimbolkan bahwa kedekatan hubungan guru-murid adalah seperti kedekatan hubungan orang tua dengan anaknya.

Kini jaringan *seguru-seelmu* ini sebenarnya masih bertahan dengan baik dalam *perguron-perguron* persilatan yang masih tetap bertahan, bahkan mampu mengembangkannya sehingga satu *perguron* memiliki berapa cabang di daerah-daerah lain. *Perguron-perguroan* yang cukup terkenal karena memiliki jaringan yang cukup besar adalah Trumbu, Bandrong, TTKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) dan Jalak Rawi.

## **c. Organisasi Massa**

Organisasi yang didirikan oleh para tokoh jawara adalah Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBI) pada tahun 1971, hampir bersamaan dengan didirikannya Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama). Pendirian organisasi ini nampaknya juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam rangka merangkul dan mengendalikan potensi politik yang ada di wilayah Banten. Jaringan yang dibentuk oleh para jawara tersebut kini tidak hanya bersifat non-formal atau tradisional tetapi juga kini memiliki organisasi masa yang tersendiri, yakni dengan terbentuknya

P3SBBI (Persatuan Pendekar Pesilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia). Organisasi para pendekar ini kini menghimpung lebih dari 100 *perguruan* yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Organisasi ini berpusat di Serang, Ibukota Provinsi Banten, yang kini masih dipimpin oleh H. Tb. Chasan Sochib.<sup>17</sup>

Dalam uraian di atas telah disinggung bahwa pembentukan organisasi jawara oleh para tokohnya tidak lepas dari campur tangan pemerintah, dalam konteks ini tampaknya pemerintah Orde Baru sangat menyadari bahwa di samping kyai, jawara memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat. Dengan formalisasi organisasi jawara, bersama dengan para kyai, kalangan jawara masuk dalam organisasi bentukan Golkar, yakni Satkar Ulama Banten, di mana tokoh jawara Banten, Tb Chasan Sochib duduk dalam kepengurusan organisasi tersebut. Secara politis kejadian ini sebenarnya merupakan upaya Orde Baru untuk memanfaatkan kepemimpinan jawara sebagai mesin politik partai pemerintah, yakni Golkar. Tidak seperti kyai, keterlibatan jawara dalam Satkar Ulama Banten pada gilirannya memberikan keuntungan bagi kalangan jawara itu sendiri, khususnya tokoh jawara. Tokoh jawara menjadi dekat dengan kalangan militer, birokrasi dan Golkar. Hubungan yang terbentuk berupa patronase antara jawara dengan rezim Orde Baru. Pola patronase dengan rezim ini pada gilirannya menempatkan tokoh jawara memiliki hak istimewa untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Banten.<sup>18</sup> Sejak saat itu jawara tidak hanya memainkan peran sosial yang bersifat tradisional semata, tetapi juga merambah pada sektor ekonomi, bahkan politik. Pada masa desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya pasca pembentukan Provinsi Banten, peran jawara dalam sektor ekonomi dan politik semakin kuat. Dengan menempatkan kader-kader mereka dalam berbagai lini, mereka memiliki jaringan yang luas, baik di legislatif, eksekutif, partai politik maupun asosiasi-asosiasi pengusaha. Sang

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Lihat Lili Romli, Taftazani. 2006. "Jawara dan Kekuasaan: Peranan Jawara Dalam Politik Pasca Pembentukan Provinsi Banten", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 6. No. 2.

Ketua organisasi jawara telah merangkap menjadi pengusaha yang kaya raya, dalam perkembangan lebih lanjut kemudian membangun dinasti politik di wilayah Banten. Setelah berhasil mendorong putrinya menjadi wakil gubernur Banten, kemudian menjadi Gubernur, anak yang lainnya menjadi Kepala Daerah Di Tangerang Selatan. Sementara itu, banyak saudara, kerabat Sang Ketua organisasi jawara menjadi anggota legislatif, bahkan istri ketiganya menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Keberhasilan Sang Ketua di bidang ekonomi dan politik menjadi "*row model*" yang di acui oleh para jawara di seluruh wilayah Banten, termasuk di Pandeglang. Menurut salah seorang nara sumber, di daerah pandeglang banyak jawara yang merangkap menjadi pemborong yang mengerjakan proyek fisik pemerintah. Sementara itu, menurut salah seorang pengusaha, saat di Pandeglang ada sekitar 267 buah perusahaan yang bergerak dalam jasa konstruksi, 10 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan sisanya berbentuk CV, sebagian di antara CV tersebut merupakan perusahaan pribadi para jawara. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa para jawara tersebut meminta proyek pada berbagai instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan identitas kultural sebagai jawara. Jaringan yang mereka miliki, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif serta asosiasi pengusaha biasanya mereka manfaatkan secara optimal, kadang-kadang juga mereka menggunakan massa jawara sebagai sumber daya untuk memperoleh proyek.

Di samping adanya *row model* yang menjadi acuan, organisasi formal jawara (P3SBBI) tampaknya menjadi wahana pembinaan para jawara di daerah-daerah, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi dan politik yang ada di lingkungannya. Salah seorang tokoh jawara yang kini merangkap menjadi kontraktor dan pemborong serta Ketua Umum DPD II Partai Golkar Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa Dia saat pertama kali mengenal Ketua Organisasi Jawara masih nol besar. Setelah Dia diasuh, baik di bidang usaha maupun bidang organisasi pendekar, akhirnya saat ini Dia

sukses.<sup>19</sup> Pengakuan tokoh jawara tersebut sejalan dengan pernyataan beberapa orang nara sumber yang menyatakan bahwa banyak anak asuh Sang Ketua yang kemudian dilepas untuk berusaha sendiri. Secara terbuka salah seorang nara sumber menyatakan bahwa dorongan untuk berusaha sendiri dari sang Ketua tersebut tadinya mungkin dimaksudkan untuk melepaskan ketergantungan secara financial kepada sang Ketua, dari pada meminta duit terus-menerus kepada Sang Ketua mendingan disuruh mencari duit sendiri dengan menggunakan sarana organisasi jawara. Seiring dengan peran ganda (peran sosial tradisional dan peran dalam bidang ekonomi/politik) yang dimainkan para jawara, persepsi masyarakat tentang jawara pun tampaknya bergeser. Seorang nara sumber dari warga masyarakat yang ditemui ketika sedang belanja di pasar Pandeglang menyatakan bahwa dahulu gambaran seorang jawara itu adalah orang yang sakti, kebal dibacok dan pemberani. Kemampuan dalam ilmu kanuragan (ilmu bela diri) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang jawara jaman dahulu, namun sekarang gambaran tentang jawara itu berubah, seorang jawara harus kaya, banyak uang dan memiliki mobil keluaran baru yang mengkilat. Pernyataan nara sumber tersebut mengindikasikan bahwa tuntutan kehidupan sosial yang materialistik tampaknya telah menggeser peran ideal seorang jawara. Menanggapi peran jawara saat ini, salah seorang nara sumber dari “Banten Haritage” menyatakan bahwa bila dinilai saat ini peran ideal jawara sebagai pelindung masyarakat itu sebenarnya hanya fakta sosial yang dikemas dalam legenda, kenyataan yang ada sekarang entitas jawara itu hanya kelompok kepentingan yang menggunakan identitas budaya.

Terlepas dari persepsi masyarakat tentang jawara sebagaimana dideskripsi di atas, pasca reformasi, jawara tidak hanya bernaung di bawah satu organisasi masyarakat. Di Pandeglang, selain P3SBBI ada juga organisasi masyarakat yang menaungi para jawara, yakni Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BKPPKB). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pandeglang, jumlah anggota saat ini

---

<sup>19</sup>*Ibid*

sekitar 10.000 orang, sebagian besar di antara mereka adalah para jawara dari setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, dahulu organisasi ini terkesan sebagai organisasi para preman. Lebih jauh nara sumber tersebut menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya organisasi ini sedang melakukan metamorfosa dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang lucu, sehingga kesan sebagai organisasi preman menjadi sirna. Untuk itu dilakukan perberdayaan para anggota dengan membuka berbagai kegiatan usaha seperti toko baju, toko sembako, bahan bangunan dan hasil bumi. Selain kegiatan usaha juga dirintis berbagai kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perberdayaan para anggota, seperti kerjasama dengan Asuransi Bumi Putra dan PT. Sigap Perkasi di Jakarta. Kerjasama dengan PT. Asuransi Bumi Putra dilakukan untuk menyalurkan para anggotanya menjadi Agen Asuransi, hingga saat sudah ada sebanyak 60 orang anggota yang menjadi agen asuransi. Sementara itu, kerjasama dengan PT. Sigap Perkasi di Jakarta dilakukan dalam rangka merintis kerjasama untuk membikin perusahaan penyaluran tenaga kerja (alih daya), khususnya untuk tenaga pengamanan. Sekalipun banyak program masih dalam tahap perintisan, namun upaya yang dilakukan oleh BKPPKB ini merupakan langkah positif dalam menciptakan orientasi baru bagi para jawara untuk merubah citra negatif tentang jawara di kalangan masyarakat. Hal ini sangat penting, sebab selama ini selain merubah nama dari jawara menjadi pendekar tidak ada upaya untuk memberikan orientasi baru terhadap jawara, seiring dengan perkembangan jaman identitas kultural jawara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih kepentingan ekonomi dan politik. Bila hal ini dibiarkan larut terus-menerus, maka dalam perkembangan lebih lanjut peran ideal jawara hanya akan menjadi catatan sejarah masa lalu.

### **3.4 Penutup**

Mayoritas penduduk Pandeglang adalah petani, mereka kebanyakan tinggal di pelosok-pelosok desa. Bukan saja secara kuantitatif jumlah petani ini relatif banyak, namun juga sebagian dari

mereka yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang relatif luas menjadi elit masyarakat setempat. Petani dilihat dalam konstelasinya dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang, tampaknya kelompok petani ini belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah tersebut. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang difokuskan pada pariwisata sebagai pengungkit dan pembangkit ekonomi daerah. Sementara itu, agro wisata diperkuat untuk menarik wilayah belakang. Sekalipun ada upaya untuk memperkuat agro industri, namun itu baru dalam tahap perencanaan, sedangkan fokus utama tetap pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, Kecamatan Panimbang yang memiliki objek wisata pantai di Tanjung Lesung jauh lebih berkembang dibanding daerah-daerah lain yang menjadi basis pertanian. Sekalipun kelompok petani termarjinalisasi oleh arah kebijakan pembangunan daerah, namun sikap para petani cenderung pasif. sikap pasif para petani sebenarnya disebabkan karena struktur kekuasaan sejak dahulu yang tidak pernah memberi ruang untuk bersikap partisipatif terhadap mereka.

Di luar sektor pertanian, akhir-akhir ini berkembang jenis usaha baru yakni pemborong atau kontraktor. Sekalipun jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam usaha ini relatif sedikit, namun jenis usaha ini dipandang prestisius dan menjadi simbol jenis usaha modern ditengah masyarakat yang agraris. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas, fenomena munculnya pemborong/kontraktor di Pandeglang merupakan lompatan aktifitas dari lingkungan agraris ke dalam sektor modern. Namun demikian, untuk itu kapasitas mereka belum memadai, profesionalisme sebagai prasyarat mutlak dinafikan demi mengejar keuntungan sesaat. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi setempat. Oleh karena itu, kemudian menjadi ajang persaingan di antara mereka. Dalam upaya memenangkan persaingan tersebut tidak hanya koneksitas yang dimanfaatkan, tetapi juga identitas kultural digunakan untuk memaksakan kepentingan mereka.

Di luar kelompok masyarakat berdasarkan kategori ekonomi (mata pencaharian/lapangan usaha), kelompok masyarakat lain yang

relatif dominan adalah organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di luar organisasi masyarakat yang tercatat, jumlah LSM yang tercatat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang saat ini sekitar 95 organisasi. Dilihat dari tahun pendiriannya, seluruh LSM tersebut rata-rata didirikan di atas tahun 1999, hal ini mengindikasikan bahwa secara ideal pendirian LSM tersebut pada dasarnya merupakan respon masyarakat terhadap konsolidasi demokrasi yang terjadi pasca reformasi. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut, LSM, khususnya FK-LSM bukan lagi kelompok strategis bagian dari *civil society* yang berfungsi mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, melainkan hanya kelompok kepentingan yang terlibat dalam perebutan sumber daya ekonomi berupa proyek yang berada dalam kontrol Pemerintah Daerah.

Dilihat dari segi peran sosial yang dilaksanakannya, entitas kyai dan Jawara merupakan sub-kultur masyarakat Pandeglang secara umum. Di tengah masa liberalisasi politik saat ini, sebagian kyai sebagai elit lokal terlibat dalam pembentukan Partai politik, bahkan kemudian menjadi pengurus aktif partai politik tersebut. Kyai-kyai yang berasal dari pesantren yang tadinya relatif independen atau menjaga jarak dengan pemerintah, bahkan tidak mau terlibat dalam pecaturan politik, pasca reformasi kemudian berafiliasi dengan partai politik tertentu. Keadaan ini membawa implikasi yang sangat luas, kyai yang tadinya berdiri di atas kepentingan umat kemudian terfragmentasi ke dalam kepentingan-kepentingan partai politik yang menjadi pilihannya. Keadaan ini kemudian menyebabkan kyai terdegradasi dari fungsi katalisnya. Di samping kondisi makro tersebut terdegradasinya fungsi dan peran kyai dalam masyarakat juga disebabkan terjadinya perubahan pola pendidikan di pesantren. Perubahan pola pendidikan salaf ke pola pendidikan modern dalam bentuk madrasah membawa implikasi luas terhadap fungsi dan peran kyai. Hubungan guru dengan murid yang tadinya seras dengan ikatan emosional, kemudian berubah menjadi hubungan guru dengan murid sebagaimana lazimnya terjadi pada sekolah-sekolah umum. Seiring dengan itu, di lingkungan pesantren yang membuka madrasah cenderung diikuti dengan

penurunan jumlah santri tetap di pesantren yang bersangkutan. Kondisi ini pada akhirnya mempersempit jaringan kekerabatan kyai dalam masyarakat, seiring dengan itu pengaruh kyai pun kian menurun. Dilihat dari sisi independensi pesantren, munculnya banyak madrasah di lingkungan pesantren menyebabkan ketergantungan pesantren terhadap negara (pemerintah). Pada awalnya ketergantungan mungkin hanya sebatas penentuan kurikulum yang akan diterapkan, namun dengan banyaknya subsidi serta berbagai bentuk bantuan yang ditawarkan pemerintah kemudian ketergantungan tersebut menjadi permanen. Menurut beberapa orang nara sumber, saat ini banyak kyai atau utusan dari pesantren yang datang ke kantor kabupaten dengan membawa map berisi proposal tentang permintaan bantuan, jenis bantuan yang diminta relatif beragam mulai dari bantuan pembangunan fisik, biaya pengelolaan hingga bantuan dana untuk acara-acara yang akan diselenggarakan di lingkungan pesantren. Terlepas dari bentuk bantuan yang diminta, kondisi ini disatu pihak menggambarkan ketergantungan kyai terhadap pemerintah, dipihak lain mengindikasikan bahwa sekalipun peran sosial para kyai tengah mengalami degradasi namun mereka tetap menuntut hak previlagenya sebagai elit sosial lokal.

Seperti halnya kyai, entitas Jawa merupakan Sub-Kultur masyarakat Pandeglang secara umum. Sekalipun keduanya sama-sama merupakan sub-kultur masyarakat pandeglang, namun dalam percaturan politik lokal relatif berbeda. Pada masa rezim Orde Baru kepemimpinan jawara dimanfaatkan sebagai mesin politik partai pemerintah, yakni Golkar. Tidak seperti kyai, keterlibatan jawara dalam Satkar Ulama Banten pada gilirannya memberikan keuntungan bagi kalangan jawara itu sendiri, khususnya tokoh jawara. Tokoh jawara menjadi dekat dengan kalangan militer, birokrasi dan Golkar. Hubungan yang terbentuk berupa patronase antara jawara dengan rezim Orde Baru. Pola patronase dengan rezim ini pada gilirannya menempatkan tokoh jawara memiliki hak istimewa untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Banten. Keberhasilan para tokoh jawara, terutama ketuanya di bidang ekonomi dan politik menjadi “*row model*”



yang di acu oleh para jawara di seluruh wilayah Banten, termasuk di Pandeglang. Pasca reformasi, keterlibatan jawara dalam bidang ekonomi semakin kuat, sehingga mereka memerankan peran ganda, yakni peran sosial tradisional dan peran dalam bidang ekonomi/politik. Dalam realitas sosial saat ini, peran dalam bidang ekonomi tampaknya jauh lebih menonjol ketimbang peran sosial tradisionalnya, tuntutan kehidupan sosial yang matrealistik tampaknya telah menggeser peran ideal seorang jawara. Dengan pergeseran peran tersebut, tampaknya saat ini peran ideal jawara sebagai pelindung masyarakat hanya merupakan fakta sosial yang dikemas dalam legenda, kenyataan yang ada sekarang entitas jawara itu hanya kelompok kepentingan yang menggunakan identitas budaya. Bila hal ini dibiarkan larut terus-menerus, maka dalam perkembangan lebih lanjut peran ideal jawara hanya akan menjadi catatan sejarah masa lalu.

## Daftar Pustaka

- Ali Maschan Moesa. 2007. *Nasionalisme Kyai, Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Ekadjati, Edi S. 1995. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Guillot, Cluade. 1990. *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lili Romli, Taftazani. 2006. "Jawara dan Kekuasaan: Peranan Jawara Dalam Politik Pasca Pembentukan Provinsi Banten", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 6. No. 2.
- Lili Romli. 2008. "Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol: Catatan Atas Hasil Pemilu

- 1999 dan Pemilu 2004". *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 8. No. 1.
- Mohamad Hudaeri Dkk. 2003. "Tasbih dan Golok, Studi Tentang Kharisma Kyai & Jawara di Banten". *Istiqro*. Jurnal Penelitian Vol. 2, No. 1.
- Manfred Ziemek. 1986. *Pesantren dalam Perubahan*. Jakarta: P3M.
- Nina Lubis. 2003. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, Jakarta: LP3ES.
- Tihami, M.A., 1992. "Kyai dan Jawara di Banten," dalam *Tesis Master Universitas Indonesia*.
- , 2012. Kompas Indonesia. *BPPKB Banten, Ormas Terbina dan Membina*. 30 April.
- , 2010. *Profil Daerah & Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang*, Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- , 2010. *Laporan Perekonomian Kabupaten Pandeglang*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

## BAB IV

# DINAMIKA SOSIAL BUDAYA KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL DI KOTA MAKASSAR

Oleh Rochmawati

### 4.1 Pengantar

Studi tentang dinamika kewarganegaraan kelompok sosial di perkotaan pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari pola dan kecenderungan relasi sosial yang tumbuh, berkembang, dan akhirnya terbentuk di antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu aspek yang penting dikaji terkait hal itu adalah terbentuknya pola dan kecenderungan relasi sosial atas dasar latar belakang budaya kelompok-kelompok sosial di perkotaan. Heterogenitas kelompok-kelompok sosial atas dasar perbedaan latar belakang budaya diduga turut mempengaruhi dinamika kewarganegaraan kelompok sosial di perkotaan.

Salah satu kota yang menarik untuk mengaji dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok sosial adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Kota Makassar yang kini dianggap sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, telah tumbuh menjadi kota metropolitan yang mengundang hadirnya berbagai kelompok sosial yang memiliki latar belakang budaya berbeda satu sama lain namun dituntut untuk saling berinteraksi sebagai warga perkotaan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Begitu besarnya daya tarik Makassar bagi para pendatang dari luar daerah dan bahkan luar pulau, sehingga dapat diibaratkan ibukota Sulawesi Selatan ini sebagai “gula” yang setiap saat dikerubuti “semut”, yakni warga pendatang yang mencari kehidupan baru yang lebih baik di Kota Makassar.

Dalam kaitan tersebut, tulisan ini hendak membahas dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok sosial budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan metropolitan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fokus pembahasan akan diarahkan pada pola relasi kelompok-kelompok sosial budaya yang ada di Kota Makassar serta pengaruh latar belakang kultural terhadap dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok sosial budaya tersebut.

## **4.2 Dinamika Sosial Budaya dalam Jalinan Etnisitas di Kota Makassar**

Menurut sejarahnya Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian dan pusat pendidikan di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain itu Sulawesi Selatan mewarisi tradisi kerajaan yang cukup kuat, diantaranya yakni Bone, Gowa, dan Luwu. Ketiga kerajaan ini merupakan kerajaan besar dan sangat berpengaruh baik di Sulawesi Selatan maupun di luar daerahnya (di wilayah Indonesia). Dengan memiliki tradisi seperti itu dan dalam konteks perkembangan demokrasi saat ini, wilayah Sulawesi Selatan menjadi daerah kaya terutama dalam hal pengalaman interaksi antara warisan budaya yang kuat dengan keharusannya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau dilihat dari latar belakang sejarahnya Provinsi Sulawesi Selatan (Bone, Gowa, dan Luwu) seperti telah diuraikan di atas yaitu merupakan satu kesatuan sekaligus kerajaan besar di mana rajanya telah melakukan kawin mawin, seperti contohnya anak raja Gowa menjadi raja Bone, kemudian anaknya raja Bone kawin dengan anaknya raja Luwu dan begitu seterusnya. Sedangkan yang membedakan adalah adanya faktor kelompok-kelompok atas dasar primordial yang tumbuh pesat pada era reformasi dan otonomi daerah. Pengelompokan dan pengkotakan itu misalnya seperti kelompok Bugis, kelompok Makassar dan sebagainya. Padahal jika kita lihat pada masa lalu tidak ada yang namanya pengkotakan-pengkotakan seperti itu.

Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah urban yang dipadati oleh penduduk dari berbagai daerah. Dengan kata lain, penduduk Kota Makassar termasuk

heterogen karena penduduknya terdiri dari beberapa etnis atau suku. Penduduk Sulawesi Selatan memiliki 4 (empat) etnis atau suku besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sedangkan penduduk pendatang di antaranya berasal dari Jawa, Sunda, Minang, Minahasa, dan lain lain. Sementara itu, penduduk pendatang di kalangan mahasiswa pada umumnya berasal dari wilayah-wilayah Indonesia bagian timur seperti Flores, Bima dan Maluku. Begitu juga dengan agama yang dianut oleh penduduk Kota Makassar mayoritas beragama Islam, dan penduduknya terkenal religius dalam menjalankan kehidupan agamanya. Penduduknya selain beragama Islam ada juga yang beragama Kristen, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Etnis atau suku Bugis, Makassar dan Mandar mayoritas beragama Islam sedangkan untuk etnis atau suku Toraja mayoritas beragama Kristen. Sementara itu, jika dilihat pada jalur birokrasi atau jalur pemerintahan pada umumnya didominasi oleh etnis Bugis-Makassar.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan dari etnis-etnis Bugis-Makassar adalah kebudayaan yang mendiami bagian terbesar dari wilayah selatan Pulau Sulawesi. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukotanya Kota Makassar. Jika dilihat dari segi penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Penyebaran penduduk Kota Makassar tersebar di 14 (empatbelas) kecamatan, dan penduduknya masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate yaitu sebanyak 170.878 jiwa atau sekitar 12,76%, kemudian di kecamatan Biringkanaya sebanyak 167.741 jiwa atau sekitar 12,52%, kecamatan Rappoeini berjumlah 151.091 jiwa atau sekitar 11,28% dan yang terendah adalah di wilayah kecamatan Ujungpandang yaitu 26.904 jiwa atau sekitar 2,01%. dan selebihnya tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu di kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Wajo, Bontoara, Ujung Tanah, Tallo, Panakukang, Manggala, dan Tamalanrea.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber data, BPS Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2011.

Jika melihat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan setiap tahun selalu bertambah sebagai akibat dari urbanisasi, secara tidak langsung Kota Makassar telah menjadi kota urban sekaligus pusat perdagangan, pendidikan, dan pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Kota Makassar khususnya pemerintah wilayah kota telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan seperti kawasan perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kota Makassar telah memperkenalkan dirinya sebagai kota metropolitan dan merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Kota Makassar, memberikan gambaran bahwa secara geografis, sangat strategis jika dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dilihat dari faktor ekonomi, Kota Makassar sebenarnya bisa menjadi simbol keberhasilan bagi wilayah Indonesia timur. Namun selama ini Kota Surabaya lebih dikenal sebagai *home base* pengelolaan produk-produk untuk kawasan timur Indonesia, sehingga Kota Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal jika melihat kondisi geografisnya sangat memungkinkan untuk dikembangkan, dan hal ini sudah terbukti bahwa Kota Makassar mampu membuktikan diri sebagai pusat pengembangan wilayah terpadu di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, Kota Makassar saat ini memiliki daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat daerah lain berbondong-bondong datang untuk mencari pekerjaan atau “kehidupan baru” yang memberikan suatu pengharapan bagi setiap orang khususnya para pendatang.

Sebagai bekas wilayah kerajaan pada masa lalu maka kalangan bangsawan masih sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan terutama di bidang sosial politik. Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan Bugis yang bergelar “Andi” dan keturunan bangsawan Makassar yang bergelar “Karaeng”, menurut sejarahnya menempati posisi yang terhormat di mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki tanah yang cukup luas dan di antara mereka banyak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan politisi. Masyarakat keturunan bangsawan, baik yang berasal dari bangsawan Bugis maupun Makassar, termasuk ke dalam

“kelompok elite” bersama-sama dengan kalangan profesional, pengusaha, intelektual, juga agamawan, bergabung dan bekerjasama dengan baik.

Berdasarkan sejarahnya Kota Makassar dan Kabupaten Bone mempunyai keterkaitan dengan masa lalu, yaitu Kota Makassar terkait dengan kerajaan Gowa, sedangkan kabupaten Bone terkait dengan kerajaan Bone. Saat ini sisa-sisa feodalisme masih cukup tampak dalam hierarki struktur sosial dengan adanya semacam pembagian kelas antara kelompok bangsawan (dengan sebutan “Andi”, “Karaeng”, atau semacamnya) dengan kelompok bukan bangsawan. Para keturunan bangsawan tersebut sekarang ini masih mempunyai pengaruh dan peran di Sulawesi Selatan, termasuk di pemerintahan lokal. Perlu diketahui bahwa menurut sejarahnya pemberian gelar-gelar kebangsawanan seperti “Andi”, “Daeng, dan “Karaeng” merupakan peninggalan masa lalu yaitu pemberian dari pemerintahan kolonial Belanda. Sementara itu, pengembangan egalitarianisme dan demokratisasi di wilayah itu khususnya di wilayah Bone yang tradisi kebangsawanannya masih kuat dan masyarakatnya relatif homogen dibanding Makassar terhambat salah satunya oleh hierarki sosial yang telah mentradisi ratusan tahun lamanya.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari sistem kekerabatan, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kota Makassar khususnya, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun karena fungsinya sebagai struktur dasar yang membentuk tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis-Makassar yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan, hirarki sosial, kekuasaan dan pengaruh pribadi.

---

<sup>2</sup>Tri Ratnawati, “Partai Dan Demokrasi Pura-Pura? Dinamika Partai Di DPRD Makassar dan Bone”, dalam Syamsuddin Haris, ed., *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2006.

Sebagaimana umumnya masyarakat Austronesia, khususnya orang-orang Nusantara seperti Melayu, Jawa, Kalimantan dan Filipina, orang Bugis-Makassar menganut sistem kekerabatan bilateral. Kelompok kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Suatu hal yang sangat umum berlaku di kalangan masyarakat Eropa, meskipun tidak terlalu universal. Sebaliknya, sistem kekerabatan kebanyakan masyarakat non Eropa, yang diteliti ahli-ahli antropologi, pada umumnya menganut prinsip patrilineal atau matrilineal.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar yang terpenting adalah memiliki garis keturunan nenek moyang dari bapak dan ibu, mulai dari yang terdekat hingga kerabat jauh yang berasal dari lima lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapis sepupu mereka. Hubungan kekerabatan tersebut biasanya disebut dengan istilah a'seajingeng yang artinya mempunyai asal usul yang sama. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh lapisan leluhur yang menghubungkan mereka. Hubungan berdasarkan nenek moyang tersebut, baik dari pihak bapak maupun ibu, menyatukan mereka dalam suatu sistem kekerabatan dan memisahkan mereka dengan orang lain (tau laeng). Masyarakat Bugis-Makassar tidak memiliki suatu kelompok kekerabatan bilateral yang mengutamakan salah satu pasangan nenek moyang saja, sebagaimana halnya orang Toraja tetangga mereka yang hanya memusatkan inti kelompok keluarga masing-masing pada sebuah rumah keluarga (tongkonan). Yang terpenting bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah dicapainya derajat yang tinggi dalam sistem stratifikasi sosial.<sup>3</sup> Walaupun pada masa sekarang sistem stratifikasi sosialnya mulai ada pergeseran sesuai dengan perubahan zaman.

---

<sup>3</sup>Christian Pelras, dalam *Manusia Bugis*, Forum Jakarta–Paris, Ecole francaise de'Extreme-Orient, Jakarta, 2006.



### 4.3 Stratifikasi Sosial dan Nilai Kultural Masyarakat Kota Makassar

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata *stratum* yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Sebagaimana Pitirir A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai perbedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Sementara itu, menurut Max Weber, yang dimaksud dengan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, *previllege* dan *prestise*.

Adanya sistem lapisan masyarakat (stratifikasi sosial) dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah berdasarkan faktor kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta seseorang dalam batas-batas tertentu.

Sifat sistem lapisan sosial (stratifikasi sosial) di dalam masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed sosial stratification*), terbuka (*open sosial stratification*), dan sistem lapisan sosial campuran. Yang dimaksud dengan stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas pada mobilitas horisontal saja. Sedangkan yang dimaksud stratifikasi sosial terbuka lebih bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggotanya dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal.

Sedangkan yang dimaksud dengan stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka.<sup>4</sup>

Melihat sistem lapisan sosial (stratifikasi sosial) di dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Sulawesi Selatan yang cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattulada,1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.

Begitu juga dengan stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar dari sejak dahulu telah memberikan posisi (kedudukan) yang sangat istimewa terhadap kaum bangsawan sebagai elit yang dianggap cukup strategis dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial yang ada. Para bangsawan tersebut menjadi pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi masyarakat Bugis Makassar dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan, di mana kasta-kasta atau golongan-golongan tersebut dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan religius masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. Sehubungan dengan penempatan posisi bangsawan dalam stratifikasi sosial ini, di dalam masyarakat Bugis-Makassar terdapat hubungan yang sangat kompleks antara individu yang satu dengan individu lainnya. Seperti kita ketahui bahwa

---

<sup>4</sup>(<http://sosiologiuntukindonesia.blogspot.com/2012/02/makalah-stratifikasi-sosial.html>). Senin, 13 Februari 2012.

pada masa lalu hubungan-hubungan yang paling erat adalah hubungan antara bangsawan dan para pengikutnya.<sup>5</sup>

Kelompok bangsawan dalam masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu:

- (1) Kelompok bangsawan yang sudah modern.
- (2) Kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi.

Yang dimaksud dengan kelompok bangsawan yang sudah modern adalah mereka yang sudah mau membuka diri dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari terutama di dalam kehidupan lingkungan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan mampu menyekolahkan anak-anaknya keluar daerah atau keluar Sulawesi Selatan seperti kota-kota besar di Pulau Jawa. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi adalah mereka yang dalam kehidupannya masih “agak tertutup”, tidak begitu peduli dengan pentingnya pendidikan, mereka terlalu kuat ikatan emosional masa lalu. Meskipun mereka mendapat tempat teratas dan sangat dihormati dalam masyarakatnya, mereka tidak menyadari bahwa situasi dan kondisi pada saat ini sudah sangat berbeda. Seperti dikemukakan oleh seorang nara sumber yang mengatakan bahwa ada seseorang yang pada masa lalu sangat dihormati dan bahkan disegani karena berasal dari keturunan bangsawan. Tetapi karena situasi yang ada telah mengubah segalanya, misalnya orang tua dari yang bersangkutan meninggal, juga tidak memiliki pendidikan yang cukup, dan harta kekayaan peninggalan orangtua sudah habis, mereka akhirnya sudah tidak mendapat tempat di mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyikapi kondisi seperti ini hanya berupa pengakuan dan penghormatan saja bahwa yang bersangkutan betul-betul keturunan bangsawan tidak lebih dari itu.

---

<sup>5</sup>Najamuddin, *Persaingan Elit Bangsawan Dengan Kelompok Terdidik Pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan*.

Jika pada masa kini kaum bangsawan atau keturunan bangsawan ada yang masih tetap eksis, baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor lain, hal ini disebabkan karena ada 2 (dua) faktor penting, yaitu pertama karena faktor pendidikan dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Bagi keturunan bangsawan yang masih eksis hingga kini penyebabnya adalah karena keluarga bangsawan pada umumnya disekolahkan sampai ke jenjang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi, dan juga ditunjang oleh faktor ekonomi keluarga yang cukup kuat. Biasanya masyarakat yang berasal dari kalangan keturunan bangsawan seperti ini menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, bagi masyarakat keturunan bangsawan yang tidak memiliki pendidikan dan tidak didukung oleh faktor ekonomi keluarga seperti telah diuraikan di atas, mereka umumnya tidak dihargai lagi, sehingga lama kelamaan akan tersingkirkan secara alamiah. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut yaitu pendidikan dan ekonomi bagi keturunan bangsawan yang masih eksis keberadaannya, memiliki peranan yang sangat penting khususnya di wilayah Kota Makassar.

Menurut sejarahnya di wilayah Sulawesi Selatan pada masa lalu terdapat 4 (empat) kelompok masyarakat yaitu:

- (1) Kelompok bangsawan.
- (2) Kelompok pemodal/pengusaha.
- (3) Kelompok hulubalang/panglima perang.
- (4) Kelompok tokoh agama.

Keempat kelompok masyarakat inilah yang mempunyai kelas tersendiri, seolah-olah mereka merupakan kelas elite, merasa berada di atas struktur masyarakat biasa. Di antara keempat kelompok masyarakat ini telah terjadi perkawinan campur atau kawin mawin, sehingga kelompok-kelompok inilah yang banyak melahirkan keturunan terutama di wilayah Bone. Perkawinan campur atau kawin mawin di antara keempat kelompok sudah terjadi sejak zaman dulu. Pada masa lalu jarang sekali terjadi perkawinan campur antara kelompok bangsawan, pemodal/pengusaha, hulubalang/panglima perang, tokoh agama dengan kelompok masyarakat biasa. Seandainya

terjadi perkawinan campur di antara keempat kelompok tersebut dengan masyarakat biasa dan walaupun ada harus melalui pertimbangan yang cukup panjang dan prosesnya sangat rumit. Namun untuk masa sekarang sudah terjadi pergeseran, di mana masyarakat biasa banyak yang melakukan perkawinan dengan keempat kelompok masyarakat tersebut, meskipun harus melalui aturan-aturan yang berlaku dikalangan keempat kelompok masyarakat itu.

Begitu juga peranan lembaga perkawinan, khususnya di kalangan etnis atau suku Bugis-Makassar, tampaknya memegang peranan penting, bahkan acapkali terkait kepentingan politik. Semakin luas jaringan keluarga, tanpa disadari otomatis semakin luas pula pengaruh kelompok tersebut. Oleh sebab itu, poligami di kalangan bangsawan merupakan salah satu indikator untuk membentuk sebuah jaringan dan dukungan. Selain itu poligami mempunyai simbol “keperkasaan” si bangsawan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang nara sumber yang mengatakan bahwa pada masyarakat Sulawesi Selatan terkenal dengan 3 (tiga) U yaitu, Ujung Pena, Ujung Lidah dan Ujung untuk kawin-mawin. Faktor ketiga inilah (ujung untuk kawin-mawin) yang menjadikan kebangsawanan seseorang samar sebagai akibat dari adanya perkawinan campur itu yaitu antara masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa, dan hal ini sudah banyak terjadi. Akibatnya, masyarakat yang bukan keturunan bangsawan atau masyarakat biasa menjadi ikut-ikutan merasa dirinya berasal dari keturunan bangsawan hanya karena kemampuannya menggunakan ujung yang ketiga (untuk kawin-mawin). Hal tersebut juga sudah terjadi di dunia kampus, bisa kita lihat di kampus-kampus para mahasiswa sudah memiliki 3 (tiga) “Ujung”. Cara penghormatan pun tidak lagi mengikuti pola kebangsawanan karena para mahasiswa pada umumnya sudah mempunyai ke tiga ujung tadi yaitu Ujung Pena sehingga mereka bisa memperoleh kepintaran atau kepandaian melalui pendidikan, kemudian pandai berbicara melalui Ujung Lidah, dan yang terakhir para mahasiswa bisa

melakukan kawin campur dengan siapa saja dengan tidak perlu melihat calon pasangannya berasal dari kelompok mana.<sup>6</sup>

Kalau dilihat masyarakat Sulawesi Selatan pada masa kini sudah sangat terbuka dan tidak terlalu ketat lagi dalam tradisi sekalipun masih ada pengaruh-pengaruh dari kelompok atau golongan, namun demikian untuk daerah-daerah tertentu pengaruh-pengaruh tradisi ini sangat kuat. Dapat kita lihat untuk daerah-daerah yang masyarakatnya sudah terbuka seperti Makassar, Pare-pare, Palopo, sudah mulai lemah dari pangaruh-pengaruh kelompok atau golongan atas dasar sistem feodal karena sudah banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai keturunan bangsawan sudah menyesuaikan dengan kelompok rasional di lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan pengertian kelompok rasional adalah mereka yang mencoba mengembangkan diri melalui jalur-jalur birokrasi. Seperti di Kota Makassar sendiri bisa dilihat pada beberapa jalur birokrasi tidak lagi dipegang atau dikuasai oleh keturunan bangsawan melainkan dari berbagai kalangan atau dari berbagai lapisan masyarakat lainnya. Kondisi seperti tersebut di atas nampaknya agak berbeda dengan di wilayah Gowa, kelihatannya kekuasaan diupayakan ke arah mereka yang masih keturunan bangsawan. Perlu diketahui juga bahwa penghargaan terhadap keturunan bangsawan di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar relatif masih tinggi tetapi bukan berarti hal itu menjadi faktor kunci, terutama dalam menentukan pemilihan kepala daerah. Diakui pula oleh sebagian masyarakat bahwa ada sekelompok keturunan bangsawan yang mulai ditinggalkan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka dalam hal ini kekuatan kelompok keturunan bangsawan mulai melemah namun bukan berarti mereka hilang sama sekali.

H.J Friedericy dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* yang ditulis oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat mengatakan bahwa pelapisan masyarakat Bugis-Makassar sudah ada sejak zaman

---

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Nara Sumber. Dr.R. Sekretaris Jurusan Sosiologi UNHAS

sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai langsung daerah Sulawesi Selatan. Salah satu sumber yang digunakan untuk melakukan rekonstruksinya adalah buku asli kesusasteraan Bugis-Makassar *La Galigo*. Pada masa lalu masyarakat Bugis-Makassar memiliki sistem kemasyarakatan atau pelapisan sosial yang terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan atau yang biasa disebut dengan sebutan “kasta”. *Pertama*, Ana Karaeng (Makassar), tingkatan kasta ini merupakan tingkatan kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kasta ini merupakan kasta yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan kalangan raja-raja yang mempunyai kekuasaan serta menguasai perekonomian dan pemerintahan. *Kedua*, Tu Maradeka (Makassar), kasta kedua ini dalam sistem kemasyarakatan Bugis-Makassar, merupakan kumpulan masyarakat atau orang-orang yang merdeka (bukan budak atau ata). Pada umumnya masyarakat Bugis-Makassar mayoritas berstatus pada kasta kedua ini. *Ketiga*, Ata. Kasta ini merupakan kasta yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Ata atau kasta ini adalah masyarakat yang merupakan budak atau abdi yang biasanya diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Pada umumnya mereka menjadi budak lantaran tidak mampu membayar utang, melanggar pantangan adat dan lain sebagainya.

Dalam usahanya untuk mencari latar belakang terjadinya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis-Makassar, Friedericy berpedoman kepada peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam *La Galigo* dan berkesimpulan bahwa masyarakat Bugis-Makassar itu pada awalnya hanya terdiri dari dua lapisan dan bahwa lapisan Ata merupakan suatu perkembangan kemudian yang terjadi dalam zaman perkembangan dari organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan zaman, pelapisan sosial paling bawah yaitu Ata mulai hilang, karena ada larangan dari pihak pemerintah kolonial dan desakan agama. Begitu juga dengan Ana Karaeng serta Tu Maradeka secara perlahan-lahan turut hilang karena adanya desakan dan tuntutan perubahan.

Akan tetapi stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar sudah mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman, dimana sistem

kerajaan mulai runtuh dan kekuasaan diganti oleh pemerintahan Belanda. Hal ini merupakan akibat pertama, pemerintahan Belanda yang melarang masyarakat Bugis-Makassar menggunakan strata sosial dan faktor yang kedua adalah desakan agama terutama agama Islam yang melarang adanya klasifikasi status sosial berdasarkan kasta. Dan tampaknya pengaruh ini terlihat sampai menjelang abad ke 20, terutama pada kasta Ata mulai hilang. Kemudian untuk kasta Ana Karaeng dan Tu Maradeka setelah Indonesia merdeka mulai berangsur-angsur hilang juga dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Akan tetapi penggunaan atau sebutan kata “Andi”, “Karaeng”, “Petta” dan “Puang”, memang masih digunakan tetapi terbatas pada kegiatan ritual atau adat istiadat mereka saja, dan sebagai sebuah penghormatan.

Dalam ruang lingkup NKRI ketiga kasta yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan dianggap menjadi penghambat, apalagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi sehingga penggunaan kasta tersebut tidak cocok lagi. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak menggunakan tingkatan kasta dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam ruang lingkup pekerjaan seperti di lingkungan pemerintahan, swasta, dll. Penggunaan kasta ruang lingkungannya dibatasi cukup hanya di lingkungan keluarga saja atau pada upacara-upacara adat yang memang masih dipegang sampai saat ini.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar stratifikasi sosial masyarakatnya seperti sudah diuraikan di atas, masyarakatnya tidak terlalu ketat lagi, melainkan sudah mulai berubah dan mulai terbuka. Stratifikasi sosial masyarakat yang sudah mulai terbuka dapat dilihat pada tatanan seperti kalau seseorang bukan berasal dari keluarga keturunan bangsawan tetapi bisa mendapatkan kekuasaan atau suatu jabatan tertentu maka yang bersangkutan akan diperlakukan seperti bangsawan. Misalnya, seorang bupati atau walikota, meskipun yang bersangkutan jelas-jelas bukan berasal dari keluarga keturunan bangsawan, tetapi diperlakukan seperti keluarga bangsawan. Sebaliknya jika seseorang berasal dari keturunan bangsawan tetapi tidak memiliki kekuasaan maka yang bersangkutan



hanya diperlakukan sebatas penghargaan atau penghormatan apa adanya saja namun bukan berarti menghilangkan asal mula keturunan kebangsawannya. Hubungan antara keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa yang bukan berasal dari keturunan bangsawan yang mempunyai kekuasaan, termasuk di jalur pendidikan, sudah tidak ketat lagi. Oleh karena itu, pada masa sekarang di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan mulai mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat yang sudah ada. Tujuan dari mengaktifkan kembali lembaga adat ini adalah supaya generasi muda yang ada sekarang tidak kehilangan jejak leluhur mereka dari keturunan bangsawan.

#### **4.4 Fungsi dan Peran Kelompok Sosial**

Seperti telah diuraikan di atas, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki paguyuban atau kelompok-kelompok berdasarkan kedaerahan yang pada awalnya mempunyai fungsi untuk kegiatan sosial, tetapi pada saat akan diadakan pilkada beralih fungsi sebagai kendraan politik yang banyak dilirik oleh orang-orang yang berkepentingan dalam kancan politik. Pengaruh dari keberadaan paguyuban atau kelompok sosial dalam aspek sosial budaya khususnya pada masyarakat Kota Makassar tidak begitu nampak dalam kehidupan masyarakatnya, hanya pada saat tertentu saja paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok ini mulai bermunculan yaitu ketika ada momen tertentu, seperti pada saat perayaan hari besar, sebab kegiatannya sudah jelas lebih kepada masalah kegiatan sosial sehingga kegiatan lainnya biasa-biasa saja. Sedangkan pengaruhnya terhadap kegiatan individu hanya terbatas kepada kegiatan arisan atau halal bilhalal berdasarkan kedaerahan, namun mereka tidak akan meminta kepada kelompok atau paguyuban yang lain sebab satu sama lain sangat memegang budaya siri.

Akan tetapi kepercayaan di antara mereka yakni berbagai kelompok dan paguyuban tersebut cukup tinggi. Ada semacam koordinasi pada saat momen-momen tertentu seperti penyelenggaraan pesta budaya Sulawesi Selatan, karena acaranya lebih spesifik tentang

kebudayaan, secara otomatis hampir seluruh kelompok atau paguyuban tersebut bersatu menjadi satu untuk bersama-sama memierahkannya tanpa mengganggu identitas kelompok atau paguyuban masing-masing. Satu sama lain saling memberi kepercayaan, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, peran kelompok sosial merupakan salah satu aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan seseorang untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan status, sehingga antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lain ada ketergantungan.

Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan itu mempunyai dua segi yaitu:

- (1) Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang harapan. Hal ini merupakan kewajiban.
- (2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakatnya. Hal ini merupakan hak pemegang peran.

Akan tetapi jika ditinjau dari segi cakupannya, peranan meliputi 3 (tiga) hal yakni:

- (1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contoh: sebagai seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan dan suri teladan para anggotanya, karena dalam diri pemimpin tersebut tersandang aturan/norma-norma yang sesuai dengan posisinya.
- (2) Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Contoh: seorang ulama, guru dan sebagainya harus bijaksana, baik hati, sabar, membimbing dan menjadi panutan bagi para muridnya.
- (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Contoh: suami/isteri, karyawan, pegawai negeri, dsb, merupakan peran dalam masyarakat yang membentuk struktur atau susunan masyarakat.

Jika dilihat dari fungsinya, peranan mempunyai beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain, yaitu:

- (1) Peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai ayah atau ibu.
- (2) Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, seperti peran dokter, pekerja sosial, dll.
- (3) Peranan juga dimainkan seseorang yang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang lelaki sebagai suami/bapak, seorang wanita sebagai isteri/ibu, dsb.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas tentang apa itu peran atau peranan mulai dari arti, cakupan serta fungsinya, maka peran dan keberadaan kelompok atau paguyuban di provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam aspek sosial budaya cukup penting. Namun sangat disayangkan fungsi dari kelompok atau paguyuban seringkali beralih fungsi sebagai kendaraan politik dalam pemilu ataupun pilkada. Oleh karena itu, peran dan keberadaan kelompok atau paguyuban tersebut harus tetap dipertahankan, jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan sekelompok orang-orang yang memanfaatkan keberadaannya dan tidak bertanggungjawab. Walaupun kegiatan-kegiatannya hanya bersifat temporer, keutuhan kelompok atau paguyuban-paguyuban tersebut tetap diperlukan untuk mempertahankan solidaritas sosial masyarakat setempat. Dan yang terpenting adalah keberadaan kelompok-kelompok atau paguyuban harus difikirkan untuk kepentingan keutuhan masyarakat dalam jangka panjang bukan hanya sekadar untuk kepentingan politik yang bersifat sesaat.

Namun demikian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa memang betul fungsi dari kelompok-kelompok atau paguyuban ini sudah beralih, walaupun tidak dipungkiri bahwa fungsi yang sesungguhnya yakni berupa kegiatan sosialnya masih tetap dilaksanakan. Jika dilihat dari keberadaannya yang sudah cukup lama

---

<sup>7</sup>[Infosos wordpress.com/kelas-xi-ips/struktur-sosial/](https://infosos.wordpress.com/kelas-xi-ips/struktur-sosial/)

terbentuk, serta satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Dengan kata lain, peran dan keberadaan kelompok atau paguyuban-paguyuban masih terus bertahan karena mereka selalu berpedoman pada tradisi “siri na pesse” atau budaya malu. Perlu diketahui juga bahwa budaya siri masyarakat Bugis-Makassar pengertiannya sangat luas sehingga komitmen untuk memegang teguh budaya tersebut sangat tinggi dan pantang dilanggar.

#### **4.5 Pergeseran Status dan Peran Sosial**

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada saat ini begitu cepat perubahannya dan tanpa disadari mulai menggerus nilai-nilai lama yang berusaha dipertahankan oleh sebagian masyarakatnya. Seperti dalam hal pengkastaan jelas sekali bahwa gelar kebangsawanan tidak lagi dianggap sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang di mata masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat yang berada di beberapa wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang masih sangat kental dengan unsur feodal, di mana nilai-nilai kebangsawanan masih dipertahankan seperti dalam menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Namun berdasarkan informasi dari beberapa nara sumber, pada saat ini di beberapa wilayah kabupaten juga sudah mulai ada pergeseran hampir sama dengan pergeseran di kota-kota seperti Makassar. Begitu dengan faktor kekayaan tidak lagi diperhitungkan. Kini pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam menduduki sebuah jabatan struktural di lingkungan pemerintahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi status sosial dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar:

- (1) Faktor jabatan atau posisi di pemerintahan, kesempatan yang sama diberikan Ana'karaeng, Tu Maradeka, maupun Ata untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Siapapun yang menjabat pasti akan mendapat penghormatan lebih dari masyarakat. Sekalipun Ata tetapi memiliki jabatan strategis sudah dapat dipastikan akan

dihormati dan akan mendapat status sosial yang tinggi di mata masyarakat.

- (2) Faktor kekayaan, sudah menjadi pengetahuan umum, mereka atau masyarakat yang mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak bahkan bisa dikatakan berlimpah kekayaan akan dihormati dan hal ini sudah ada sejak zaman dulu terjadi, bahkan sudah bersifat turun temurun.
- (3) Faktor pendidikan. Pada saat ini faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya Kota Makassar khususnya, pengaruhnya cukup besar dan pengaruh tingkat pendidikan seseorang sangat berperan sentral dalam menentukan status sosialnya. Dalam bidang pendidikan sudah sangat jauh berbeda dengan masa lalu, di mana masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan hanyalah mereka yang berasal dari keturunan bangsawan atau masyarakat yang berasal dari kasta paling tinggi. Hal ini berbeda dengan dengan kondisi masa kini yakni semua masyarakat Sulawesi Selatan tanpa kecuali baik itu berasal dari keturunan bangsawan maupun masyarakat biasa mempunyai hak dan kewajiban juga kesempatan yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi. Sehingga tidak ada lagi bahwa pendidikan dan pengetahuan hanyalah menjadi milik dari sekelompok masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau kasta tertinggi di Sulawesi Selatan.<sup>8</sup>

Untuk masa kini gelar akademik menjadi sumber status baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang bukan berasal dari keturunan bangsawan berlomba-lomba untuk dapat meraih pendidikan sampai ke jenjang paling tinggi yakni perguruan tinggi. Oleh sebab itu, berbagai gelar yang diraih dari berbagai disiplin ilmu mulai dari ilmu sosial, seperti sastra, hukum, ekonomi, manajemen, teknik, maupun kedokteran, merupakan modal utama agar bisa bekerja di lingkungan

---

<sup>8</sup><http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/pergerseran-status-sosial-dalam-masyarakat-bugis-makassar/> Wawancara Dengan Nara Sumber: Dr. R. Sekretaris Jurusan Sosiologi UNHAS.

pemerintahan juga swasta dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, serta dapat disejajarkan dengan masyarakat keturunan bangsawan yang memiliki pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Melihat kondisi masyarakat di Kota Makassar sudah mulai ada pergeseran, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pemerintahan juga sektor swasta. Sekarang yang terpenting adalah siapapun juga bisa menduduki sebuah jabatan baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta asalkan memiliki pendidikan memadai dan kompeten di bidangnya. Kepercayaan masyarakat biasa terhadap keluarga keturunan bangsawan telah mengalami pergeseran karena masyarakat sudah sangat pandai dan menyadari bahwa dari kalangan mereka pun mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan bisa sederajat dengan keluarga keturunan bangsawan. Masyarakat biasa dan keturunan bangsa kini memiliki kesempatan yang sama menduduki jabatan apa pun di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Bahkan ada di antaranya yang memperoleh gelar “Andi” karena posisi atau jabatan yang dipegangnya. Hal tersebut telah memperlihatkan bahwa untuk di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar kesempatan dan kepercayaan terhadap masyarakat biasa sudah mengalami pergeseran dan terbuka.<sup>9</sup>

Pergeseran ini juga secara perlahan-lahan mulai terlihat di beberapa wilayah di luar Kota Makassar seperti contohnya di salah satu kecamatan di Kabupaten Jeneponto, di wilayah tersebut banyak masyarakatnya berasal dari keturunan bangsawan dan tersebar di beberapa wilayah. Pada awalnya kepala pemerintahan dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari kalangan keturunan bangsawan, namun akhir-akhir ini mulai ada pergeseran seperti yang disampaikan oleh salah seorang nara sumber yang mengatakan bahwa di wilayah Kabupaten Jeneponto kepemimpinannya mulai ada pergeseran. Jabatan-jabatan struktural di lingkungan pemerintahan tidak lagi dipimpin oleh keturunan bangsawan melainkan dari kalangan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan nara sumber: Dr. R. Sekretaris Jurusan Sosiologi UNHAS.

masyarakat biasa. Pada awalnya sempat terjadi keributan yakni masyarakat keturunan bangsawan merasa keberatan dengan adanya kepemimpinan yang dikepalai oleh seseorang yang berasal dari masyarakat biasa. Kasus-kasus seperti ini telah memperlihatkan adanya pergeseran status sosial di masyarakat Bugis-Makassar. Oleh karena itu, status sosial tidak lagi didasarkan pada keturunan, kasta, atau stratifikasi sosial seseorang. Untuk masa sekarang jabatan struktural di pemerintahan, kekayaan, dan tingkat pendidikan lebih dominan berpengaruh dalam menentukan derajat sosial seseorang. Pergeseran ini semakin terlihat dengan jelas sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut pendapat Mattulada (1974) dalam buku *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan* yang ditulis oleh Christian Pelras mengatakan bahwa komposisi kaum elit telah mengalami perubahan. Mattulada membedakan tiga kelompok utama golongan elit baru yaitu bangsawan, pegawai negeri, intelektual dan penguasa. Sebenarnya ketiga kelompok elit ini telah saling berpenetrasi sebab seorang keturunan bangsawan juga bisa jadi pegawai, intelektual bahkan pengusaha. Selain itu dalam ketiga kategori tersebut, orang juga dapat digolongkan menjadi militer dan non-militer. Mattulada menghitung, diperkirakan 50% dari pejabat tinggi di Sulawesi Selatan berasal dari kalangan militer yang telah diberi jabatan sipil. Oleh sebab itu, pentingnya keanggotaan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok tersebut kurang lebih sama, yang menyebabkan hanya sepertiga dari pejabat tinggi berasal dari kalangan keturunan bangsawan.

Tampaknya masyarakat Kota Makassar mempunyai kelompok-kelompok berdasarkan kedaerahan dan kecenderungannya memiliki kerjasama yang cukup baik. Kelompok-kelompok tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan satu kesatuan yang tumbuh bersama yaitu adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi yang di dalamnya terdapat sikap saling tolong menolong. Jika melihat arti atau fungsi kelompok sosial sangat jelas sekali bahwa keberadaan kelompok sosial ini sangat membantu masyarakat dalam menemukan kesamaan visi dan misi dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain itu, tampaknya ada

beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut yaitu mempunyai kepentingan yang sama, keturunan yang sama, geografis yang sama dan memiliki daerah asal yang sama.

Kemudian kelompok-kelompok sosial tersebut memiliki jaringan kelompok kedaerahan yang tidak bisa dipungkiri lagi cukup menonjol. Ikatan berdasarkan kedaerahan ini terlihat dari menjamurnya berbagai kelompok paguyuban atas dasar etnis ataupun daerah asal. Kegiatan dari kelompok-kelompok tersebut pada umumnya lebih bersifat sosial seperti kegiatan pengumpulan bantuan dana untuk masjid, bantuan dana bagi yang tidak mampu khususnya bantuan pendidikan.

Meskipun cukup banyak paguyuban atas dasar kedaerahan, mereka saling menghormati satu sama lain. Sementara itu, masyarakat Makassar sendiri sangat menghormati budaya yang mereka miliki dan sudah dipegang turun temurun serta dihormati oleh mereka yaitu “budaya siri” atau harga diri atau rasa malu. Seandainya seseorang sudah merasa dipermalukan, maka yang bersangkutan harus melakukan perlawanan untuk menutupi rasa malunya tersebut. Bahkan harus rela berkorban dengan mengorbankan jiwanya. Dan sebaliknya jika seseorang dipermalukan dan tidak melakukan tindakan atau perlawanan, dianggap tidak memiliki rasa malu atau sudah tidak memiliki budaya siri tersebut.

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya etnis Bugis Makassar memiliki etos hidup atau nilai budaya luhur sebagai proses pembelajaran yang telah diwariskan secara turun temurun, serta dapat mempengaruhi pikiran dan pola hidup masyarakatnya. Etos hidup masyarakat Bugis-Makassar terkenal dengan “siri na pesse”. Siri sendiri mempunyai arti rasa malu, sangat erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan dan harga diri. Sedangkan pesse mempunyai arti mengandung rasa belas kasihan, kepedihan, solidaritas, serta semangat tolong menolong dengan sesamanya. Arti keseluruhan dari siri na pesse adalah harkat martabat dan rasa pedih yang sangat



mendalam yang melahirkan adat yang mengatur watak, moral, dan sikap hidup masyarakat hidup Sulawesi Selatan.

Apabila seseorang dipermalukan dan tidak melakukan reaksi atau perlawanan maka disebut *degage siri'na/tena siri'na* dan tidak mendapat tempat di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi siri atau harga diri atau rasa malu tersebut. Adanya budaya siri ini sangat memotivasi kekuatan kelompok atau paguyuban-paguyuban itu sendiri. Kelompok atau paguyuban tersebut sifatnya permanen namun kegiatan-kegiatannya lebih bersifat temporer.

Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya begitu juga dengan masyarakat Kota Makassar khususnya atau masyarakat Bugis-Makassar secara keseluruhan, juga memiliki etika yang mengatur dalam kehidupan yaitu sangat menghargai tata krama atau sopan santun yang dikenal dengan “sipakalebbi” yang artinya adalah sifat saling tolong-menolong, “sipakatau” yaitu saling menghargai sebagai sesama manusia dan “sipakainga” yang artinya saling mengingatkan. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang atau masyarakat dituntut atau diharuskan untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan, memiliki sifat tolong menolong dan saling menghargai serta saling mengingatkan. Akan tetapi jika ada orang atau anggota masyarakat yang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan cara-cara tadi atau tidak berpedoman kepada sipakalebbi, sipakatau dan sipakainga, maka yang bersangkutan akan mendapat balasan dengan lebih tidak sopan lagi dan diperlakukan secara anarkis.<sup>10</sup>

Salah satu paguyuban atau kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau kedaerahan yang ada di wilayah Kota Makassar adalah kelompok atau paguyuban “Bosowa” yaitu kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng dan Wajo. Sedangkan “Bosowasipalu” yaitu kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Palopo dan Luwu, dll. Seperti telah diuraikan di atas kegiatannya lebih bersifat sosial dan perlu diketahui juga bahwa

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Nara Sumber, S. Humas DPRD Kota Makassar

solidaritas kedaerahannya sangat kuat. Akan tetapi keberadaan paguyuban tersebut berubah atau mulai ada pergeseran fungsi yaitu ketika akan diadakan pemilihan kepala daerah maka keberadaannya menjadi sangat penting sebab fungsinya digunakan untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Setelah beralih fungsi, sering dijumpai bahwa tim sukses dari masing-masing partai ada di dalam paguyuban, sehingga kegiatan dari paguyuban atau kelompok-kelompok tersebut lebih menonjol dalam memenangkan pemilihan kepala daerah ketimbang kegiatan sosial. Kegiatan dari kelompok-kelompok paguyuban ketika menjelang pemilihan kepala daerah sangat “heroik” sampai ke pelosok-pelosok daerah namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penuh dengan muatan politis. Bahkan keberadaan kelompok atau paguyuban dianggap sebagai sumber suara atau mesin untuk mendulang suara dalam pilkada. Akan tetapi ketika pilkada berakhir maka kegiatan kelompok atau paguyuban-paguyuban tersebut kembali kepada fungsi semula, yakni kegiatan sosial.

Diakui juga oleh seorang nara sumber bahwa di antara paguyuban atau kelompok-kelompok tersebut pernah terjadi gesekan-gesekan, termasuk gesekan atau persoalan pribadi, namun berkembang menjadi masalah yang cukup besar dan serius. Seperti perselisihan antardaerah, misalnya antara Bugis-Makassar, bahkan di antara etnisnya sendiri. Sebagai akibatnya maka muncullah persoalan-persoalan pribadi yang dihubung-hubungkan dengan asal daerah masing-masing, sehingga tidak mustahil persoalannya meluas kepada masalah budaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah SARA. Hal seperti ini sering terjadi juga di kampus-kampus terutama kampus-kampus yang berada di Kota Makassar. Baik konflik internal di dalam kampus maupun konflik antarkampus, dapat mengakibatkan konflik sampai ke daerah, bahkan menjadi konflik etnis. Seperti contoh terdapat kelompok-kelompok atau perhimpunan mahasiswa dari daerah tertentu yang mengatasnamakan asal daerah atau etnis, misalnya Ikatan Pelajar/Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL), Ikatan Pelajar/Mahasiswa Tator, Ikatan Pelajar/Mahasiswa Bone dll. Kelompok-kelompok seperti ini tumbuh dengan subur namun tidak diantisipasi baik oleh pihak

kampus maupun pemerintah, mereka berkembang sendiri-sendiri, sehingga ego kedaerahan muncul dengan cukup kuat. Hal ini juga dipicu oleh kegiatan pemilihan kepala daerah, di mana kelompok atau perhimpunan mahasiswa ini telah diperalat oleh sekelompok orang atau partai-partai politik yang memanfaatkan keberadaannya, tanpa memikirkan akibatnya.<sup>11</sup>

Konflik horizontal yang sering terjadi di Kota Makassar pada umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda dan mahasiswa, seperti konflik Palopo (Luwu raya), Bone, Bulukumba, Bima, dll. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah asal sebagian pemuda dan mahasiswa di Kota Makassar. Sebenarnya tidak terlihat kelompok atau pendatang yang dominan, namun hal itu justru menimbulkan sifat gengsi dan menonjolkan sikap fanatisme kedaerahan yang akhirnya memicu konflik karena masing-masing merasa sebagai kelompok mayoritas. Konflik perorangan bisa berakibat cukup fatal sebab mereka mengatasnamakan solidaritas kedaerahan, sehingga berkembang menjadi konflik antar daerah.

Konflik yang sering terjadi baik di internal kampus maupun antar kampus bisa juga dilihat antara etnis Luwu dan Bone dan lain lain. Konflik bermula ketika ada seorang mahasiswa Luwu pulang ke daerahnya kemudian orang Bone yang di daerah Luwu diusirnya, sebab ada informasi bahwa asrama mahasiswa Luwu yang ada di Kota Makassar telah dibakar oleh orang-orang Bone, bahkan dikabarkan ada mahasiswanya yang luka dan diberitakan meninggal. Setiap mahasiswa Luwu di-*sweeping* termasuk plat nomor polisi motor serta mobil, hal ini terus berlanjut hingga ke daerah-daerah, begitu juga sebaliknya orang Luwu yang ada di wilayah Bone akan diusir, begitu sebaliknya. Hal ini merupakan cikal bakal yang nantinya meluas menjadi kerusuhan etnis, padahal sebetulnya yang terjadi hanya kerusuhan di

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Drs. H.S. M.Si. Kabag Tata Pemerintahan Kota Makassar.

dalam kampus dan berita yang disebarakan sebetulnya hanya rumor, namun sebagai akibatnya konflik kampus berkembang meluas menjadi konflik etnis. Konflik etnis sering terjadi bukan hanya antara Luwu dengan Bone saja tetapi terjadi juga antara Bulukumba dengan Luwu.

Konflik antar daerah semakin hari semakin marak terjadi di wilayah Kota Makassar. Hal ini diduga oleh beberapa kalangan bahwa konflik tersebut merupakan konflik lama dari sejarah feodalisme masyarakat Sulawesi Selatan, namun ada juga yang berpendapat bahwa konflik tersebut sudah didisain oleh para elit politik untuk mengalihkan isu-isu yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, keberadaan paguyuban atau kelompok-kelompok berdasarkan kedaerahan belum memberi kontribusi untuk mengatasi, padahal di antara mereka memiliki sikap saling menghormati satu sama lain.

Adanya kelompok atau paguyuban berdasarkan etnis dan kedaerahan di wilayah Sulawesi Selatan terutama di Kota Makassar memperlihatkan betapa variatifnya kondisi masyarakat setempat. Walaupun demikian, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, posisi kekuasaan tertentu tetap saja dikuasai oleh etnis tertentu, dan hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, di Kota Makassar yang duduk di pemerintahan tidak lagi didominasi oleh satu kelompok etnis tertentu, ada juga posisi-posisi yang dikuasai oleh etnis tertentu tetapi tidak begitu menonjol. Tetapi lain halnya dengan wilayah di luar Kota Makassar kondisinya sangat berbeda di mana kekuatan ikatan berdasarkan etnis dan kedaerahannya sangat menonjol dan kuat sekali peranannya. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang nara sumber yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga keturunan bangsawan yang bergelar "Andi" di mana karir pertamanya sebagai camat di daerah asalnya yaitu Bone, di wilayahnya tidak ada yang berani menduduki posisi atau jabatan seperti camat, kades, lurah bahkan bupati. Hal ini disebabkan karena kuatnya ikatan emosional berdasarkan etnis dan identitas keturunan kebangsawannya. Oleh karena itu, masyarakat atau penduduk yang tinggal di wilayah Bone

yang bukan berasal dari etnis Bone dan bukan berasal dari keluarga raja atau bukan berasal dari keturunan bangsawan tidak akan pernah bisa menduduki posisi puncak atau menjadi pimpinan tertinggi, dan hal ini masih terjadi hingga saat ini.

#### 4.6 Penutup

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki masyarakat sangat heterogen. Selain itu Sulawesi Selatan mempunyai 4 (empat) etnis besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Menurut sejarahnya Sulawesi Selatan memiliki 3 (tiga) kerajaan besar yakni Bone, Gowa dan Luwu. Ketiga kerajaan besar tersebut satu sama lain telah memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, di mana masyarakat yang merasa berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap dirinya memiliki strata paling tinggi. Tidak dipungkiri memang betul pada masa lalu masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja menduduki strata paling tinggi. Hal ini terlihat pada stratifikasi sosial masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar pada masa lalu keturunan bangsawan mendapat posisi yang sangat istimewa, yaitu sebagai elite masyarakat. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan masyarakat keturunan bangsawan mengalami pergeseran.

Stratifikasi sosial yang ada lama kelamaan luntur. Sejak pemerintahan Belanda sebenarnya klasifikasi status sosial berdasarkan kasta sangat tidak disetujui dan dalam ajaran agama Islam tidak diperkenankan atau dilarang adanya pengkastaan dalam masyarakat. Pada akhirnya sistem pengkastaan atau pembagian strata mulai hilang, begitu juga gelar kebangsawanan yang selama ini digunakan mulai memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas kepada kegiatan upacara adat atau acara ritual saja. Juga hanya sebagai penghormatan bahwa mereka memang betul merupakan keturunan bangsawan, tidak lebih dari itu. Selain itu status sosial tidak lagi didasarkan pada keturunan, kasta, maupun stratifikasi sosial seseorang. Begitu juga di

lingkungan pekerjaan seperti di pemerintahan, kini tidak lagi mengutamakan status kebangsawanan seseorang, atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kini peranan pendidikan lebih dominan dan sangat berpengaruh dalam menentukan derajat sosial seseorang. Menurut sejarahnya stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap keturunan bangsawan sebagai elit strategis dari masyarakat, sehingga menempatkan mereka sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Dewasa ini hal tersebut sudah jauh berbeda karena semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat biasa, mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.

## Daftar Pustaka

- BPS dan Bappeda Sulawesi Selatan 2011. *Makassar Dalam Angka 2011*. BPS Kota Makassar.
- Bappeda dan BPS Kota Makassar. 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar*.
- Chistian Pelras, 2006. *Manusia Bugis*. Forum Jakarta-Paris. Ecole francaise d'Extreme-Orient. Jakarta.
- Fatimah, Nyayu (editor), 2011. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial di Perkotaan, Kasus Kelompok Pekerja Profesional Bidang Kesehatan*. Jakarta: LIPI Press.
- Haris, Syamsuddin (editor), 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, LIPI, IMD.
- Haris, Syamsuddin (editor), 2006. *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (editor), 2007. *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1975. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Sapdodadi.

Roger Tol I Kees Van Dijk I Greg Acciaioli, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Jakarta: KITLV.

Usman Nukman & Usdar Nawawi, 2010. *Makassar Dalam Tren Global*, Makassar: Pelita Pustaka.

Zuhro, Siti, dkk, 2011. *Model Demokrasi Lokal Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Jakarta: TIFA.

### **Bahan Dari Internet**

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/pergeseran-status-sosial-dalam-masyarakat-bugis-makassar/>

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/24/akar-konflik-sosial-komun...infosos.wordpress.com/kelas-xi-ips/struktur-sosial/>

REPI20 Desember 2011 11:24

<http://jurnallontar.com/?p=190>

<http://sosiologiuntukindonesia.blogspot.com/2012/02/makalah-stratifikasi-sosial.html>, Senin, 13 Februari 2012





## BAB V

# DINAMIKA SOSIAL EKONOMI KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL DI KOTA MAKASSAR

Oleh Suprihadi

## 5.1 Pengantar

**B**erbagai ragam kekhasan daerah perkotaan sudah barang tentu tidak akan muncul dengan begitu saja. Dari segi lintasan historis misalnya, daerah perkotaan memiliki tifikasi dan kerangka makna tersendiri. Kondisi itu, juga dikarenakan faktor kultur dan spatial, maka pantaslah daerah perkotaan menjadi hiterogen. Meskipun heterogen, pasti mempunyai kekhasan yang mungkin saja antara daerah perkotaan satu dengan daerah perkotaan lainnya mempunyai kemiripan.

Selain itu, daerah perkotaan diwarnai oleh hiterogenitas penduduknya, baik secara etnik, jenis pekerjaan, kelas sosial maupun status sosial dan lainnya. Keragaman ini dapat dilihat sebagai peluang untuk saling belajar dari budaya masing-masing komunitas, memodifikasi atau bahkan mengadopsinya untuk perbaikan peluang hidup komunitas yang bersangkutan. Pada sisi lain, kondisi ini juga merupakan hal yang rentan dari muncul dan berkembangnya ketidakaturan sosial seperti munculnya kerusuhan sosial, konflik antar kelompok masyarakat dan ketidaktenangan kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian ini akan menimbulkan daerah perkotaan tidak stabil dan berdampak pula pada situasi sosial yang tidak sehat dalam pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan. Namun demikian perkembangan kota itu juga berpengaruh terhadap perekonomian kota

yang secara positif dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah perkotaan.

Kaitannya dengan dinamika kewarganegaraan kelompok sosial masyarakat yang berdasarkan status sosial ekonomi di perkotaan, maka dalam tulisan ini akan mengungkapkan tentang Profil Kota Makassar di bidang sosial ekonomi. merupakan bagian dari tulisan sebagai pintu masuk untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristik sosial dan ekonomi masyarakatnya, yang dalam tulisan ini mengambil lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bagian lain yang cukup penting adalah kondisi kelompok masyarakat yang berkaitan dengan status sosial ekonomi dan dinamikanya serta jaringan sosial dalam hubungannya dengan merealisasikan dan pemahaman tentang kewarganegaraan, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat tentang realisasi kewarganegaraan.

## **5.2 Profil Ekonomi Kota Makassar**

Makassar merupakan kota terpenting, tidak hanya Sulawesi Selatan, melainkan juga di Indonesia dan bahkan dunia. Alasan utama yang sering dikemukakan para ahli, secara historis sebagaimana ditunjukkan dalam kajian-kajian sejarah bahwa di masa lalu Kota ini memainkan peranan besar, baik dalam dinamika sosial maupun aktivitas ekonomi khususnya di bidang perdagangan. Pada abad 16-17 keberadaan Makassar disejajarkan dengan Penang di Malaysia yang merupakan pusat perdagangan Asia Selatan, dan Kota Hamburg di Jerman yang merupakan pusat perdagangan di Eropa ketika itu. Dalam dinamika sosial politik, pada awal abad ke-17, kota ini menjadi Kerajaan Gowa, sebuah kerajaan besar yang kekuasaan dan pengaruh politik yang luas di Jazirah selatan Sulawesi Selatan.

Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%, bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini,

bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandar Internasional Sultan Hasanuddin, Jalan Tol dan sarana bermain Kelas Dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga.

Walaupun selama ini Kota Makassar dibombardir isu negatif demonstrasi, ternyata persepsi Kota Makassar oleh investor yang ada di luar berbanding terbalik. Terbukti, minat mereka tetap besar, jadi kuncinya adalah konsistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan tanpa memungut biaya siluman (Walikota, Ilham Arief Sirajuddin). Menurut Ilham, sejak memulai perubahan Kota Makassar pada tahun 2004, yang paling pertama dilakukannya adalah mengubah posisi Kota Makassar menjadi Ruang Keluarga Kawasan Timur Indonesia (KTI) dari yang sebelumnya dikenal sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Dengan menjadi ruang keluarga, maka seluruh aktivitas sosial maupun ekonomi akan bertumpu di Kota Makassar. Bandingkan jika hanya sebagai pintu gerbang, para pelaku ekonomi hanya menjadikan Makassar sebagai tempat transit atau daerah perlintasan saja, artinya tidak mendapat apa-apa. Ibarat ruang keluarga di sebuah rumah, maka Kota Makassar menjadi titik simpul Kawasan Timur Indonesia sehingga menjadi pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan.

Selain itu, dilihat dari pembangunan ekonomi di berbagai sektor di Kota Makassar, kondisinya bisa terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2009, nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp.31.263.651 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2009, nilainya sebesar Rp.14.798,187 milyar rupiah.

**Tabel 1**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Sulawesi Selatan dan Kota Makassar (Dalam Juta Rupiah) 2005-2009

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan	PDRB Kota Makassar	Persentase Makassar Terhadap Sul-sel
2005	52.042.724,45	15.744.193,91	30,25
2006	60.902.828,80	18.165.876,32	29,83
2007	69.271.924,56	20.794.731,30	30,02
2008	85.143.191,27	26.068.221,49	30,62
2009	99.904.658,31	31.263.651,65	31,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2011

Sementara itu, struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Struktur ekonomi Kota Makassar masih didominasi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Makassar sebagai kota pelabuhan sangat relevan terhadap aktivitas ekonomi di sektor perdagangan. Angka lainnya yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB perkapita. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Angka perkapita bruto (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Kota Makassar tahun 2009 adalah sebesar Rp.24.758.131,-

Apabila dilihat dari struktur ekonomi Kota Makassar berdasarkan sektor lapangan usaha pada tahun 2009, maka sektor perdagangan mendapatkan porsi terbesar kontribusinya (28,70%). Kemudian disusul secara berurutan yakni sektor industri pengolahan (20,74%), sektor Jasa-jasa (15,88%), sektor angkutan dan komunikasi (13,93%), sektor Bank dan Lembaga Keuangan (10,17%), sektor Bangunan (7,94%), Listrik, gas dan air (1,79%), pertanian (0,82%) dan sisanya adalah sektor pertambangan/penggalian sebesar (0,01%)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Lihat Badan Pusat Stastistik, 2010, Makassar Dalam angka, Makassar, 2010.

Sementara itu, dalam peluang investasi di Kota Makassar belakangan ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembarakan. Nilai investasi terus bergerak naik yang pada periode tahun 2009 berjumlah sekitar Rp.11 triliun, pada tahun 2010 telah bergerak menjadi sekitar Rp.20 triliun, dan bahkan untuk periode tahun berikutnya diprediksi naik terus. Sektor usaha yang memberikan nilai investasi yang cukup besar di Kota Makassar, umumnya sektor usaha retail, perhotelan dan perumahan. Ketiga hal tersebut diminati investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan sahamnya, karena melihat perkembangan Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Usaha retail, perhotelan dan perumahan memiliki prospek yang cerah berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Hanya saja belakangan ini yang menjadi kendala adalah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti sarana listrik, karena di daerah ini masih krisis daya listrik.

Untuk mendukung percepatan dalam pembangunan ekonomi di Kota Makassar, antara lain memberikan kemudahan berinvestasi. Pemerintah telah menetapkan suatu perubahan kebijakan investasi yang mempunyai sasaran untuk memberikan kemudahan dan mendorong investasi sektor swasta melalui implementasi dan perubahan yang transparan, terprediksi, kebijakan yang berorientasi pasar, perlakuan yang sama baik investor domestik maupun asing. Pemerintah baru-baru ini telah mengadopsi perubahan kebijakan utama, termasuk liberalisasi aturan atas investasi asing. Pemerintah berkomitmen terhadap penghapusan pembatasan atas investasi lokal maupun asing. Pernyataan tersebut telah diadopsi pada kebijakan pemerintah kota untuk mempromosikan dan memudahkan sektor swasta berinvestasi di Makassar. Langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memastikan implementasinya adalah beberapa kebijakan yang diadopsi untuk memudahkan investasi swasta, diantaranya<sup>2</sup> adalah:

---

<sup>2</sup>Lihat Peluang Investasi dalam Makassar Dalam Tren Global, oleh Usman Nukma dan Usdar Nawawi, Makassar: Pelita Pustaka. Hlm. 86-96;

*Pertama*, hukum investasi nasional. Ini adalah landasan hukum investasi yang akan menggantikan peraturan penanaman modal domestik dan peraturan investasi asing sekaligus mengatur sektor investasi. Peraturan ini akan menyertakan prinsip kebijakan investasi yang berorientasi pasar, menetapkan jaminan atas perlakuan yang sama bagi investor asing maupun dalam negeri dimanapun dan kapanpun, perlindungan atas pengambil alihan investasi. Kebebasan pengembalian investasi asing dan penggajian yang layak yang sesuai dengan standar internasional. Peraturan bidang investasi yang sudah ada, akan diefektifkan dan diperbaiki untuk memperkecil daftar negatif dan larangan investasi lokal maupun asing. Untuk sementara waktu dalam masa persiapan peraturan undang-undang, segala administrasi investasi terkait fungsi aparatur dan pelayanan pemerintah akan diperbaharui dan ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan dan prosedur yang mudah sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan investasi ini.

*Kedua*, kebebasan untuk berinvestasi. Investor diijinkan untuk menanamkan modal dalam sektor manapun kecuali pada sejumlah kecil aktivitas, yang masuk dalam "*Negatif List*". Tidak ada pembatasan atas ukuran investasi, sumber dana atau jenis produk yang diperuntukkan sebagai keperluan ekspor atau untuk pasar yang domestik dalam negeri. Investor asing diperkenankan menanamkan modal dalam aktivitas selain dari yang masuk dalam "*Negatif List*".

*Ketiga*, bentuk perusahaan. Perizinan industri masih diperlukan berdasar pada prinsip-prinsip kewajaran, mekanisme yang sederhana, prosedur yang transparan dan cepat. Prosedur untuk pendirian perusahaan dan badan usaha masih sebagai izin pendiriannya.

*Keempat*, pajak dan bea. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi negeri dan daya saing internasional. Oleh karena itu, dilakukan pengurangan dan penyederhanaan kewajiban dan pajak melalui program perubahan atas kebijakan perdagangan dan pajak. Indonesia menyiapkan hukum perpajakan sebagai insentif sektor pajak bagi investor penanam modal tertentu: Insentif pajak penanam modal, Penghapusan dan penyisihan uang berkala, perluasan ganti rugi

kerugian tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dan 10% tarif pajak untuk dividen pembayar wajib pajak asing, kecuali bagi konvensi pajak, memelihara tarif pajak yang lebih rendah. Indonesia selalu mencoba untuk menjamin hukum perpajakan tidak hanya untuk wajib pajak tetapi juga untuk kasus pajak yang mempunyai persamaan. Dengan memberi insentif pajak ke investor, diyakini bahwa insentif yang diberikan ini masih merefleksikan kesetaraan perlakuan dan penerapan prinsip tersebut tidak terpisah dari tujuan insentif perpajakan.

*Kelima*, Prosedur. Pemerintah akan terus melanjutkan, tatanan ukuran-ukuran dan prosedur, dimana devisa asing untuk transaksi impor dan deviden pembayaran dengan bebas dapat tersedia, dan pemerintah memastikan kesenangan repatriasi kemudahan pembayaran dan pengembalian untuk layanan bisnis.

*Keenam*, akses terhadap pembiayaan lokal. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan suatu sistem sederhana yang akan memungkinkan investasi asing untuk mendapatkan mengakses ke pembiayaan lokal berdasar pada ukuran-ukuran yang relatif sederhana.

*Ketujuh*, tenaga kerja. Dalam kerangka kerja hukum perburuhan di Indonesia, Pemerintah memperbolehkan perusahaan merekrut tenaga ahli asing. Oleh karena itu, akan diikuti dengan izin untuk menetap, yang dimungkinkan melalui peraturan untuk tenaga kerja seperti itu bagi perusahaan yang membutuhkannya. Langkah yang harus diambil adalah bagaimana mengambil langkah kebijakan perbaikan investasi, peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi swasta yang memenuhi prinsip di atas, aktif mempromosikan dan memfasilitasi investasi, transparansi izin masuk dan penanaman investasi, transparansi prosedur dan administrasi oleh pemerintah, dan meminimalisasi aturan atas larangan sesuai daftar negatif investasi yang tertutup.

*Kedelapan*, Infrastruktur umum. Pemerintah menyadari pentingnya infrastruktur untuk mendukung investasi dan berkomitmen membuat infrastruktur yang baik seperti sarana transportasi, kelistrikan,

komunikasi dan air sampai kepada mekanisme persekutuan yang menarik bagi modal swasta. Undang-undang perlindungan yang memadai mencakup jaminan atas integritas kontrak akan diberikan.

*Kesembilan*, Pemerintah berkomitmen menyediakan lahan untuk industri dan pemanfaatan komersial tersedia bagi investor. Pemerintah akan menerima dan menyederhanakan semua perijinan pemanfaatan lahan ada prosedur persetujuan lingkungan yang transparan. Pemerintah berkomitmen mengembangkan layanan kawasan industri dan menyiapkan kerangka kerja untuk investor swasta yang akan mengembangkan kawasan industri yang akan dipersewakan kepada investor lainnya.

*Kesepuluh*, dorongan untuk usaha kecil menengah. Perusahaan kecil menengah memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi negara. Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mendukung usaha kecil menengah ini, termasuk penyederhanaan dalam peraturan dan kebijakan, pengamanan akses terhadap ketersediaan bahan baku, penghilangan pajak-pajak tertentu dan peningkatan akses terhadap kredit.

*Kesebelas*, promosi investasi. Untuk lebih meningkatkan kapasitas Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) dan menciptakan suatu promosi investasi yang terintegrasi, Pemerintah secara aktif meninjau ulang pembentukan kemitraan swasta publik untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi swasta di Indonesia.

*Keduabelas*, layanan investasi. Pemerintah berkomitmen bahwa layanan investasi untuk investasi domestik maupun asing pada era otonomi adalah lebih baik seperti kondisi saat ini. Oleh karena itu, sistem *one stop service* akan lebih diimplementasikan.

*Ketigabelas*, perlindungan investasi. Pemerintah menganggap bahwa keamanan aset memiliki arti penting yang tertinggi. Oleh karena itu, meyakinkan investor bahwa perlindungan terhadap hak milik mereka sangatlah penting. Dalam hal investor asing, pemerintah telah



merundingkan dan menyimpulkan beberapa perjanjian investasi antara dua belah pihak, yang menyediakan perlindungan langsung ke investor terhadap keamanan aset mereka, seperti halnya jaminan untuk pemulangan aset investasi mereka. Pemerintah akan dengan aktif bekerja menyimpulkan perjanjian investasi dari dua belah pihak yang telah bersepakat dan negara-negara lain. Indonesia juga telah bergabung dengan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

*Keempatbelas*, pembebasan dari pajak. Untuk meningkatkan ekonomi dan hubungan dagang negara-negara lain, Indonesia mempunyai peraturan hukum tertentu yang mengatur kewajiban pajak seperti halnya di setiap negara. Tujuan peraturan tersebut adalah prestasi kepastian hukum, menghindarkan pemajakan berganda, dan pencegahan pengelakan dan penggelapan pajak. Pemerintah berhak membuat suatu persetujuan dengan negara-negara lain untuk menghindari pemajakan berganda dan untuk mencegah pengelakan/pengelapan pajak. Kerangka kerja dan hal terkait persetujuan ini didasarkan pada konvensi internasional dan kepastian hukum lain serta peraturan pajak dari tiap-tiap negara.

*Kelimabelas*, fasilitas. Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan mendapat keuntungan dan kemudahan dalam rangka penanaman modal dari Pemerintah berupa fasilitas-fasilitas antara lain (1) Pembebasan bea masuk dan perpajakan atas pengimporan barang modal. (2) Pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi selama dua tahun. (3) Angka pengenalan impor terbatas (APIT). (4) Izin usaha tetap (IUT), (5) Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah bagi industri tertentu. (6) Penangguhan PBB sejumlah 50% selama delapan tahun.

Adapun untuk fasilitas bea masuk meliputi; (1) Pembebasan bea masuk mesin mempunyai hubungan langsung dengan aktifitas industri, (2) Pembebasan bea masuk materiel dasar dan tambahan yang akan digunakan untuk produksi sesuai dengan kapasitas instalasi.

Sedangkan untuk fasilitas pajak pertambahan nilai (PPn) meliputi (a) Izin usaha tetap (IUT), (b) Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah bagi industri tertentu, (c) Penangguhan PBB sejumlah 50% selama 8 tahun.

### **5.3 Jaringan dan Status Sosial Ekonomi Kelompok Masyarakat**

Pola hubungan sosial kelompok sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di Makassar tetap dijalankan dengan baik, karena hidup tanpa komunikasi ilmu pengetahuan menjadi sedikit yang diperoleh. Sebagai anggota masyarakat bisa hidup berhasil disamping kerja ulet harus didorong dengan komunikasi yang lebih luas dengan komunitas-komunitas lain terutama melalui organisasi, karena dengan komunikasi itu akan memperoleh pengetahuan yang lebih berharga baik secara sosial maupun ekonomi. Namun demikian hubungan dengan sesama anggota masyarakat meskipun dilatarbelakangi perbedaan status sosial tetap merupakan kewajiban. Menurut pengakuan seorang tokoh masyarakat<sup>3</sup>, bahwa seseorang bisa berhasil hidup di perantauan tepatnya di Kota Makassar ini tidak terlepas dengan dorongan ikatan sesama anggota masyarakat yang dilatarbelakangi profesi dan mitra kerja baik dengan mereka yang berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi, menengah dan lainnya.

Selain menjalin hubungan dengan sesama masyarakat, dalam menjalankan profesinya juga harus menjalin hubungan melalui organisasi baik organisasi kedaerahan maupun organisasi profesi, karena diantara mereka masing-masing sama-sama sebagai manusia biasa dan sama kedudukannya sebagai warga negara. Sebagai anggota masyarakat meskipun mempunyai status sosial yang tinggi secara ekonomi misalnya pengusaha, mereka tetap menghormati dan

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Pengurus HIPMI Kota Makassar, Beliau mengatakan bahwa sebagai Pengusaha wajib masuk anggota HIPMI karena disamping untuk mempererat persatuan Pengusaha juga dapat menjangkau komunikasi sesama pengusaha untuk memperoleh peningkatan pengetahuan, baik melalui seminar-seminar maupun pertemuan-pertemuan lainnya.

mengikuti aturan-aturan sebagai warga negara yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah daerah setempat. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi dalam Bab I, Pasal I (ayat 1) bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sementara pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Maka sebagai warga negara setiap penduduk di wilayah seperti di Makassar ini mempunyai hak dan derajat yang sama.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dalam pengertian warga negara dan penggunaannya tergantung kepada kita dalam menjalankan hidup. Misalnya, setiap warga negara yang sudah memasuki umur sekolah berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang memadai, atau setiap warga negara berhak menjalankan aktivitas-aktivitas sosial ekonomi dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh dari kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh dari kewajiban adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, wajib menghormati hak azazi orang lain demi kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>4</sup>. Oleh karena itu, sebagai warga negara wajib untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakatnya sebagai perwujudan diri dari sebuah negara kesatuan.

Kegiatan di bidang ekonomi yang merupakan kegiatan yang dilakukan warga masyarakat seperti pengusaha, adalah kegiatan penting karena disamping dapat menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Untuk

---

<sup>4</sup>Lihat Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan, Kasus Kelompok Pekerja Kesehatan, 2011, hlm. 64-65.

mengembangkan usaha ini tidak terlepas menjalin hubungan dengan berbagai pihak, terutama sesama kelompok pengusaha yang berlatarbelakang profesi maupun ikatan daerah asal. Di Kota Makassar telah terjadi pengelompokan-pengelompokan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berdasarkan ikatan etnis maupun jenis pekerjaan. Ada kecenderungan bahwa kelompok etnis Cina mayoritas bekerja di bidang perdagangan, sementara kelompok Etnis Bugis dan Makassar sebagai etnis lokal disamping banyak yang bekerja di sektor perdagangan dan terkenal dengan jiwa kewirausahaannya, sebagian lagi bekerja di kantor pemerintah, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Masyarakat Bugis dan Makassar sebagai penduduk lokal yang dominan, lebih tampak bervariasi latarbelakang jenis pekerjaannya dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya.

Masyarakat dari Etnis Bugis dan Makassar umumnya adalah sebagai pedagang sesuai dengan latar belakang daerahnya yakni Makassar sebagai kota perdagangan. Maka Kota Makassar, meskipun perekonomian dikuasai oleh pengusaha etnik Cina, peran masyarakat lokal yang berasal dari etnis Bugis dan Makassar tetap tinggi di dalam dunia perdagangan, baik mereka sebagai pengusaha, pedagang maupun buruh di sektor perdagangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kota Makassar itu sendiri terutama, yakni pada zaman penjajahan bahwa ketika Makassar selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang terlupakan. “Jan Kompeni” maupun para penjajah kolonial pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang sampai abad ke-20 masih terdiri dari selusin kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militan yang dilancarkan kerajaan-kerajaan itu. Maka Kota Kompeni itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah tanpa *hinterland* – bentuknyapun bukan bentuk kota tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort Rotterdam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Lihat Makassar, Menggeliat di Usia 401 Tahun,

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama Bandar dunia ini adalah pemasaran budak serta menyuplai beras kepada kapal-kapal VOC yang menukarkannya dengan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1930-an di abad ke-18, pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Tiongkok. Komoditi yang dicari para saudagar Tionghoa di Sulawesi, pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang, sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu cendana, sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan bagi monopoli jual beli rempah-rempah dan kain yang didirikan VOC. Setelah Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC, yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan Kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan *backwater* menjadi kembali sebuah bandar internasional.

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia dapat mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih dari setengahnya merupakan pendatang baru dari luar kota<sup>6</sup>. Akibat itu semua Kota Makassar menjadi berkembang tidak terlepas dari sejarah penjajahan, dan berakibat pula terhadap karakter warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas terutama di bidang ekonomi dan yang dominan adalah dunia perdagangan.

Kehidupan sosial ekonomi bagi kelompok etnis Bugis dan Makassar tidak bisa terpisah dengan sistem kemasyarakatannya. Dan

---

<sup>6</sup>*Ibid*

sistem ini selalu melekat dengan aktivitas-aktivitas yang dijalankannya terutama yang berkaitan dengan status sosial ekonomi. Dalam sistem kemasyarakatan lama masyarakat Bugis dan Makassar terdiri dari tiga tingkatan (kasta). Pertama, *ana' karaeng* (Makassar), menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan. Mereka umumnya adalah kelompok raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan. Kedua: *tu maradeka* (Makassar), adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bugis-Makassar. Yang tergolong ini adalah mereka orang-orang yang merdeka (bukan budak atau *ata*). Umumnya mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan yang berlatar belakang etnis Bugis dan Makassar berada di kasta kedua ini. Ketiga: *ata*, adalah sebagai kasta terendah dalam strata sosial. Yang tergolong ini mereka adalah budak/abdi yang biasanya diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Umumnya mereka menjadi budak karena yang terjadi pada zaman dahulu tidak mampu membayar utang, melanggar pantangan adat, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika sosial ketika sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh pemerintahan kolonial, stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar berangsur-angsur mengalami perubahan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya aktivitas di bidang ekonomi. Pergeseran-pergeseran akan terjadi dengan sendirinya, antara lain dari masing-masing strata dalam stratifikasi sosial tersebut karena adanya perbaikan ekonomi sehingga bisa mengubah pandangan terhadap kelas tersebut. Pengaruh ini semakin terlihat pada waktu menjelang abad ke-20, dimana kasta terendah (*ata*) yang biasanya dari latar belakang kelas ekonomi rendah mulai menghilang terutama di daerah perkotaan seperti di Kota Makassar ini. Setelah Indonesia merdeka, karena pengaruh perbaikan kondisi ekonomi dua kasta tertinggi yaitu *ana' karaeng* dan *tu maradeka* juga berangsur-angsur mulai menghilang dalam kehidupan masyarakat.

Di bidang kewarganegaraan, tiga kasta dalam masyarakat Bugis-Makassar dapat dianggap menjadi sebuah hambatan. Oleh karenanya, sosialisasi untuk tidak mengedepankan strata sosial lama terus digalakkan oleh pemerintah. Makna kasta lebih diutamakan dalam

lingkup keluarga saja, bukan untuk dibawa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengaruhnya di bidang sosial ekonomi adalah masing-masing kasta mempunyai hak yang sama dalam usaha pencapaian kehidupan yang lebih layak. Bahkan bagi kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang ekonomi, seperti pengusaha yang sukses, akhirnya cenderung diakui dan dihormati seperti masyarakat lainnya yang berprestasi tanpa memandang berasal dari kasta manapun.

Perkembangan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar dalam melakukan aktivitas ekonomi terutama di wilayah perkotaan yang cepat ikut menggerus nilai nilai lama yang dianutnya, yaitu pengkastaan seperti yang disebutkan di atas. Hal ini terlihat jelas pada kelompok-kelompok masyarakat Bugis-Makassar baik yang bekerja di pemerintahan, swasta maupun sebagai pedagang, bahwa mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa membedakan. Gelar kasta tidak lagi dianggap sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang di mata masyarakat. Ada kecenderungan bahwa kelompok mereka yang dihormati karena adanya prestasi di bidang ekonomi yang berdampak pada kepemilikan seperti banyaknya harta, pemilikan saham di berbagai usaha atau banyaknya perusahaan-perusahaan di berbagai sektor yang dimiliki dan di sisi lain bagi mereka yang bekerja di pemerintahan dihormati karena memiliki posisi jabatan atau kedudukan birokrasi di pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, banyak dipengaruhi oleh karena keberhasilan di bidang sosial ekonomi. Misalnya, di *bidang pemerintahan* kesempatan yang sama diberikan pada semua kasta baik dari bangsawan maupun bukan bangsawan untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Siapapun yang menjabat, pasti akan mendapat penghormatan lebih di mata masyarakat. Sekalipun *bukan dari keturunan bangsawan* tetapi mempunyai jabatan strategis, pasti kecenderungan dihormati dan mendapatkan status sosial tinggi di masyarakat.

Kemudian dari segi *Kekayaan*, sudah menjadi ketentuan umum bahwa mereka yang mempunyai modal usaha yang melimpah akan

dihormati oleh sebagian besar masyarakat. Begitu juga dalam masyarakat Bugis-Makassar, seseorang yang mempunyai harta lebih banyak akan dihormati. Di era reformasi ini telah terjadi dinamika sosial ekonomi bahwa masyarakat berkompetisi melakukan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesuksesan kehidupan yang lebih layak dengan berbagai macam cara, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Faktor lainnya yang dianggap dominan mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah *tingkat pendidikan*. Pengaruh tingkat pendidikan seseorang juga dapat berperan sentral dalam menentukan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan sudah berbeda jauh dengan masa lampau, dimana mereka yang bisa menikmati pendidikan adalah hanya dari kasta tertinggi. Sekarang, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, sehingga tidak ada lagi dominasi pengetahuan yang terbatas pada kalangan atas saja. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini dengan mudah mereka bisa menaikkan status sosialnya, terutama karena dengan kecerdasan yang diperoleh bisa memasuki dunia kerja yang menjanjikan masa depan, misal dengan mendirikan bisnis usaha mandiri dan lama-lama membuka jaringan sosial yang lebih luas dengan kelompok masyarakat lainnya akhirnya usahanya bisa berkembang secara luas.

Jadi antara kelompok masyarakat yang berasal dari kasta tertentu atau bangsawan dan masyarakat biasa akan mendapat perlindungan yang sama dalam hidup bermasyarakat, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis. Mereka yang bekerja sebagai pengusaha bisa menjalankan sesuai profesinya dan mempunyai jaringan-jaringan dalam melakukan aktivitasnya. Demikian pula mereka yang bekerja sebagai pedagang, dan lainnya akan bekerja sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk pencapaiannya. Mereka masing-masing berhak mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan aktivitas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kondisi ini juga terjadi di Kota Makassar, bahwa anggota masyarakat umumnya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat meskipun dari latarbelakang sosial budaya dan ekonomi yang berbeda-beda.



Masyarakat dari kelompok Bugis dan Makassar adalah merupakan kelompok sosial yang dominan dilihat dari sisi etnis, maka dalam aktivitasnya ada kecenderungan terlibat di organisasi kedaerahan/daerah asal yang berdasarkan etnis, dan juga secara ekonomi yang bekerja sebagai pengusaha terlibat dalam organisasi seperti HIPMI, KADIN dan organisasi di bidang sosial ekonomi lainnya.

Salah satu alasan dan tujuan dari keikutsertaan dalam organisasi profesi atau kedaerahan adalah untuk melindungi kepentingan kelompok, disamping mengembangkan kualitas profesi pengusaha atau pekerja. Keserasian antara kepentingan anggota dan kepentingan bersama, merupakan salah satu penunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak anggota menaruh kepercayaan terhadap kemampuan profesional sebagai pengusaha atau pekerja, di lain pihak karena adanya keamanan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Jaringan organisasi yang bersifat kedaerahan dan latar belakang etnis Bugis dan Makassar ini cukup luas, bahkan di setiap kabupaten atau kota di seluruh Sulawesi Selatan terdapat cabangnya. Apabila yang berada di luar Sulawesi terbentuk organisasi yang lebih luas lagi yang dinamakan IKSS (Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan), yang anggotanya dari berbagai sub kelompok etnis yang berada di Sulawesi Selatan. Organisasi ini juga terjadi pengelompokan-pengelompokan usaha di bidang ekonomi, sehingga terjadi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama di dalam pengadaan bahan baku, perekrutan tenaga kerja dan pemasaran. Kondisi ini menciptakan mentalitas perantau sesama warga Sulawesi Selatan menjadi kuat dalam persaudaraan karena senasib, sepenanggungan dan untuk pengaman sebagai saudara ketika berada di luar wilayah Sulawesi Selatan, misalnya IKSS di Jakarta, Surabaya, Medan, dan lainnya.

Melalui organisasi HIPMI<sup>7</sup>, kelompok etnis Bugis dan Makassar ini turut berperan besar, hal ini terlihat dari sisi kepengurusan organisasinya. Meskipun anggotanya terdiri dari berbagai etnis, seperti etnis Cina yang terkenal dan dominan menguasai dunia usaha dan perdagangan, namun etnis Bugis dan Makassar tetap berpengaruh dalam kepengurusannya. Ada kecenderungan pengusaha dari etnis Cina tidak mau di depan dalam kepengurusan dan lebih mengalah, tetapi pada sisi lain bisa memanfaatkan payung organisasi ini sebagai pengaman dan membangun relasi di bidang bisnis. Sementara bagi etnis Bugis dan Makassar tetap pegang roda perjalanan organisasinya dan melakukan hubungan-hubungan dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun swasta. Hak dan kewajiban sebagai anggota HIPMI ini tetap berpegang pada aturan-aturan yang berlaku, seperti setiap anggota harus membayar iuran sebanyak Rp.500.000; per-setiap periode kepengurusan (empat tahun)<sup>8</sup>. Secara sosial ekonomi menjadi anggota HIPMI ini tidaklah merasa dirugikan, karena bisa melihat perkembangan dunia usaha dan adanya kerjasama antara pengusaha di berbagai bidang, misalnya pengurusan izin-izin usaha, penyelenggaraan tender-tender dan lainnya seperti penyelesaian-penyelesaian ketika ada permasalahan yang dialami oleh pengusaha.

Hubungan pengusaha dari kelompok etnis Bugis Makassar dengan pengusaha etnis lainnya seperti Cina yang dianggap menguasai perdagangan di Kota Makassar tetap baik. Pada satu sisi mereka saling bekerjasama terutama dalam pengadaan bahan baku misalnya, tetapi pada sisi lain tetap berkompetisi dalam mencapai keuntungan usaha bisnisnya. Pandangan pengusaha Bugis-Makassar terhadap pengusaha etnis Cina umumnya mengatakan bahwa mereka mempunyai etos kerja yang tinggi dan didukung dengan persatuan usaha yang kuat sesama kelompoknya. Sikap hemat, lebih teliti dan berani ambil resiko dimiliki

---

<sup>7</sup>Badan Pengurus HIPMI Kota Makassar periode 2011-2014, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, Kompartemen-kompartemen, Departemen-departemen, dan disertai dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Pengurus HIPMI cabang Kota Makassar, periode 2011-2014.

oleh etnis Cina sehingga bisnisnya bisa bertahan dan berkembang dengan cepat. Selain itu, menjalin jaringan kerja sesama kelompok etnisnya juga luas. Sebaliknya etnis Cina juga mempunyai pandangan tersendiri terhadap usaha yang dilakukan oleh etnis Bugis dan Makassar, bahwa mereka mempunyai dua sifat utama yang cukup menarik sebagai pengusaha yaitu sifat ramah dan mempunyai moral yang tinggi sebagai pengusaha karena selalu mematuhi pada nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, hubungan dua kelompok pengusaha meskipun berbeda karakternya selalu menjalin kerjasama dengan berdasarkan saling membantu dan saling mempunyai kepentingan di bidang ekonomi.

Perilaku bisnis dan modal sosial yang dimiliki antara dua kelompok etnis tersebut jauh berbeda, namun tetap tidak meninggalkan tujuan dari aktivitas yang dilakukan yaitu keuntungan atau *profit* yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur yang berbeda, masyarakat Bugis Makassar meskipun tujuan berbisnis adalah mengejar keuntungan tetapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai agama Islam yang dijalankan tidak boleh dilanggar. Akibatnya tujuan idealnya untuk mencari keuntungan ekonomi kadang-kadang kurang maksimal dan bahkan mengalami hambatan-hambatan. Mereka juga mempunyai strategi tersendiri dalam menjalankan usahanya, baik dalam menjalin jaringan sosial, merekrut tenaga kerja, pengadaan bahan baku, sumber permodalan dan mencari tender-tender pekerjaan yang merupakan proyek.

Pada sisi lain, pandangan pengusaha tentang hubungan di bidang ekonomi antara anggota masyarakat yang berlainan kasta atau keturunan bangsawan dan bukan bangsawan adalah cukup bervariasi. Hubungan antara mereka tidak ada masalah dan terjalin kemitraan dengan baik, apabila mereka mempunyai saling kepentingan. Masing-masing pihak akan menyadari selama kepentingannya terpenuhi, tetapi tidak sedikit bagi mereka yang merasa berasal keturunan dari bangsawan, misalnya dari *ana'karaeng* (Makassar) akan merasa lebih tinggi statusnya. Namun kondisi semacam ini semakin lama di daerah perkotaan akan semakin melebur, yang penting adalah dari segi prestasi

bahwa dari pihak yang bukan bangsawanpun apabila berprestasi secara ekonomi cenderung akan dihormati. Misalnya dari kalangan keluarga biasa yang bekerja sebagai pengusaha, karena prestasi dalam menjalankan usahanya berjalan sukses dan mencapai puncaknya mereka tetap akan membawa nama baik di daerahnya dan akhirnya bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat. Kondisi semacam ini berakibat merubah pandangan masyarakat terhadap status mereka menjadi naik, yang dikarenakan prestasi di bidang sosial ekonomi. Stratifikasi relatif terbuka, setelah aktivitas mencapai dengan prestasi tersebut dan akan mendapat penghargaan seperti bangsawan. Sebaliknya kalau dari kalangan bangsawan tidak memiliki prestasi yang menonjol dalam aktivitas, masih tetap mendapat penghargaan. Maka jalur pendidikan, prestasi di bidang ekonomi, adalah strategi untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan oleh kalangan masyarakat luas. Namun demikian simbol-simbol kebangsawanan tetap dipertahankan, karena hubungan sesama warga masyarakat Bugis Makassar saling menghargai kultur.

Di lain pihak pandangan masyarakat tentang hubungan anggota masyarakat yang berbeda status sosial yang berbeda ada yang menganggap sensitif, karena walaupun bagaimana status yang masih merasa keturunan dari bangsawan seperti dari kasta tertentu dimana mereka bertempat tinggal akan selalu dihormati oleh anggota masyarakat dari etnis yang sama. Faktor status sosial ini sangat berpengaruh terhadap kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktifitas di bidang ekonomi, karena jaringan-jaringan yang masih berbau status masih terjadi pengelompokan. Bagi mereka yang berasal dari kalangan status kelas bawah, ada yang tidak mau berbaur dengan kelompok status di atasnya. Namun kondisi semacam ini di wilayah perkotaan semakin lama sudah semakin melemah, karena pengaruh dinamika sosial kehidupan yang semakin berubah akibat pola interaksi sosial yang terbuka antar berbagai warga masyarakat.

Selain itu, pandangan masyarakat tentang hubungan pengusaha yang menguasai di bidang ekonomi yang berbeda latar belakang status sosial adalah cukup bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa hubungan

pengusaha yang berasal dari etnis Bugis dan Makassar dengan pengusaha yang berlatarbelakang etnis Cina berjalan dengan baik, karena keduanya saling mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Namun ada pula yang berpendapat hubungan diantara keduanya berjalan kurang harmonis, karena kadangkala tidak sejalan kepentingan yang didapat. Perlu diketahui bahwa di wilayah Kota Makassar ini, penggerak utama dalam bidang perekonomian mayoritas dikuasai oleh etnis Cina, dan setelah itu sebagai etnis lokal yang dominan di kota ini yakni pengusaha yang berasal dari etnis Bugis dan Makassar. Tercipta hubungan antara kedua kelompok ini tetap berjalan, meskipun kadang-kadang kurang harmonis. Pihak dari pengusaha Cina tetap menganggap bahwa pengusaha dari Bugis dan Makassar sebagai mitra kerja, karena dalam melakukan usaha tetap memerlukan hubungan kerjasama. Upaya yang dilakukan adalah melalui forum komunikasi atau forum pertemuan misalnya melalui jaringan kerja di organisasi HIPMI dengan tujuan membangun budaya kerja yang lebih mengutamakan kebersamaan. Forum ini selalu dilaksanakan untuk membangun hubungan sinergi antara para pengusaha, mengingat peran pengusaha adalah tulang punggung dalam menggerakkan perekonomian di perkotaan.

Pada sisi lain, pandangan masyarakat tentang hubungan kelompok masyarakat yang berbeda status sosial di bidang ekonomi tetap terjadi kesenjangan, hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan. Di beberapa kelembagaan misalnya di organisasi HIPMI dalam menentukan pengurus harus melalui pemilihan tetapi umumnya diduduki oleh kelompok etnis dari status sosial yang kondisi ekonominya telah mapan. Keterlibatannya para pengusaha kelas atas umumnya ikut menentukan secara tidak langsung, karena mereka mempunyai kepentingan yang berpengaruh terhadap kondisi bisnis yang mereka tekuni. Hubungannya dengan pemerintah, mereka tetap membangun dengan baik misalnya dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan perizinan di bidang usaha maupun dinas-dinas yang memberikan peluang kerjasama dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan.

Untuk mengembangkan peran kelompok masyarakat yang berdasarkan etnis ini untuk tujuan sosial telah melakukan kerjasama dengan mitra kerja antara lain dengan HIPMI, dan organisasi-organisasi kedaerahan. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan kepedulian sosial dalam berpartisipasi membangun masyarakat. Kegiatan tersebut, antara lain adanya kegiatan bersama bhakti sosial yang dibantu pula oleh berbagai sponsor. Bhakti sosial ini, misalnya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu penghasilannya, dan lainnya. Pembauran antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda status sosial ekonominya baik yang mampu, kurang mampu tetap dilaksanakan.

## 5.4 Pemahaman Tentang Kewarganegaraan

Pemahaman tentang kewarganegaraan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berdasarkan status sosial ekonomi tidak hanya penting untuk keberhasilan kelompok masyarakat dalam merealisasikan hak-hak kultural anggota, tetapi juga bagi pengembangan kesadaran dan budaya sipil yang akan mewarnai sikap dan perilaku masyarakat di perkotaan yang pluralistik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka konsepsi, terdapat delapan unsur modal sosial yang dapat dianggap sebagai *proxy* sejauh mana pemahaman dan aktifitas kewarganegaraan yang dapat dijadikan indikator tingkat keterikatan pada lingkup internal maupun internal suatu komunitas, yaitu (1) Adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) Jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) Rasa aman dan saling percaya (*reciprocal trust*), (4) Keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) Kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) Se jauh mana adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) Kemampuan untuk menghargai perbedaan

pendapat, dan (8) Sejauh mana adanya solidaritas sebagai sesama warga negara.<sup>9</sup>

Dalam dunia nyata kewarganegaraan memiliki dinamika yang berbeda dengan aturan normatifnya. Dinamika kewarganegaraan kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan status sosial ekonomi seperti pengusaha, pekerja biasa di Kota Makassar ini tampaknya cukup mendukung kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Profesi pengusaha misalnya, sebagai warga negara kurang berpengaruh dalam mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintahan kota, namun secara tidak langsung ikut menyumbangkan pemikiran melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang ada ikatannya dengan latar belakang bidang pekerjaannya.

Pengusaha sebagai warga negara mempunyai rasa memiliki bahwa kota sebagai tempat tinggal adalah melalui proses yang dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan dan keberhasilannya serta jaringan sosialnya. Di Kota Makassar, terdapat organisasi profesi seperti HIPMI yang anggotanya dari para Pengusaha Muda, dan organisasi KADIN, dan lainnya yang berdasarkan pekerjaan. Para Pengusaha yang bekerja sesuai bidangnya seperti kontraktor, perdagangan, transportasi, dan lainnya, cenderung bekerja sesuai dengan keahliannya agar lebih profesional dan selanjutnya dapat meningkatkan karier.

Menurut pengakuan dari informan<sup>10</sup> sebagai pengusaha, proses untuk menjadi berhasil adalah melalui proses panjang yang dimulai dari bawah dan semuanya mempunyai tujuan. Setidaknya terdapat dua macam kekuatan terus-menerus yang dapat mempengaruhi keutuhan profesi di bidang pekerjaannya. Pertama, harus bekerja keras dan mau

---

<sup>9</sup>Lihat dalam (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Coleman, 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahra, 2007, Zainuddin, 2003;)

<sup>10</sup>Wawancara dengan seorang pengusaha muda, di kota Makassar, beliau menuturkan pengalaman hidupnya tentang perjalanan kariernya sebagai pengusaha dan pengalaman-pengalaman aktivitas-aktivitas sosial yang dijalannya.

belajar secara terus-menerus dan aktif mengikuti organisasi profesi antara lain HIPMI dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan spesialisasinya. Dan kedua, sebagai warga negara harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang sesuai latar belakang budaya tuan rumah. Tinggal di daerah perkotaan ini harus bisa mengendalikan hubungan-hubungan dinamis antara kebertahanan dan perubahan yang mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi.

Setelah berhasil tetap membina hubungan baik dengan pemerintah atau tempat bekerja maupun organisasi-organisasi profesi yang diikutinya khususnya di Kota Makassar. Sebagai Pengusaha, dia bisa berperan banyak dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran melalui organisasi itu dan selanjutnya bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah khususnya pembangunan di bidang ekonomi di wilayah perkotaan. Demikian pula sebagai warga masyarakat yang baik karena eksistensinya di dalam masyarakat diakui, dan aktif di berbagai kegiatan sosial yang terdapat di Kota Makassar.

Makassar sebagai kota perdagangan dan strategis di kawasan Indonesia Timur merupakan kota yang penduduknya berlatar belakang etnik yang berbeda-beda dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Membuat Makassar maju dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan umum merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu, bagi anggota masyarakat sebagai pendatang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bekerja sebaik-baiknya dalam mencari nafkah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Keberhasilan dalam hidup harus bisa menjalin hubungan antar sesama manusia meskipun berlatar belakang etnik yang berbeda, demikian pula hubungan dengan pemerintahan dimana mereka bertempat tinggal. Stratifikasi sosial masyarakat khususnya bagi masyarakat Bugis dan Makassar, ada kecenderungan melemah yang membedakan status kehidupan masyarakat, namun tetap dihargai. Masing-masing status tetap mendapat perlindungan hidup baik secara hukum dan sosial kemasyarakatan.



Keberadaan kelompok pengusaha seperti HIPMI, KADIN di perkotaan ini secara tidak langsung telah membawa pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial maupun perkembangan masyarakat di daerah perkotaan. Kelompok ini berarti telah ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan sekaligus dapat menciptakan dalam proses integrasi sosial. Pada umumnya pandangan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ini menganggap penting, karena disadari bahwa pembangunan di daerah perkotaan untuk kepentingan bersama. Kelompok pengusaha ini tumbuh karena tuntutan profesi, sehingga ada kecenderungan memajukan pembangunan sesuai dengan bidangnya di wilayah tempat tinggalnya. Sikap-sikap kelompok ini juga mempunyai hal yang positif untuk mendukung pembangunan di perkotaan, misalnya keikutsertaan kegiatan sosial di lingkungannya mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi. Misalnya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tidak lupa mereka ikut serta merayakannya dengan menyumbangkan bantuan baik berupa dana maupun tenaga secara suka rela yang terkait dengan profesinya, misalnya pengetahuan manajemen usaha kecil menengah, kegiatan pembangunan sosial, penyuluhan berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan pemasaran pedagang kecil dan penanggulangan bantuan bencana yang terkena musibah dan lainnya.

Di sini ada kesamaan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pengusaha dengan kelompok lainnya yaitu pencapaian *the common good* dalam kehidupan sosial mereka. Cita-cita ini menjadi perekat berbagai komunitas di Kota Makassar. Sikap kebersamaan kelompok terbangun dengan adanya keinginan bersama merealisasikan apa yang mereka anggap baik untuk kepentingan bersama. Berbagai partisipasi kelompok pengusaha dalam berbagai sektor muncul dengan masyarakat sipil karena adanya jaminan bahwa proses pencapaian itu merupakan hal yang diterima oleh masyarakat dan pemerintahannya. Jaminan itu tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan formal tetapi juga dalam pranata sosial seperti

nilai dan etika yang tidak hanya menjadi basis sikap dan tindakan masyarakat tetapi juga menjadi pendorongnya.

Jaringan sosial merupakan hal yang krusial untuk keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Partisipasai kelompok pengusaha seperti HIPMI juga terlihat dari masa ke masa terutama mereka yang terkenal dengan karakter profesinya telah ikut mengembangkan Kota Makassar dengan melakukan aktivitas dalam gerakan-gerakan bhakti sosial masyarakat di bidang sosial ekonomi, seperti pembinaan usaha kecil, kebersihan lingkungan dan lainnya. Sebagai warga negara, kelompok pengusaha ini anggotanya kebanyakan mempunyai sikap toleransi yang tinggi baik sesama anggota kelompok maupun terhadap kelompok di luar profesinya. Biasanya bersama-sama dengan komunitas lainnya ikut aktif dalam partisipasi pembangunan di sekitarnya, misalnya pembangunan gorong-gorong, jalan-jalan dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Namun demikian kelompok pengusaha yang umumnya telah sukses di bidang ekonomi yang berasal dari kasta manapun ada kecenderungan untuk menaikkan status sosialnya untuk terjun ke dunia politik yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat kota, provinsi dan pusat. Hal ini dilakukan karena disamping dapat menaikkan status sosial, dapat pula sebagai kepedulian partisipasi membangun bangsa dan negara.

Sementara itu, kaitannya dengan eksklusi sosial diakui bahwa secara legal formal, eksklusi sosial tidak ada. Semua kelompok pengusaha di Kota Makassar dapat dikatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama karena mereka sama-sama sebagai warga Kota Makassar. Jadi prinsip *free and equal* setiap kelompok pengusaha ini sudah menjadi kesadaran formal para legislator dan eksekutif. Oleh karena itu, tidak adanya diskriminasi secara teoritis dan tidak mendapatkan tempat lagi baik dalam berekspresi maupun dalam berhubungan dengan pelayanan birokrasi. Namun secara ekonomi bagi pengusaha yang telah mapan ada kecenderungan diakui oleh masyarakat, apalagi bisa berperan bagi kehidupan masyarakat luas yang berkaitan aktivitas sosial ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja atau penanggulangan masalah pengangguran, dan dapat

membantu masalah-masalah sosial lainnya. Karena bisa berperan besar dan diakui oleh masyarakat, maka pengusaha ini cenderung dihormati karena prestasinya yang bisa membantu kehidupan bagi masyarakat terutama menaikkan kesejahteraan warga masyarakat.

Namun demikian secara praktis, prinsip bebas dan sederajat ini belum sepenuhnya dialami oleh semua kelompok masyarakat, terutama yang berkaitan di jajaran birokrasi di pemerintahan. Bagi Pegawai Negeri Sipil misalnya, mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah atau menengah akan sulit mendapatkan jabatan yang strategis di unit kerjanya dan mereka ada kecenderungan hanya sebagai staf atau jabatan di bawah meskipun sudah lama masa kerjanya. Mayoritas jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Daerah atau dinas-dinas terkait lainnya di bidang pemerintahan didominasi oleh kelompok etnis dari etnis lokal yang terdapat di Kota Makassar, misalnya kepala bidang pemerintahan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas perekonomian dan jabatan sejenis lainnya. Meskipun demikian yang membedakan hanyalah status jabatan di lingkungan kerjanya, namun mereka sebagai warga negara tetap diakui keberadaannya.

Dalam bidang pendidikan bagi kelompok pengusaha maupun di lingkungan pegawai negeri sipil diakuinya tidak ada eksklusi sosial. Para pengusaha maupun Pegawai Negeri Sipil dapat belajar di sekolah-sekolah manapun dalam mengembangkan kariernya, namun kecenderungan yang dipilih oleh pengusaha tidak begitu penting kecuali yang berkaitan untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya untuk Pegawai Negeri biasanya melanjutkan sekolahnya ke jenjang S-1 atau S-2 universitas-universitas negeri di Kota Makassar atau di luar Makassar seperti UGM atau Akademi/sekolah tinggi di bidang pemerintahan seperti APDN. Tetapi menurut informan<sup>11</sup>, biasanya ada kesenjangan di bidang pendidikan antara Pegawai Negeri Sipil di

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan seorang Pejabat Pemerintah Kota Makassar. Beliau sering dimutasi dalam jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan dari kalangan bangsawan Bugis-Makassar.

lingkungan kerjanya dalam melanjutkan pendidikannya dalam kaitan mengembangkan karir untuk syarat menduduki jabatan. Bagi kelompok Pegawai Negeri Sipil dari etnis tertentu seperti Bugis dan Makassar akan lebih mengalami kemudahan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari luar kedua etnis tersebut. Maka terlihat di kantor pemerintahan di Kota Makassar, posisi-posisi jabatan strategis didominasi oleh mereka yang berasal dari etnis Bugis dan Makassar. Namun demikian syarat pendidikan untuk memperoleh suatu jabatan harus dipenuhi secara mutlak. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang diperoleh, namun menyadari meskipun latar belakang etnis para pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan berbeda-beda tetap berjalan dengan kondusif dalam pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perkotaan.

Menurut pengakuan dari informan, bahwa kesenjangan hubungan antara sesama karyawan dikarenakan faktor status sosial atau jabatan, demikian pula antara anggota kelompok etnis yang berasal dari bangsawan dengan non bangsawan. Faktor jabatan ini bisa dikatakan sebagai hal yang dominan. Misalnya dalam tugas sehari-hari, meskipun mereka dari kalangan non bangsawan seperti pejabat eselon bisa memerintahkan kepada bawahannya meskipun mereka dari kalangan bangsawan, tetapi kalau kelompok etnis yang berlatarbelakang bangsawan, biasanya ada kecenderungan mempunyai sikap sulit untuk diperintah. Untuk mengatasi hal ini, biasanya para pejabat memperlakukan khusus terhadap pegawainya dengan memberikan kesadaran tentang posisi dan peran bahwa mereka sama-sama sebagai pegawai yang setara dalam menjalankan tugas. Demikian pula hubungan antara pejabat senior dengan junior, pejabat senior tetap melakukan pembinaan terhadap pejabat junior. Kesenjangan ini biasanya segera diatasi dengan mengacu peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan status dan jabatannya berikut *job description* nya.

## 5.5 Pendorong dan Penghambat Realisasi Kewarganegaraan

Dari wawancara yang dilakukan dengan nara sumber baik dari Dinas-dinas Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat serta nara sumber lainnya dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat yang berlatarbelakang dari status sosial ekonomi yang berbeda sebagai warga negara tidak terlepas dari pengetahuan mereka yang berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang mereka alami. Beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam kehidupan masyarakat terhadap kesamaan derajat sebagai warga negara sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, adalah sebagai berikut:

Adanya suatu atau beberapa masalah mendesak yang menyangkut kepentingan bersama dan pemecahannya memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan pekerjaan perlu adanya sikap saling menghargai, saling bekerjasama, saling isi-mengisi dalam kehidupan, misalnya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti pengusaha di Makassar ini tujuan utama bekerja adalah untuk mencari nafkah dan mengembangkan karier tetapi tidak boleh melanggar ajaran-ajaran agama, etika, maka perlu membangun komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam kehidupan sosial dengan menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga kerjanya.

Selain itu, komunikasi yang intensif dan penyampaian semua informasi yang diperlukan secara transparan kepada semua pihak yang memerlukan, hal ini dilakukan dalam rangka membangun kesadaran sebagai warga negara kota yang tidak boleh membedakan antar golongan baik berdasarkan pekerjaan, agama maupun status sosial. Pertemuan dan dialog yang dilakukan secara intensif yang melibatkan para pejabat dan dinas terkait di bidang pemerintahan yang menyangkut urusan pelayanan kepada masyarakat akan mempererat hubungan koordinasi dan sinkronisasi serta rasa kebersamaan. Misalnya, dalam menanggulangi anggota masyarakat yang sakit perlu diadakan dialog yang dilakukan antara pengurus kelompok untuk

memecahkannya, meskipun sudah ada peraturan secara tertulis, sehingga bisa memberikan kontribusi optimal bagi pemecahan masalah bersama. Hal ini penting dilakukan karena urusan pertolongan ada kaitannya dengan kesadaran kewarganegaraan, apalagi bagi anggota masyarakat yang berasal dari warga yang kurang mampu secara ekonomi.

Faktor keterbukaan dan kemauan untuk mendahulukan kepentingan bersama demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat adalah sangat penting, mengingat bahwa kondisi masyarakat kota adalah masyarakat yang pluralistik. Pihak Pemerintah kota harus berhati-hati untuk menyepakati yang berkaitan dengan pembiayaan secara proporsional berbagai kegiatan di bidang pelayanan kepada masyarakat di wilayah perkotaan. Jangan sampai ada diskriminasi antar kelompok masyarakat sebagai warga masyarakat yang sama-sama sebagai warga negara, mereka harus dilakukan pelayanan yang sama agar mereka menganggap bahwa sebagai warga negara tidak dibedakan sehingga akan tumbuh perasaan bahwa sebagai warga negara sama-sama dihargai hak dan kewajibannya.

Adanya kesadaran bahwa pelayanan masyarakat tidak mungkin lagi menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah kota sepenuhnya. Oleh karena itu, pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat terutama kelompok-kelompok etnis seperti di bidang sosial ekonomi di perkotaan perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Berdasarkan prinsip hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal ini yang paling penting adalah komitmen besar yang ditunjukkan pemerintah kota untuk sebagai pelayan masyarakat atau mitra masyarakat dan membangun secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Apabila kondisi ini bisa tercipta dengan baik akan melahirkan tingkat kesadaran yang semakin tinggi terhadap kesadaran kewarganegaraan di perkotaan.

Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat bahwa mereka juga turut bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Pendekatan

melalui dialog dengan warga komunitas di perkotaan dilakukan sejak awal dari perencanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dapat ditingkatkan. Dengan cara demikian juga dapat diciptakan rasa memiliki pada warga masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat maka nilai swadaya atau kerjasama yang diberikan masyarakat juga semakin tinggi. Dalam hal ini akan semakin terbukti bahwa komunikasi yang terbina baik antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan pembangunan khususnya dalam bidang pelayanan kepada kehidupan warga masyarakat.

Mengingat masyarakat Kota Makassar sebagai kota pelabuhan di Indonesia Timur dan kondisi masyarakatnya multi-etnik, antara lain: etnik Bugis, Makassar, Tator, Mandar, Cina, dan etnik lainnya, perlu diciptakan hubungan yang harmoni dan dapat menumbuhkan budaya gotong-royong, sehingga dapat meringankan beban kegiatan di bidang pelayanan di berbagai bidang bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dapat bersinergi dalam memecahkannya yang mana kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan status sosial ekonomi di masyarakat itu mempunyai hak dan derajat yang sama sebagai warga negara. Dinamika kehidupan masyarakat di daerah perkotaan telah mempengaruhi pergeseran kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kasta atau strata sosial, bahwa yang dahulu tergolong dari bangsawan semakin lama ada kecenderungan memudar pengakuannya. Faktor ini dipengaruhi oleh prestasi-prestasi dalam aktivitas anggota masyarakat terutama di bidang ekonomi, seperti banyak pengusaha dari latar belakang masyarakat kalangan non bangsawan karena menjadi pengusaha yang sukses akhirnya cenderung mendapat pengakuan dari masyarakat, karena telah bisa membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah dan membantu sumbangan-sumbangan sosial dalam kehidupan masyarakat lainnya.

Budaya kelompok etnis yang berkaitan dengan status sosial seperti bangsawan sebagai warga negara dan menetap di Kota Makassar ini sudah menunjukkan sikap terbuka. Meskipun mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi, masing-masing kasta mempunyai perbedaan, tetapi sebagai warga negara tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sikap ini ditunjukkan dalam partisipasi dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat untuk turut berpartisipasi membangun daerah ini khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gerakan bergotong royong bersama komunitas masyarakat untuk membangun kota yang lebih maju dan kondusif, seperti kesadaran lingkungan kebersihan dan kegiatan sosial lainnya. Dinamika kehidupan masyarakat terutama setelah era reformasi, yang berkaitan dengan status sosial menunjukkan adanya kelonggaran, masing-masing lapisan akan mendapat pengakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi dan peran pemerintah kota juga merupakan salah satu faktor penentu yang penting dalam menentukan kebijakan program pelayanan terhadap masyarakat. Faktor pimpinan juga turut menentukan, seperti Walikota Makassar yang berasal dari putera daerah atau etnik Makassar yang disegani masih tetap merupakan tokoh panutan baik secara formal maupun informal, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Kota Makassar warga masyarakatnya multi-etnik sehingga perlu adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok etnis di kota ini terutama kelompok yang dominan. Peran kelompok etnis di bidang sosial ekonomi sangat tinggi seperti yang terlibat dalam HIPMI, KADIN, berperan sebagai warga kota telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi untuk memajukan Kota Makassar. Mereka telah turut berpartisipasi dalam gerakan pembangunan ekonomi membaur dengan kelompok masyarakat, meskipun masih belum sempurna, terutama gerakan sosial pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. Pola hubungan baik dengan sesama profesi maupun sesama anggota kelompok masyarakat tetap dilakukan, tetapi sebagai warga Kota Makassar tetap menjalankan



fungsi dan peran sebagai warga negara yang baik dan mengikuti kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar.

## 5.6 Penutup

Kota Makassar adalah kota yang pluralistik dan dihuni oleh berbagai kelompok etnik dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, tetapi didominasi oleh kelompok etnis Bugis dan Makassar sebagai penduduk lokal. Oleh karena itu, cukup menarik dijadikan lokasi penelitian dinamika kewarganegaraan. Makassar juga merupakan salah satu kota perdagangan yang dominan di kawasan Iundonesia Timur. Salah satu kelompok sosial masyarakat yang dominan di Kota Makassar adalah kelompok masyarakat yang berlatar belakang etnis Bugis dan Makassar yang ada kecenderungan mewarnai aktivitas kehidupan sosial ekonomi di wilayah perkotaan.

Dinamika kelompok etnis di bidang sosial ekonomi yang anggotanya dengan latar belakang berbeda status sosialnya, baik itu sebagai pengusaha maupun pedagang dan pekerja/karyawan swasta dan pemerintah dari berbagai kasta yang tinggal di perkotaan dalam mengartikulasikan kewarganegaraan tetap berjalan secara damai dan tidak menemui masalah-masalah yang berarti. Terdapat persaingan kepentingan antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat baik secara politik dan ekonomi. Tetapi kompetisi ini dapat hidup berdampingan yang relatif toleran, terbuka dan tetap saling menghargai dalam pergaulan sehari-hari.

Realisasi hak kewarganegaraan khususnya bagi kelompok etnis tampaknya memang difasilitasi secara organisatoris dan sangat mendukung bagi perkembangan kehidupannya. Misalnya, pengusaha terikat dengan organisasi profesinya di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan ada pula yang ikut organisasi Kedaerahan yang berasal dari Kabupaten/daerah asalnya, apabila berada di luar provinsi ada kecenderungan ikut anggota Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan (IKSS) dan harus taat pada aturan-aturannya. Sedangkan anggota lainnya misalnya sebagai Pegawai Negeri atau Swasta terikat dengan

organisasi di lingkungannya, mereka juga harus taat pada peraturan yang digariskan dalam organisasi profesi. Hal inilah yang membuat arti penting adanya perkumpulan masyarakat bagi komunitas masyarakat berdasarkan ikatan etnis. Upaya untuk mempromosikan identitas profesi melalui perkumpulan adalah sebagai sarana kegiatan sosial bagi anggota komunitas untuk melakukan aktivitas baik melakukan hubungan dengan komunitas lain maupun terhadap pemerintah. Ekspresi ini merupakan hal yang positif dari prinsip kewarganegaraan.

Fenomena dinamika kewarganegaraan di Kota Makassar serta peran komunitas kelompok etnis dari berbagai strata sosial sebagai modal sosial struktural komunitas pekerja juga perlu mengembangkan *bridging social capital* untuk konektivitas dengan komunitas kelompok lain dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat dengan lingkungan yang baik serta kebebasan sipil dan politik. Peran komunitas kelompok etnis di bidang sosial ekonomi dalam pembentukan multikulturalisme sangat diperlukan yaitu dengan membentuk adanya *social networking* dengan komunitas-komunitas lain untuk mengurangi budaya dominan, sehingga akan tercipta komunikasi yang lebih terbuka.

### Daftar Pustaka

- Bruner Edward. M. 1978. *“The Expression Of Ethnicity in Indonesia”* dalam *Urban Ethnicity*, Abner Cohen, ed, London: Tuuistock.
- BPS Kota Makassar. 2011. *Makassar Dalam Angka 2011*, Makassar: Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Makassar.
- , 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2009*, Bab VI Ketenagakerjaan, Makassar: Kerjasama Bappeda dan BPS Kota Makassar.
- Coleman, James. 1988. “Social Capital in the Creation of Human Capital” *American Journal of Sociology*, Vol 94 (supplement), pp. S95-S120.

- Fatimah, Nyayu, dkk. 2011. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Pekerja Profesional di bidang Kesehatan*, Jakarta: LIPI Press.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* New York: The Free Press.
- Hans, Dieter Evers. 1995. *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: LP3ES.
- Jumadi Mappanearo. 2009. *Rancang Metropolitan Mamminasata dalam Makassar Bagaimana Menjadi Kota dunia?*, Makassar: Ombak Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar.
- Karakteristik Sosial dan Ekonomi*. 2007. dalam Mega Trends, Makassar: Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Ilham, Makassar. Humas Pemerintah Kota Makassar.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mulyana, Deddy, Prof, MA, Ph.D. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan pertama.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi*, Jakarta: LP3ES.
- Putnam, Robert. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life* The American Prospect, Vol 13. Pp. 35-42.
- Nasikoen. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali.
- Parker, SR, Br own, RK.1990. *Sosiologi Industri*, Jakarta: CV Rajawali.
- Tumanggor, Roesmin. 2009. "Pengembangan Penelitian Masalah Kesehatan Sosial", *Jurnal Puslitbang Kesejahteraan Sosial DEPSOS*, Vol. 14 No.01, Januari-April 2009, Jakarta.
- Usman Nurma dan Usdar Nawawi. 2010. *Bagian Ketujuh, Peluang Investasi Dalam Makassar*. Dalam Tren Global, Makassar:

Pelita Pustaka bekerjasama dengan Humas Pemerintah Kota Makassar.

Zainuddin, Dundin, dkk. 2010. *Dinamika Kewarganegaraan Kelompok Sosial Di Perkotaan*, Jakarta: LIPI Press.

## BAB VI

# DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL DALAM POLITIK LOKAL DI KOTA MAKASSAR

Oleh Sukri Abdurrachman

### 6.1 Pengantar

Berakhirnya pemerintah Orde Baru yang otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, Indonesia memasuki era baru yang dijuluki “era Reformasi” menuju suatu pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Sejak era reformasi digulirkan, telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi sistem pemerintahan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah di era reformasi. Perubahan dari pemerintahan yang sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi yang lebih demokratis diharapkan dapat melahirkan pemimpin dan pejabat struktural di eksekutif maupun pemimpin dan anggota parlemen di legislatif yang modern, handal dan profesional yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik, baik di tingkat pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan politik yang demokratis di era reformasi dan otonomi daerah, salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah lokal di sejumlah daerah di Indonesia adalah semakin menguatnya politik identitas lokal. Menguatnya politik identitas lokal itu erat kaitannya dengan peran dan pengaruh etnis dan kelompok kelas sosial dominan di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi etnis di Provinsi Sulawesi

Selatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 terbanyak adalah etnis Bugis (41,90%). Disusul, etnis Makassar (25,43%); etnis Toraja (9,02%); etnis Mandar (6,10%); dan etnis Luwu (4,08%). Sisanya etnis lainnya (Jawa (2,72%), Duri (1,56%); Selayar (1,20%); Sunda (0,10%); Madura (0,07%); Minangkabau (0,06%); Betawi (0,05%); Banjar (0,05%) dan 7,66% etnis lainnya).<sup>1</sup> Dalam beberapa etnis lokal di Sulawesi Selatan terdapat kelompok kelas sosial bangsawan dan kelompok kelas sosial non bangsawan.

Dari berbagai studi yang telah dilakukan, kelompok kelas sosial bangsawan di Sulawesi Selatan mempunyai peran dan pengaruh yang kuat di lembaga-lembaga pemerintahan dan politik di tingkat lokal. Christian Pelras (1976: 314) menyimpulkan bahwa “kaum bangsawan akan tetap berkuasa meskipun dalam bentuk berbeda dengan yang ada di masa lampau”.<sup>2</sup> Burhan Magenda (1989: 891-892 dan 896) menyatakan “untuk Sulawesi Selatan masih tetap bertahannya kaum bangsawan setempat dalam aparat pemerintahan (pamongpraja). Fakta bahwa pamong praja telah menjadi penunjang kaum bangsawan setempat tidak mengherankan mengingat birokrasi daerah tidak lain merupakan perkembangan dari birokrasi turun temurun berbagai teritori yang memerintah sendiri sejak masa kolonial. Reformasi desentralisasi yang terjadi pada tahun 1938 telah mengakibatkan perluasan birokrasi turun temurun, membuahkan kesempatan mengenyam pendidikan yang semakin luas dan semakin bertambahnya jumlah kaum bangsawan”.<sup>3</sup> Hasan Walinono (1979: 195) menyatakan bahwa “seorang pejabat yang juga bangsawan akan lebih dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat dibandingkan dengan pejabat yang

---

<sup>1</sup>Leo Suryadinata dkk, 2003, *Penduduk Indonesia Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*, Cetakan pertama, Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 28

<sup>2</sup>Dikutif dari Andi Faisal Bakti, 2007, “Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan” dalam Henk Schulte Norddholt et.al (Editor), *Politik Lokal di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kerjasama KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, hlm. 491.

<sup>3</sup>Dikutif dari Andi Faisal Bakti, 2007, *Loc. Cit.*

bukan bangsawan”.<sup>4</sup> Mattulada (1985: 26) menyatakan “Kemurnian keturunan pada lapisan tertentu dalam masyarakat Makassar sangat ketat dipertahankan, karena erat hubungannya dengan jabatan dalam birokrasi kerajaan, terutama pada posisi puncak kerajaan. Seorang yang bisa dipilih *Samboya* (raja) hanyalah dari putra yang berasal dari *anak tikno* (*ana’ ti’no*)”.<sup>5</sup> Hal ini menurut Ahmad M. Sewang “mempunyai hubungan dengan kepercayaan dalam masyarakat bahwa seorang raja haruslah berasal dari turunan Tomanurung”.<sup>6</sup> Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.<sup>7</sup>

Studi ini dilakukan di Kota Makassar. Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat perdagangan, pintu gerbang perekonomian dan pembangunan kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar juga dikenal sebagai kota pendidikan terkemuka di kawasan Timur Indonesia. Penduduknya dihuni berbagai etnis/suku bangsa, agama, dan berbagai kelompok kelas sosial serta panguyuban kedaerahan.

Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: Bagaimana peta kelompok kelas sosial dominan dalam politik lokal

---

<sup>4</sup>Dikutif dari Imam Suprayogo, “Warisan Budaya Karaeng Galesong (Studi Kasus Perkawinan di Desa Galesong)” dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (Editor), *Panorama Kehidupan Sosial*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, The Indonesiaan Social Sciences Proyek, ADAB dan MSI Sul-Sel, 1985, hlm. 8

<sup>5</sup>Dikutif dari Ahmad M. Sewang, 2005, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 36.

<sup>6</sup>Ahmad M. Sewang, 2005, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup>Baduzzaman, *Stratifikasi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan*, 2008, hlm. 1, <http://bz69elzam.blogspot.com>, diakses 14 Juni 2012.

pada era reformasi dan otonomi daerah di Kota Makassar? Apakah telah terjadi perubahan atau pergeseran kelompok kelas sosial dominan khususnya kelas bangsawan dalam politik lokal? Ataukah masih tetap kuat bertahan kelompok kelas bangsawan dalam politik lokal? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimanakah dampak atau implikasi kelompok kelas sosial terhadap dinamika kewarganegaraan khususnya dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan kelompok kelas sosial di bidang politik? Bagaimana pandangan pejabat/aparat pemerintah, anggota DPRD, kalangan Akademis (dosen/peneliti), tokoh masyarakat, tokoh agama dll?

## 6.2 Selayang Pandang tentang Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 119<sup>0</sup> 24'7'38" Bujur Timur dan 5<sup>08</sup>'5'19" Lintang Selatan. Posisi wilayah Kota Makassar dengan ketinggian yang bervariasi antara 1–25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia, dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Kota Makassar dijuluki sebagai kota "*Anging Mammiri*" yang pada abad ke-16 terkenal sebagai bandar niaga dan kota maritim yang sudah mendunia.<sup>8</sup> Kota Makassar sebelumnya dinamakan Ujung Pandang berdasarkan julukan "*Jumpandang*". Pada tanggal 13 Oktober 1999 melalui Peraturan Pemerintah No. 86/1999 berubah menjadi Kota

---

<sup>8</sup>M. Idris Patarai, 2009, *Ilham Arief Sirajuddin Dari 1 ke 1*, Makassar: Penerbit Pustaka YASPINDO, hlm. 42.



Makassar.<sup>9</sup> Secara administratif Kota Makassar berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa. Sebelah Timur dengan Kabupaten Maros. Dan sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Makassar adalah 175,77 km<sup>2</sup> mencakup dalam 14 wilayah kecamatan dan 143 kelurahan. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2010 berjumlah 1.339.374 orang dengan rumah tangga berjumlah 306.067. Menurut jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Penduduk perempuan berjumlah 677.995 orang (50,62%) dan laki-laki berjumlah 661.379 orang (49,38%). Penyebaran penduduk Kota Makassar menurut kecamatan manunjukkan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tamalate yakni berjumlah 170.874 orang (12,76%). Di urutan kedua, Kecamatan Biringkaya berjumlah 167.741 orang (12,52%). Dan urutan ketiga, Kecamatan Rappocini berjumlah 151.091 orang (11,28%). Sementara penduduk terendah berada di Kecamatan Ujung Pandang yaitu berjumlah 26.904 orang (2,01%).<sup>10</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Dari sisi kepadatan penduduk, yang terpadat adalah kecamatan Makassar dengan kepadatan 32.421 jiwa per km persegi. Disusul kecamatan Mariso dengan kepadatan 30.701 jiwa per km persegi. Urutan berikutnya kecamatan Mamajang dengan kepadatan 26.221 jiwa per km persegi. Sedangkan kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.241 jiwa per km persegi. Disusul kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan 3.479 jiwa per km persegi. Urutan berikutnya kecamatan Manggala dengan kepadatan 4.850 jiwa per km persegi. Kecamatan Ujung Tanah dengan kepadatan 7.860 jiwa per km persegi. Dan

---

<sup>9</sup>Suplemen Makassar Terkini, 2005, *Makassar Menggeliat di Usia 401 Tahun*. Makassar: Info Komunitas Kawasan Makassar, hlm. 2.

<sup>10</sup>BPS, *Makassar Dalam Angka 2011*. Makassar: BPS Kota Makassar, 2011, hlm. 20.

kecamatan Panakkukang dengan kepadatan 8.292 jiwa per km persegi.<sup>11</sup>

**Tabel 1**  
Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2010

No.Urut	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (F) (%)
1	Tamalate	170.878 (12,76)
2	Biringkanaya	167.741 (12,52)
3	Rappocini	151.091 (11,28)
4	Panakkukang	141.382 (10,56)
5	Tallo	134.294 (10,03)
6	Manggala	117.075 (8,74)
7	Tamalanrea	103.192 (7,70)
8	Makassar	81.700 (6,10)
9	Mamajang	58.998 (4,40)
10	Mariso	55.875 (4,17)
11	Bontoala	54.197 (4,05)
12	Ujung Tanah	46.688 (3,49)
13	Wajo	29.359 (2,19)
14	Ujung Pandang	26.904 (2,01)
Total		1.339.374 (100,00)

Sumber: BPS, *Makassar Dalam Angka 2011*, Makassar: BPS Kota Makassar, 2011, hlm. 41 dan 56.

Pemerintah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks, masalah tata ruang kota yang kurang baik yang disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai Rancangan Tata Ruang dan Rancangan Wilayah Kota (RTRWK), menjamurnya pembangunan ruko-ruko yang tidak disertai fasilitas parkir yang memadai, PK5 bertebaran di berbagai sudut kota, bangunan bercampur aduk antara permukiman dengan komersial, hilangnya ruang publik, lalu lintas yang carut marut karena tak seimbang antara jalan dan volume kendaraan yang meningkat tajam, pemakai jalan yang tidak disiplin menghentikan kendaraan di sembarang tempat, diperparah

<sup>11</sup>BPS, *Makassar Dalam Angka 2011*, *Ibid.*, hlm. 21

dengan seringnya aksi demo dan tawuran mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kota Makassar menyebabkan terjadi kemacetan dari pagi hingga malam hari.

Di bidang tenaga kerja, meskipun angka pengangguran di Kota Makassar pada tahun 2010 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2009 angka pengangguran secara prosentase berjumlah 7,82%, dan pada tahun 2010 menurun menjadi 7,43%.<sup>12</sup> Namun dari sisi jumlah angkatan kerja terjadi peningkatan. Jumlah pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar pada tahun 2010 berjumlah 10.212 orang. Di bandingkan pencari kerja pada tahun 2009 berjumlah 5.884 orang terjadi peningkatan 4.328 orang (42,38%) pencari kerja.

Menurut jenis kelamin, pencari kerja perempuan di Kota Makassar pada tahun 2010 lebih banyak daripada pencari kerja laki-laki. Pencari kerja perempuan berjumlah 5.389 orang (52,77%) sedangkan pencari kerja laki-laki berjumlah 4.823 orang (47,23%). Angka yang hampir sama pada tahun 2009, dari 5.884 orang pencari kerja terdapat 3.026 orang (51,43%) pencari kerja perempuan sedangkan pencari kerja laki-laki berjumlah 2.858 orang (48,57%). Tingkat pendidikan pencari kerja di Kota Makassar pada tahun 2010 terbanyak adalah tamat SLTA sederajat berjumlah 4.369 orang (42,78%). Urutan kedua adalah tamat Sarjana berjumlah 3.760 orang (36,82%). Urutan ketiga adalah tamat D1, D2, D3 berjumlah 2.032 orang (19,90%). Sisanya 43 orang (0,42%) tamat SLTP dan 8 orang (0,08%) tamat SD. Tingkat pendidikan pencari kerja perempuan lebih baik dibandingkan pencari kerja laki-laki. Dari 5.389 orang pencari kerja perempuan terbanyak (2.197 orang atau 40,77%) adalah tamat Sarjana, disusul 1.687 orang (31,31%) tamat SLTA; 1.482 orang (27,50%) tamat D1, D2, D3; 21 orang (0,39%) tamat SLTP dan 2 orang (0,03%) tamat SD). Sedangkan dari 4.823 orang pencari kerja laki-laki terbanyak (2.682 orang atau 55,61%) adalah tamat SLTA, disusul

---

<sup>12</sup>BPS, *Makassar Dalam Angka 2011*, Makassar: BPS Kota Makassar, 2011, hlm. 109.

1.563 orang (32,41%) tamat Sarjana; 550 orang (11,40%) tamat D1,D2,D3; 22 orang (0,46%) tamat SLTP, dan 6 orang (0,12%) tamat SD.

Di bidang pendidikan, Kota Makassar merupakan kota pendidikan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Berbagai sarana dan prasarana pendidikan terdapat di Kota Makassar sejak dari TK hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2010/2011 di Kota Makassar terdapat: 452 unit SD dengan jumlah guru 6.033 orang dan jumlah murid 144.499 orang; 179 unit SLTP dengan jumlah guru 4.268 orang dan jumlah murid 61.107 orang; dan 116 unit SLTA dengan jumlah guru 5.905 orang dan jumlah murid 35.567 orang.<sup>13</sup> Di tingkat perguruan tinggi di Kota Makassar terdapat berbagai perguruan tinggi, antara lain: Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Makassar, UVRI, dan lain-lain. Dalam penelitian ini tidak diperoleh data jumlah perguruan tinggi, jumlah tenaga pengajar (dosen) dan jumlah mahasiswa di Kota Makassar. Mahasiswa yang menuntut ilmu di Kota Makassar berasal dari berbagai Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan dan juga dari berbagai daerah di luar Sulawesi Selatan. Dalam perkembangan belakangan ini mahasiswa di sejumlah kampus perguruan tinggi di Kota Makassar sering terjadi konflik, baik antar mahasiswa fakultas di lingkungan perguruan tinggi yang sama ataupun antar mahasiswa kampus perguruan tinggi yang berbeda.

Menurut Armin Paera. AP, Staf Bagian Pemerintahan Kota Makassar “masalah terjadinya konflik antar mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi di Kota Makassar disebabkan mahasiswa di sejumlah kampus kadangkala membawa kedaerahan masing-masing. Misalnya konflik mahasiswa Bugis Palopo dengan mahasiswa Bugis Bone di kampus UNHAS. Persoalannya karena faktor kedaerahan dan adu gengsi. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat sehari

---

<sup>13</sup>BPS, 2011, *Ibid.*, hlm. 110

hari tidak terjadi”.<sup>14</sup> Pendapat senada dikemukakan Muh. Rais dan Mansyur Rajab, peneliti Badan Litbang Departemen Agama Makassar. Ia menyatakan “konflik mahasiswa di sejumlah kampus perguruan tinggi di Kota Makassar ada konflik berbasis etnis kedaerahan, ada konflik antar organisasi mahasiswa dan ada konflik antar fakultas. Kasus terbaru adalah pembakaran asrama mahasiswa Bulukumba oleh mahasiswa dari Luwu”.<sup>15</sup> Latar belakangnya, menurut Mansyur Radjab “awal mulanya adalah persoalan yang sifatnya pribadi kemudian berkembang menjadi persoalan etnis dan kedaerahan”.<sup>16</sup> Namun, menurut Nuraeni Ma'mur, kepala Sekretariat DPRD Kota Makassar “persoalan konflik antar mahasiswa di sejumlah kampus itu hanya selisih paham dan bukan karena faktor etnis dan kedaerahan atau yang lainnya”.<sup>17</sup> Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh Dr. Rakhmad, sekretaris jurusan dan dosen FISIP UNHAS. Ia menyatakan “yang sering terjadi konflik adalah antara mahasiswa Bone dengan Luwu Palopo. Hal itu dikarenakan Bone dan Palopo memiliki asrama mahasiswa lebih dari 10 buah, sebab itu mudah meledak. Begitu pula konflik antar mahasiswa FISIP UNHAS dan Fakultas Teknik UNHAS yang sering terjadi bentrok, karena jumlah mahasiswanya berlebihan. Namun demikian belum ada kejelasan jumlah yang idealnya”.<sup>18</sup>

Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Drs. H. Sabri, M.Si, Kabag. Pemerintahan Kota Makassar dan mantan Camat Kecamatan Talamanrea yang wilayahnya mencakup kampus UNHAS. Ia menyatakan “faktor penyebab konflik antar mahasiswa di sejumlah kampus perguruan tinggi di Kota Makassar terdiri dari faktor internal dan eksternal. Penyebabnya faktor internal, yakni: 1. Kurang berperannya kampus di dalam membina mahasiswa. Kampus UNHAS misalnya eksklusif milik dosen dan bukan milik rakyat. Pihak kampus UNHAS tidak memberi akses masyarakat ke dalam kampus bahkan

---

<sup>14</sup> Armin Paera, AP, wawancara, 29 Mei 2012.

<sup>15</sup> Muh. Rais, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>16</sup> Mansyur Radjab, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>17</sup> Nuraeni Ma'mur, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>18</sup> Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

cenderung menutup masyarakat, termasuk jalan-jalan kecil. 2. Ada orang luar yang kemudian masuk ke dalam KAMPUS. 3. Ada perubahan demokrasi ala kampus, dekan dan rektor dipilih. Ada kelompok penekan misalnya jangan pilih calon rektor x atau dekan y dengan berbagai alasan. Sedangkan penyebab faktor eksternal, yakni: 1. Terdapat kelompok himpunan mahasiswa daerah tertentu, misalnya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Luwu (IKMIL), Himpunan Mahasiswa Bone, Himpunan Mahasiswa Palopo, dll. ini tumbuh subur dan tidak diantisipasi oleh kampus maupun Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Padahal asrama mahasiswa itu dibiayai dan dibina oleh Pemerintah Daerahnya. Jadi muncul egoisme kedaerahan bersamaan dengan pilihan rektor, pilkada walikota, pilkada gubernur. Misalnya salah satu calon walikota atau gubernur adalah orang Bone, maka Himpunan Mahasiswa Bone akan mempromosikan calon gubernur berdasarkan daerah. 2. Adanya mahasiswa yang DO tetapi masih menduduki kepengurusan organisasi di kampus atau di luar kampus. Mereka inilah yang memanfaatkan ketika terjadi gesekan, baik itu persoalan pribadi atau lainnya yang kemudian meluas hingga ke etnis dan penguyuban/himpunan kedaerahan, dan pada saat bersamaan masuk unsur luar (provokator) dan itu tidak bisa diantisipasi pihak keamanan dan kampus”.<sup>19</sup>

Untuk mengatasi konflik mahasiswa di sejumlah kampus di Kota Makassar, H. Sabri menyarankan: 1. Pihak kampus harus membuka diri dengan memberikan akses ke rakyat sehingga menjadi kampus rakyat. 2. Pihak kampus terutama pembantu rektor III harus melakukan terobosan di bidang kemahasiswaan untuk mengarah kepada hal-hal yang positif. Intinya peran Pembantu Rektor III harus tegas dan menciptakan kegiatan yang positif. 3. Mahasiswa yang bersalah dipecah langsung dan diumumkan. Ini untuk memberi pembelajaran bagi mahasiswa yang lain. 4. Peranan PemDa dalam membina kelompok penguyuban kedaerahannya. Kalau perlu tidak diberikan fasilitas asrama atau pembiayaannya dicabut di APBD. 5.

---

<sup>19</sup>H. Sabri, wawancara 29 Mei 2012

Pihak Kepolisian jangan hanya represif. Tetapi Kapolda atau Kapolres beserta jajarannya aktif memberi ceramah atau penerangan ke kampus-kampus. Juga di Kopolisian perlu dibentuk atau diaktifkan kembali Bimas. Sebab apa yang terjadi di kampus kadangkala meluas ke daerah. Ketika anak mahasiswa pulang ke daerahnya, misalnya ada isu bahwa orang Bone di Luwu akan diusir. Atau ada kabar asrama Mahasiswa Luwu di Makassar dibakar dan ada yang luka-luka. Yang semula konflik mahasiswa berkembang menjadi konflik etnis dan kedaerahan. Apalagi kalau unsur pihak ketiga atau orang luar ikut memanaskan suasana. Hal lain, peranan media cetak dan elektronik seharusnya jangan memperkeruh masalah seperti konflik yang terjadi belum lama ini antara mahasiswa Bulukumba dengan mahasiswa Luwu diberitakan bahwa Asrama Mahasiswa Bulukumba di bakar.<sup>20</sup>

Menurut Prof. Dr. M. Basri Wello, MA “berbagai masalah pendidikan yang terkait langsung dengan kualitas pendidikan di Kota Makassar harus dibenahi secara terpadu karena satu sama lainnya saling terkait. Pemerintah kota sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki fungsi dan posisi yang paling strategis harus menjadi *leading sector* dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan di kota ini melalui program-programnya yang terpadu dan berkesinambungan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pembenahan dalam bidang pendidikan di kota ini langsung pada prinsip pemerataan, relevansi dan peningkatan mutu. Pemerataan dalam pengertian bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia senantiasa dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dari berbagai tingkatan sosial budaya untuk mendapat kesempatan yang sama menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Peningkatan daya tampung dan pendirian sekolah baru harus menganut azas relevansi untuk mengantisipasi kebutuhan lokal, nasional dan global sehingga tidak terjadi ketimpangan kualitas dan kuantitas di masyarakat. Perencanaan pengembangan pendidikan adalah peningkatan mutu hal ini terkait dengan berbagai aspek dalam satuan pendidikan seperti manajemen pendidikan, kepala, sekolah,

---

<sup>20</sup>H. Sabri, wawancara, 29 Mei 2012

professionalisme guru, sarana belajar (perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, alat peraga), kurikulum, pembiayaan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Di bidang politik, pembangunan politik dan pemerintahan Kota Makassar harus memenuhi kebutuhan dalam hal pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Menurut Drs. M. Kautsar Bailusy, MA “secara politis Kota Makassar merupakan kota yang memiliki tingkat kemajuan yang tertinggi untuk wilayah Indonesia Timur. Hal ini ditandai dengan adanya jumlah pendatang yang menetap sebagai warga Kota Makassar dari berbagai Kabupaten, Kota dan Provinsi baik dari wilayah Indonesia Timur dan sebagian Indonesia Barat. Daya tarik Kota Makassar yang begitu mempesona menghasilkan warga Kota Makassar menjadi heterogen dan secara spontan terbentuk proses pembaruan, asimilasi berbagai nilai budaya yang akan mempercantik Kota Makassar dengan sejumlah penduduk/ warga negara dalam irama Bhineka Tunggal Ika.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Ia menyatakan “Kota Makassar dengan penduduk lebih dari satu juta, keragaman etnis budaya dan tingkat pendidikan serta kepentingan yang beraneka ragam secara politik menyimpan potensi konflik yang tinggi atau konsensus yang rendah. Potensi konflik ini dapat berkembang menjadi konflik apabila terjadi melemahnya sosok pemimpin (walikota): 1. Tidak dipercaya lagi sebagai pemimpin; 2. Apabila pemerintah tidak memberi pelayanan yang sewajarnya; 3. Kepentingan-kepentingan masyarakat yang kurang diakomodir oleh pemerintah; 4. Prilaku Rasialis Walikota terhadap warga masyarakat. Untuk 5 hingga 10 tahun ke depan masyarakat Kota

---

<sup>21</sup>M. Basri Wello, “Menuju Pembangunan Pendidikan Yang Berkualitas di Kota Makassar” dalam Andhy Pallawa (Editor) *Makassar LakekomaE? (Sebuah Ikhtiar Mengaca Diri)*, Makassar: Global Publishing, 2004, hlm. 148 – 149

<sup>22</sup>M. Kautsar Bailusy, “Membangun Sistem Politik/Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal Kota Makassar” dalam Andhy Pallawa (Editor) *Makassar LakekomaE (Sebuah Ikhtiar Mengaca Diri)*, Makassar: Global Publishing, 2004, hlm. 131



Makassar membutuhkan seorang Walikota selain memiliki kekuasaan yang sah, juga harus memiliki *capability* dalam melaksanakan kekuasaan sebagai fungsi nilai dan kaidah yang diterima dan diakui masyarakat Kota Makassar. Kalau kompetensi ini sudah dimiliki oleh seorang Walikota maka secara spontan Walikota memiliki otoritas masyarakat sebagai pemimpin atau Walikota Masyarakat. Otoritas seorang Walikota sangat fungsional untuk membangun masyarakat Kota Makassar yang heterogen dan dinamis menjadi masyarakat berperilaku konsensus dan *integrated*. Untuk mencapai masyarakat Kota Makassar yang berkompentensi ke depan maka pemerintah Kota Makassar harus membangun masyarakat yang mempunyai struktur kekuasaan yang luwes. Hubungan-hubungan dalam masyarakat yang tidak seimbang akan menghasilkan integrasi karena secara fundamental hubungan asimetris itu terjadi karena adanya daya tarik. Masyarakat Kota Makassar berdasarkan pengalaman masyarakat sedang tertata ke arah profesi tertentu tapi belum dominan dan mayoritas. Pemerintah Kota Makassar perlu memotivasi warga Kota Makassar untuk mampu membangun diri sendiri pada taraf yang berkualitas tertentu, mempunyai daya tarik oleh pihak lain. Hubungan asimetris ini membutuhkan kualitas tertentu dan daya tarik. Kalau kondisi ini sudah terbentuk dalam masyarakat maka kemungkinan akan terjadi sebagai berikut: 1. Adanya dorongan yang muncul dalam setiap orang untuk senantiasa bersama dengan pihak yang mempunyai daya tarik (popularitas) walaupun dalam tingkat tertentu tidak menganutnya. 2. Pada kondisi tertentu setiap orang mempunyai dorongan untuk meniru tingkah laku pihak yang mempunyai daya tarik dan menganggapnya sebagai contoh. 3. Individu masyarakat Kota Makassar terdorong untuk mengikuti keteladanan atau perintah dari pihak yang mempunyai daya tarik. Dengan adanya dorongan individu untuk bersama pihak lain.. Meniru pihak yang berkualitas, mengikuti keteladanan dan perintah pihak lain maka masyarakat Kota Makassar dominan berupaya membangun kebersamaan dalam intergritas politik”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>M. Kautsar Bailusy, 2004, *Ibid.*, hlm. 131 -135

Pemerintah Kota Makassar pada era kepemimpinan Walikota Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM., dan Wakil Kota H. A. Herry Iskandar periode 2004 - 2009 telah menetapkan Visi dan Misi Kota Makassar. Visi Pemerintah Kota Makassar 2004–2009 adalah “Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan Yang Bermartabat dan Manusia”. Juga telah menetapkan Visi jangka panjang Kota Makassar 2005–2025 yaitu “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”.

### 6.3 Pelapisan Sosial Dalam Etnis Lokal

Menurut Ahmad M. Sewang “Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial dianggap penting dalam mencari latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu masyarakat, termasuk struktur politik”.<sup>24</sup> Ahli lain, Selo Soemardjan menyatakan “latar belakang pandangan hidup, watak, sifat-sifat dasar dan warna hubungan dalam suatu masyarakat adalah pelapisan sosial atau sering juga disebut stratifikasi sosial adalah perbedaan ke dalam kelas-kelas secara bertingkat”.<sup>25</sup>

Di Sulawesi Selatan terdapat empat etnis besar, yaitu: Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Menurut Syahril Sappaile, Staf Ahli Walikota Makassar “Secara budaya perbedaan antara etnis Bugis dan Makassar hanya terletak bahasa dan adat istiadat”.<sup>26</sup> Hal senada dikemukakan Nuraeni Ma'mur, Kepala Sekretariat DPRD Kota Makassar. “Dari segi budaya, perbedaan antara etnis Bugis dan etnis Makassar hanya dalam bahasa, etnis Bugis bahasanya halus dan etnis Makassar lebih kasar bahasanya. Dan dalam adat istiadat serupa tetapi tidak sama”.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad M. Sewang, 2005, *op.cit.*, hlm. 29

<sup>25</sup>Selo Soemardjan dan Sulaeman Sumardi, 1974, *Bunga Rampai Sosiologi*, Jakarta: UI, hlm. 254.

<sup>26</sup>Syahril Sappaile, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>27</sup>Nuraeni Ma'mur, wawancara, 30 Mei 2012

H. J. Friedericic (1933: 451-452) antropolog Belanda yang meneliti sumber-sumber lokal, seperti *Sure Galigo* di Sulawesi Selatan mengemukakan “Pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan, baik masyarakat Bugis, Mandar, Tana Toraja, maupun Makassar, mempunyai persamaan dalam pelapisan sosial, yaitu terdiri atas tiga golongan”.<sup>28</sup>

Pada etnis Bugis yang merupakan etnis terbesar pertama di Sulawesi Selatan terdapat tiga tingkatan pelapisan sosial, yaitu: 1. *Ana' Arung*, 2. *To Maradeka*, dan 3. *Ata*. Dalam lapisan teratas *Ana' Arung* terdapat dua tingkatan sosial, yaitu *Ana' Jemma* dan *Ana' Mattola*. *Ana' Jemma* adalah anak bangsawan yang lahir pada saat ayahnya memerintah/menjadi raja. Anak ini menjadi pewaris dari kerajaan. *Ana' Mattola* adalah anak bangsawan dari raja yang lahir sebelum atau sesudah ayahnya memerintah. *Ana' Mattola* terdiri dari tiga tingkatan sosial, yaitu 1. *Ana' Mattola Matase*, 2. *Ana' Mattola Malolo*, dan 3. *Ana' Cera'*. *Ana' Mattola Matase* adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibu dari tingkatan sosial yang sama. *Ana' Mattola Malola* adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah yang lebih tinggi darah kebangsawannya daripada ibunya. Sedangkan *Ana' Cera'* adalah anak yang lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan orang biasa. Lapisan kedua, *To Maradeka* adalah orang yang tidak diperbudak oleh orang lain. Lapisan ini terdiri atas dua lapisan, yaitu *To Baji* (orang baik) dan *To Samara* (orang biasa). Sedangkan lapisan ketiga, *Ata*. Dalam *Ata* terdapat dua lapisan, yaitu: *Ata Mana'* dan *Taimanu*. *Ata Mana'* adalah budak turun temurun sejak nenek moyangnya, jika mereka mempunyai keturunan maka keturunan tersebut menjadi budak lagi dari orang yang memperbudaknya. Sedangkan *Ata Taimanu* adalah golongan budak yang paling rendah dan dianggap paling hina, karena yang memperbudaknya adalah *To Maradeka*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Dikutif dari Ahmad M. Sewang, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 29

<sup>29</sup>Badruzzaman, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Pada etnis Makassar yang merupakan etnis terbesar kedua di Sulawesi Selatan juga terdapat tiga tingkatan pelapisan sosial, yaitu: 1. *Anak Karaeng (Ana' Karaeng)*, 2. *To Maradeka*, dan 3. *Ata*.

Lapisan pertama, *Anak Karaeng (Ana' Karaeng)* adalah keturunan raja atau kaum bangsawan yang menempati tingkat tertinggi dalam pelapisan masyarakat Makassar. Lapisan ini terdiri atas empat golongan, yaitu: 1. *Anak Tikno (Ana' Ti'no)*, 2. *Anak Sipue (Ana' Sipuwe)*, 3. *Anak Cerak (Ana' Cera')*, dan 4. *Anak Karaeng Sala (Ana' Karaeng Sala)*. *Anak Tikno (Ana' Ti'no)* adalah golongan bangsawan murni yang berasal dari turunan Tomanurung. Seorang yang berdarah *Anak Tikno (Ana' Ti'no)* berasal dari seorang ibu dan bapak yang keduanya dari *Anak Tikno (Ana' Ti'no)* juga, tidak terkecuali apakah ia berasal dari Gowa, yang terpenting ia berdarah Tomanurung.<sup>30</sup> Golongan *Anak Tikno (Ana' Ti'no)* terbagi atas dua bagian, yakni:

- (1) *Anak Tikno Pattola (Ana' Ti'no Pattola)*, yaitu golongan yang berhak menduduki jabatan tertinggi dalam kerajaan sebagai *sombaya* di Gowa atau *payungnge* di Luwu, *mangkau* di Bone, *datu* di Sopeng, *arajang* di Balanipa Mandar, dan *addatuang* di Sidenreng.<sup>31</sup>
- (2) *Anak Manrapik (Ana' Manrapi)*, golongan ini mempunyai hak sebagaimana halnya *Anak Tikno Pattola (Ana' Ti'no pattola)*, akan tetapi seorang *anak manrapik* barulah berhak diangkat sebagai pejabat tinggi, apabila ternyata seorang *anak tikno pattola* dinyatakan kurang cerdas atau tidak mampu untuk menduduki tahta; atau tidak ada calon lain dari *anak tikno pattola*; atau bisa juga karena para *anak tikno pattola* tidak bersedia menjadi pejabat tinggi kerajaan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad M. Sewang, 2005, *op.cit.*, hlm. 32

<sup>31</sup> Istilah-istilah *sombayo*, *payungnge*, *mangkau*, *arajang* dan *addatuang* adalah gelar raja pada masing-masing kerajaan di Sulawesi Selatan, Ahmad M. Sewang, 2005, *Loc.Cit.* Lihat, Mukhlis, *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Jaman Pemerintahan Hasanudin (1653–1669)*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1975, hlm. 28

<sup>32</sup> Ahmad M. Sewang, 2005, *Ibid.*, hlm. 32 - 33.

*Anak Sipue (Ana' sipuwe)* adalah keturunan campuran antara keturunan Tomanurung dengan manusia biasa.<sup>33</sup> Golongan *Anak Sipue* terbagi atas dua bagian, yakni: 1. *Anak sipue manrapik (Ana' Sipuwe Manrapi)* yang dapat diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan, seperti *sombaya*, apabila ternyata tidak ada calon lain yang berasal dari *anak tikno*. 2. *Anak sipue (Ana' sipuwe)* adalah berasal dari seorang ayah berdarah *anak pattola*, sedang ibunya berasal dari seorang berdasar *tosamarak* yang tadinya berasal dari golongan *ata nibuang*.<sup>34</sup>

*Anak Cerak (Ana' Cera')* adalah golongan yang berasal dari seorang ayah berdarah *anak tikno (ana' ti'no)* atau *anak sipue manrapik (ana' sipuwe manrapi)*, sedang ibunya berasal dari golongan *ata mana* atau *ata sossorang*.<sup>35</sup>

*Anak Karaeng Sala (Ana' karaeng Sala)*, yaitu golongan yang berdarah *anak sipue (ana' sipuwe)* atau *anak cerak* dari pihak ayah, sedang ibunya berdarah *tosamarak* atau berdarah *ata*. Golongan ini merupakan golongan mayoritas dalam masyarakat dan termasuk kelompok yang cepat populasinya. Hal ini disebabkan seorang *anak karaeng sala*, di samping mempunyai isteri yang berasal dari golongan sendiri, ia juga masih mempunyai beberapa isteri dari golongan *ata*.<sup>36</sup>

Lapisan kedua dalam etnis Makassar adalah *To Maradeka*. Lapisan ini dibagi atas dua golongan, yaitu: 1. *Tobajik (Tobaji)* atau orang baik-baik adalah keluarga yang masih dapat menunjukkan satu silsilah keturunannya yang berhubungan dengan salah satu lapisan *anak karaeng*. Namun, ia sendiri sudah tidak dapat menunjukkan identitasnya, pada lapisan mana sebenarnya ia berada, karena sudah sangat jauh keluar dari lapisan *anak karaeng*. 2. *Tosamarak (Tosamara)* atau orang kebanyakan memiliki jumlah anggota yang sangat banyak dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>34</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>35</sup> *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Ahmad M. Sewang, 2005, *Ibid.*, hlm. 34

Lapisan ketiga dalam etnis Makassar adalah *Ata*. *Ata* merupakan lapisan yang datang kemudian, setelah lembaga kekuasaan dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan telah berkembang.<sup>38</sup> Pandangan ini sesuai dengan yang tertulis dalam *Lontara Latoa* yang dikutip oleh Mattulada tentang penyebab seseorang menjadi *ata*, yaitu: a. Seorang yang kalah perang dijual oleh yang menang perang kepada orang lain, sebagai hasil kemenangan perang; b. Seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain; c. Tawanan perang; dan d. Melanggar *panggadakkang*, yaitu adat atau tata tertib dalam masyarakat.<sup>39</sup> Dalam *ata* terdapat tiga golongan, yaitu: 1. *Ata Sassorang*; 2. *Ata Nibuang*; dan 3. *Ata Tai Jangang*. *Ata Sassorang* adalah budak turun temurun dan biasanya diperbudak oleh satu keluarga. *Ata Nibuang* adalah budak karena hukuman, budak yang karena berbuat kesalahan sehingga ia dijatuhi hukuman atau kalah dalam peperangan. *Ata Tai Jangang* adalah orang yang diperbudak oleh orang yang pernah jadi budak (*To Somara*).<sup>40</sup>

Pada etnis Mandar yang merupakan etnis terbesar keempat di Sulawesi Selatan juga terdapat tiga tingkatan pelapisan sosial, yaitu: 1. *Puang*, 2. *To Maradeka*, dan 3. *Batua*. Lapisan pertama, *Puang* terbagi atas dua golongan, yaitu: 1. *Puang Ressu*, dan 2. *Puang*. *Puang Ressu* adalah orang yang darah kebangsawannya masih murni, artinya ia lahir dari seorang ayah dan ibu berstrata *Puang*, dan ia berhak mewarisi kerajaan. Dan yang tergolong lapisan *Puang* adalah anak bangsawan yang bobot kebangsawannya lebih rendah dari *Puang Ressu*. Lapisan kedua, *To Maradeka* ada kesamaan dengan lapisan kedua yang dianut oleh etnis Bugis dan etnis Makassar. Sedangkan lapisan ketiga, *Batua* terbagi atas tiga golongan, yaitu: 1. *Batua Balliang*, 2. *Batua Masossorang*, dan 3. *Batua Tai Manu'*. *Batua Balliang* adalah budak yang berasal dari orang merdeka, kemudian dijual karena kalah, baik dalam perjudian maupun dalam peperangan.

---

<sup>38</sup> *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Mattulada (1985: 30-31) dikutip dari Ahmad M. Sewang, 2005, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> Badruzzaman, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 3-4

*Batua Masossorang* adalah budak neneknya sampai ke anak cucunya diperbudak oleh *Puang* atau *To Pae*. Sedangkan *Batua Tai Manu* adalah budak yang paling rendah tingkatannya, golongan ini mengerjakan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya dan mereka diperbudak oleh *To Maradeka*.<sup>41</sup>

Pada etnis Toraja yang merupakan etnis terbesar ketiga di Sulawesi Selatan. Pada etnis Toraja terdapat empat tingkatan pelapisan sosial, yaitu: 1. *Tana' Bulaan*, 2. *Tana' Bessi*, 3. *Tana' Karurung*, dan 4. *Tana' Kua-Kua*. Yang tergolong *Tana' Bulaan* adalah para penguasa yang membuat peraturan-peraturan dalam masyarakat atau golongan pemangku adat Tana Toraja pada masing-masing daerah adat. Karena itu, golongan ini merupakan tingkatan emas. Tingkatan kedua, *Tana' Bessi*, diartikan tingkat besi. Mereka yang tergolong dalam lapisan ini adalah masyarakat yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari sebagai pembantu dari ketua-ketua adat. Tingkatan ketiga, *Tana' Karurung* adalah orang biasa yang tidak mempunyai kekuasaan, hanya dipakai sebagai pengabdikan-pengabdikan pada upacara keagamaan. Sedangkan *Tana' Kua-Kua* adalah tingkatan paling bawah, golongan ini biasanya mengabdikan pada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bessi*.<sup>42</sup>

Tingkatan pelapisan sosial di atas berlaku secara ketat pada masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat maupun dalam hal penempatan raja dan pembantu-pembantu. Setiap pengangkatan selalu menelusuri kejelasan asal-usul, karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaannya sebagai pemimpin masyarakat dan petugas kerajaan.<sup>43</sup>

Mengenai stratifikasi sosial, menurut Dr. Rakhmad, ketua Jurusan dan dosen FISIP UNHAS “di Kota Makassar sudah tidak terlalu ketat. Stratifikasi sosial relatif terbuka. Kalau dia bukan bangsawan setelah memegang kekuasaan tetap diperlakukan seperti bangsawan sehingga antara bangsawan dan non bangsawan tidak

---

<sup>41</sup>Badurzzaman, 2008, *Ibid.*, hlm. 4

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

menjadi persoalan. Dan sekarang diaktifkan lembaga adat. Selain itu sudah banyak kawin campur. Di dalam kultur Bugis Makassar ada istilah tiga ujung, yaitu: Ujung Lidah, Ujung Badik dan Ujung Burung. Ujung burung itu artinya keturunan bangsawan. Ini potensi yang baik untuk menjaga kebangsawannya. Sebenarnya kalau tidak terpengaruh di politik, bangsawan di luar politik jauh lebih dihargai. Kalau bangsawan terjun ke politik dan berhasil menduduki jabatan politik semakin naik penghargaan dan kewibawannya dan kalau kalah semakin turun kewibawaannya”.<sup>44</sup> Menurut Mansyur Radjab, Dosen FISIP UNHAS, “Dulu kultur Bugis bangsawan itu “Pedagang”. Tetapi kemudian pengaruh bangsawan pedagang itu menurun, dan sekarang ini pengaruh pedagang kembali menjadi kuat. Karena itu, dalam kultur Bugis atau Makassar, ada tiga, yaitu: Pertama, *Toanyah* = orang pintar. Kedua, *Torani* = orang berani, dan Ketiga, *Tosugi* = orang kaya/pengusaha”.<sup>45</sup>

## **6.4 Etnisitas dan Kelompok Kelas Sosial Dalam Politik Lokal**

### **6.4.1 Peta Politik Lokal**

Sejak kejatuhan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 peta politik lokal di Sulawesi Selatan terjadi perubahan. Pada Pemilu 1999 perolehan partai Golkar di Sulawesi Selatan menurun menjadi 66,5%. Posisi kedua ditempati PPP dengan jumlah suara pemilih 8,4%, dan posisi ketiga ditempati PDI-P dengan perolehan suara pemilih 6,6%.<sup>46</sup> Komposisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hasil Pemilu tahun 1999 dari 65 orang anggota DPRD, urutan pertama adalah Partai Golkar dengan menempatkan 44 orang (67,69%) anggota DPRD.

---

<sup>44</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>45</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>46</sup>Tri Ratnawati, 2007, “Partai dan Demokrasi Pura-Pura? Dinamika Partai di DPRD Makassar dan Bone”, dalam Syamsuddin Haris (Editor), *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 152.



Urutan kedua, PPP 6 orang (9,23%) anggota DPRD.. Urutan ketiga PDI-P, 5 orang (7,69%) anggota DPRD. Dan urutan keempat PAN, 3 orang (4,26%) anggota DPRD. Sisanya masing-masing 1 orang anggota DPRD adalah PBB, PK, IPKI, PP, PKB, PDR, dan PKP. Hasil Pemilu 2004, Partai Golkar masih memperoleh suara terbanyak tetapi yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terjadi penurunan menjadi 33 orang (44%) anggota DPRD dari 75 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Disusul PAN 8 orang (10,57%) anggota DPRD dan PDK 8 orang (10,57%) anggota DPRD. Berikutnya, PPP, 7 orang (9,33%) anggota DPRD; PDI-P, 6 orang (8%) anggota DPRD. Sisanya masing-masing 1 orang anggota DPRD adalah PBB, PBR, PD, PDS dan Partai Merdeka. Tri Ratnawati menyimpulkan bahwa hasil Pemilu 2004 telah menempatkan Golkar tidak lagi sebagai *the single majority* di DPRD Sulsel dibandingkan dengan DPRD hasil Pemilu 1999.<sup>47</sup>

Bagaimana dengan Kota Makassar? Berdasarkan data komposisi anggota DPRD Kota Makassar hasil pemilu tahun 2004, Partai Golkar masih tetap sebagai pemenang dengan menempatkan 16 orang (35,56%) anggota DPRD dari 45 anggota di DPRD Kota Makassar. Namun, terjadi penurunan 6 orang anggota DPRD dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999 yang berjumlah 22.<sup>48</sup> Disusul masing-masing dengan 5 orang anggota DPRD adalah PKS, PAN, PPKD, dan PPP. Berikutnya PDI-P dan Partai Demokrat masing-masing dengan 4 orang anggota DPRD, dan PKPI dengan 1 orang anggota DPRD.

Pemilu 2009 anggota DPRD Kota Makassar berjumlah 50 orang anggota atau meningkat 5 orang anggota DPRD dibandingkan Pemilu 2004 yang berjumlah 45 anggota DPRD. Komposisi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2014 menurut jenis kelamin terdiri dari 43 orang (86%) anggota DPRD laki-laki dan 7 orang (14%) anggota DPRD perempuan. Ini menunjukkan kedudukan kaum

---

<sup>47</sup>Tri Ratnawati, 2007, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 154

perempuan di dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar masih jauh dari target quota yang diinginkan sebesar 30%. Menurut partai politik, hasil Pemilu tahun 2009 masih menempatkan Partai Golkar di urutan pertama dengan 12 orang (24%) anggota DPRD terdiri dari 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Terjadi penurunan 4 orang anggota DPRD dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 2004 yang berjumlah 16 orang anggota DPRD. Urutan kedua, Partai Demokrat dengan 9 orang (18%) anggota DPRD (semuanya laki-laki). Terjadi peningkatan yang drastis dari 4 orang anggota DPRD hasil Pemilu 2004 menjadi 9 orang anggota DPRD hasil Pemilu 2009 atau meningkat sebanyak 125%. Komposisi anggota DPRD Kota Makassar menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2009–2014 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
Komposisi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014  
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD		Total Anggota DPRD
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Golongan Karya (P. GOLKAR)	11	1	12
2	Parta Demokrat	9	-	9
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	1	5
4	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	4	1	5
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	-	3
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (P. GARINDRA)	2	1	3
8	Partai Hati Nurani Rakyat (P. HANURA)	1	2	3
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2	-	2
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	-	1
11	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1	-	1
12	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1	-	1
13	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	-	1	1
Total		43	7	50

Sumber: Diolah dari data Sekretariat DPRD Kota Makassar

## 6.4.2 Kelompok Etnis Dalam Politik Lokal

Dari sisi latar belakang etnis, dari 50 anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2014 terbanyak adalah etnis Bugis berjumlah 27 orang (54%). Urutan kedua adalah etnis Makassar berjumlah 16 orang (32%) dan sisanya etnis lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. Kenyataan ini menunjukkan dua etnis besar di Sulawesi Selatan yakni etnis Bugis dan etnis Makassar masih mendominasi keanggotaan DPRD Kota Makassar. Yang menariknya, kecuali etnis Tionghoa dan campuran etnis Flores Ambon tidak ada satupun etnis besar lainnya (seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau dllnya) di luar Sulawesi Selatan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Hal ini menandakan semakin kuatnya politik identitas lokal pada era reformasi dan otonomi daerah di Kota Makassar.

**Tabel 3**

Komposisi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009–2014  
Menurut Etnis

No. Urut	Nama Etnis	Total F (%)
1	Bugis	27 (54,00)
2	Makassar	16 (32,00)
3	Campuran Bugis Makassar	3 (6,00)
4	Toraja	1 (2,00)
5	Campuran Plores Ambon	1 (2,00)
6	Tionghoa	1 (2,00)
7	Campuran Bugis Tionghoa	1 (2,00)
Total		50 (100,00)

Sumber: Diolah berdasarkan data dan informasi Bapak Advi Umar, Kabag. Umum Sekretariat DPR Kota Makassar dan Bapak Muh. Syarifuddin, Staf. Humas DPRD Kota Makassar.<sup>49</sup>

Menurut Syahril Sappaile, Staf Ahli Walikota Makassar “secara prosentase yang menjadi walikota/bupati di Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkembangannya 70% dari etnis Bugis dan 30% etnis Makassar. Karena secara Kabupaten/Kota penduduknya banyak dihuni

<sup>49</sup>Advi Umar dan Muh, Syarifuddi, wawancara, 30 Mei 2012.

etnis Bugis dan Makassar. Walikota Makassar saat ini Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin berasal dari kalangan bangsawan etnis Bugis Makassar. Bapaknya etnis Bugis Bone yang pernah menjadi Bupati di Kabupaten Gowa, dan Ibunya etnis Makassar Enrekang. Wakil Walikota Makassar saat ini Drs.H. Supomo Guntur, MM dari etnis Makassar. Pada masa Orba terdapat Bupati Kabupaten Mamuju dari etnis Jawa. Di Kota Makassar pada masa Orba juga pernah yang menjadi Walikota dari etnis Jawa yaitu Bapak Suwahyo dari TNI AD. Jadi pada masa OtDa justeru etnisitas dan politik identitas dalam politik lokal semakin kuat”.<sup>50</sup>

Hal senada dikemukakan Sofyan BR, peneliti Badan Litbang Departemen Agama Makassar yang menyatakan “Pada masa otonomi daerah justeru etnisitas atau politik identitas semakin kuat. Karena secara langsung atau tidak ada upaya untuk memberikan dukungan moril kepada salah satu calon pilkada yang ada keterkaitan dengan etnis dan kedaerahan”.<sup>51</sup>

Usman M. Sadjim, kepala Sekretariat Golkar Kota Makassar menyatakan “Parpol dalam Pemilu legislatif atau Pilkada walikota/bupati dan gubernur, komunitas etnis menjadi sumber suara parpol. Komunitas etnis juga punya kepentingan, misalnya bagaimana usahanya lancar, perizinan dipermudah, mendapat jabatan di pemerintahan dsbnya. Sebagian melakukan pendekatan perorangan dan jarang dilakukan secara kelembagaan partai. Melakukan pendekatan perorangan lazim dilakukan melalui anggota atau pengurus panguyuban dengan bermacam-macam apliasi politik. Calon Gubernur juga melaksanakan komunikasi melalui jaringan individu di panguyuban/perkumpulan etnis lokal. Pengurus dan anggota panguyuban/perkumpulan etnis mempunyai bermacam-macam kepentingan dan elitnya ada keterkaitan dengan jabatan. Di Sulawesi

---

<sup>50</sup>Syahril Sappaile, wawanca, 29 Mei 2012

<sup>51</sup>Sofyan BR, wawancara, 30 Mei 2012

Selatan pada era otonomi daerah solidaritas kedaerahan semakin kuat'.<sup>52</sup>

### 6.4.3 Kelompok Profesi Dalam Politik Lokal

Dari sisi latar belakang profesi yang ditekuni sebelum menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2004 atau hasil Pemilu 2009, terbanyak adalah politisi berjumlah 24 orang (48%). Urutan kedua pengusaha 9 orang (18%). Urutan ketiga, Politisi + pengusaha 6 orang (12%), dan sisanya profesi lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4. Kenyataan ini menunjukkan kalangan pengusaha atau pebisnis cukup besar jumlahnya dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar. Tetapi sebaliknya kalangan agamawan/tokoh agama jumlahnya relatif kecil yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar.

Tertariknya pengusaha terjun ke politik menurut Mansyur Radjab, Dosen FISIP UNHAS, hal itu disebabkan “Perubahan level status sosial simbol-simbol di jabatan politik tetap tinggi pada masyarakat sehingga pengusaha atau orang kaya mencari status itu. Karena itu, ada kecenderungan pengusaha atau orang kaya berupaya untuk mendapatkan status di jabatan politik dan pemerintahan yang lebih dilihat oleh masyarakat”.<sup>53</sup>

Usman M. Sadjim, kepala Sekretariat Golkar Kota Makassar dan Anggota Bidang Ekonomi AMPI Kota Makassar menyatakan “pengusaha masuk parpol atau terjun ke politik untuk menjadi anggota DPRD atau jabatan di pemerintahan (walikota/bupati) karena faktor Parpol, misalnya Golkar memang memilih yang mapan secara ekonomi dan politik. Meskipun itu belum tentu berhasil, karena ini terkait dengan perilaku yang bersangkutan dimata pemilih”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Usman M. Sadjim, wawancara, 1 Juni 2012

<sup>53</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>54</sup>Usman M. Sadjim, wawancara, 1 Juni 2012

**Tabel 4**  
**Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009–2012**  
**Menurut Profesi yang Ditekuninya Sebelum Menjadi Anggota DPRD**

No. Urut	Jenis Profesi yang Ditekuni	Total F (%)
1	Politisi	24 (48,00)
2	Pengusaha	9 (18,00)
3	Politisi + Pengusaha	6 (12,00)
4	Politisi + Tokoh Agama	3 (6,00)
5	Politisi + Tokoh Masyarakat	2 (4,00)
6	Konsultan	2 (4,00)
7	Wartawan	1 (2,00)
8	Guru	1 (2,00)
9	Advokat dan Dosen	1 (2,00)
10	Pekerja Sosial (Pengurus Yayasan Pendidikan)	1 (2,00)
Total		50 (100,00)

Sumber: Diolah berdasarkan data dan informasi Bapak Advi Umar, Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar dan Bapak Muh. Syarifuddin, Staf. Humas DPRD Kota Makassar.<sup>55</sup>

Sandra, Sekretaris Eksekutif HIPMI Kota Makassar Priode 2011-2014, menyatakan “salah satu faktor pengusaha terjun ke politik untuk menjadi anggota DPRD atau walikota/bupati adalah untuk menambah jaringan dan tambahan penghasilan. Selain itu, posisi pengusaha/orang kaya di kota Makassar sejajar dengan bangsawan, politisi dan birokrat. Kecuali untuk daerah tertentu posisi kaum bangsawan paling tinggi. Apalagi kalau sudah menjadi anggota DPRD atau kepala daerah (Bupati/Walikota) pengusaha dihormati seperti bangsawan. Meskipun setelah tidak menjadi pejabat kembali menjadi biasa. Di Kota Makassar ini masyarakat memandang kaum bangsawan biasa-biasa saja. Berbeda dengan di daerah seperti Bone, Luwu dllnya penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap kaum bangsawan masih tinggi. Status pengusaha meningkat setelah era reformasi. Mereka bisa menjadi eksekutif (walikota/bupati) dan legislatif (Anggota

<sup>55</sup>Advi Umar dan Muh. Syarifuddin, wawancara, 30 Mei 2012

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Yang menjadi anggota di DPRD Kota/Kabupaten rata-rata mendapat dukungan dari pengusaha. Hubungan pengusaha dengan eksekutif dan legislatif di Kota Makassar karena pergaulan, misalnya di lapangan golf, kafe dllnya. Namun, tidak semua pengusaha berkeinginan mempunyai jabatan politik di eksekutif dan legislatif”.<sup>56</sup>

Mengenai relatif kecilnya kalangan agamawan/tokoh agama/ulama menjadi anggota DPRD Kota Makassar beberapa nara sumber mengemukakan pandangannya. Syahril Sappaile, Stah Ahli Walikota Kota Makassar menyatakan “Kecil dan jarangny tokoh agama/ulama menjadi anggota DPRD karena masyarakat disini masih sulit dipisahkan dari anggapan “anakny tokoh besar” atau “anakny bangsawan”. Oleh sebab itu, tokoh agama/ulama yang hanya mengandalkan keulamaannya masih sulit untuk menjadi anggota DPRD, apalagi menjadi walikota/bupati atau gubernur. Apalagi sejak era reformasi untuk menjadi anggota DPRD, walikota/bupati dan gubernur diperlukan dana yang banyak. Karena itu, kalangan pengusaha lebih banyak yang menjadi anggota DPRD, walikota/bupati dibanding- kan kalangan ulama/tokoh agama. Jangankan tokoh agama/ulama, kalangan aparatur negara untuk menjadi anggota DPRD, walikota/ bupati dan gubernur sangat sulit”.<sup>57</sup>

Muh. Syarifuddin, Staf Humas DPRD Kota Makassar menyatakan “Tokoh agama/ulama tidak mempunyai kemampuan ekonomi, karena untuk menjadi anggota DPRD, Walikota diperlukan dana yang banyak. Meskipun tokoh agama/ulama tersebut mempunyai massa yang banyak, tetapi jarang yang menjadi anggota DPRD, apalagi menjadi Walikota”.<sup>58</sup>

Sofyan, BR, peneliti Badan Litbang Departemen Agama Makassar mengemukakan “Persoalan kalangan tokoh agama/ulama yang tidak menonjol di DPRD Kota Makassar atau di DPRD Provinsi

---

<sup>56</sup>Sandar, wawancara, 31 Mei 2012.

<sup>57</sup>Syahril Sappaile, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>58</sup>Muh. Syarifuddin, wawancara, 30 Mei 2012

Sulawesi Selatan karena faktor “politik transaksional” sehingga mereka yang terpilih lebih cenderung yang kuat ekonominya. Contohnya, Dai kondang Ky. H. Agung Wirawan yang dijagokan oleh Partai Golkar untuk DPRD Kota Makassar ternyata tidak terpilih. Prof. Dr. H. Djalaludin Rachman guru besar UIN Alaudin Makassar, mantan ketua DPW PPP ternyata juga gagal menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula Prof. Dr. Hamka Haq mantan Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang dicalonkan PDI-P untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ternyata juga gagal. Namun untuk di Luwu Timur pemimpin pondok pesanteren berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu. Hal ini juga tidak terlepas proses rekrutmen calon anggota DPRD adalah parpol, bukan atas pilihan rakyat. Sebelum era reformasi atau masa Orde Baru masih banyak tokoh agama/ulama yang menjadi anggota DPRD, seperti Ky. H. Abdurrachman Dale pendiri Dewan Dakwah Al Irsyad dari Golkar menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ky. H. Muh. Nur dari Golkar menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ky. H. Muh. Abduh Pabadjia dari PPP menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dllnya. Jadi masa Orba kalangan agamawan/tokoh agama ada di DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar. Daya tarik ulama sekarang tidak jelas basis massanya karena ormas keagamaan sudah berkurang perannya. Selain itu, anggapan masyarakat sekarang kalau tokoh agama/ulama terjun ke politik maka yang bersangkutan telah masuk ke dunia lain”.<sup>59</sup>

Mansyur Radjab, dosen FISIP UNHAS menyatakan “Kalangan agamawan/tokoh agama/ulama sejak dulu posisinya rendah. Karena itu, agamawan dihargai di level bawah. Sebetulnya pada masa penjajahan Belanda pengaruh agamawan kuat. Tetapi setelah Indonesia merdeka pengaruh kalangan agamawan/tokoh agama/ulama semakin berkurang. Oleh sebab itu, pada saat agamawan/tokoh agama/ulama terjun ke politik menjadi hilang kewibawaannya”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Syofyan, BR, wawancara, 30 Mei 2012.

<sup>60</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012



Rakhmad, Sekretraris Jurusan dan dosen FISIP UNHAS menyatakan “Tidak terpilihnya kalangan agamawan/ulama menjadi anggota DPRD atau walikota/bupati karena masyarakat sudah resisten, seperti ceramah untuk mendukung parpol tertentu maka ulama/tokoh agama itu akan berkurang kewibawaan dan penghargaannya oleh masyarakat, bahkan akan ditinggalkan ummat atau massa pengikutnya. Keadaan ini menyebabkan masyarakat tidak tertarik memilihnya agar agamawan/ulama yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar. Masyarakat di sini resisten terhadap ulama/tokoh agama yang masuk ke partai politik sekalipun masih tetap ada yang terjun ke politik. Sebagai contoh, setelah reformasi ada Kyai yang dicalonkan oleh PDI-P tetapi ternyata gagal menjadi anggota DPRD. Masih beruntung meskipun gagal Kyai yang bersangkutan masih berpengaruh dikalangan ummatnya. Karena kecenderungannya kalangan agamawan/ulama kalau keluar dari parpol tidak hilang sama sekali atau masih tetap berpengaruh dengan ummat/massa pengikutnya.”<sup>61</sup>

Usman M. Sadjim, kepala Sekretariat Partai Golkar Kota Makassar menyatakan “Tokoh agama tidak ada di DPRD Kota Makassar terkait dengan sistem dan aturan Pemilu yang membuat terjadinya tarik menarik kepentingan lintas kelompok. Misalnya kelompok kristen tidak sulit memilih partai dalam pemilu dan pilkada. Parpol Islam sekarang bisa dimasukkan orang kristen dan begitu sebaliknya parpol non Islam bisa masuk calon Islam. Parpol Islam basis utama ummat Islam. Perangkat organisasinya seperti NU, ada PMII, Ansor dan lain-lain. Begitu pula Muhammadiyah, ada IMM dan lain-lain. Pada era reformasi yang berkembang di masyarakat kalangan agamawan/tokoh agama sebaiknya bergerak di bidang agama saja dan tidak perlu di politik. Juga situasi politik sekarang kurang begitu mendapat tempat bagi kalangan agamawan/tokoh agama. Karena partai politik hanya menjadikan kalangan agamawan/tokoh agama sebagai mesin suara. Meskipun mereka mempunyai tingkat elektifitas yang

---

<sup>61</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

tinggi tetapi kadangkala mereka tidak dekat dengan partai politik, atau bisa juga mereka sendiri tidak tertarik terjun ke dunia politik”.<sup>62</sup>

#### **6.4.4 Kelompok Bangsawan Dalam Politik Lokal**

Dari sisi kelompok kelas sosial bangsawan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2012 atau hasil Pemilu 2009 berdasarkan informasi Advi Umar, Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar dan Muh. Syarifuddin, Staf Humas DPRD Kota Makassar<sup>63</sup> dari 50 anggota DPRD Kota Makassar terdapat 12 orang (24%) berasal dari kalangan bangsawan, yakni 7 orang bangsawan Bugis, 4 orang bangsawan Makassar, dan 1 orang bangsawan Toraja. Kenyataan ini menunjukkan kelompok kelas sosial bangsawan masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam politik lokal, terutama dalam keanggotaan di DPRD Kota Makassar.

Mengenai kelompok kelas sosial bangsawan pandangan diantara para nara sumber yang diwawancarai cukup bervariasi. Umumnya mereka menyatakan meskipun belum berubah tetapi telah terjadi pergeseran.

Syahril Sappaile, Staf Ahli Walikota menyatakan “masalah kelas sosial bangsawan di Kota Makassar sudah bergeser. Meskipun keturunan bangsawan tetap memakai atau menggunakan label seperti Andi, Karaeng, Datu’, Oppu, tetapi dimata masyarakat penghargaan dan penghormatan terhadap mereka sudah berkurang utamanya di Kota Makassar. Karena kota Makassar selain penduduknya heterogen, perkembangan pendidikan dan IPTEK semakin maju, perkembangan kota yang semakin dinamis, juga perkembangan kelembagaannya. Selain itu, perkawinan antara kalangan bangsawan dengan orang biasa sudah sering terjadi. Perjudohan sudah banyak anak yang menentukan dan orang tua tinggal merestuinnya. Berbeda dengan dulu kelas sosial kelompok bangsawan memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Karena itu, penghargaan dan penghormatan masyarakat

---

<sup>62</sup>Wawancara, 1 Juni 2012

<sup>63</sup>Wawancara, 30 Mei 2012

terhadap kalangan bangsawan tinggi. Turun naiknya penghargaan dan penghormatan terhadap kalangan bangsawan banyak faktornya, antara lain kharismatis, kekayaan, pendidikan tinggi dan lain-lain. Pergeseran ini dari sudut kewarganegaraan dampaknya tentu positif karena semakin tidak membedakan kelompok kelas sosial.<sup>64</sup>

Taufan Mukhtar, Kasubag. Pemerintahan Kota Makassar mengemukakan “mengenai pengaruh kelompok kelas sosial bangsawan untuk di perkotaan seperti kota Makassar tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan di daerah lain seperti Wajo, Bone, Palopo, Luwu, Soopeng, Pindrang dll. kelompok kelas sosial bangsawan masih kuat pengaruhnya di politik dan pemerintahan. Untuk Kabupaten Wajo, Bone, Soopeng, Luwu dan Pindrang yang menjadi Bupati dari bangsawan. Tetapi di Kabupaten Sidrap yang menjadi bupati orang kaya bukan bangsawan. Di Pare-pare yang menjadi bupati dari politisi bukan bangsawan. Di Kota Makassar ada juga yang masih kuat kebangsawannya, tetapi tidak mau terjun ke politik. Bangsawan itu punya basis pengikut di samping didukung keuangan dan harta yang dimiliki. Untuk saat ini tidak bisa hanya “retorika belaka”. Meskipun, masih banyak pandangan masyarakat kita yang menanyakan “Anak siapa atau keturunan siapa”. Di Sulsel kelompok kelas sosial bangsawan disebut “kelompok berdarah biru”. Bangsawan itu memiliki kelebihan, memiliki tanah yang luas, dan satu kata dengan perbuatan. Masyarakat tidak punya tanah dan minta tanah untuk garapan diberikan untuk menggarapnya. Yang tidak bekerja di mana-mana oleh mereka diberikan pekerjaan. Juga, ada pengaruh antara Kota/Kabupaten yang penduduknya heterogen dan homogen”.<sup>65</sup>

Drs. H. Sabri, Msi, Kabag. Pemerintahan Kota Makassar menyatakan “Tesis kaum bangsawan masih kuat di kekuasaan masih berlaku beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Bahkan semakin kuat dengan sistem Pilkada langsung dan kelompok profesional akan tersingkir. Terutama keturunan kaum bangsawan yang mempunyai

---

<sup>64</sup>Syahril Sappaile, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>65</sup>Taufan Mukhtar, wawancara, 29 Mei 2012

pendidikan tinggi dan kekayaan. Bangsawanan itu harus pintar. Karena itu, anak bangsawan di sekolahkan agar berpikir modern. Dulu itu anak bangsawan di sekolahkan di Jawa, maka kelompok bangsawan tetap mempertahankan kekuasaannya. Sisi negatifnya jabatan itu “dinasti”. Sekarang ini pendidikan sudah terbuka untuk siapa saja. Namun, pelaku politik di Sulsel kelompok bangsawan terutama yang bermodal kekayaan dan pendidikan justru semakin kuat menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Bahkan, kalangan bangsawan yang punya modal dan tidak berada di lingkaran kekuasaan masih bisa mempengaruhi kekuasaan. Bangsawan yang tetap eksis adalah memiliki pendidikan dan kekayaan juga anak dan keturunannya mempunyai pendidikan dan kekayaan. Faktor pendidikan dan kekayaan tetap berpengaruh hingga sekarang. Tetapi bagi bangsawan yang tidak memiliki pendidikan dan kekayaan tetap tidak dihargai dan dihormati. Jadi sudah ada pergeseran. Dulu bangsawan jarang kawin di luar kelompok bangsawan. Sekarang sudah banyak terjadi”.<sup>66</sup>

Advi Umar, Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar mengemukakan “sudah ada pergeseran, karena tokoh bangsawan kharismatis yang menjadi panutan sudah banyak yang meninggal. Di sekolah sekolah dalam pelajaran sejarah lokal tidak banyak dimunculkan. Meskipun demikian, tokoh bangsawan masih dibutuhkan karena ada etika yang diatur dalam adat istiadat untuk saling menghormati atau dalam istilah Bugis disebut “*Sipakatan*” artinya saling menghormati, “*Sipatainga*” artinya saling mengingatkan. “*Sipakalitbi*” artinya saling menolong. Faktor kualitas SDM dan finansial kebangsawanan seorang calon, dan hubungan dengan masyarakat tetap menjadi ukuran pemilih. Misalnya dilihat dulu tingkah lakunya apa pernah atau tidak mengintimidasi masyarakat. Karena bangsawan itu ada sifat diktatornya. Ke depan itu, untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan bagi kalangan bangsawan sangat tergantung kedekatannya kepada masyarakat, di samping dana dan pendidikan atau kualitas SDM yang dimilikinya”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>H. Sabri, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>67</sup>Advi Umar, wawancara, 30 Mei 2012

Muh. Syarifuddin, Staf Humas DPRD Kota Makassar menyatakan “Posisi kaum bangsawan di Kota Makassar masih kuat. Terutama mereka yang mempunyai pendidikan dan kemampuan ekonomi. Karena itu, kaum bangsawan masih banyak yang menjadi anggota DPRD. Pemilih dalam mendukung kalangan bangsawan itu dilihat dari kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan IPTEK yang dimilikinya”.<sup>68</sup>

Nuraeni Ma'mur, Kepala Sekretariat DPRD Kota Makassar mengemukakan “dari sisi penghormatan masyarakat terhadap kalangan bangsawan masih tetap kuat. Namun, dari sisi penghargaan nilai kebangsawanan sudah bergeser karena kaum bangsawan sendiri tidak terlalu mempertahankan lagi nilai-nilai yang berlaku. Misalnya dalam perkawinan sudah bisa kalangan bangsawan menikah dengan masyarakat biasa, mereka telah mengikuti nilai-nilai demokrasi yang berlaku. Untuk bidang politik, posisi kaum bangsawan masih kuat, terbukti mereka cukup banyak menjadi anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi Sulsel, walikota/bupati di sejumlah Kota/Bupati di Sulsel, ada yang menjadi anggota DPR RI. Karena mereka berkualitas. Tingkat pendidikan mereka juga baik, tidak sama dengan bangsawan tempo dulu, sehingga kaum bangsawan bisa bertahan di kekuasaan dan tetap berada dalam status sosial yang lebih tinggi. Tetapi dibandingkan pada masa Orba. Posisi kaum bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan (anggota DPRD atau kepala daerah (Walikota/Bupati) pada masa Orba lebih banyak karena tidak dipilih langsung. Sedangkan di era reformasi dengan sistem dipilih langsung jumlah bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan lebih menurun jumlahnya. Di era reformasi siapa saja yang dapat menggalang masa dapat menduduki jabatan politik. Untuk ke depan, tampaknya kaum bangsawan masih tetap kuat meskipun agak menurun”.<sup>69</sup>

Drs. Sofyan, BR, peneliti Badan Litbang Depag Makassar menyatakan” kaum bangsawan dalam kontek politik Sulsel untuk

---

<sup>68</sup>Muh. Sarifuddin, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>69</sup>Nuraeni Ma'mur, wawancara, 30 Mei 2012

daerah tertentu kalangan bangsawan masih kuat di jabatan politik dan pemerintahan, seperti di Luwu Timur, Bone dan lain-lain. Ada ungkapan di Luwu Timur seandainya Bupati bisa dipilih tiga atau empat kali kemungkinan masih dipilih lagi”.<sup>70</sup>

Muh Rais, MSi, peneliti Badan Litbang Departemen Agama Makassar menyatakan “jabatan politik dan pemerintahan di Kota Makassar dan kota/kabupaten lainnya sejak era reformasi sudah ada pergeseran dibandingkan dulu pada masa Orba sangat primordialistik, status kebangsawanan, pengusaha, birokrat dan meliter. Contohnya kasus Bupati Kabupaten Gowa terpilih, Karaeng Madusila, SH anak raja Gowa kalah dengan Iksan Yasin Limpo, SE adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Iksan menang karena pencitraan. Juga unsur dinasti Gubernur Syahrul Yasin Limpo di jabatan politik dan pemerintahan”.

Drs. Mansyur Radjab, Msi, dosen FISIP UNHAS mengemukakan “posisi bangsawan dalam jabatan politik dan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan pada era reformasi dan otonomi daerah ada kecenderungan kalangan bangsawan cenderung mewarisi kembali dalam jabatan politik dan pemerintahan. Terutama di Kabupaten Bone, Soppeng, Singkang dll cenderung masih kuat dalam membangun dinasti di jabatan politik dan pemerintahan. Seperti posisi lurah, camat, bupati, kepala dinas dsbnya. Tetapi untuk Kota Makassar tidak demikian tergantung prestasi pejabat yang bersangkutan. Di Kota Makassar pengaruh bangsawan berkurang atau tidak terlalu kuat karena di kalangan bangsawan terkotak-kotak. Juga penduduknya heterogen. Contoh lain kasus terpilihnya Bupati Gowa Iksan Limpo, SE mengalahkan anak raja Gowa Karaeng Manusila, SH. Di Kabupaten Gowa masyarakatnya heterogen kurang lebih sama dengan Kota Makassar”.<sup>71</sup>

Dr. Rakhmad, Sekretaris Jurusan dan Dosen FISIP UNHAS mengemukakan “Sulsel terbuka meskipun ada pengaruh kebangsawanan

---

<sup>70</sup>Sofyan, BR, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>71</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012

untuk daerah- daerah tertentu masih kuat. Tapi untuk Makassar, Parepare tampaknya pengaruh kaum bangsawan masih digunakan meskipun bukan faktor utama. Kesadaran masyarakat berdemokrasi di Sulawesi Selatan semakin meningkat sehingga menyebabkan pengaruh kaum bangsawan menurun. Karena itu, sopan santunnya yang dijaga karena semua serba transaksional dan itu terbaca juga oleh elite bangsawan. Mereka mengkalkulasi bahwa ada bangsawan yang lemah dalam finansial dan lemah dalam arti kekuasaan tetapi tidak hilang sama sekali pengaruhnya. Karena di Sulsel untuk mendapat jabatan politik dan di pemerintahan tetap mendekati kaum bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan komunitas di daerah. Karena faktanya yang berkuasa saat ini (walikota/bupati) ada kalangan bangsawan, tokoh akademis, pengusaha, politisi, birokrat dan lain lainnya. Yang jelas pilihan masyarakat sejauhmana jasa yang bersangkutan terhadap modal sosial. Sehingga Sulsel bukan daerah yang bebas. Dan kecenderungannya bangsawan mengikuti keadaan yang ada. Dan kalangan pengusaha juga mengetahui kondisi seperti itu. Jadi kalau ada bangsawan yang berkuasa karena sudah punya modal sosial. Kasus Bulukumba dimana Bupati nya bukan bangsawan tetapi terpilih jadi Bupati. Sulsel sejak reformasi tokoh seperti Yusuf Kalla (YK) justru menjadi kuat padahal bukan bangsawan. Terpilihnya Syahrul Limpo pada Pilkada Gubernur yang lalu tidak terlepas dari pengaruh Yusuf Kalla yang bermain dua kaki, dan orang-orang Golkar tidak sepenuhnya memenangkan Amir Syam. Istilah di sini "lain yang menang dan yang dilantik". Sebenarnya Amir Syam yang menang, tetapi lewat pendekatan hukum dimenangkan Syahrul Yasin Limpo. Hal ini membuat Amir Syam kecewa dengan YK. Ada permainan yang lemah di internal. Juga ada rasa tidak percaya dari Amir Syam. Kondisi pada saat itu adalah permainan politik. Kedua-duanya ada permainan curang. Kegagalan partai Golkar di kemudian hari dikemukakan tim keluarga Amir Syam. Akhirnya semua pasrah pada keputusan MK. Tetapi begitu ada keputusan MK semua menerima dengan ikhlas. Jadi "Normatif mengalahkan realitas".<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

Mengenai tesis beberapa pakar seperti Matulada (1985), Hasan Walinono (1979), Burhan Magenda (1989), Christian Pelras (1976) dan lain-lain yang menyatakan "kaum bangsawan tetap akan kuat di Sulawesi Selatan". Menurut Mansyur Radjab, dosen FISIP UNHAS "Mungkin Matulada dkk tidak memprediksi dinamika sistem politik dan pemerintahan yang terjadi seperti sekarang. Pada masa Orba kalau tidak bangsawan "ya" militer/ABRI. Tetapi di era reformasi seperti kasus pilkada Gubernur Sulawesi Selatan antara Amir Syam bangsawan Bugis Bone dan militer kalah dengan Syahrul Limpo, birokrat dari Makassar. Meskipun ada yang mengatakan sebenarnya sama kuat. Terjadi *black campaign* masalah SARA terutama agama yang menyebabkan orang Toraja tidak memilih Amir Syam, dan suara umat Kristen ke Syahrul Yasin Limpo. Dulu faktor bangsawan kuat karena memiliki tanah yang luas, tetapi sekarang sudah banyak yang tidak memiliki tanah, juga ikatan kebangsawan sudah mulai bergeser. Contoh, Kabupaten Gowa sejak reformasi dinasti bangsawan dikalahkan non bangsawan. Tetapi di Kabupaten Takalar masih kuat dinasti bangsawannya. Kabupaten Janeponto Bupati sebelumnya dari kalangan bangsawan, tetapi Bupati sekarang non bangsawan. Kabupaten Bantaeng sekarang yang menjadi Bupati dari Dosen UNHAS, tetapi sebelumnya Bangsawan. Kabupaten Bulukumba sebelumnya bangsawan Andi Supli dan sekarang yang menjadi Bupati Syarindi adalah pengusaha. Kesimpulan saya orang biasa bisa jadi Bupati. Memang untuk lurah dan camat masih didominasi bangsawan'.<sup>73</sup>

Pandangan senada dikemukakan Dr Rakhmad, dosen FISIP UNHAS. Ia menyatakan "Di era Orba tesis Matulada dkk betul, tetapi untuk sekarang sudah berubah. Meskipun di beberapa daerah masih cukup banyak kaum bangsawan yang duduk di jabatan politik dan pemerintahan. Juga masyarakatnya masih menghormati kaum bangsawan. Akan tetapi pertimbangan masyarakat sudah berbeda dengan dulu. Ada yang kecewa dengan kaum bangsawan. Karena itu,

---

<sup>73</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012



meskipun kalangan bangsawan masih ada pengaruh tetapi masyarakat tidak selalu mengikutinya”.<sup>74</sup>

#### **6.4.5 Kelompok Panguyuban Kedaerahan dalam Politik Lokal**

Di Kota Makassar terdapat banyak kelompok panguyuban yang bersifat kedaerahan, seperti Himpunan Keluarga Masyarakat Bone, Himpunan Keluarga Masyarakat Takalar, Persatuan Masyarakat Takalar dllnya Kelompok panguyuban kedaerahan ini melakukan berbagai kegiatannya seperti acara hari besar keagamaan, halal bihalal, pesta budaya, acara keluarga, bantuan bea siswa, bakti sosial kesehatan, bantuan bencana dll. Hubungan kelompok panguyuban kedaerahan dengan politik lokal menurut Syahril Sappaile, Staf Ahli Walikota Makassar “Hubungan kelompok panguyuban kedaerahan dengan politik lokal seperti Pilkada walikota/bupati/gubernur lewat tim sukses kandidat masing-masing daerah. Meskipun umumnya dilakukan secara pribadi sebagai anggota atau pengurus kelompok panguyuban yang bersangkutan”.<sup>75</sup>

Sofyan BR., peneliti Badan Litbang Departemen Agama Makassar “Mengenai kelompok panguyuban kedaerahan keterlibatan dalam tim sukses salah satu calon Pilkada (Bupati/Walikota/Gubernur) secara langsung tidak, tetapi secara pribadi ada upaya untuk memberikan dukungan moril kepada salah calon pilkada, apalagi kalau yang diusungkan sebagai calon adalah berasal dari daerah yang bersangkutan. Pada era otonomi daerah kelompok panguyuban kedaerahan justeru semakin berkembang dan politik identitas semakin kuat”.<sup>76</sup>

Muh. Syarifuddin, Staf Humas DPRD Kota Makassar menyatakan “Setiap Pilkada walikota/bupati/gubernur muncul berbagai kelompok panguyuban kedaerahan. Sebetulnya ada positif dan negatifnya. Positifnya pengurus panguyuban dijadikan Tim Sukses dari

---

<sup>74</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>75</sup>Syahril Sappaile, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>76</sup>Sofyan BR., wawancara, 30 Mei 2012

daerahnya untuk memenangkan calon yang diinginkannya. Negatifnya ada anggota kelompok paguyuban kedaerahan yang mengatas namakan pribadinya. Gengsi kedaerahan sangat tinggi terutama di masing-masing internal panguyuban. Hal itu terkait budaya “*Siri’ Na Pacce*” artinya malu untuk meminta. *Syiri’* itu artinya “lebih baik malu”.<sup>77</sup>

Nuraeni Ma’mur, Kepala Sekretariat DPRD Kota Makassar menyatakan “Hampir semua daerah di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki panguyuban kedaerahan. Tujuannya adalah untuk mempererat tali siralaturrachmi masyarakat di daerahnya. Di dalam pilkada Bupati/Walikota/Gubernur secara pribadi ada yang ikut dalam Tim Sukses calon Pilkada, dan itu tidak semua berpihak pada satu calon. Seperti di Gowa dan Takalar meskipun orang Makasar tidak semuanya mendukung Pak Syahrul Yasin Limpo. Di setiap daerah itu ada bermacam kelompok panguyuban. Misalnya di Takalar, ada Panguyuban Masyarakat Takalar, ada Persatuan Masyarakat Takalar (Permata). Kelompok panguyuban itu dibentuk untuk kepentingan daerahnya. Seperti BASOWA (Bone, Sopeng, Wajo). BASOWASIPALU (Bone, Sopeng, Wajo, Sinjau, Palopo, Luwu)”.<sup>78</sup>

Mansyur Radjab, Dosen FISIP UNHAS menyatakan “kelompok panguyuban itu hidup dan berkembang ketika ada Pilkada”.<sup>79</sup> Menurut Dr. Rakhmad, Dosen FISIP UNHAS “Di dalam Pilkada, keberadaan kelompok panguyuban kedaerahan mengidentifikasi dirinya agar dilirik sebagai alat politik. Rata rata organisasi panguyuban bukan satu warna di setiap daerah. Berbagai kelompok panguyuban kedaerahan muncul ketika ada kepentingan politik, seperti di dalam pilkada dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu calon melalui “Tim Sukses”.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Muh. Syarifuddin, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>78</sup>Nuraeni Ma’mur, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>79</sup>Mansyur Radjab, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>80</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012.

#### 6.4.6 Dinasti Politik dalam Percaturan Politik Lokal

Di dalam perkembangan politik lokal di Kota Makassar khususnya, dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, sejak era reformasi dan otonomi daerah munculnya gejala menguatnya “Dinasti Politik”. Keluarga Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulawesi Selatan saat ini misalnya cukup banyak yang menduduki jabatan politik dan di pemerintahan. Diantaranya, Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2014 dari Partai Golkar. Bupati Kabupaten Gowa adalah Iksan Yasin Limpo, SE juga adik kandung Syahrul Yasin Limpo. Dua orang anak Syahrul Yasin Limpo, salah satunya dari PAN menjadi anggota DPR RI, dan yang satu lagi menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Adik Syahrul Yasin Limpo dari Partai Hanura menjadi anggota DPR RI, juga Adik Syahrul Yasin Limpo menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kakak Syahrul Yasin Limpo menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan mantan ketua Golkar di Kabupaten Gowa. Begitu pula keluarga Amir Syam mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya, anaknya Imran Tenti Tata, SE dari Partai Golkar menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009 - 2014. Istrinya Ir. Apiati Amir Syam Asisten IV Bidang SDM dllnya.

Dari berbagai nara sumber yang diwawancarai, gejala munculnya “Dinasti Politik” tidak terlepas dari adanya pandangan masyarakat di Sulawesi Selatan tentang “anak siapa atau keturunan siapa”. “Anak Tokoh Besar atau Anak Bangsawan” “Kelompok Bangsawan atau Non Bangsawan”. “Kelompok Darah Biru atau bukan”. “Pengusaha atau Berokrat”. Menurut Dr. Rakhmad, Ketua jurusan dan Dosen FISIP UNHAS “pandangan seperti sah sah saja. Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulawesi Selatan saat ini yang dipandang atau dilebelkan oleh masyarakat “Membangun Dinasti” sebenarnya dia sudah lama mempersiapkannya di lingkungan keluarga. Pak Syahrul Yasin Limpo sendiri birokrat mulai dari Lurah, Camat, Bupati Kabupaten Gowa, Wakil Gubernur dan Gubernur Sulawesi Selatan. Latar belakang orang tuanya tentara Kolonel. Pak Syahrul sudah menerima 155 penghargaan. Karena itu, Pak Syahrul adalah

simbol ketokohan pemimpin di Sulawesi Selatan. Seharusnya dia sudah di level nasional (Menteri). Jadi munculnya “Dinasti Politik” tidak selamanya negatif selama lingkungan keluarga yang berada dalam dinasti itu berkualitas dan dipersiapkan”.<sup>81</sup>

## **6.5 Jabatan dalam Birokrasi dan Implikasinya Terhadap Kewarganegaraan**

Menurut Syahril Sappaile, Staf Ahli Walikota Makassar “Di jajaran jabatan struktural pemerintahan kota Makassar semua pegawai mempunyai kedudukan yang sama, tergantung prestasi tingkat pendidikan dan penguasaan IPTEK yang dimilikinya. Karena itu, jabatan struktural di pemerintahan kota Makassar tampaknya sangat sulit didasari atas dasar etnis atau kelompok kelas sosial tertentu. Dari sudut kewarganegaraan dampaknya tentu positif karena semakin tidak membedakan etnis dan kelompok kelas sosial”.<sup>82</sup>

Drs. H. Sabri, Kabag. Pemerintahan Kota Makassar menyatakan “Dalam penentuan jabatan struktural khususnya di pemerintahan Kota Makassar didasarkan pada: Pegawai yang dipromosikan berprestasi dan itu di kader oleh dinas/instansi yang bersangkutan. Ada juga kelompok pegawai yang dibesarkan oleh Papol, KNPI, AMPI, atau dibesarkan organisasi. Untuk etnis atau kelompok kelas sosial bangsawan tidak begitu berpengaruh dalam menentukan pejabat struktural di pemerintahan Kota Makassar”.<sup>83</sup>

Nuraeni Ma'mur, Kepala Sekretariat DPRD Kota Makassar menyatakan “dari sudut kewarganegaraan belum terjadi dalam penentuan pejabat di pemerintahan berdasarkan etnis atau kelompok kelas sosial tertentu. Di Pemerintah kota Makassar yang menjadi pejabat bermacam-macam etnis, seperti Asisten I Pemerintah Kota Makassar orang Wajo. Asisten II orang Palopo. Asisten II orang Takalar, Asisten IV orang Bone. Kabag. Ortala orang Toraja. Kabag.

---

<sup>81</sup>Rakhmad, wawancara, 31 Mei 2012

<sup>82</sup>Syahril, Sappaile, wawancara, 29 Mei 2012

<sup>83</sup>H. Sabri, wawancara, 29 Mei 2012

Hukum dan HAM orang Selayar. Kabag. Pemerintahan orang Bone dan lain-lainnya”.<sup>84</sup>

Usman M. Sadjim, kepala Sekretariat Golkar Kota Makassar menyatakan “Di Pemerintahan Kota Makassar jabatan struktural di dominasi etnis Bone karena walikotanya orang Bone tapi bukan berarti etnis dari kelompok kelas sosial lain tidak mendapat jabatan. Karena mereka yang punya kualifikasi lah yang diangkat dalam jabatan struktural. Pada masa Gubernur Amir Syam banyak etnis Bugis Bone menduduki jabatan di pemerintahan karena memang mereka memenuhi kualifikasi bukan atas dasar etnis atau kelompok kelas sosial”.<sup>85</sup>

Dengan demikian, jabatan struktural di pemerintahan dalam pandangan nara sumber berimplikasi positif terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan.

## 6.6 Penutup

Rangkaian masalah dan pandangan-pandangan yang telah diuraikan, mengantarkan studi ini dalam beberapa kesimpulan dan saran-saran.

- Pertama, peta politik lokal di Kota Makassar pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sejak era reformasi dan otonomi daerah telah terjadi perubahan. Partai Golkar tidak lagi sebagai *the single majority* di DPRD Sulawesi Selatan maupun di DPRD Kota Makassar.
- Kedua, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar masih rendah, dari 50 anggota DPRD Kota Makassar hanya terdapat 7 orang (14%) anggota DPRD perempuan. Ini menunjukkan kedudukan kaum perempuan di dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar masih jauh dari target *quota* yang diinginkan sebesar 30%.

---

<sup>84</sup>Nuraeni Ma'mur, wawancara, 30 Mei 2012

<sup>85</sup>Usman M. Sadjim, wawancara, 1 Juni 2012.

- Ketiga, dari sisi kelompok etnis dalam politik lokal di Kota Makassar masih didominasi etnis Bugis dan etnis Makassar. Dari 50 anggota DPRD Kota Makassar periode 2009–2014 diantaranya 27 orang (54%) adalah etnis Bugis dan 16 orang (32%) etnis Makassar. Hal ini menandakan semakin kuatnya politik identitas lokal pada era reformasi dan otonomi daerah di Kota Makassar.
- Keempat, dari sisi kelompok profesi dalam politik lokal khususnya dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar, dari 50 anggota DPRD periode 2009–2014 terbanyak adalah politisi berjumlah 24 orang (48%). Disusul, pengusaha 9 orang (18%). Berikutnya, Politisi + pengusaha 6 orang (12%), politisi + tokoh agama 3 orang (6%) dan sisanya profesi lainnya. Kenyataan ini menunjukkan kalangan pengusaha atau pebisnis cukup besar jumlahnya dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar. Tetapi sebaliknya kalangan agamawan/tokoh agama/ulama jumlahnya relatif kecil yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Itupun bukan tokoh agama/ulama yang mempunyai basis massa pengikut/ummatnya yang banyak dan terkenal (Dai kondang misalnya).

Tertariknya pengusaha terjun ke politik dari sudut pandang nara sumber faktornya adalah 1. Perubahan level status sosial simbol-simbol di jabatan politik dan pemerintah pada masyarakat lokal masih tetap tinggi sehingga pengusaha ada kecenderungan berupaya mencari status itu yang lebih dilihat oleh masyarakat. 2. Karena faktor Parpol, seperti Golkar memang memilih calon yang mapan secara ekonomi dan politik. 3. Faktor untuk menambah jaringan dan tambahan penghasilan. 4. Faktor pergaulan dan solidaritas di lingkungan sesama profesi, pengurus parpol atau organisasi, dan hubungan kerja dengan pejabat di eksekutif (walikota/bupati) dan legislatif (pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan kota/kabupaten).

Mengenai relatif kecilnya kalangan agamawan/tokoh agama/ulama menduduki jabatan politik (Anggota DPRD kota/kabupaten/provinsi, walikota/bupati/gubernur) dari sudut pandang nara sumber faktornya adalah: 1. Karena pandangan masyarakat di Sulsel masih sulit dipisahkan dari anggapan “anaknya tokoh besar” atau “anaknya

bangsawan”. 2. Faktor kemampuan finansial atau dana yang terbatas. 3. Karena faktor “politik transaksional” sehingga mereka yang terpilih cenderung yang sudah mapan secara politik dan ekonomi. 4. Daya tarik tokoh agama/ulama sekarang tidak jelas basis massanya karena ormas keagamaan sudah berkurang perannya. 5. Adanya anggapan di masyarakat kalau tokoh agama/ulama terjun ke politik maka yang bersangkutan telah “masuk ke dunia lain” atau “hilang kewibawaannya”. 6. Kalangan agamawan/tokoh agama/ulama sejak dulu posisinya rendah berada di level bawah. 7. Terkait dengan sistem dan aturan Pemilu yang membuat terjadinya tarik menarik kepentingan lintas kelompok. 8. Berkembang pandangan di masyarakat bahwa tokoh agama/ulama sebaiknya bergerak di bidang agama saja dan tidak perlu di politik. Karena Parpol hanya menjadikan kalangan agamawan/tokoh agama sebagai mesin suara. 9. Di kalangan agamawan/tokoh agama tidak dekat dengan partai politik dan tidak tertarik terjun ke dunia politik.

Kelima, dari sisi kelompok kelas sosial bangsawan dalam politik lokal khususnya dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar periode 2009–2012 masih cukup besar, dari 50 anggota DPRD terdapat 12 orang (24%) berasal dari kalangan bangsawan, yakni 7 orang bangsawan Bugis, 4 orang bangsawan Makassar, dan 1 orang bangsawan Toraja. Kenyataan ini menunjukkan kelompok kelas sosial bangsawan masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam politik lokal, terutama dalam keanggotaan di DPRD Kota Makassar.

Dari sudut pandang para nara sumber tentang keberadaan kelompok kelas sosial bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan di Kota Makassar khususnya dan di sejumlah Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Umumnya mereka menyatakan meskipun belum berubah tetapi telah terjadi pergeseran. Faktor pergeserannya adalah 1. Pengaruh heterogenitas penduduk di Perkotaan seperti di Kota Makasar. 2. Perkembangan pendidikan dan IPTEK semakin maju. Pendidikan sudah terbuka bagi siapa saja. 3. Perkembangan kota yang semakin dinamis. 4. Perubahan sistem politik dan kelembagaan sejak era reformasi dan Otonomi Daerah. Pada masa

Orba lebih banyak karena tidak dipilih langsung. Di era reformasi dengan sistem dipilih langsung jumlah bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan lebih menurun jumlahnya. Siapa saja yang dapat menggalang massa dapat menduduki jabatan politik. 5. Kesadaran masyarakat berdemokrasi di Sulawesi Selatan semakin tinggi. 6. Perkawinan antara kalangan bangsawan dengan orang biasa sudah sering terjadi. Perjodohan sudah banyak anak yang menentukan dan orang tua tinggal merestunya. 7. Perubahan dalam bidang perekonomian, dulu ekonomi kelompok bangsawan lebih baik daripada kelompok masyarakat lainnya, memiliki tanah yang luas dan punya basis pengikut dan satu kata dengan perbuatan. 8. Tokoh bangsawan kharismatis yang menjadi panutan sudah banyak yang meninggal. 9. Di sekolah sekolah dalam pelajaran sejarah lokal tokoh bangsawan tidak banyak yang dimunculkan. 10. Di kalangan bangsawan ada juga yang sifatnya diktator belum hilang dan hubungan atau kedekatan dengan masyarakat kurang baik. 11. Kaum bangsawan sendiri tidak terlalu mempertahankan lagi nilai-nilai yang berlaku dan di kalangan bangsawan terkotak-kotak. Dan 12. Di kalangan bangsawan jabatan itu dinasti.

Faktor masih kuat bertahannya kaum bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan menurut pandangan nara sumber, adalah 1. Sistem Pemilu atau Pilkada langsung semakin memperkuat posisi kaum bangsawan di jabatan politik dan pemerintahan dan kelompok profesional akan tersingkir. 2. Keturunan kaum bangsawan SDMnya berkualitas dan banyak yang berpendidikan tinggi sejak dulu hingga sekarang. 3. Finansial kaum bangsawan masih kuat. Kaum bangsawan masih banyak yang kaya dan semakin kuat posisinya di jabatan politik dan pemerintahan. Bahkan, kaum bangsawan yang punya modal dan tidak berada di lingkaran kekuasaan masih bisa mempengaruhi kekuasaan. 4. Anak keturunan bangsawan banyak yang berpendidikan tinggi dan memiliki kekayaan. 5. Tokoh bangsawan masih dibutuhkan masyarakat karena secara budaya dan adat istiadat masih kuat dan ditaati oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. 6. Munculnya kecenderungan kalangan bangsawan berusaha mewarisi kembali dalam



jabatan politik dan pemerintahan. 7. Posisi kaum bangsawan pada pemerintahan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi masih dominan. 8. Ada kecenderungan kaum bangsawan mengikuti perubahan yang terjadi.

Keenam, dari sisi kelompok panguyuban kedaerahan, di Kota Makassar muncul dan berkembangnya berbagai kelompok panguyuban yang dalam Pilkada (walikota/bupati dan gubernur) dijadikan alat untuk tim sukses masing-masing calon. Baik dilakukan atas nama pribadi maupun kelompok. Kelompok panguyuban berkembang ketika ada Pilkada yang dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu calon melalui Tim Sukses. Rata rata organisasi panguyuban bukan satu warna di setiap daerah.

Ketujuh, era reformasi dan otonomi daerah di Kota Makassar khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan umumnya semakin menguatnya gejala “Dinasti Politik”

Kedelapan, implikasi kewarganegaraan dalam jabatan struktural di pemerintahan Kota Makassar pada era reformasi dan otonomi daerah berdampak positif karena semakin tidak membedakan etnis dan kelompok kelas sosial.

Untuk ke depan diharapkan baik jabatan politik maupun jabatan struktural di pemerintahan Kota Makassar khusus dan Sulawesi Selatan pada umumnya tidak ada pengkotak-kotakan antara etnis dan kelompok kelas sosial yang satu dengan etnis dan kelompok kelas sosial yang lain. Baik yang berasal dari Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. Yang penting berkualitas, berprestasi, profesional, dan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik serta tantangan dinamika perubahan zaman agar tercipta kehidupan yang cerdas, sejahtera, berkeadilan dan demokratis dalam bingkai NKRI.

## Daftar Pustaka

- Badruzzaman, 2008, *Stratifikasi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan*, <http://bz69elzam.blogspot.com>, di akses 14 Juni 2012.
- Bailusy, Kautsar M., 2004, “Membangun Sistem Politik/Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal Kota Makassar” dalam Andhy Pallawa (Editor) *Makassar LakekomaE (Sebuah Ikhtiar Mengaca Diri)*, Makassar: Global Publishing.
- Bakti, Andi Faisal, 2007, “Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan”, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV Jakarta.
- BPS, 2011, *Makassar Dalam Angka 2011*, Makassar: BPS Kota Makassar bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Haris, Syamsuddin (Editor), 2007, *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Hisyam, Muhamad, 1985, “Sayyid–Jawi (Studi Kasus Jaringan Sosial di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan” dalam Mukhlis & Kathryn Robinson (Editor), *Panorama Kehidupan Sosial*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, The Indonesian Social Proyek, ADAB dan MSI Sul-Sel.
- Mukhlis & Robinson, Kathryn (Editor), 1985, *Panorama Kehidupan Sosial*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, The Indonesian Social Sciences Proyek, ADAB dan MSI Sul-Sel.
- Pallawa, Andhy (Editor), 2004, *Makassar LakekomaE*, Makassar: Global Publishing.

- Pattarai, Idris M., 2009, *Ilham Arief Sirajuddin Dari 1 Ke 1*, Makassar: Penerbit Pustaka YASPINDO.
- Pelras, Christian, 2006, *Manusia Bugis*, Cetakan Kedua, Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO
- Schulte-Nordholt, Henk dan Gerry van Klinken (Editor), 2007, *Politik Lokal di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama KITLV Jakarta.
- Selosoemardjan dan Sulaeman Sumardi, 1974, *Bunga Rampai Sosiologi*, Jakarta: LP. FE. UI.
- Sewang, Ahmad M., 2005, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suplemen Makassar Terkini, 2005, *Makassar Menggeliat di Usia 401 Tahun*, Makassar: Info Komunitas Kawasan Makassar.
- Suprayogo, Imam, 1985, "Warisan Budaya Karaeng Galesong (Studi Kasus Perkawinan di Desa Galesong)" dalam Mukhlis & Kathryn Robinson (Editor), *Panorama Kehidupan Sosial*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, The Indonesian Social Sciences Proyek, ADAB dan MSI Sul-Sel.
- Suryadinata, Leo dkk., 2003, *Penduduk Indonesia Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.
- Wahid, Sugira, 2007, *Manusia Makassar*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi
- Wello, Basri M., 2004 "Menuju Pembangunan Pendidikan Yang Berkualitas di Kota Makassar" dalam Andhy Pallawa (Editor) *Makassar LakekomaE? (Sebuah Ikhtiar Mengaca Diri)*, Makassar: Global Publising.

Zuhro, Siti R. dkk., 2011, *Model Demokrasi Lokal, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Jakarta: Penerbit PT. THC. Mandiri.



